Membumikan i.s.l.a.m dalam Kerangka Kebijakan

Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo Berdasarkan Nalar Fiqih Ke-NU-an

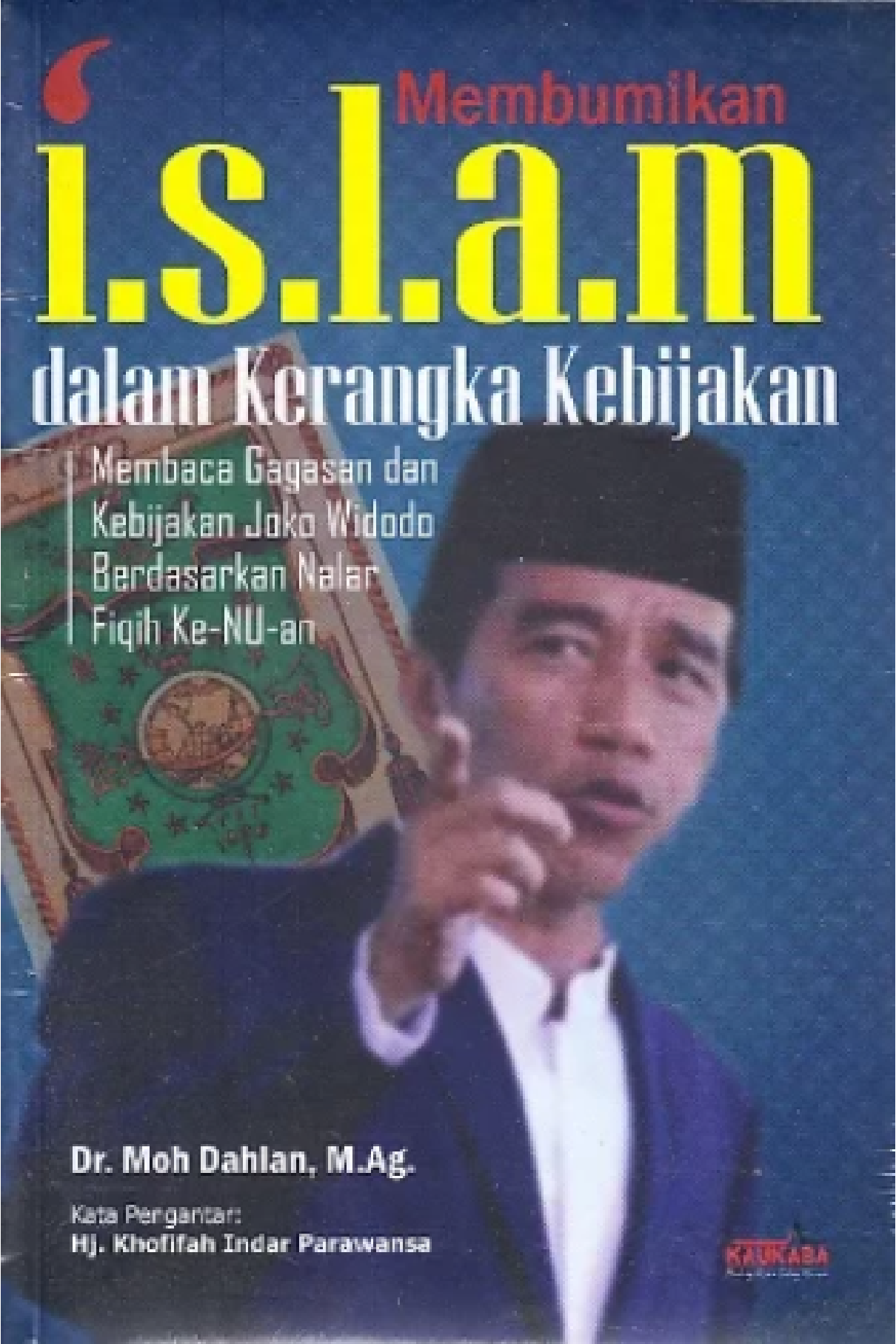

Dr. Moh Dahlan, M.Ag.

Kata Pengantar:
Hj. Khofifah Indar Parawansa

KALIKABA

Membumikan ISLAM

dalam Kerangka Kebijakan

Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo
Berdasarkan Nalar Fiqih Ke-NU-an

Dr. Moh Dahlan, M.Ag.

Membumikan ISLAM

dalam Kerangka Kebijakan

Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo
Berdasarkan Nalar Fiqih Ke-NU-an

Kata Pengantar:

Hj. Khofifah Indar Parawansa
(Menteri Sosial Republik Indonesia)

KAUKABA
Bintang Akbara Galang Wacana

2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan buku yang berjudul: Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo berdasarkan Nalar Fiqih ke-NU-an.

Buku ini hadir untuk memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai spirit gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an. Dengan hadirnya ini diharapkan memberikan wawasan keilmuan dan menjadi model beragama bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Walaupun demikian, saya menyadari bahwa di dalam buku ini mungkin terdapat kekurangan, adanya sejumlah data semisal foto yang belum terekam sumbernya karena faktor kesulitan mencari data-data lagi diakses di media on line, sehingga perlu adanya masukan dan saran. Demikian juga karya buku ini belum sempat wawancara langsung dengan Bapak Ir H Joko Widodo, Presiden RI, sehingga bisa jadi apa yang ditulis di sini tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh beliau. Namun demikian, hal ini tidak mengurangi nilai keilmiahannya karena logika keilmuan ini diakui dalam paradigma "otonomi teks" dan "otonomi tindakan" Paul Ricoeur. Di samping itu, adanya keterkaitan data dan paradigma keilmuan antara satu karya dengan karya lainnya dari penulis adalah sebagai bagian dari titik kesinambungan kajian penulis. Oleh sebab itu, kita berharap adanya banyak kritik, saran dan masukan yang berarti demi sempurnanya buku ini.

Dengan selesainya buku ini, kami harus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan wawasan, saran, masukan dan kritikan selama penulisan buku ini, di antaranya:

1. Menteri Agama RI, Drs H Lukman Hakim Saifuddin, yang memberikan inspirasi dan wawasan dari sejumlah pertemuan yang diikuti mengenai pentingnya sikap pluralitas hidup beragama.
2. Prof Dr H Nur Syam, M.Si., selaku Sekjen Kemenag RI, dan Prof Dr H Kamaruddin Amin, MA., selaku Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, yang telah memberikan wawasan Islam moderat dan kebijakan pembangunan nasional melalui berbagai acara di lingkungan Kementerian Agama RI.
3. Prof. Dr H Sirajuddin M, M.Ag., MH, selaku Ketua Tanfidziyah Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Bengkulu, yang telah memberikan wawasan dalam masalah ke-NU-an.
4. Prof Dr H Rohimin, M.Ag., selaku Ketua MUI Propinsi Bengkulu yang telah ikut serta mendiskusikan lahirnya wawasan keulamaan dan wacana tentang MUI.
5. KH Moh Zuhri Zaini selaku Pengasuh PP Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur yang telah mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dari berbagai sumber kitab kuning.
6. Dr KH Mursyid Romli, M.Pd.I selaku Pengasuh PP Nurul Huda Situbondo Jawa Timur yang telah memberikan inspirasi pemikiran kepesantrenan.
7. Para dosen selama kuliah S-2/S3 di IAIN/UIN Sunan Kalijaga, di antaranya Prof Dr H Machasin, MA, Prof Dr HM Amin Abdullah, Prof Drs. H Akh Minhaji, M.A., PhD., Pof Dr. Irwan Abdullah, MA., Prof Dr H Syamsul Anwar, MA., Prof Dr Haryatmoko, Prof Dr H Abdul Munir Mulkhan, SU, Prof Dr H Musa Asy'arie, dan Dr Th Sumartana yang telah memberikan wawasan keilmuan, agama, dan riset ilmiah.
8. Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, yang telah berkenan diwawancarai seputar profil Bapak Joko Widodo dan

memberikan data-data Walikota Surakarta semasa Bapak Ir H Joko Widodo.

9. Sahabat-sahabat PMII tahun 1999-an yang telah banyak memberikan sumbangan wawasan keilmuan Islam dan nasionalisme melalui berbagai kegiatan pergerakan PMII, di antaranya sahabat Drs H Muhaimin Iskandar, M.Si, dan H Imam Nahrawi, S.Ag.
10. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan moril dan materiil hingga lulusan pendidikan S-3.
11. Istri tercinta Siti Mas'ulah, M.Pd.I, dan anak-anakku tersayang Muhammad Maulana Malik Azh-Zhahir, Syarifatus Syakura, dan Muhammad Hirzan Haidar Ar-Razi.

Bengkulu, 18 Juli 2016
Penulis,

Dr Moh Dahlan, M.Ag

KATA SAMBUTAN

Prof Dr H Sirajuddin M, M.Ag., MH
(Rektor IAIN Bengkulu)

Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan taufiq dan hidayahnya hingga bisa memberikan kata sambutan ini. Dan salawat beserta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad saw yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang diridlai Allah swt.

Dalam kesempatan ini, saya selaku Rektor IAIN Bengkulu menyambut baik hadirnya karya saudara Dr Moh Dahlan, M.Ag yang berjudul: *Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo berdasarkan Nalar Fiqih ke-NU-an* yang mengurai nalar fiqih ke-NU-an yang memotret gagasan dan kebijakan Presiden RI, Bapak Ir H Joko Widodo, dalam membangun kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Dalam kajian ini dijelaskan, bahwa gagasan dan kebijakan Bapak Ir H Joko Widodo memiliki interrelasi yang sangat erat dengan spirit dan *ruhul jihad* Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) dalam membangun bangsa dan negara, terutama dalam membangun relasi antara agama dan negara yang bertujuan mewujudkan hubungan simbiosis mutualistik, sehingga kemajuan negara dapat menopang kemajuan syiar-syiar agama dan juga sekaligus syiar-syiar agama dapat mendukung keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perjuangan untuk membangun hubungan yang harmonis antara agama dan negara sudah dirintis dan diletakkan pondasinya oleh para pendiri negara, termasuk KH Wahid Hasyim dari Tokoh NU, dalam merumuskan ideologi Pancasila dan UUD-NRI tahun 1945.

Akhirnya, saya berharap kehadiran buku ini dapat memberikan wawasan ke-NU-an dalam kehidupan politik kebangsaan dan kenegaraan yang majemuk di Indonesia.

Bengkulu, Juni 2016
Rekor,

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH
NIP. 196003071992021001

KATA SAMBUTAN

Dr H Ridwan Mukti, MH
(Gubernur Bengkulu)

Alhamdulillah puji sukur saya haturkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan berkah dan karunia, sehingga bisa lahir karya ilmiah ini sebagai bahan refleksi dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan ini, saya juga sedikit mengulas dan menjelaskan bahwa NU sebagai madzhab utama umat Islam di Indonesia patut mendapat perhatian yang memadai karena nalar keilmuannya selalu sesuai dengan arah kebijakan Negara dan para pemimpinnya. Bahkan secara historis-politik, NU melalui KH M Hasyim Asy'ari telah menyuarakan tegaknya negara yang memberikan ruang dan mampu menjadi wadah bagi kehidupan umat di Indonesia. Secara detail fatwa resolusi jihad KH. Hasyim Asy'ari menjadi bukti sejarah bahwa NU telah mampu menggerakkan Pemerintah RI dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersama-sama melawan tentara Sekutu yang diboncengi NICA Belanda. Pertempuran 10 November 1945 merupakan pertempuran laskar ulama-santri di garda terdepan untuk mempertahankan dan menegakkan NKRI.[1]

Semangat yang penuh perjuangan untuk membangun agama, masyarakat, bangsa dan negara tersebut juga menjadi spirit gagasan dan kebijakan Joko Widodo. Bahkan beliau menandaskan bahwa kita

[1] Fathoni, *Ulama-Santri, Garda Depan Perjuangan Kemerdekaan*, http://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-kemerdekaan diakses 6 Juni 2016; lihat Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014)

harus berusaha untuk bersama-sama melindungi bangsa dan negara dari semua bentuk ancaman radikalisme dan terorisme, serta sekaligus berupaya mengajak umat menuju paham Islam -dalam hal ini akidah dan fiqih- yang toleran, moderat dan santun.[2] Oleh sebab itu, spirit perjuangan Joko Widodo dalam membangun agama, masyarakat, bangsa dan negara perlu didalami dan dieksplorasi sebagai profil hidup beragama, berbangsa dan bernegara yang sejati di masa kini yang penuh dinamika. Bahkan Presiden RI, Ir H Joko Widodo (Jokowi), pada waktu membuka Istighatsah Akbar Nahdlatul Ulama dan Munas Alim Ulama NU juga menyatakan bahwa Islam yang moderat, toleran dan santun serta menghargai perbedaan antara umat beragama menjadi perhatian dan harapannya sebagai Presiden RI.

Akhirnya, saya sebagai Gubernur Bengkulu menyambut baik hadirnya buku ini sebagai bahan refleksi ilmiah dalam memahami, menghayati dan mengamalkan norma-norma agama Islam di Indonesia. Semoga kehadiran buku ini banyak memberikan inspirasi dan membuka wawasan keagamaan kita bersama dalam kehidupan yang majemuk.

Bengkulu, 5 Juni 2016

Gubernur,

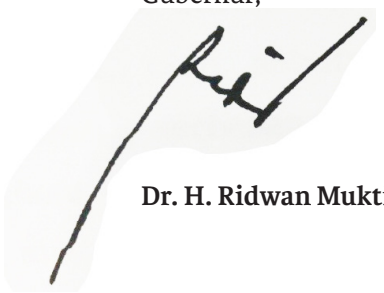

Dr. H. Ridwan Mukti, MH

[2] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016

PRA-WACANA

Ali Mukartono, SH., MM.
(Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu)

PRA-WACANA

Sejarah perjalanan hidup berbangsa dan bernegara yang tidak ternilai harganya adalah adanya semangat yang muncul dan lahir dari budaya yang mau menghargai keberagaman, dan mempunyai toleransi, moderasi dan sopan santun. Bahkan umat Islam yang berpaham *ahlussunnah wal jamaah* sebagaimana Nahdlatul Ulama (NU) telah ikut serta memberikan warna dan nilai-nilai keagamaan (fiqih) Islam dalam proses penyusunan dan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) tahun 1945,[1] sehingga walaupun umat Islam yang mayoritas itu mengamalkan ajaran-nya, tetapi tetap setia terhadap NKRI, bahkan semakin teguh komitmennya dalam mendukung, mempertahankan dan memajukan NKRI. Oleh sebab itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar dari sisi keanggotannya di Indonesia senantiasa konsisten mengajarkan paham keagamaan (fiqih) Islam yang moderat, ramah, toleran, dan santun, sehingga NU saat ini menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan yang berada di garda depan dalam menghadang paham radikalisme dan ekstrimisme agama di Indonesia, serta menangkal paham sesat/penodaan agama yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1/PNPS tahun 1965.

---

[1] *Jam'iyyah Nahdlatul Ulama* pada Muktamar NU di Banjarmasin, mengeluarkan fatwa perlunya mendirikan negara dalam bentuk *Darussalam* (negara harmoni), bukan *Darul Islam* (negara Islam). *Laporan Khusus*, dalam Majalah Risalah NU, Edisi 46 Tahun VII, 2014, hlm. 109; KH Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Ahmad Baso (ed), (Jakarta: LTN PBNU, 2012), hlm. 267.

Dalam konteks kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, Presiden Joko Widodo juga menekankan perlunya menjaga dan mengembangkan paham keagamaan Islam yang moderat, ramah toleran, rukun dan santun, dengan senantiasa selalu waspada dan menentang terhadap munculnya dan adanya gerakan-gerakan keagamaan radikal dan ekstrim di Indonesia. Hal ini penting agar kita sebagai bangsa yang religius dan majemuk tetap kondusif dalam pembangunan di segala bidang dan juga sekaligus sebagai contoh ideal bagi peradaban agama di tingkat internasional, yang sudah terbukti hingga kini tetap diakui oleh negara-negara Timur Tengah sebagai sebuah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang mampu betul-betul menerapkan ajaran Islam dengan sesungguhnya. Oleh sebab itu, budaya yang baik tersebut harus terus dilestarikan dan dikembangkan.[2]

Dalam konteks pembangunan masyarakat dan bangsa, kebijakan Presiden Joko Widodo memulai program pembangunannya dari pinggiran, pesisiran, pedesaan, dan daerah tertinggal dan terluar. Program ini sesungguhnya senafas dengan spirit nalar fiqih ke-NU-an dan juga nalar keilmuan Hasan Hanafi, Guru Besar Universitas Kairo Mesir, yang memiliki orientasi pemikiran keislaman yang mendahulukan pemberdayaan kaum du'afa' atau kaum lemah.[3]

Dengan demikian, spirit agama (Islam) sangat erat hubungannya dengan NKRI walaupun bukan negara agama, tetapi tidak menafikan peran agama, bahkan memberikan ruang bagi kehidupan dan kemajuan syiar-syiar agama. Hal ini sesungguhnya berakar dari Sila Pertama, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan.[4] Dengan

---

[2] Lihat, Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26, diakses 6 Juni 2016.

[3] Hasan Hanafi, *Min al-Aqidah ila al-Tsaurah,* Jilid I (Beirut: Maktabah Madbulah, t.th), hlm. 20-24.

[4] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 45.

demikian, komitmen keberagamaan masyarakat dan bangsa, termasuk umat Islam, yang kuat dan tulen tidak berarti harus menjauhkan diri dari nilai-nilai kebangsaan dan NKRI, tetapi sebaliknya, justru semakin kuat penghayatan dan pengamalan agama Islam/fiqih-nya, maka seharusnya semakin meneguhkan sikap nasionalismenya dalam mempertahankan dan memajukan NKRI.

Oleh sebab itu, saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyambut baik hadirnya buku ini yang diharapkan akan memberikan orientasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dengan benar di dalam upaya menangkal tumbuh dan berkembangnya aliran/paham sesat maupun penodaan agama, dan sekaligus mampu .mempertahakan serta memajukan NKRI

Bengkulu, 12 Juli 2016
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu,

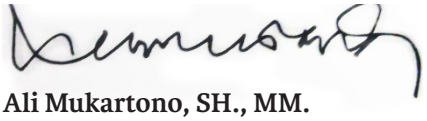

Ali Mukartono, SH., MM.

KATA PENGANTAR

Prof Dr H Machasin, MA
(Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI)

Kehadiran buku karya saudara Moh Dahlan, yang berjudul: *Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo Berdasarkan Fiqih Ke-NU-an*, pada dasarnya hendak mengungkapkan pentingnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai moderasi, toleransi, kerukunan, *ukhuwah* dan keadilan dalam kehidupan umat yang majemuk yang dalam hal ini menampilkan figur Joko Widodo yang sekarang sedang menjabat sebagai Presiden RI. Akar pemikiran dan gagasan buku ini jika kita telusuri pada dasarnya berangkat dari latar belakang keilmuan dan budaya penulisnya, dari budaya Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajarkan prinsip-prinsip fundamental dalam hidup beragama dan berbangsa, seperti prinsip moderasi, toleransi, *ukhuwah*, kerukunan, dan pluralitas.

Sesuai dengan latar belakang penulisnya, buku ini memotret figur Joko Widodo dengan sudut pandang pemikiran fiqih/Islam ke-NU-an. Oleh sebab itu, buku ini menjelaskan pentingnya menegakkan prinsip moderasi, toleransi, *ukhwah* dan keadilan dalam rangka membangun tata kehidupan yang sejahtera dan makmur yang menjadi prinsip perjuangan KH Muhammad Hasyim Asy'arie, pendiri NU dan Pahlawan Nasional.[1] Dalam buku ini diungkapkan bahwa KH Muhammad Hasyim Asy'arie

[1] Lihat al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 185. KH Hasyim Asy'ari, "Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin", dalam Hasyim Asy'ari, *Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy'ari*, Ishomuddin Haziq (ed), (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th), hlm. 91-95.

telah mengajarkan akan pentingnya menjaga dan mengembangkan jiwa nasionalisme dengan senantiasa mengembangkan paradigma keilmuan dan perilaku yang inklusif dan toleran terhadap adanya perbedaan aliran dan golongan, sehingga perbedaan aliran atau golongan di sini tidak boleh dianggap sebagai penghambat bagi keberlangsungan dan kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia, tetapi justru harus dipandang dan dinilai sebagai ruh dan wahana untuk merajut potensi seluruh umat dan anak bangsa untuk menjaga, mengembangkan dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan senantiasa berpegang dan berpedoman pada norma-norma agama yang moderat, toleran, adil dan elastis, sehingga kita sebagai bangsa yang religius bisa mengamalkannya dalam kehidupan yang majemuk.

Dalam konteks tersebut, buku ini mengungkapkan bahwa menegakkan prinsip toleransi, moderasi, *ukhuwah* dan keadilan dalam membangun tata kehidupan yang sejahtera dan makmur merupakan ensensi dan sendi hidup beragama, berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia (UUD-NRI) tahun 1945 telah menjadikan hal tersebut sebagai bagian esensial kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang dalam term fiqih[2] dikenal dengan *al-mashlahah al-'ammah* (kemaslahatan umum).[3] Dengan prinsip-prinsip hidup tersebut, buku ini kemudian memotret pembumian nilai-nilai fiqih atau keislaman dari pemikiran dan kebijakan Joko Widodo di dalam membangun dan menegakkan tata kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara yang rukun, damai, adem, ayem, adil, makmur dan sejahtera.

Terima kasih saya sampaikan pada penulis, dengan hadirnya buku ini, masalah pembinaan dan penerangan agama Islam *rahmatal lil alamin* yang menjadi komitmen Kementerian Agama RI dapat terbantu

[2] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 167-168.

[3] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 211-212.

tersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Semoga kehadiran buku ini dapat memperteguh dan memperkokoh paham Islam *rahmatal lil alamin* di dalam NKRI. Amin...

Jakarta, 24 September 2016
Dirjen Bimas Islam,

Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

KATA PENGANTAR

Hj. Khofifah Indar Parawansa
(Menteri Sosial RI)

Setelah membaca karya Dr Moh Dahlan, M.Ag yang berjudul: Membumikan Islam dalam Kerangka Kebijakan: Membaca Gagasan dan Kebijakan Joko Widodo berdasarkan Nalar Fiqih ke-NU-an, saya menyampaikan apresiasi yang cukup berarti terhadap hadirnya buku ini karena telah berhasil membedah gagasan dan kebijakan Joko Widodo berdasarkan etika tanggung jawab yang hendak mengungkapkan bahwa perjuangan untuk memajukan dan menyejahterakan kaum miskin, kaum petani, kaum nelayan, dan masyarakat tertinggal-terluar sebagai titik balik permulaannya yang tidak bisa hanya dijelaskan dengan kerangka konseptual/rencana yang tidak berdasarkan fakta kongkrit yang riil, tetapi harus berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sehingga di situlah kebenaran ilmiah tindakan Joko Widodo yang sering blusukan. Dengan adanya sering blusukan, perencanaan pembangunan yang dirumuskan akan semakin valid dan dekat dengan fakta lapangan, sedangkan dari sisi etika, akan semakin meningkatkan rasa tanggung jawab dari pemimpin itu terhadap apa yang sudah menjadi amanah rakyat. Dengan etika tanggung jawab Emanuel Levinas ini, hendak kita tegaskan bahwa tanggung jawab pemimpin hanya akan terwujud dengan baik jika seseorang berhadapan langsung dengan fakta atau peristiwa, karenanya di sinilah perlunya seorang pemimpin melakukan kunjungan untuk melihat masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Dari sisi teori kritis Mansour Fakih, buku ini hendak mengungkapkan bahwa berbagai permasalahan bangsa dan negara tidak bisa dijelaskan hanya secara parsial dan naratif, tetapi harus diselesaikan dengan

cara yang utuh dengan membangun sistem yang baik. Di sinilah teori hermeneutika Paul Riceour juga berbicara bahwa untuk mencapai maksud sesuatu tidak bisa hanya dipahami secara parsial, tetapi harus secara utuh, ide utama. Dalam kasus ini,

salah satu contoh yang bisa dijelaskan adalah apa yang sedang dilakukan oleh Joko Widodo dalam memberantas kemiskinan bagi kaum nelayan dimana hal itu dilakukan tidak hanya dengan memberikan alat tangkap kepada kaum nelayan, tetapi juga masalah pencurian ikan dan masalah modal (melalui program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah/TPAKD) juga menjadi perhatian pemerintahan Joko Widodo yang hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kaum nelayan secara sistem. Dengan teori kritis Mansour Fakih, buku ini mau berbicara bahwa dalam penyelesaian masalah tidak bisa hanya bertumpu pada satu objek masalah, yang dalam hal ini nelayan saja, tetapi harus dibenahi sistem yang melingkupinya sebagaimana yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Akhirnya, saya sebagai Menteri Sosial RI menyambut baik hadirnya buku ini sebagai bahan kajian reflektif bagi masyarakat dan bangsa dalam membangun kehidupan yang majemuk di Indonesia.

Bengkulu, Juni 2016
Menteri Sosial RI,

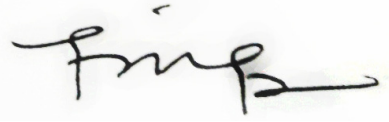

Hj. Khofifah Indar Parawansa

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

KATA SAMBUTAN ..... **ix**
Prof Dr H Sirajuddin M, M.Ag., MH ..... **ix**
(Rektor IAIN Bengkulu) ix

KATA SAMBUTAN ..... **xi**
Dr H Ridwan Mukti, MH ..... **xi**
(Gubernur Bengkulu) xi

PRA-WACANA ..... **xiii**
Ali Mukartono, SH., MM. ..... **xiii**
(Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu) xiii

KATA PENGANTAR ..... **xvii**
Prof Dr H Machasin, MA ..... **xvii**
(Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI) xvii

KATA PENGANTAR ..... **xxi**
Hj. Khofifah Indar Parawansa ..... **xxi**
(Menteri Sosial RI) xxi

DAFTAR ISI ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Pembahasan 13
D. Metode Pembahasan 13
1. Pendekatan Kajian 13
2. Kerangka Teoritik 15
3. Teknik Analisis Data 19
E. Sistematika Pembahasan 19

BAB II BIOGRAFI KEISLAMAN, KARIR, DAN DASAR NALAR FIQIH KE-NU-AN JOKO WIDODO .. 21
A. Biografi Keislaman dan Karir Joko Widodo..... 21
B. Penyebaran Agama Islam ala Teologi Ahlussunnah Wal Jama'ah di Indonesia..... 42
C. Nalar Teologi Ahlussunnah wal Jamaah sebagai Landasan Ijtihad Fiqih ke-NU-an 59
1. Firqah Yang Selamat 65
2. Firqah Yang Kurang/Tidak Selamat 88

BAB III NALAR ITJIHAD FIQIH KE-NU-AN JOKO WIDODO 97
A. Nalar Ijtihad 'Urf ke-NU-an 97
B. Nalar Ijtihad Maslahat ke-NU-an 117
C. Menuju Nalar Ijtihad Fiqih Irfani ke-NU-an: 127
Reinterpretasi Konsepsi Riddah..... 127
D. Blusukan sebagai Tradisi Dakwah Kiai 146

BAB IV NALAR FIQIH KE-NU-AN JOKO WIDODO DALAM KEHIDUPAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN 159
A. Fiqih Jihad Kebangsaan..... 159
B. Fiqih Kaum Pinggiran 169
C. Fiqih Kemanusiaan 187
D. Fiqih Ekonomi Kerakyatan 204
E. Fiqih Kebangsaan 227
F. Fiqih Kenegaraan..... 260
G. Fiqih Dakwah Blusukan Kiai 280

BAB V PENUTUP..... 299
A. Kesimpulan..... 299
B. Saran 301

DAFTAR PUSTAKA..... 303
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 323

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

> "Islam mempunyai cita-cita. Islam mempunyai macam-macam-macam cita-cita. Cita-cita mengenai ketatanegaraan punya, cita-cita mengenai kehidupan rohani khususnya sudah barang tentu punya.....Islam adalah satu *way of life. Islam is not merely a religion* bukan sekadar satu agama *but Islam is a way of life*".[1]

Secara umum, norma agama Islam memiliki unsur pokok yang terdiri dari tiga macam, yakni teologi Islam atau akidah, fiqih dan akhlak. Salah satu unsur yang akan menjadi pembahasan utama adalah pembahasan fiqih, di samping akidah dan akhlak. Dalam kaitannya dengan masalah fiqih, Ir Soekarno (Presiden RI Pertama) pernah menjelaskan bahwa ikhtiar Nabi Muhammad saw pada periode pertama di Mekkah adalah mengajak umat pada keimanan atau pembangunan mental spiritual -yang sekarang dikenal dengan "revolusi mental", sedangkan pada periode kedua di Madinah tatkala masyarakat sudah beriman, Nabi saw mencurahkan perhatiannya pada pembangunan aturan hukum-hukum, seperti perkawinan, yang dalam hal ini dijelaskan dalam masalah

[1] Soekarno, "Negara Nasional dan Cita-Cita Islam", dalam Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, dalam dalam R Soemarjono (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm. 146.

pembahasan fiqih.[2] Pembahasan fiqih merupakan pembahasan yang urgen karena sebagai aturan hidup manusia atau umat Islam dalam membangun keadilan, kesejahteraan, dan kemakmurannya. Sebagai agama wahyu, aturan fiqh telah berakhir dengan selesainya wahyu al-Qur'an turun pada Nabi Muhammad saw dan Sunnah dari Nabi saw, sedangkan problematika hidup manusia terus berkembang. Sebagai regulasi yang mengatur tata kehidupan manusia, hukum fiqh itu adalah bersifat normatif. Fiqh[3] adalah norma (kaidah, patokan atau ketentuan) yang menjadi pedoman dalam hidup manusia baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[4] Fiqih sebagai hasil pemahaman ulama fiqih yang mendalam terhadap sumber aslinya al-Qur'an dan Sunnah Nabi dituntut harus mampu menjawab perkembangan zaman walaupun wahyu atau sunnah sudah berakhir dengan wafatnya Nabi. Oleh sebab itu, ijtihad keilmuan Islam harus selalu digalakkan untuk menggali muatan keilmuan fiqih dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sebab, jika tidak dilakukan ijtihad untuk menjawab dinamika perkembangan zaman, maka fiqih sebagai hasil pemahaman yang mendalam mengenai (hukum) agama Islam akan ketinggalan zaman.[5] Fiqih di satu sisi sebagai noma bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw, sedangkan pada sisi lain, juga mengandung unsur-unsur kemanusiaan karena dibangun berdasarkan prinsip ijtihad

---

[2] Soekarno, "Negara Nasional dan Cita-Cita Islam", dalam Kuliah Umum di Universitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, dalam dalam R Soemarjono (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*...., hlm. 147.

[3] Joseph Shahct, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003).

[4] Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam,* http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html diakses 06 Juni 2011.

[5] Hukum dalam pandangan ulama ushul fiqih dan ulama fiqih terjadi perbedaan pandangan. Ulama ushul fiqih berpendapat bahwa hukum adalah khitab Allah yang mana mukallaf diperintah untuk mengerjakannya atau memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya atau sebab dari terjadinya sesuatu atau syarat atau pencegah dari sesuatu lainnya. Adapun fuqaha' berpendapat, hukum adalah sifat yang merupakan bekas dari khitab itu seperti wajibnya shalat. Said Agil Husin Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh: Telaah Konsep al-Nadb & al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), hlm. 27.

dan kemaslahatan hidup manusia yang hakiki.[6] Unsur kemanusiaan fiqih dapat diakui karena fiqih adalah pengetahuan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang digali oleh mujtahid dari nas-nas al-Qur'an dan Sunnah yang rinci untuk tujuan menjawab kepentingan hidup manusia.

Sebagai disiplin otonom dan aplikatif, pendekatan kajian fiqih dapat berbentuk juridis-normatif atau normatif-empiris. Penggunaan jenis pendekatan kajian fiqih sangat berhubungan erat dengan masalah fiqih yang hendak diteliti.[7] Pendekatan juridis-normatif digunakan sebagai bahan kajian fiqih yang berpijak pada analisis rasional sebagaimana teori qiyas digunakan untuk menggali aturan fiqih dari sumber asalnya, semisal untuk menentukan keharaman Bir Bintang, maka kita harus merujuk pada ayat al-Qur'an yang mengatur masalah keharaman khamar karena adanya kesamaan illat, yaitu sama-sama memabukkan. Sementara itu, pendekatan normatif-empiris digunakan sebagai bahan kajian fiqih yang titik tekannya pada pembangunan aturan fiqih yang berhubungan erat dengan pemenuhan kepentingan umat manusia, sehingga di dalam hal ini digunakan teori-teori kajian fiqih empiris seperti *mashlahah*, *istihsan* dan *'urf*.[8]

Dalam masalah ini, pendekatan normatif, empiris, dan bahkan akhir-akhir ini pendekatan hukum kritis (*critical legal studies*) banyak digunakan dalam kajian fiqih. Walaupun pendekatan historis, antropologis atau sosiologis sebagai varian pendekatan empiris telah digunakan, tetapi norma fiqih tetap bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi, hanya saja pendekatan empiris lebih berhubungan erat dengan pemenuhan kepentingan hidup manusia, seperti kemaslahatan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan.[9]

---

[6] Duksi Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep istiqro' al-Maknawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 98.

[7] Mudjia Rahardjo, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam,* http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html diakses 06 Juni 2011.

[8] Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009)

[9] Rahardjo, *Penelitian Sosiologis.*; Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., hlm. 386.

Dalam tataran praktis, arah kajian fiqih sering dipertentangan antara teori normatif dan empiris. Teori normatif adalah arah kajian fiqih yang membahas masalah hukum fiqih dari paradigma "bagaimana seharusnya". Sementara itu, teori empiris adalah arah kajian fiqih yang membahas masalah-masalah riil yang dihadapi manusia "apa adanya". Arah kajian normatif-deduktif digunakan untuk menghasilkan ilmu-ilmu keislaman seperti fiqih yang bekerja dalam wilayah doktrinal yang dikenal dengan kajian teori murni (*theoritical resarch*), sedangkan arah kajian empiris-induktif digunakan dalam wilayah historis-sosiologis-antropologis yang dikenal dengan kajian terapan (*applied research*). Dalam kajian ilmu-ilmu fiqih, Imam Syafi'i sebagai pendiri ilmu ushul fiqih telah meletakkan dasar-dasar kajian doktrinal ijtihad fiqih baik kajian *istimbathi* (deduktif) maupun *istintaji* (induktif). Teori dasar dalam kajian normatif deduktif akan menjadi bahan baku dalam kajian normatif-induktif dalam bidang kajian fiqih dan demikian sebaliknya.[10]

Kajian fiqih yang menggunakan pendekatan normatif-deduktif dapat dimasukkan dalam kategori kajian hukum *law-in-books*, yaitu kajian yang memposisikan aturan hukum sebagai sumber normatif dalam pembangunan norma hukum, dalam hal ini norma hukum fiqih, sedangkan kajian normatif-induktif dapat dimasukkan dalam kajian hukum *law-in-action*, yaitu kajian yang menempatkan norma hukum sebagai keyataan empiris yang dialami.[11]

Norma fiqih tidak hanya berhubungan dengan masalah hukum yang dikeluarkan hakim atau mufti, tetapi juga berhubungan dengan masalah-masalah sumber normatif hukum yang bersifat teologis sebagai landasannya.[12] Dalam kajian hukum positif, untuk kepentingan praktik hukum diperlukan kajian hukum secara memadai.[13] Oleh

[10] Supriatna dan Ahmad Pattiroy, *Paradigma Integratif-interkonekif: Alternatif metodologi dalam Penelitian Hukum Islam*, t.tp., hlm. 12-13; Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 45-47.

[11] Pattiroy, *Paradigma Integratif-interkonekif...*, hlm. 13 Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., hlm. 386-387.

[12] Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 224-225.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 37;

sebab itu, secara spesifik, dalam merumuskan norma hukum fiqih, ada sejumlah prasyaratan yang harus dipenuhi di antaranya, yaitu *Pertama*, seorang mujtahid dalam fiqih harus menguasai fiqih secara mumpuni. *Kedua*, ijtihad dimaksudkan untuk mencetuskan hukum syar›i yang berhubungan langsung dengan perilaku manusia. *Ketiga*, hukum syar'i yang menjadi ruang lingkup ijtihad adalah masalah hukum dlanni. Adapun ruang lingkup kajian ijtihad fiqih dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni: *Pertama*, masalah-masalah baru yang belum diatur ketentuannya dalam al-Qur'an atau Sunnah secara jelas dan rinci. *Kedua*, adanya masalah-masalah baru yang belum dikeluarkan fatwa hukumnya oleh mujtahid. *Ketiga*, nash-nash dlanni. *Keempat*, masalah fiqih yang dikaji adalah masalah yang rasional (*ta'aqquly*).[14]

Nalar kajian fiqih terutama fiqih ke-NU-an sebagai madzhab utama dalam kehidupan keagamaan Islam di Indonesia telah banyak mendapat perhatian dan menjadi arah pengembangan kajian keilmuan (fiqih) Islam karena selalu sesuai dengan dan mendukung kebijakan negara Indonesia. Oleh sebab itu, gagasan dan kebijakan para pemimpin negara Indonesia selalu memiliki korelasi dengan norma-norma ilmu agama Islam terutama nalar fiqh ke-NU-an. Hal itu bisa terjadi karena secara historis-politik, para ulama Nusantara, terutama ulama NU (nahdlatul Ulama), memiliki arah yang sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana telah digariskan oleh pendiri NU, KH M Hasyim Asy'ari, yang telah ikut andil dalam memperjuangkan dan mempertahankan NKRI, yang ditandai dengan lahirnya fatwa Muktamar NU tahun 1936 M dan juga resolusi jihad dari KH M Hasyim Asy'ari yang bertujuan mendorong lahirnya semangat juang bagi Laskar Hizbullah, Fisabilillah, dan seluruh rakyat Indonesia pada pertempuran 10 November 1945.[15]

Al-Munawar, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh...*, hlm. 29-42.

[14] KH. Ibrahim Hosen, "Taqlid dan Ijtihad: Beberapa Pengertian Dasar" dalam Budhy Munawar-Rachman, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 320-321.

[15] Fathoni, *Ulama-Santri, Garda Depan Perjuangan Kemerdekaan*,

[h]ttp://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-

Hal tersebut bukanlah kebetulan, tetapi karena sejak sebelum dan sesudah merdeka, NU memantapkan nalar akidah dan fiqih-nya ala *ahlussunnah wal jamaah* yang moderat, inklusif, dan toleran, sehingga nalar fiqih ke-NU-an selalu mampu mengikuti dan mendukung gagasan dan kebijakan para pemimpin Indonesia dalam berupaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran.[16]

Dengan nalar fiqih toleransi,[17] moderasi dan inklusif tersebut, gerakan NU selalu sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman. Inklusifitas dan moderasi itu dapat dipahami dari pemikiran pendiri NU, KH M Hasyim Asy'ari, dalam karyanya yang mengutip pendapat al-Syaikh Ahmad al-Husaini sebagaimana ditulis dalam kitabnya *Tuhfah al-Ra'yi al-Sadid li Ahmad* yang mengatakan bahwa *'i'lam anna ikhtilaf al-madzahib fi hadzihi al-millah al-Islamiyah nikmatun kabiratun wa fadlilatun 'adimatun* (ketahuilah bahwa adanya perbedaan madzhab atau golongan dalam agama Islam merupakan nikmat yang agung dan keutamaan yang besar). Oleh sebab itu, syariat/fiqih ini mengajarkan norma-norma hukum yang mudah dilaksanakan dan luas cakupannya serta tidak sulit-menyulitkan (Q.S. al-Baqarah [2]: 185), dan hadis Nabi saw juga menguatkan bahwa "Aku (kata Nabi saw) diutus untuk memberikan kemudahan dan keluasan".[18] Namun demikian, perbedaan

---

kemerdekaan diakses 6 Juni 2016; lihat juga *Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014).*

[16] Fathoni, *Ulama-Santri, Garda Depan Perjuangan Kemerdekaan*,

[h]ttp://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-kemerdekaan diakses 6 Juni 2016.

[17] Menurut Zuhairi Misrawi, toleransi terbagi menjadi dua macam: *Pertama*, toleransi pasif yang mana seseorang menerima keberagaman sebagai realitas faktual yang harus diterima, sehingga toleransi ini cenderung disebut dengan sikap inklusif. *Kedua*, toleransi aktif adalah sikap toleransi yang mengakuti dan menerima adanya perbedaan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerjasama dalam hal-hal yang bersifat umum dan universal. Zuhairi Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil 'Alamin*, (Jakarta: Penerbit Oasis, 2010),hlm.166.

[18] KH Hasyim Asy'ari, *Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin* dalam Ishomuddin Haziq (ed), *Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy'ari*, (Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th), hlm. 91-94.

itu hanya berlaku dalam hal cabang, tetapi tidak berlaku dalam hal pokok, semisal rukun iman tidak bisa ditambah atau norma dasar yang menyatakan bahwa "Nabi Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul terakhir" tidak bisa diubah, sehingga jika hal itu diubah, maka akan terancam pasal penodaan agama Islam yang secara jelas dilarang oleh peraturan Perundangan-undangan Nomor 1 tahun 1965.

Sifat "kemudahan dan keluasan dalam hal cabang" itulah yang menjadi spirit dan kebijakan Presiden Joko Widodo yang dikehendakinya yang disampaikan pada saat acara Istighatsah Akbar NU bahwa nalar (fiqih) Islam yang moderat, toleran dan santun serta saling menghargai atas perbedaan antara umat beragama harus menjadi perhatian kita semua, karena itu ia menyampaikan rasa syukurnya; "*Alhamdulillah, Islam kita Islam Nusantara,*[19] *Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi.*" Nalar fiqih Islam inilah yang telah digagas dan dibangun KH Hasyim Asy'ari dengan titik tekan pada sikap toleransi, moderasi, rukun, dan saling menghargai atas perbedaan.[20] Dengan eksistensi nalar fiqih Islam yang dianut umat Islam Indonesia itulah, maka dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan kepala-kepala negara, Joko Widodo selalu menyampaikan bahwa Indonesia

[19] Menurut Zainul Milal Bizawie, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia. Hal ini adalah gabungan dari nilai Islam teologis dengan nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat Tanah Air. Karakter Islam Nusantara adalah wajah Islam yang menampilkan sikap ramah terhadap tradisi dan kearifan lokal dalam kerangka syariat Islam serta mensinergikan dengan adat istiadat di berbagai wilayah Indonesia. Nalar fiqih/ Islam Nusantara hadir untuk memperkaya dan berdialog khazanah keislaman dengan budaya lokal, sehingga karakter Islam Nusantara bersifat inklusif, ramah dan akomodatif terhadap segala bentuk adat istiadat yang baik dan benar. Karakter Islam Nusantara ini bertujuan untuk mewujudkan rahmat bagi sekalian alam, *rahmatal lil alamin.* Inilah tradisi penyebaran Islam yang dilakukan Walisongo yang kemudian mencapai titik paripurna dengan bentuk pendidikan pesantren yang kekal hingga masa kini, seperti Pesantren Termas, Pesantren Sidogiri Pasuruan, Pesanten Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, Pesantren Zainul Hasan Keraksaan Pronolinggo, Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, dan lainnya. *Pengaruh Ulama Nusantara dalam Perjuangan Melawan Penjajah*, Majalah Risalah NU, Edisi 60 Tahun X 1437 Tahun 2016, hlm. 14-17.

[20] KH Hasyim Asy'ari, *Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin* dalam Ishomuddin Haziq (ed), *Irsyad al-Syari* ..., hlm. 91-94.

adalah sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan nalar keislaman yang penuh keramahan, kesantuan dan saling menghargai. Karakter hidup umat Islam ini disampaikan oleh Joko Widodo karena ternyata masih banyak-kepala negara yang tidak tahu mengenai eksistensi kerukunan dan toleransi hidup umat beragama serta antar umat beragama yang sesungguhnya lahir dan berasal dari budaya Indonesia. Dengan modal hidup yang rukun, toleran dan saling menghargai tersebut, maka hal itu telah menjadi kekuatan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan serta terhindar dari perpecahan.[21]

Dalam *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015*, Joko Widodo menyampaikan harapannya, bahwa nalar (fiqih/pemahaman) keislaman yang harus diamalkan adalah nalar keislaman yang mendukung kemajuan, perdamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan umat bersama. Sebab, kita dewasa ini, baik sebagai umat, bangsa maupun masyarakat dunia sedang mendambakan hal itu. Oleh sebab itu, kita harus mampu merumuskan kembali dan menerapkan konsep pembangunan Indonesia sebagai negara bertuhan dan religius yang terbebas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan menjadi sebuah negara yang adil, makmur, dan sejahtera, baik secara spiritual maupun material. Lebih lanjut, kita juga harus memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial sebagai pilar untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang rukun, damai, bermoral dan berbudaya, serta memperkuat rasa kebersamaan, toleransi dan rasa saling menghargai.[22] Demikian juga Majlis Ulama

---

[21] *Jokowi: Alhamdulillah, Islam Kita Islam Nusantara*, http://www.jpnn.com/read/2015/06/14/309550/Jokowi:-Alhamdulillah-Islam-Kita-Islam-Nusantara-/page2 diakses 6 Juni 2016; dan *Joko Widodo: "Islam Kita Penuh Kesantunan dan Tatakrama"* https://serambiminang.com/2015/08/joko-widodo-islam-kita-penuh-kesantunan-dan-tatakrama.html/, diakses 6 Juni 2016

[22] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal **15 Mei 2015,*** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016

Indonesia (MUI) sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan untuk dihargai dan dihormati, sehingga umat Islam dan pemerintah Indonesia berkewajiban menerima, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dan berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Allah swt menegaskan pentingnya hal itu.[23]

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

> Artinya: Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Q.S. Yunus [10]:99).

Kajian terhadap gagasan dan kebijakan pemimpin Indonesia dalam hal ini Presiden Joko Widdo dinilai penting karena adanya pendapat MUI yang menegaskan bahwa *"dalam rangka mewujudkan amanah dasar negara dan konstitusi maka agama harus dijadikan sumber hukum, sumber inspirasi, landasan berpikir, dan kaidah penuntun dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara....karena ajaran Islam merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin dan shalihun likulli zamanin wa makanin"*. Apalagi diyakini agama Islam merupakan agama yang sempurna yang dapat menjawab masalah-masalah umat manusia, termasuk masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sebagaimana firman Allah swt.[24]

---

[23] KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 402-405.

[24] KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*..., hlm. 875.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. al-Ma'idah [5]: 3).

Di samping itu, Indonesia sebagai negara religius (*religious nation state*)[25] sesungguhnya merupakan negara yang majemuk, sehingga memerlukan pemimpin yang visioner-religius baik dari sisi gagasan maupun kebijakannya. Lahirnya pemimpin yang visioner baik dari sisi gagasan maupun kebijakan sangat layak untuk dikaji dan dieksplorasi untuk disampaikan pada publik sebagai bahan pemikiran dan pedoman dalam pengembangan keilmuan dan kebijakan.

Sejak menjabat Walikota Surakarta hingga kini sebagai Presiden RI, gagasan dan kebijakan Joko Widodo memiliki konsistensi dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bawah, pinggiran, pedesaan, nelayan, merajut pluralitas hidup umat dan bangsa, serta memiliki gaya kepimpinan dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan bangsa dengan cara-cara humanis. Dengan meminjam pemikiran Gus Dur, gagasan dan kebijakan Joko Widodo sangat layak dikaji karena sikap keberpihakannya kepada kaum du'afa' dan pluralitas hidup serta cara-cara penyelesaian masalah-masalah umat dan masyarakat dengan cara-cara yang humanis dan membumi baik secara konseptual maupun kebijakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt.[26]

[25] "Dengan sila ketuhanan ini, sekaligus dengan penjabarannya di konstitusi, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila adalah sebuah negara religius (*religious nation state*). Di negara ini tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan anti keagamaan." Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 48.

[26] KH Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjo dkk, (peny), (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 184-185.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah, 2; 42).

Hal itu dapat disimak dan dicermati ketika Joko Widodo merelokasi para pedagang pasar di Surakarta, kebijakannya sesuai dengan spirit ayat tersebut dimana relokasi yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan pasar rakyat itu adalah sebagai tujuan yang mulia dan baik sesuai dengan amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi hal itu tidak cukup jika tidak diikuti dengan kebijakan pelaksanaan yang baik pula. Oleh sebab itu, dalam tataran implementasinya-pun dilakukan dengan baik.

Dengan meminjam pemikiran KH M Hasyim Asy'arie yang tertuang dalam karyanya berjudul "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa man Tabi'ahu min al-Shahabah wa al-Tabi'in", kita dapat mengasumsikan bahwa gagasan dan kebijakan Joko Widodo memiliki karakter yang sama dengan jiwa ke-santri-an yang tertanam dalam para *salafus shaleh,* di antaranya terdiri dari sikap *wara'* dan *qana'a*, memperjuangkan persamaan nasib dan kemaslahatan bersama tanpa kecuali termasuk pada kaum non-Muslim (*ahlu al-dzimmah*), keberanian berkoban (*al-istihanah bi al-maut*) membela kebenaran dan menolong yang terdlalimi, menjaga dan memelihara keyakinan, martabat serta hak-hak bangsa, serta sabar dalam menerima rasa sakit dalam menunaikan tugas kenegaraan serta melawan sikap egosentrime.[27] Oleh sebab itu, gagasan dan kebijakan Joko Widodo layak dikaji karena memiliki nilai-nilai filosofis dan praktis yang visioner yang berasal dari jiwa (akidah) Islam yang benar, sejati, ikhlas, taat beribadah, dan gigih berjuang untuk memberdayakan kaum du'afa'; kaum pinggiran, pedesaan, nelayan, kaum buruh, petani, pedagang asongan/kaki lima, dan kaum tertindas lainnya.

[27] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari...*, hlm. 32-33.

Tidak hanya itu, jika dibaca dari teori "pesan utama" dalam hermeneutika fenomenologis Paul Riceour, maka gagasan dan kebijakan Joko Widodo berasal dari sesuatu yang utuh dan komprehensif dalam setiap menjawab masalah atau dalam bahasa Mansour Fakih dikenal dengan teori kritis, semisal kasus nelayan. Jika dibaca dari etika tanggung Emanuel Levinas, tradisi blusukan yang dilakukan sejak menjadi Walikota Surakarta hingga kini sebagai Presiden RI, Joko Widodo telah mengamalkan teori Levinas, bahwa tanggung jawab akan muncul dengan tulus dan sepenuhnya jika seseorang berhadapan langsung dengan kenyataan.[28]

Berdasarkan uraian tersebut, buku ini hendak mengeksplanasi dan mengeksplorasi gagasan dan kebijakan Joko Widodo yang sesungguhnya jika ditelurusi, lahir dan berakar dari nilai-nilai keislaman terutama nalar fiqih ke-NU-an, sehingga wajar jika gagasan dan kebijakannya memiliki kesamaan ruh dan semangat dengan cita-cita Organisasi Sosial Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam membangun kemaslahatan umat, bangsa dan negara Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Buku ini adalah kajian eksplanatif dan eksploratif terhadap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an dengan pokok masalah kajian sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana akar historis kehidupan, keislaman dan karir Joko Widodo dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan? *Kedua*, bagaimana nalar ijtihad fiqih ke-NU-an Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara. *Kedua*, bagaimana relevansi gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara.

[28] Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.); Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000); Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dan Insist, 2001).

C. TUJUAN PEMBAHASAN

Buku ini hendak mengkaji secara reflektif-analitis tentang gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an dengan tujuan kajian berikut: *Pertama*, untuk meneliti akar historis kehidupan, keislaman dan karir Joko Widodo dalam konteks sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. *Kedua*, untuk meneliti nalar ijtihad fiqih ke-NU-an Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara. *Ketiga*, untuk mendalami relevansi gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara.

D. METODE PEMBAHASAN

1. Pendekatan Kajian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatif dan eksploratif terhadap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an. Oleh sebab itu, sumber utama penelitian ini adalah sumber data tertulis berupa buku, kata sambutan, keterangan pers, artikel, jurnal, majalah, surat kabar harian, dan publikasi lainnya, baik dari media cetak maupun elektronik. Sedangkan sumber data sekundernya adalah data-data lapangan baik berupa wawacara maupun observasi lapangan. Adapun pendekatan kajian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Teori Kritis

Teori-teori kritik pada dasarnya adalah semua teori sosial yang mempunyai tujuan dan implikasi praktis terhadap teori perubahan sosial dari aliran kritis. Teori kritis tidak hanya sekadar teori yang digunakan untuk mengkritisi realitas sosial-politik, ekonomi dan hukum yang tidak adil, tetapi juga suatu teori yang berusaha melakukan perubahan sistem dan strukur. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa teori kritis merupakan kajian kritis terhadap realitas teoritik dan praktis. Dengan demikian, teori kritis merupakan teori perubahan sosial atau transformasi sosial. Secara

epistemologis, teori kritis merupakan teori sosial yang bukan hanya memberikan makna atau menjelaskan realitas dengan apa adanya tetapi juga sekaligus berusaha mengubah sejarah hidup manusia sesuai idealitas teoritik. Bagi teori kritis, verifikasi kebenaran bukan dengan ukuran angka, tetapi berdasarkan verifikasi praktis terhadap tingkat kesadaran masyarakat yang memiliki kepentingan itu sendiri. Dengan demikian, teori kritis adalah aksi dan politis.[29]

Tugas teori kritis adalah membawa pembebasan yang ditempu dengan dua jalur: *Pertama*, teori sosial hendak menjelaskan bagaimana kesadaran palsu yang muncul di masyarakat bisa terbentuk dan bagaimana masyarakat bisa sadar akan kesadaran palsu itu sendiri. *Kedua*, teori sosial juga hendak memberikan jalan alternatif dari kesadaran palsu itu, sehingga masyarakat terbebas dari segala bentuk penindasan, eksploitasi dan ketidakadilan. Kedua teori ini bermakna bahwa teori dan praktik berfungsi untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat akan kondisi dirinya agar menjadi lebih baik dan terbangun sistem yang baik yang lahir dari kesadaran teori-teori sosial kritis itu.[30]

b. Pendekatan Etika Tanggung

Nalar etika tanggung jawab Emmanuel Levinas dihadirkan untuk membaca nalar etika yang hendak mengakui eksistensi yang lain (*alterite*), bukan bersifat *psikologis* (perjumpaan dengan sesama kita yang kita jelaskan dari sisi kejiwaan kita, tetapi kita membiarkan pihak lain nampak lahir dalam keberlainnya), bukan pula *normatif* yang berarti *harus menghormati pihak lain*, tetapi ketika bertemu dengan pihak lain, maka pada waktu itu akan muncul secara otomatis tanggung jawab atas apa yang kita saksikan.[31] Dalam nas agama Islam disebut dengan sebutan *lita'arafu* (saling mengenal),

[29] Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan* ..., hlm. 93-94

[30] Mansour Fakih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan* ..., hlm. 93-95.

[31] Demikianlah pemikirannya Emmanuel Levinas/Profesor di Universitas Paris IV (Sorbonne), Franz Magnis-Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*..., hlm. 92.

sehingga dengan nalar keilmuan ini, umat Islam Indonesia seharusnya mampu mengakui dan menghargai eksistensi pihak lain sebagaimana apa adanya bukan hanya sebagai kesadaran psikologis maupun normatif. Dengan kata lain, dapat kita nyatakan bahwa eksistensi pihak lain/agama lain menjadi ada dan bermakna bukan karena kita hargai atau harus kita hargai, tetapi eksistensi pihak lain atau agama lain berharga dengan sendirinya sebagaimana apa adanya yang berbeda. Dalam nalar fiqih,[32] teori ini diakui dalam teori ijtihad *al-'urf* yang menegaskan bahwa tradisi dapat dikukuhkan menjadi ketetapan hukum syara' (*al-'adah syariatun muhakkamatun*) dan apa yang dijadikan ketetapan dalam tradisi juga berlaku sebagaimana ditetapkan dalam nas (*al-tsabit bi al-'urf ka al-tsabit bi al-nash*).[33]

Teori Levinas ini digunakan memotret gagasan dan kebijakan Joko Widodo yang sering blusukan dalam mengenali dan mendengar aspirasi rakyatnya yang dalam hal ini menjadi inti pemikiran Levinas yang menegaskan bahwa kesadaran etis akan tanggung jawab tidak pernah muncul dengan sempurna tanpa adanya kehadiran dan kesaksian langsung terhadap kenyataan, sehingga teori etika tanggung jawab ini menjadi jembatan untuk memupuk dan mempertebal tanggung jawab dalam menyelesaikan kasus-kasus aktual yang dihadapi rakyat atau masyarakat/bangsa secara efektif, efesien dan inovatif.

2. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik yang kita gunakan adalah tiga teori hermeneutika berikut: *Pertama*, teori hermeneutika W Dilthey yang menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan diperoleh melalui fenomena empiris dan

---

[32] Secara harfiah, *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Secara istilah, *fiqih* adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan dan menjelaskan hukum-hukum *syara'* yang berciri praktis yang digali dari dalil-dalil rinci yang bersifat furu'iyah melalui proses penalaran. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3-4; .

[33] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm.90; Lihat juga karya Muhammad al-Fayad, tentang Pemikiran Emmanuel Levinas.

pengalaman batin sehingga ia merintis pemaduan antara teori dan praktik.[34] Oleh sebab itu, hubungan sub ilmu dengan ilmu lainnya atau satu karya ilmiah dengan karya lainnya tidak bisa dipisahkan sebagai bagian keutuhan kerangka keilmuan. Oleh sebab itu, teori hermeneutika W Dilthey digunakan untuk menjelaskan keabsahan penggunaan data-data sebagaimana apa adanya terutama yang bersumber dari karya-karya penulis di berbagai terbitan sebagai wujud kesinambungan kajian teoritik dan ilmiah, terutama dalam karya yang berjudul *Paradigma Ushul Fiqih Multikultral Gus Dur* terbitan IAIN Bengkulu Press, 2013, *Konsep HAM menurut Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im*, Tesis S-2 IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003, dan karya-karya/artikel publikasi ilmiah lainnya, sehingga adanya kesamaan teori-teori atau data-data dengan karya tulis sebelum/sesudahnya merupakan keniscayaan paradigmatik teoritik-ilmiah, tetapi teori-teori dan data-data itu digunakan untuk menganalisis dan mengkaji masalah-masalah baru yang berkaitan dengan pokok bahasan buku ini.[35] Dengan teori hermeneutika Dilthey, kita juga dapat melakukan eksplanasi/deskripsi terhadap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara.

Kedua, teori hermeneutika Hans G. Gadamer digunakan untuk mengembangkan pemaduan teori dan praktik dari Dilthey, tetapi dengan proses yang lebih mendalam dimana memahami teks, gagasan dan kebijakan bukan lagi reproduksi makna sebagaimana Dilthey, tetapi justru berusaha memunculkan makna produktif dari hasil eksplorasi antara pembaca dengan teks, gagasan atau kebijakan seseorang, sehingga dalam proses penafsiran terhadap teks, gagasan, atau kebijakan berjalan dengan cara "pembauran cakrawala (*fusion of horizon*)" yang berarti bahwa ada dialektika antara pembaca dan teks yang kemudian melahirkan makna baru.[36] Dengan teori hermeneutika G Gadamer,

---

[34] Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*.., hlm. 22.

[35] Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*..., hlm. 114; Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Paradigma, 1998), hlm. 207-218.

[36] Lihat "Gadamer evidences the structure of the fusion of past and present as underlying both accurate understanding and miscomprehension". Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics*..., hlm. 114, 147; Kaelan, *Filsafat Bahasa*...., hlm. 207-218.

kita dapat melakukan eksplorasi terhadap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara.

Ketiga, teori hermeneutika fenomenologi Paul Riceour yang mengemukakan beberapa teori tafsir, yakni (a) "pesan/ide utama" dalam memahami wacana; (b) *autonomy of the text* yang berarti bahwa setiap kata-kata dapat terlepas dari maksud pembicaranya jika pembicaranya sudah mengungkapkan kata-katanya; dan (c) *autonomy of an action* yang berarti bahwa setiap makna tindakan (*the meaning of an action*) dapat terbuka dan bebas untuk dimaknai dan dipahami dengan makna baru secara eksistensial, sehingga makna tindakan itu bisa terlepas dari peristiwa pelakunya, yakni maksud dari konsekuensi tindakan itu (*the meaning becomes detached from the event, the intention from the consequences of action*).[37] Dengan menggunakan teori hermenutika fenomenlogi Paul Riceour, kita dapat memberikan legitimasi ilmiah bagi kajian buku ini, bahwa membaca dan memahami gagasan dan kebijakan Joko Widodo yang masih berjalan dan bergerak sah secara ilmiah. Dengan kata lain, teori hermeneutika ini hendak mengatakan, bahwa gagasan dan kebijakan Joko Widodo ketika sudah disampaikan ke publik, maka makna gagasan dan kebijakan itu menjadi milik publik, yang dalam hal ini dikenal dengan *autonomy of the text* dan *autonomy of an action.* Walaupun demikian, untuk meminimalisir jauhnya pemaknaan dari makna asalnya, maka teori Riceour ini menjembatani dengan "pesan utama".

Keempat, nalar ijtihad Muhammad Abed al-Jabiri yang membagi kajian keilmuan Islam ke dalam tiga macam: *Pertama*, nalar bayani. Secara etimologis, *bayan* memiliki beberapa makna; kesinambungan (*asl-washl*), keterpilahan (*al-fashl*), jelas dan terang (*al-zhuhur wa al- wudhuh*), dan kemampuan untuk memberikan penjelasan dan keterangan. Dengan demikian, nalar bayani adalah nalar keilmuan untuk memahami dan menjadi landasan dalam memahami apa pun, terutama nas agama Islam secara tekstual, penjelasan antara nash dengan nash, dan yang menjadi salah satu *pioneer bayaniyun* adalah

[37] Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics...*, hlm. 229-232.

Imam Syafii dengan ilmu ushul fiqihnya. Namun, kelemahan nalar bayani adalah tidak bisa menghasilkan pemahaman yang utuh, tetapi cenderung parsial/atomistik, misalnya dalam ilmu fiqih kemudian menjadi terpisah dengan keimanan, sehingga fatwa tidak terkait dengan ketaqwaan. *Kedua*, nalar irfani. Kata *irfan* dalam bahasa Arab dikenal dengan pengetahuan (*ma'rifatul 'ilm*). Terminologi ini kemudian dikenal di kalangan sufi dengan pengertian; pengetahuan yang termulia yang dihujamkan ke lubuk hati melalui cara *kasyf* (penyingkapan mata batin) atau ilham. Kalangan *irfaniyun* (penganut nalar gnostik) tidak hanya berhenti pada pengetahuan fenomenal (lahiriah-eksoteris), tetapi terus berjalan hingga pengetahuan *noumenal* (batiniah-esoteris) yang muara akhirnya di luar jangkauan indera dan akal pikiran. Pengetahuan ini diperoleh melalui jalan *mujahadah* dan *riyadah* (latihan batiniah secara moral spiritual), sehingga ilmunya bersifat *khuduri* (presensial) atau *knowledge by presence*. *Ketiga*, nalar *burhani* memiliki prinsip *aqlaniyyah* (rasionalisme), kausalitas (*al-sababiyah*), dan esensialisme (*al-mahiyah*). Nalar burhani berkerja dalam jalur indera empiris dan akal pikiran manusia, tidak di luar keduanya, hal ini terjadi karena nalar burhani berasumsi bahwa semuanya bisa dinalar (*al-ma'quliyah*). Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada hubungannya dengan yang ilahi, sebab rasio manusia senantiasa selaras dengan sistem kealaman, dan sistem kealaman selaras dengan sistem tata ilahi.[38]

Dengan demikian, kajian ini memaknai nalar irfani sebagai puncak dari nalar bayani sebagai nalar rasional dan nalar burhani sebagai nalar empiris, bukan hanya dipahami sebagai nalar supra-rasional murni, sehingga nalar tiga keilmuan saling terkait yang bermuara pada nalar irfani. Nalar Abed al-Jabiri ini digunakan sebagai teori tambahan terhadap pesan utama dari Paul Riceour yang dalam nalar ini diistilahkan

[38] Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2008), hlm. 38, 39, 52, 54, 57, dan 61-72; bandingkan dengan Muhammad Abed al-Jabiri, *Bunyat al-'Aql al-'Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1993), hlm. 251-253.

dengan nalar irfani. Cara kerja nalar keilmuan ini mirip nalar keilmuan Edmund Husserl yang mana teori ilmu pengetahuannya berpuncak pada nalar transendental.

3. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode deduktif, induktif, dan historis. *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menjelaskan gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika menjelaskan gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun agama, bangsa dan negara berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an yang terdapat dalam berbagai publikasi dan naskah tulisan, berita dan lainnya baik cetak maupun elektronik untuk kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengeksplanasi dan mengeksplorasi gagasan dan kebijakannya, sedangkan wawancara/ data lapangan adalah sebagai data pendukung. *Ketiga*, metode historis digunakan untuk mengkaji eksistensi gagasan dan kebijakan Joko Widodo serta sejarah hidupnya dalam realitas kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika buku ini meliputi pembahasan sebagai berikut: Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang menjelasakan masalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan. Bab kedua terdiri ulasan mengenai biografi dan karir Joko Widodo dengan uraian seputar sejarah hidup, penyebaran agama Islam ala ahlusunnah wal jamaah di Indonesia, dan teologi ahulussunnah wal jamaah sebagai landasan nalar ijtihad fiqih ke-NU-an. Bab ketiga terdiri dari ulasan nalar ijtihad ke-NU-an Joko Widodo yang meliputi nalar ijtihad '*urf*, nalar ijtihad maslahah, nalar ijtihad irfani, serta blusukan dalam nalar fqih ke-NU-an. Bab keempat terdiri dari pembahasan mengenai nalar fiqih ke-NU-an Joko

Widodo yang memuat fiqih jihad kebangsaan, fiqih kaum pinggiran, fiqih kemanusiaan, fiqih ekonomi kerakyatan, fiqih kebangsaan, fiqih kenegaraan, dan fiqih dakwah blusukan Kiai. Pada bagian akhir dalam bab kelima memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI KEISLAMAN, KARIR, DAN DASAR NALAR FIQIH KE-NU-AN JOKO WIDODO

A. BIOGRAFI KEISLAMAN DAN KARIR JOKO WIDODO

Ir H Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961 dan menikah dengan Ny. Hj. Iriana Joko Widodo yang dikarunia tiga anak, Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar Negeri di Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan S-1 Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Adapun karir dan organisasi yang ditekuni, yakni tahun 1990 menjadi pendiri Koperasi Pengembangan Industri Kecil Solo/Surakarta, periode 1992-1996 menjadi Ketua Bidang Pertambangan & Energi Kamar Dagang dan Industri Surakarta, periode 2002-2007 menjadi Ketua Asosiasi Permebelan dan Industri Kerajinan Indonesia Surakarta, masa 2005-2012 menjadi Walikota Surakarta, masa 2012-2014 menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan periode 2014 s/d 2019 menjadi Presiden Republik Indonesia.[1]

Joko Widodo juga mendapat beragam penghargaan sebagaimana berikut: Satya Bhakti-Kadin Jawa Tengah–2007, Leadership Awards - Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara & Leadership Park-2008, Pelopor Inovasi Pelayanan Prima - Presiden Republik Indonesia

[1] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=167, diakses 4 Juni 2016.

– 2010, Innovative Government Award - Kementerian Dalam Negeri – 2010, Apresiasi Visit Indonesia - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata – 2010, Inovasi Manajemen Perkotaan Awards - Kementerian Dalam Negeri – 2011, Satya Lancana Pembangunan Bidang Koperasi - Presiden Republik Indonesia – 2011, Bintang Jasa Utama - Presiden Republik Indonesia – 2011, Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha, dan yang terakhir Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan - Kementerian Hukum dan HAM.[2]

Secara religius, Joko Widodo memiliki riwayat sebagai penganut Islam yang taat, sejak kecil sudah belajar mengaji al-Qur'an, bahkan orang tuanya bercita-cita dan menghendaki Joko Widodo dan adik-adiknya kelak bisa mengaji, membaca al-Qur'an. Secara personal, ia selalu menyempatkan baca al-Qur'an dan menghayati maknanya serta jika ada waktu luang digunakan untuk menghafal beberapa ayat al-Qur'an.[3]

Bibit pemahaman keislaman Joko Widodo memang bukan dari pesantren, tetapi belajar agama Islamnya unik karena selain mendapat pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, di pergaulan, dan di pengajian. Pemahaman ilmu agama Islam Joko Widodo memang tidak sama dengan lulusan pesanten, tetapi ketika menjalankan amanah sebagai Walikota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan bahkan kini sebagai Presiden RI tetap mencerminkan nilai-nilai Islam baik dari segi gagasan maupun kebijakannya. Bahasa teladan lebih fasih daripada bahasa tulisan, mungkin patut kita sematkan pada beliau. Tutur kata dan tindakannya begitu dekat dengan budaya pesantren, bahkan Joko Widodo mengakui pentingnya pesantren sebagai basis pengkaderan revolusi mental untuk menanamkan akhlakul karimah.[4]

---

[2] http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=167, diakses 4 Juni 2016.

[3] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan,* (Jakarta: Penerbit Imania, 2014), hlm. 27 dan 57.

[4] Dalam kunjungannya ke pusat-pusat pendidikan Islam, Joko Widodo bilang, "Saya melihat betapa pesantren telah berhasil melakukan revolusi mental, terutama dalam menanamkan akhlakul karimah kepada para santri". Kastoyo Ramelan, *Jokowi:*

Demikian juga dalam tradisi ibadah, walaupun bukan lulusan pesantren, tetapi ibadah Joko Widodo mencerminkan budaya santri, ia rajin beribadah shalat lima waktu, dan shalat Jum'atnya juga tidak pernah ditinggalkan walaupun ada kesibukan di Kantornya. Joko Widodo dan sekeluarga merupakan jama'ah masjid Baiturrachman. Bahkan Masjid Baiturrachman itu sudah diperlebar oleh Joko Widodo yang awalnya hanya 100 M2 menjadi 400 M2. Ketika masih menjabat sebagai Walikota, Joko Widodo mempersilahkan komunitas zikir dan salawatan bernama Jamaah Muji Rasul (Jamura) untuk mengadakan salawatan di Pendopo Joglo, kompleks rumah dinasnya, di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Setelah diundang Joko Widodo, Jamura ini menjadi terkenal dan seringkali menerima undangan untuk bershalawat di berbagai tempat di Surakarta dan luar kota.[5] Hal ini juga dikisahkan oleh KH Abdul Kareem, pengasuh Pesantren al-Muayyad Surakarta, sebagai berikut:

> "Solo saat ini jadi lebih hijau *dhohiron wa bathinan*, peringatan hari besar Islam juga lebih semarak, ada Parade Hadrah setiap Rajab, Festival Sholawat, kegiatan dzikir tahlil dan barzanji semakin marak, ada setiap saat, tidak hanya di masjid-masjid tapi juga di hotel-hotel mewah. Itu semua sebab kebijakan-kebijakan Jokowi dalam membangun Solo sebagai Kota Sholawat dan juga Spirit of Java. Sholawat Barzanji yang awalnya sesuatu yang jarang, karena NU di Solo adalah minoritas, sekarang menjadi hal yang seakan harus hadir dalam setiap moment, iya, sejak Jokowi menjadikan Majelis Dzikir dan Sholawatan sebagai tamu rutin di Balai Kota setiap Rabiul Awwal. Tidak hanya itu, di Rumah Dinas beliau, Lodji Gandrung dijadikan tempat rutin taraweh ala Masjidil Haram, 23 rakaat beserta witir dan mengkhatamkan al-Qur'an".[6]

Beragama dalam Tindakan..., hlm. 59.

[5] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 72 dan74.

[6] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal,* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

Secara historis, ketika Jamura pertama kali diundang di Balai Kota, Joko Widodo memberi kenang-kenangan, dalam bungkusan yang sangat tebal, dikira isinya uang oleh para Jamaah, tetapi ternyata striker yang isinya bertuliskan, "Jamuro, dengan Bershalawat Kita Semua Selamat Dunia Akhirat." Walaupun demikian, substansi kenang-kenangan itu tetap memberikan pengaruh bagi penyebaran syi'ar Islam di Surakarta.[7]

> "Aku tertawa mendengar cerita tersebut, sebab kenang-kenangan tumpukan 5000 stiker sebesar uang kertas, dibungkus dengan rapi kertas coklat, yang dibuka di depan umum, bisa menjadikan orang menyangka itu adalah uang puluhan juta. *Jebule* cuma stiker. Jamuro, singkatan dari Jam'ah Muji Rosul, awalnya hanya majlis dzikir tahlil dan pembacaan Barjanji yang menjadi rutinan segelintir jamaah, tapi sekarang jama'ahnya puluhan ribu dari Solo dan sekitarnya. Dan Pak Jokowi adalah salah satu pembinanya".[8]

Menurut Imam Suprayogo, salawatan dan tahlilan merupakan budaya yang berkembang di kalangan santri/pesantren. Hal ini sudah pernah berkembang pada masa pemerintahan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), dimana budaya santri -dalam hal ini tradisi dzikir dan salawatan- menjadi terangkat kembali setelah lama tidak muncul ke permukaan.[9]

Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Walikota Surakarta juga tidak pernah merugikan umat Islam, bahkan selalu berkonsultasi dengan para ulama jika mau membuat kebijakan yang berhubungan dengan masalah-masalah agama, terutama pada kiai Durrachim, Mustasyar NU pada waktu itu. Oleh sebab itu, dengan adanya dukungan kebijakan Joko Widodo itu, maka saat ini kegiatan keagamaan semakin marak, misalnya

---

[7] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal,* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

[8] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal,* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

[9] Imam Suprayogo, *Memelihara Sangkar Ilmu: Refleksi Pemikiran dan Pengembangan UIN Malang*, (Malang: UIN Malang Press, 2006), hlm. 168.

peringatan hari besar Islam, parade rajab, festival salawatan, zikir, tahlilan dan barzanji. Dengan demikian, tradisi hidup dan tindakan Joko Widodo ini masuk kategori tradisi santri yang berbeda dengan tradisi abangan, dimana tradisi abangan biasanya tidak demikian itu. Sementara itu, Joko Widodo selalu rajin shalat, puasa, zakat, bahkan sekeluarga sudah haji semua, termasuk Joko Widodo. Tidak hanya itu, Joko Widodo juga rajin membaca dan menghafal al-Qur'an. Dari sisi keturunan, Joko Widodo leluhurnya berasal Kiai Abdul Jalal yang merupakan penyebar Islam di daerah Surakarta bagian utara.[10]

Dengan demikian, dapat kita nyatakan bahwa sejak masa kecil, Joko Widodo sudah dikenal sebagai seorang yang religius Islam, dan bahkan sebelum menjadi Walikota Surakarta. Keluarga Joko Widodo merupakan keluarga yang semuanya dikenal sebagai Muslim yang taat dalam melaksanakan ajaran akidah dan fiqih Islam.[11] Joko Widodo adalah seorang Muslim sejati dan sekeluarga sudah menunaikan rukun Islam yang kelima, naik haji. KH Abdul Kareem menjelaskan:

> "Islam-imanipun Jokowi miturut kulo *sae, saestu sae* (baik, benar-benar baik). Saya kenal Jokowi jauh sebelum dia menjadi walikota, ketika dia menjadi ketua Asmindo, Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia, dia punya perusahaan mebel namanya 'Rakabu'. Dia aktif mengikuti pengajian-pengajian saya. Dan dikemudian hari membentuk majlis pengajian Pengusaha Islam Muda yang namanya Bening Ati, pengasuhnya kulo kiyambak (saya sendiri), Pak Yai Nahar, (Pengasuh PP Ta'mirul Islam waktu itu) dan juga Pak Yai Rozaq, (Pengasuh PP Al Muayyad)".[12]

Joko Widodo mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Muslim yang sejati yang bercita-cita mewujudkan Islam *rahmatan lil alamin* bagi sekalian umat, yakni wawasan (fiqih) Islam yang relevan dalam membangun kehidupan Negara Kesatuan RI, memegang teguh Pancasila,

---

[10] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 63, 67, dan 83.

[11] Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan....,* hlm. 27.

[12] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

UUD-NRI 1945, dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai rahmat dari Allah swt.[13] Paham ini senafas dengan nalar fiqih ke-NU-an.

Salah satu kebijakan Joko Widodo yang senafas dan sesuai dengan nalar fiqih ke-NU-an adalah penutupan lokalisasi yang kemudian diganti dengan areal yang berguna untuk membangun ruang usaha atau bisnis bagi masyarakat. Kebijakan ini dijelaskan oleh Kiai NU Surakarta, KH Abdul Kareem sebagai berikut:

> "Contoh lain, lokalisasi Shilir yang ada di Semanggi setahun menjadi Wali Kota, ditutup oleh Pak Jokowi, dan kemudian dibangun sebuah pasar untuk menghidupkan perekonomian warga sekitar. Dan yang mengisi pasar tersebut adalah para pedagang loak yang di Banjarsari, di sana itu ada sebuah monumen yang menjadi cagar budaya, kumuh dan kotor karena ditempati oleh PKL-PKL yang tidak teratur. Dan cara memindahkannya pun, Masya Allah, sangat manusiawi, *nguwongke uwong tenan*, perwakilan PKL diundang makan di Lodji Gandrung sampai puluhan kali kalau tidak salah untuk berdiplomasi dengan para pedagang, dan ketika para pedagang menerima dipindah, mindahnya pun tidak dengan kekerasan, dipawaikan... dikirab dengan marak... *podo ditumpakke jaran, seneng tenan...podo diuwongke mbek* Wali Kotane...(proses pemindahan tidak dengan kekerasan, semua pihak merasa dihargai)."[14]

Karakter sejak kecil hingga menjadi Walikota Surakarta ternyata masih tetap terpatri di jiwa Joko Widodo, semisal sikap dan perilaku tawadu' yang nota bene banyak diajarkan oleh pesantren, yaitu bagaimana seorang murid menghormati kiai atau gurunya menjadi perhatian penting karena dari situ, akhlakul karimah ditanamkan dan dibangun. Walaupun tidak mengenyam pendidikan pesantren secara langsung, tetapi Joko Widodo memiliki sikap dan jiwa kesantrian. Ketika

---

[13] Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 27.

[14] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

menjabat Walikota Surakarta, Joko Widodo masih tetap taat dan patuh kepada nasehat-nasehat kiai sebagaimana disampaikan KH Abdul Kareem.

> "Gus Kareem, saya minta dikawal sampai saya selesai, tapi Panjenengan hanya bisa menasehati kulo atau memberi usul, tidak bisa merubah kebijakan saya dalam hal pemerintahan. Kalo dalam hal wudhu, atau sholat, atau ibadah kulo yang salah, *kulo menawi mboten nurut Jenengan, kulo monggo Jenengan sampluk*. (Kalau dalam urusan wudhu dan shalat saya salah, tolong saya diluruskan), itu perkataan Jokowi sendiri ketika dia menjadi Wali Kota Solo, begitu itu sosok Pak Jokowi Gus, tegas, semua bawahannya pasti tahu itu." Akhir cerita Pak Dul Kareem, allohu yarham".[15]

Sikap tawadu' dan hormat kepada ulama merupakan salah satu simbol tradisi santri NU atau tradisi ulama *salafus shaleh*. Menurut KH M Hasyim Asy'arie, ulama *salafus shaleh* selalu berhias dengan sikap yang terpuji, tawadu', ikhlas dan tidak sombong. Oleh sebab itu, ulama *salafus shaleh* selalu menghindari perilaku membanggakan diri, riya', dan juga menghindari tindakan yang meremehkan orang lain.[16]

Dalam kaitannya dengan organisasi NU, Joko Widodo memiliki perhatian tersendiri ketika masih menjabat Walikota Surakarta dimana ia memerintahkan untuk melengkapi struktur organisasi hingga ranting NU di Surakarta dan mendukung program kerja NU. Tidak hanya itu, bahkan ia yang menutup sendiri dua arca yang beraroma mistis dan

---

[15] Karena adanya beragam informasi mengenai keislaman Joko Widodo, Irfan Nuruddin, reporter Risalah NU, kemudian "berinisiatif untuk mendapatkan info tentang Jokowi dari sumber yang *tsiqoh*, yang tahu dan kenal dekat dengan Jokowi, dan yang aku tahu adalah KH. Abdul Kareem, seorang hafidzul Qur'an dan juga Pengasuh Pondok Pesantren Az-Zayyady, Laweyan, Solo. Untuk masyarakat Solo dan sekitarnya pasti tahu siapa beliau. Beliau juga sahabat sekaligus mentor Jokowi", Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal,* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

[16] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari...*, hlm. 27.

syirik sebagai wujud simbol penghapusan praktik mistis dan syirik. Hal ini disampaikan KH Abdul Kareem:

> "Lah ndilalah, Pak Jokowi satu tahun jadi wali kota, kulo kebetulan dados ketua PCNU Solo, jadi *gih saget* bersinergi dengan Pak Wali, dan Pak Jokowilah yang mengusulkan dan yang ngobrak-ngobrakki agar dibentuk Ranting NU di seluruh Solo, ada 51 Ranting, dan ini baru pertama kalinya PCNU Solo punya ranting, itu berkat Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga yang membuatkan 51 papan nama untuk ranting NU tersebut," cerita Pak Dul Kareem dengan antusias". [17]

> "Di antara juga, shalat Idul Fitri bisa terlaksana di Balai Kota, itu juga kebijakan Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri yang menutupi dua arca yang di depan balai kota itu, pakai kain mori, ditutup sendiri, padahal untuk hal seperti itu, *nyuruh* ajudan kan bisa." Saya jadi teringat ketika Jokowi *ngangkati* gong yang mau ditabuh oleh SBY, entah dalam pembukaan apa itu, aku lupa".[18]

Dalam hal ibadah, Joko Widodo rajin/ istiqamah dalam melaksanakan ibadah shalat wajib, dan juga ibadah shalat sunnah seperti shalat tarawih yang dilakukan secara keliling -yang dikenal dengan tarawih keliling (Tarling)- oleh Joko Widodo ketika masih menjadi Walikota Surakarta. Pada putaran pertama tanggal 25 September 2006, ia melakukan tarling bersama unsur Muspida dan masyarakat Kota Surakarta di Masjid al-Karim Kajen Danukusuman, Serengan, Surakarta/Solo.[19]

Tidak hanya itu, kita dapat mengkategorikan ke dalam ibadah zakat/ sadakah/infaq, apa yang dilakukan Joko Widodo pada waktu menjabat

---

[17] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

[18] Irfan Nuruddin, *Jokowi di Mata Kiai Lokal* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

[19] *Solopos*, 26 September 2006 hlm. 2.

ta minta
mah
stasi

ru berpikir jangka pen-
jangka panjang," ung-

giatan yang dihadiri
pida Solo Walikota
, saat ini Solo telah
satu kota tujuan in-
sangat diperhitung-
hampir 20 tahun,
nah masuk dalam
esar kota investa-
nal di antara 448
yang ada di selu-
dan sekarang So-
uduki peringkat
k tingkat Jawa
asuk dalam tiga
nunjukkan ada-
an yang pesat
di Solo," jelas-

BPH
pen

Jakart

Badan
dan Pemb
nemukan
nyimpang
luran dar
sekolah
Hal itu
didikan
byo dal
Komisi
Jakarta
ditnya
sember
ta Bam
Dia
nyimp
beber
memi
BOS,
bung
daera
belu
kola

Espos/Suharyo Haryo Bayu

TARLING PUTARAN PERTAMA–Walikota Solo Joko Widodo (*kedua dari kiri*) bersama jajaran Muspida dan masyarakat Kota Solo melakukan tarawih keliling (Tarling) putaran pertama, Senin (25/9) di Mesjid Al Karim, Kajen, Danukusuman, Serengan, Solo.

Walikota Surakarta yang memberikan gaji-nya kepada warga masyarakat yang memerlukan. Dalam sesi wawancara dengan Walikota Surakarta saat ini, FX Hadi Rudyatmo, ia menjelaskan bahwa gaji Joko Widodo selama menjadi Walikota Surakarta ditandatangani, tetapi diberikan kembali kepada warga masyarakat yang memerlukannya.[20]

[20] Hasil Wawancara dengan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, tanggal 24 Juni 2016 Jam 18 WIB di Kantor Walikota Surakarta.

(Bersama Walikota Surakarta Periode 2016-2021, tanggal 24 Juni 2016 di Kantor Walikota Surakarta)

Ibadah sedekah dan/zakat yang telah ditunaikan kepada warga masyarakat Surakarta merupakan bagian dari pelaksanaan Sunnah Nabi saw yang menjelaskan bahwa *al-sa'il hadiyah min Allah ila 'abdihi* (orang yang meminta pertolongan adalah hadiah Allah swt kepada hamba-Nya). Dengan demikian, betapa senangnya jika seorang hamba dapat meminjamkan hartanya kepada Allah melalui cara memberikan sedekah dan/zakat pada fakir-miskin, sehingga balasan bagi orang-orang yang mementingkan "ibadah ritual" -seperti ibadah shalat, puasa, zakat, dan haji, dan "ibadah sosial" -seperti membantu dan menegakkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat- dinyatakan oleh Nabi saw melalui hadis Qudsi: "Allah swt berfirman pada hari kiamat terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman: "Kamu telah mementingkan urusan akhirat dari urusan duniamu dan mementingkan ibadah kepada-Ku atas syahwatmu, maka demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku tidak menciptakan surga kecuali untukmu".[21]

Keistiqamahan Joko Widodo dalam menjalankan ibadah terus dilakukan hingga saat ini. Menurut laporan Tim Komunikasi Presiden RI, Ari Dwipayana, di tengah padatnya agenda kunjungan resmi di Belanda, Presiden Joko Widodo bersama rombongan dan masyarakat Indonesia tetap menunaikan Ibadah Salat Jumat yang dilaksanakan di Aula Kedutaan Besar Republik Indonesia, Den Haag, tanggal 22 April 2016. *"Setelah melaksanakan Salat Jumat, Presiden mengimami Salat Jamak Taqdim Qashar bersama beberapa anggota rombongan Kepresidenan"*. Kegiatan shalat Jum'at itu tampak sebagaimana foto berikut:[22]

[21] Syaikh Abdul Qadir Jailani RA, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani* yang telah diterjemahkan oleh Masrahan Ahmad dengan judul *Jalan Menuju Cinta Ilahi,* (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hlm. 60-61.

[22] *Presiden Tunaikan Shalat Jumat di KBRI Den Haag,* http://presidenri.go.id/kabar-presiden/hari-hari-presiden/presiden-tunaikan-shalat-jumat-di-kbri-den-haag.html, diakses 30 Juni 2016.

Demikian juga Presiden Joko Widodo -bersebelahan Prof Dr H Nazaruddin Umar, MA.- tampak sedang menunaikan ibadah shalat berjama'ah di Masjid Istiqlal Jakarta sebagaimana tampak gambar berikut:[23]

[23] http://presidenri.go.id/kabar-presiden/koleksi-foto.html, diakses 30 Juni 2016.

Dalam ramadhan tahun ini, Joko Widodo telah membayar zakat sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) langsung kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Bambang Sudibyo. Bahkan Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja beserta jajaran eselon I di Istana Negara, Jakarta, Kamis 29 Juni 2016. Hasil pantauan *Kompas.com* sejak pukul 09.00 WIB, para menteri dan pejabat eselon I sudah mulai berdatangan ke Istana. Sebanyak 24 petugas dari Baznas juga sudah bersiap-siap untuk menerima kedatangan para menteri dan eselon I yang hendak membayar zakat. Dalam kegiatan ini, Jokowi hadir menyaksikan langsung proses pembayaran zakat itu pada pukul 09.50 WIB.[24]

Demikian juga dalam hal shalat idul fitri, setibanya di Sumatera Barat, Joko Widodo langsung disambut takbir bersama masyarakat Sumbar.[25] Menyambut hari kemenangan umat Islam, Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016 M, Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan: "Selamat Hari Raya Idul Firi 1 Syawal 1437 H, mohon maaf lahir dan batin".[26] Kemudian, setibanya di halaman Masjid Raya Sumatera Barat Jam 07.10 Rabu 6 Juli 2016, Presiden Joko Widodo mengenakan sarung dan jas berwarna abu-abu bersama Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengenakan busana muslimah berwarna putih. Presiden dan Ibu Negara berbaur bersama ribuan warga masyarakat dalam melaksanakan shalat Idul Fitri.[27]

Selanjutnya, Joko Widodo tetap konsisten/istiqamah dengan semangat keberagamaannya dan semangat nasionalismenya yang sangat

---

[24] Menurut Bambang, langkah Jokowi yang mengumpulkan pejabat eselon I hingga menteri untuk membayar Zakat merupakan terobosan baru yang dilakukan Kepala Negara di Istana Negara dan hal ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan komitmen dan motivasi untuk menunaikan zakat. *Jokowi Kumpulkan Menteri dan Eselon I buat Bayar Zakat* http://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/10082281/jokowi.kumpulkan.menteri.dan.eselon.i.buat.bayar.zakat, diakses 4 Juli 2016.

[25] http://setkab.go.id, diakses 7 Juli 2016.

[26] http://setkab.go.id, diakses 7 Juli 2016.

[27] http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-06-PHOTO-5846.jpg, diakses 7 Juli 2016.

tinggi, sehingga dalam hal membela dan mempertahankan NKRI, ia tetap tegas untuk tidak akan berkompromi atau meminta maaf pada pihak mana pun yang pernah/berkhianat pada negara.

> "Tentang permintaan maaf terhadap PKI.....sudah saya sampaikan, tapi ini ada isu-isu lagi, ada gosip-gosip lagi, sehingga perlu saya sampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali saya akan minta maaf kepada PKI, tidak ada. Sebetulnya ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Bertemu PP Muhammadiyah saya juga sampaikan; bertemu dengan PBNU juga sudah saya sampaikan; ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dengan ulama juga sudah saya sampaikan. Termasuk saat Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, setahun yang lalu, juga sudah saya katakan. Tapi sekali lagi, ada yang menggoreng-goreng, sehingga muncul lagi gosip dan isu-isu seperti itu. Sudah jangan dengarkan. Sekali lagi tidak ada rencana untuk meminta maaf kepada PKI".[28]

Hal itu menunjukkan bahwa jiwa nasionalisme-religius yang sangat kuat dan tinggi dalam diri Joko Widodo sehingga beliau selalu bersikap arif dan bijaksana dan sekaligus selalu melihat ke depan untuk berpikir, mendengar dan bekerja keras-ikhlas untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, menurutnya, bangsa Indonesia harus mampu merajut kebersamaan dan persatuan untuk membangun bangsa menjadi bangsa yang siap berkompetisi dan siap maju.[29]

---

[28] *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Acara Buka Puasa Bersama dengan Prajurit TNI dan PNS Mabes TNI, 27 Juni 2016, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Oleh: Humas ; Diposkan pada: 27 Juni 2016; 2026 Views Kategori: Transkrip Pidato*, http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-acara-buka-puasa-bersama-dengan-prajurit-tni-dan-pns-mabes-tni-27-juni-2016-di-plaza-mabes-tni-cilangkap-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

[29] *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Acara Buka Puasa Bersama dengan Prajurit TNI dan PNS Mabes TNI, 27 Juni 2016, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Oleh: Humas ; Diposkan pada: 27 Juni 2016; 2026 Views Kategori: Transkrip Pidato*, http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-acara-buka-puasa-bersama-dengan-prajurit-tni-dan-pns-mabes-tni-27-juni-2016-di-plaza-mabes-tni-cilangkap-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

Dalam kerangka keilmuan Clifford Geertz, Joko Widodo dapat dimasukkan ke dalam kategori sebagai seorang santri sejati karena telah menjalankan tradisi pokok peribadatan Islam secara teratur, shalat, puasa, haji dan sedekah/zakat. Kelompok yang menjalankan ajaran agama/syariat Islam yang murni itu walaupun secara formal belum pernah nyantri di Pesantren, tetapi sikap, jiwa dan perilaku Joko Widodo seratus persen adalah jiwa seorang santri sejati yang ikhlas, tawadu', rajin ibadah, dan pekerja keras dalam membantu sesamanya.[30] Dengan jiwa kesantrian itu, tetap melekat jiwa nasionalismenya.

Di samping memiliki tradisi religius yang baik, semasa kecilnya Joko Widodo juga pernah merasakan pahitnya hidup karena rumahnya digusur. Rumah petak sekaligus tempat usaha kayu ayahnya di daerah Cinderejo Lor, digusur dan dijadikan pusat jasa travel. Menurut Ibundanya, semasa kecilnya, ia adalah sosok pendiam, tetapi pandai bergaul. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu mengalah ketika bermain dengan kawan-kawannya, untuk menghindari pertengkaran. Sikap ini lahir dari sifat mulia kedua orang tuanya yang selalu mengajarkan makna ikhlas dan bertanggung jawab. Ketika pergi ke sekolah, ia berjalan kaki. Pribadi ini masih menjadi karakter setelah dewasa dengan ciri khas kesederhanaannya. Sosok Joko Widodo kecil itu tetap terpatri dalam jiwanya ketika sudah dewasa dan menjadi pemimpin, sehingga ketika ia menjadi walikota sangat dicintai rakyatnya, dan dukungan moril warga Surakarta tak pupus, termasuk ketika maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Setelah lulus kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada tahun 1985, ia merantau ke Aceh dan bekerja di BUMN. Namun demikian, setelah bekerja di Aceh kemudian kembali lagi ke Surakarta dan bekerja di Perusahaan Perkayuan, CV. Roda Jati. Setelah itu, pada tahun 1998, ia berhenti bekerja di CV Roda Jati dan kemudian memulai bisnis sendiri dengan pengalaman yang dimiliki. Dengan kerja keras, tekun dan ulet, ia berhasil mengembangkan usaha bisnis perkayuan dan menjadi eksportir mebel ke luar negeri. Pada tahun 2005, Joko Widodo

[30] Clifford Geertz, *The Religion of Java: Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mashasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm. 7.

mencalonkan diri sebagai Walikota Surakarta dengan partai politik pengusung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan kemudian terpilih. Selama masa kepemimpinannya, Surakarta banyak mengalami kemajuan. Setahun setelah ia memimpin, banyak gagasan dan kebijakan progresif dilakukan dengan mengambil pelajaran dari pengembangan kota-kota di Eropa yang pernah dikunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya. Di bawah kepemimpinannya, Surakarta mengalami perubahan yang pesat di bawah branding *"Solo: The Spirit of Java"*. Adapun prestasi yang cukup progresif dari kebijakan Joko Widodo semasa menjadi Walikota salah satunya adalah kemampuannya dalam merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari tanpa gejolak yang kemudian direvitalisasi fungsinya menjadi lahan hijau terbuka, investor diharuskan memikirkan kepentingan publik, dan komunikasi yang langsung secara rutin dan terbuka disiarkan oleh televisi lokal dengan masyarakat dalam sosialisasi gagasan dan kebijakan yang hendak dilakukan.[31]

Sikap kesederhanaan dan merakyat Walikota ini tidaklah dibuat-buat. Bagi Masyarakat Surakarta, Joko Widodo adalah sosok pemimpin yang sangat peduli dengan kehidupan mereka, di lorong pasar, dan jalan-jalan, ia sering mengobrol dan mendengarkan keluh kesah rakyat tanpa jarak, serta gemar membantu warga fakir-miskin.[32] Sikap ini adalah sikap ikhlas yang luar biasa dalam mengabdi dan membangun masyarakat Surakarta, yang religius, sehingga beliau dicintai dan disenangi berkat keberhasilannya dalam membangun Surakarta, bahkan

[31] *Biografi Joko Widodo,* https://www.facebook.com/notes/indonesia-hebat/biografi-joko-widodo/463980870405272/, diakses 4 Juni 2016

[32] Apa yang dilakukan oleh Joko Widodo merupakan personifikasi dari sikap zuhud dalam tradisi Islam, yakni sikap tidak tergantung pada dunia, tetapi bukan mengisolasi diri dari urusan dunia. Sebab, Rasulullah saw dan sahabatnya sebagai figur ideal dari seorang ahli zuhud dalam kenyataanya tidak mengisolasi diri dari urusan dunia, tetapi sebaliknya justru aktif dalam menggeluti dan mengurusi urusan dunia demi kebahagian akhirat. Jadi tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan meminjam nalar Amin Syukur, Joko Widodo sebagai Walikota Surakrta dapat dinyatakan sebagai seorang zahid dalam menjalankan roda pemerintahannya, yakni bekerja aktif dan progresif untuk kemajuan masyarakat tanpa mengharapkan imbalan terutama materi dari masyarakat atau negara kecuali ridla Allah swt. M Amin Syukur, *Zuhud di Abad Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 147.

pada pemilihan Walikota 2010-2015, pasangan Joko Widodo- F.X. Hadi Rudyatmo berhasil meraih 90% suara dari total pemilih.[33] Dengan sikap kesederhanaannya, pada saat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo dilaksanakan dengan sederhana dan dibalut dengan prosesi adat dan budaya Jawa.[34]

(Foto Joko Widodo dan FX Hadi Rudyatmo)[35]

Selama menjabat Walikota Surakarta, Joko Widodo bertabur prestasi berkat gagasan dan kebijakan inovatif-progresif serta kerja kerasnya, sehingga dengan sederet prestasi itu, Joko Widodo kemudian dinobatkan menjadi Walikota terbaik ketiga dunia sebagimana dikutip dari *http://www.worldmayor.com*. Joko Widodo berada di posisi ketiga di bawah Inaki Azkuna, Wali Kota Bilbao, Spanyol. Inaki berhasil menyulap Bilbao dari kota industri menjadi kota pusat pariwisata dan seni internasional, di posisi kedua adalah Lisa Scaffidi, Walikota Perth, Australia Barat karena

[33] *Biografi Joko Widodo,* https://www.facebook.com/notes/indonesia-hebat/biografi-joko-widodo/463980870405272/, diakses 4 Juni 2016

[34] Arfi Bambani Amri, *Joko Widodo Dilantik Lagi Jadi Walikota Solo,* http://politik.news.viva.co.id/news/read/167299-joko-widodo-dilantik-lagi-jadi-bupati-solo.

[35] Arfi Bambani Amri, *Joko Widodo Dilantik Lagi Jadi Walikota Solo,* http://politik.news.viva.co.id/news/read/167299-joko-widodo-dilantik-lagi-jadi-bupati-solo.

berhasil meningkatkan profil internasional kota itu yang menjadikan kota Perth dikenal sebagai pembuat roti dan susu.[36]

Sementara itu, Jokowi selain dianggap sukses mengangkat Surakarta ke dunia internasional dan sukses dalam kampanye antikorupsi. Ada sederet prestasi yang dibangun selama menjabat Walikota Surakarta, yaitu *Pertama*, ia menjadikan Solo sebagai destinasi pariwisata. Ia mampu mengubah kota Surakarta/ Solo menjadi kota yang dikenal dunia internasional, yang sebelumnya Surakarta dikenal sebagai kota yang penuh dengan kejahatan. Selain itu, juga menjadi sebagai pusat kesenian dan kebudayaan, bahkan Solo berhasil menjadi salah satu destinasi pariwisata bagi dunia internasional dan untuk Indonesia selain Bali. *Kedua*, ia kampanye melawan korupsi. Ia dikenal sebagai pejabat berintegritas tinggi dan tidak pernah tersangkut satu pun persoalan yang ada hubungannya dengan korupsi selama menjadi Walikota. *Ketiga*, ia memberikan gajinya kepada warga yang memerlukannya. *Keempat*, kepribadian yang baik menjadi daya tarik tersendiri, sehingga terpilih menjadi Walikota terbaik ketiga dunia. Pribadi Joko Widodo memiliki nilai kualitas yang bagus, baik dari segi kualitas pribadi, kerendahan hati, ringan tangan maupun pendekatannya. *Kelima*, ia lebih banyak terjun ke lapangan atau blusukan. Hampir setiap jam kerjanya dihabiskan untuk bertemu dengan warga, meski harus becek-becekan.[37] *Keenam*, ia telah mendapatkan tiga jenis penghargaan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilannya sebagai Juara I nasional pada kategori pengelolaan sanitasi dan katgeori penataan bangunan, dan Juara II nasional pada kategori penataan ruang yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2006 di Istana Negara Jakarta, sebagaimana tergambar dalam foto berikut.[38]

---

[36] *5 Alasan Jokowi jadi wali kota terbaik ketiga dunia*, http://www.kemendagri.go.id/news/2013/01/09/5-alasan-jokowi-jadi-wali-kota-terbaik-ketiga-dunia, diakses 4 Juni 2016.

[37] *5 Alasan Jokowi jadi wali kota terbaik ketiga dunia*, http://www.kemendagri.go.id/news/2013/01/09/5-alasan-jokowi-jadi-wali-kota-terbaik-ketiga-dunia, diakses 4 Juni 2016.

[38] *Solopos*, tanggal 29 Desember 2006, hlm. 1.

Sanitasi & tata bangunan Kota Solo terbaik

Antara/Ali Anwar

PENGHARGAAN CIPTA KARYA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan bidang Cipta Karya kepada Walikota Solo Joko Widodo dalam rangka Hari Pekerjaan Umum, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/12).

Solo (Espos)

Kota Solo meraih tiga penghargaan nasional di bidang Cipta Karya atau pekerjaan umum. Dua penghargaan masing-masing juara I pada kategori pengelolaan sanitasi dan penataan bangunan serta juara II pada kategori penataan ruang. Penghargaan itu diserahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/12).

Ketika dihubungi *Espos* melalui telepon selulernya, Kamis kemarin, Jokowi mengatakan penghargaan di bidang sanitasi diberikan kepada Kota Solo, lantaran pengelolaan sanitasi di Kota Solo dinilai telah tertata baik. "Sebenarnya bagi saya, penghargaan tidak penting. Yang lebih penting lagi adalah program-program yang dilaksanakan Pemkot ini lebih bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelas Jokowi.

Ditambahkan dia, dalam hal pengelolaan sanitasi, ada beberapa program yang telah dilaksanakan. Di antaranya, instalasi pengolahan limbah rumah tangga yang ada di wilayah Solo timur dan kawasan Semanggi. Ke depannya nanti, kata dia, pengolahan sanitasi di Solo akan terus ditingkatkan dengan beberapa program-program yang telah direncanakan Pemkot.

Ditambahkan Kepala Dinas Tata Kota (DTK) Ir Budi Yulistianto, beberapa proyek yang telah dilakukan maupun sedang dilakukan memberi andil diterimanya tiga penghargaan itu.

Bersambung ke Hal 8 Kol 5

Dengan meminjam pemikiran KH Said Aqiel Siraj, Ketum PBNU, pemberdayaan dan santunan pada masyarakat fakir dan miskin yang dilakukan Joko Widodo selama menjabat sebagai Walikota merupakan simbol dari penerapan ajaran Nabi Muhammad saw yang mana selama hayatnya Nabi Muhammad saw berusaha menyantuni rakyat dan mengatasi fakir miskin dengan menggerakkan zakat, sedekah, dan bentuk-bentuk pendistribusian kekayaan lainnya. Segala bentuk monopoli kekuasaan dan kekayaan selalu dihindari oleh Nabi Muhammad saw.[39]

Selanjutnya, pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama dan berhasil menjadi pemenangnya setelah melalui dua putaran Pilgub.[40] Pada tahun 2014, Joko Widodo berpasangan dengan M Jusuf Kalla maju dalam pencalonan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang berkompetisi dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa

---

[39] KH Said Aqil Siraj, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun*, (Jakarta: LTNU, 2014), hlm. 69.

[40] *Biografi Joko Widodo,* https://www.facebook.com/notes/indonesia-hebat/biografi-joko-widodo/463980870405272/, diakses 4 Juni 2016.

dengan hasil dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK dengan partai pengusung adalah PDIP, PKB dan Partai Nasdem yang kemudian dilantik menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI hingga sekarang.

(Pelantikan Presiden RI, Ir H Joko Widodo, berpasangan dengan Wakil Presiden RI, Drs H M Jusuf Kalla)[41]

Dalam menjalankan pembangunan tata kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Joko Widodo-M Jusuf Kalla menetapkan arah kebijakan nasional yang hendak dicapai selama masa kepemimpinannya. Ia menetapkan kerangka visi pembangunan Indonesia 2014-2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Upaya mewujudkan visi Indonesia tersebut dijabarkan dalam 7 misi pembangunan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut:[42]

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

[41] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

[42] Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;

c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;

e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.[43]

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional, kemudian ditetapkan 9 agenda prioritas kerja yang hendak dicapainya, yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

[43] Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.[44]

B. PENYEBARAN AGAMA ISLAM ALA TEOLOGI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DI INDONESIA

Menurut M Quraish Shihab, agama merupakan fitrah manusia, sehingga manusia tidak akan bisa melepaskan diri dari agama karena agama adalah kebutuhan hidup manusia.[45]

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu (Q.S. al-Rum [30]: 30)

Dengan mengutip pendapat William James, M Quraish Shihab menyatakan bahwa "selama manusia masih memiliki naluri cemas dan mengharap, selama itu pula ia beragama (berhubungan dengan Tuhan)". Menurut Murtadha Mutahhari, fungsi agama dalam kehidupan manusia jika dibandingakan dengan ilmu pengetahuan, yakni agama akan menjadi penunjuk arah bagi manusia, sedangkan ilmu akan membimbing untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat, ilmu dapat memberikan kemampuan bagi manusia untuk menyesuaikan dengan lingkungannya,

[44] Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

[45] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 493.

sedang agama akan mampu mendorong lahirnya penyesuaian dengan jati dirinya, ilmu akan menjadi hiasan lahir, sedang agama akan menjadi hiasan batin, ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, sedangkan agama memberikan harapan dan dorongan jiwa, ilmu tidak jarang menimbulkan kekeringan pikiran dan bencana bagi manusia, sedangkan agama datang untuk menenangkan dan menjernihkan pikiran dan jiwa manusia.[46]

Adapun istilah "Islam" disebutkan setidaknya tiga ayat dalam al-Qur'an yang dikenal dengan *al-din* yang berarti agama, *al-din* bisa berarti "pembalasan" (*al-jaza'*), "kepatuhan" (*al-tha'a*), "ketundukan", (*al-khudu'*). Islam sebagai agama yang paling benar disebutkan dalam al-Qur'an sebagai berikut:[47]

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam (Q.S. Ali Imran [3]: 19)[48]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (Q.S. Ali Imran [3] : 85).

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

[46] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an....*, hlm. 494-495.

[47] Mu'in Sirry, *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 84-85.

[48] Terjemahan al-Qur'an merujuk pada Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI), yang diprogram oleh Achmad Fahrudin dkk ke dalam "freeware Al Quran", Versi 1.2, *Freeware © Hak cipta hanya milik Allah swt.*

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (Q.S. al-Ma'idah [5]: 3).

Secara internal agama Islam, bagaimana hubungan antara *al-din* dengan *millah* dan *syar'i*. Rasyid Ridla menjelaskan bahwa kata *din* dihubungkan dengan seluruh perintah Allah (*al-Taklif*) yang dengan perintah itu para hamba (*al-'ibad*) menundukkan diri pada Allah swt dan dalam konteks ini bermakna *millah* dan *syar'i*. Segala aturan yang diwahyukan Allah swt yang menuntut kewajiban bagi hambanya dikenal dengan *syar'i,* dan disebutkan dengan *din* jika dilihat dari sisi manusia yang berkewajiban tunduk pada Allah swt. Jika disebutkan sebagai seluruh kewajiban yang ditujukan pada hambanya, maka disebut dengan *millah*.[49] Dengan ayat tersebut juga menjadi jelas bahwa agama Islam merupakan agama yang paling benar dan sempurna yang menjadi prinsip dan pedoman hidup bagi manusia yang beriman dalam menjalani hidupnya baik yang berhubungan dengan masalah duniawi maupun masalah ukhrawi.

Secara lintas agama, bagaimana hubungan agama Islam dengan agama lain, M Quraish Shihab menyebutkan bahwa agama Islam datang tidak hanya untuk mempertahankan eksistensinya sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, dan kerukunan, tetapi juga mengakui eksistensi agama lain dan memberikan hak hidup untuk berdampingan seraya menghormati pemeluk agama lainnya sebagai kewajaran.[50]

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, (Q.S. al-An'am [6]: 108)

---

[49] Mu'in Sirry, *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 84-85.

[50] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*...., hlm. 498-499.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) (Q.S. al-Baqarah [2]: 256)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku (Q.S. al-Kafirun [109]: 6)

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pluralitas agama diakui oleh agama Islam dan Islam sebagai agama terakhir memberikan toleransi dan keterbukaan untuk hidup berdampingan dan rukun serta kerjasama dalam urusan duniawi serta tidak mengganggu rumah ibadah mereka sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an (Q.S. al-Hajj [22]: 40) karena jika Allah swt menghendakinya, niscaya semua penduduk bumi ini akan beriman dan memeluk agama Islam secara keseluruhan alias jadi satu umat saja, tetapi Allah swt tidak menghendakinya, sehingga pluralitas itu merupakan realitas sunnatullah.[51]

Selanjutnya, kata "kalam", menurut Yunahar Ilyas, berasal dari akar kata "berbicara" atau "pembicaraan", sedangkan ilmu kalam dipahami oleh para ulama kalam dengan pengertian sebagai pembicaraan dan dialog atau perdebatan yang membahas mengenai gagasan atau pemikiran akidah, misalnya dalam pembicaraan ilmu kalam dibahas mengenai status al-Qur'an, apakah ia adalah *qadim* (lama) atau *hadis* (baru).[52] Dalam Islam, ilmu kalam berkembang dengan beberapa pengertian, di antaranya; di sini disebutkan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang menjelaskan tentang masalah ketuhanan secara rasional untuk mempertahankan dan membela eksistensi aliran akidah tertentu dari akidah lainnya.[53]

---

[51] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an....*, hlm. 498-500.

[52] Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), hlm. 5

[53] TIM Yayasan Paramadina, *Al-Ghazali tentang Ilmu Kalam*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 8-9; A. Athaillah, *Rasyid Ridha': Konsep Teologi*

Secara historis, ilmu kalam lahir pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma'mun (Ibn Harun al-Rasyid, 198-218H/813-833 M) dari Daulah Abbasyiyyah dan dicetuskan oleh kaum Muktazilah. Dalam hal penamaan, Ilmu kalam memiliki beberapa nama lain di antaranya, yakni *Pertama*, ilmu tauhid[54] yang membahas masalah pengukuhan tentang kemahaesaan Allah dengan berlandaskan pada aqidah dan iman.[55] *Kedua*, ilmu ushuluddin adalah ilmu yang mengulas mengenai ajaran Islam fundamental.[56] *Ketiga*, ilmu akidah yang pada awalnya juga dikenal dengan sebutan *fiqhul akbar* yang membahas tidak hanya sebatas norma fiqih saja sebagaimana yang ada sekarang, tetapi juga membahas masalah-masalah akidah.[57] *Keempat*, teologi Islam karena membahas eksistensi Allah swt, hubungan manusia dengan Allah swt, misalnya bagaimana status kufur, iman, perbuatan Allah swt dan perbuatan manusia dalam konteks balasan di akhirat, apakah seseorang masuk surga karena amal perbuatannya ataukah karena fadlal Allah.[58]

Berdasarkan sejumlah penjelasan tersebut, kita cenderung lebih memilih pengertian yang dikemukakan oleh A Athaillah yang menjelaskan ilmu kalam atau teologi Islam sebagai ilmu yang mengkaji masalah ketuhanan yang bertujuan untuk memperkokoh keyakinan (akidah) melalui kajian rasional-empiris serta usaha-usaha menjawab kelompok lainnya berdasarkan kajian rasional-empiris.[59]

Sementara itu, secara terminologis, nalar *Ahlussunnah wal Jama'ah* bersumber dari dua akar kata: *Pertama*, kata *sunnah* berarti jalan yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah saw, sahabat-sahabat dan

---

Rasional dalam Tafsir al-Manar, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 9-10.

[54] A. Athaillah, *Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional...*, hlm. 8-9.

[55] TIM Yayasan Paramadina, *Al-Ghazali tentang Ilmu Kalam...*, hlm. 9; A. Athaillah, *Rasyid Ridha'....*, hlm. 9-10.

[56] TIM Yayasan Paramadina, *Al-Ghazali tentang Ilmu Kalam...,* hlm. 9.

[57] Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam...*, hlm. 5

[58] Harun Nasution, "Sejarah Pertumbuhan Ilmu Kalam" dalam Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 368.

[59] A. Athaillah, *Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional ...*, hlm. 9-10.

ulama *salafus shaleh*. Hal ini berpijak pada hadis Nabi: "Hendaknya kalian mengikuti sunnaku dan sunnah para pemimpin setelah aku". Kata sahabat dan ulama *salafus shaleh* merupakan bagian dari nilai-nilai normatif untuk mengikuti sunnah-sunnah orang-orang yang shaleh setelah Nabi Muhammad saw. *Kedua*, kata *jama'ah* adalah kelompok yang mengikuti sunnah Rasulullah saw, sahabat, wali dan ulama sebagai pewaris para Nabi. Oleh sebab itu, nalar *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah kelompok yang berpijak pada sunnah Nabi saw, sahabat-sahabatnya, wali dan ulama.[60] Dengan demikian, mata rantai keilmuan masih tetap bersambung hingga Nabi Muhammad saw karena pengajaran agama Islam berjalan secara historis-kronologis, mulai dari masa Nabi saw hingga masa sesudahnya, termasuk agama Islam yang disebarkan di Nusantara.

Secara historis, penyebaran agama Islam ala *Ahlussunnah wal Jamaah* di Nusantara berjalan secara damai dan akulturatif. Hal dijelaskan oleh M C Ricklefs dalam karyanya yang berjudul *A History of Modern Indonesia Since 1200,* bahwa agama Islam disebarkan oleh para ulama dan fuqaha' (ahli fiqih) di Indonesia dengan cara-cara yang damai, tidak bersifat konfliktul, tetapi berjalan dengan cara-cara yang damai dan santun melalui proses dakwah Islam yang bersifat akulturatif. Gerakan dakwah Islam akulturatif yang dilakukan para ulama dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, terutama yang sangat jelas perbedaannya adalah gerakan dakwah yang dilakukan oleh para wali/ulama di wilayah Sumatera dengan di wilayah Jawa. Para ulama menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Sumatera dengan melalui cara-cara yang cenderung formalistik tetapi dengan tetap membaur dengan budaya, misalnya gerakan dakwah Islam di Sumatera dimulai dengan pengucapan kalima syahadat, khitan dan penggunan gelar-gelar Arab atau Sultan, sedangkan gerakan dakwah Islam di Jawa dilakukan ulama melalui kegiatan-kegiatan yang dihubungkan dengan sunan yang

[60] Misrawi, *Hadaratusssyaikh KH Hasyim Asy'ari...,* hal. 106-107.

berarti *suhun;* "menghormati". Dalam hal ini digunakan bentuk pasifnya dengan arti "dihormati".[61]

Hikayat Raja-raja Pasai menjelaskan bahwa gerakan dakwah Islam di wilayah Sumatera dilakukan ulama dengan menerapkan cara akulturasi Islam yang berkarakter formalistik dan bernuansa ke-Arab-an. Dalam sejarah tersebut disebutkan, bahwa penguasa Samudera Pasai telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad saw dimana dalam mimpi tersebut Nabi saw hadir untuk memberikan *ilmu ladunni* pada penguasa tersebut, sehingga ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah dimiliki, menjadi dimiliki secara ghaib tanpa ada proses belajar secara rasional, tetapi justru belajarnya secara intuitif-supra-rasional melalui *ilmu kasyf*, yakni ilmu yang dibuka langsung Allah swt kepada siapa saja yang dikehendaki dan diridlainya. Demikian juga Nabi saw hadir dalam mimpi tersebut dengan sekaligus memberikan gelar Sultan Malik as-Shalih. Peristiwa mimpi itu menjadi titik awal untuk mendapatkan makna dan hikmah yang luar biasa bagi Sultan, karena yang sebelumnya ia belum mampu membaca al-Qur'an kemudian menjadi mampu membacanya walaupun belum pernah belajar sama sekali baca al-Qur'an. Demikian juga diberikan *karamatul awliya'* (keistimewaan kekasih Allah) dengan bentuk khitan secara ghaib pada Sultan. Dengan adanya berita istimewa tersebut, Khalifah Makkah, Syeikh Ismail, kemudian hadir untuk melantik penguasa Samudera Pasai sebagai pemimpin dengan jubah kenegaraan Arab.[62]

Hikayat *Babad Tanah Jawi* menjelaskan bahwa gerakan dakwah Islam di tanah Jawa berbeda dengan gerakan dakwah Islam di wilayah Sumatera. Di tanah Jawa, agama Islam/ syariat Islam disebarkan melalui jalur sufistik karena karakter budaya Jawa yang banyak beraroma kepercayaan dan kebatinan. Salah satu contoh kasusnya adalah masuknya Sunan Kalijaga menjadi Islam melalui peristiwa ilmu kebatinan atau kesaktian Sunan Bonang. Kisanya disebutkan, bahwa suatu ketika,

---

[61] M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008), hlm. 5-6 dan 15.

[62] M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200...,* hlm. 15-16.

Said (nama asal dari Sunan Kalijaga) merampok Sunan Bonang. Setelah dirampok, maka Sunan Bonang berubah menjadi empat orang. Setelah kejadian itu, Said kemudian merasa bersalah dan gelisah, akhirnya ia meninggalkan jalan munkar tadi dan kemudian bertapa untuk berdzikir/ beribadah untuk *taqarrub* ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah swt) sehingga menjadi waliyullah (kekasih Allah swt) yang kemudian dikenal dengan "Sunan Kalijaga." Peristiwa itu menjadi salah satu contoh dari proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Demikian juga kisah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga sendiri untuk menyebarkan agama Islam melalui proses akulturasi budaya di tanah Jawa, semisal budaya sekatenan (yang pada awalnya sebenarnya berasal "*syahadatain*") di Yogyakarta. Tradisi sekatenan ini diformulasikan oleh Sunan Kalijaga untuk melakukan Islamisasi terutama di Jawa dengan cara setiap pengunjung yang mau masuk ke arena skatenan diwajibkan membaca dua kalimah syahadat.[63]

Walisongo telah mengajarkan pada kita tradisi keberagamaan yang transformatif (*tahawwuly wa taghyiry*) yang bukan hanya sekadar mengajak masyarakat masuk Islam, tetapi juga melakukan perubahan struktur sosial masyarakat menuju tata nilai kehidupan sosial yang adil dan sejahterah berdasarkan tradisi yang baik. Tradisi keberagamaan yang diwariskan oleh Walisongo inilah yang dikenal dengan sebutan nalar (teologi) Islam ala *Ahlussunnah wal Jamaah* yang mengajarkan hidup berjamaah atau kolektifitas dan/ kebersamaan gotong royong untuk mempersatukan umat dan masyarakat melalui pandangan: *man la syaikha lahu fa asy-syaithanu syaikhun lahu* (siapa saja yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan). Dalam konsep Walisongo, kecintaan kepada bangsa dan tanah air harus menjadi etos untuk membendung ancaman luar dan menghalau paham sektarianisme dan fundamentalisme yang sedang marak akhir-akhir ini.[64]

---

[63] M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200...*, hlm.18.

[64] Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Ahmad Baso (ed), (Jakarta: LTN PBNU, 2012), hlm. 440 dan 442.

Selanjutnya, nalar *Ahlussunnah wal Jama'ah* ala NU adalah paham yang mengikuti nalar fiqih Imam Syafi'i, akidah Abu Hasan al-Asy'arie, dan tasawuf Imam al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Al-Syadzadli.[65] Secara historis, ormas NU pada awalnya bernama *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) yang dibentuk tahun 1916. Setelah itu, kemudian disusul dengan berdirinya *Taswirul Afkar* atau *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran) tahun 1918. Setelah berhasil menata pola pikir, disusul lagi dengan membentuk organisasi ekonomi, yaitu *Nahdlatut Tujjar*, (Pergerakan Kaum Sudagar). Dari *Nahdlatul Tujjar* itulah kemudian lahir *Taswirul Afkar* yang menekuni pengabdian di bidang pendidikan dan keagamaan. Adapun tujuan berdirinya ormas itu adalah untuk menjawab dan menyelesaikan keterbelakangan umat Islam baik pendidikan, budaya, agama, ekonomi dan lainnya, sedangkan secara keagamaan ormas tersebut berdiri untuk membangun kebebasan bermadzhab dalam bidang fikih dengan senantiasa melestarikan warisan lama yang baik. Dengan berbekal adanya komite Hijaz dan berbagai organisasi embrional tersebut, ulama dan kiai menyadari perlunya membentuk organisasi yang sistematis, sehingga terbentulah organisasi yang bernama Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin KH. Hasyim Asy›ari[66] sebagi Rais Akbar, yang mana organisasi ini dijalankan berdasarkan *Kitab Qanun Asasi* (prinsip dasar) dan *kitab I›tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah* sebagai dasar dan rujukan berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.[67]

---

[65] Misrawi, *Hadaratusssyaikh KH Hasyim Asy'ari...*, hal. 106-107.

[66] Pada tahun 1920-an, banyak ulama yang ingin belajar ilmu hadis pada Hasyim Asy'arie di Tebuireng, di antaranya Kiai Bangkalan, guru Hasyim. Kiai Khalil berkata, "Pada masa lalu aku adalah gurumu, tetapi saya sekarang ingin belajar pada kamu." Hasyim dengan rendah hati menjawab, "saya tidak pernah berpikir kalau kiai Khalil akan mengatakan: saya dulu, dan saya sekarang adalah murid kamu. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa dua ulama ini yang mengajarkan sikap *tawadu',* menghormati ilmu dan orang yang berilmu. Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2004), hal. 202, 205-206.

[67] *Sejarah*, http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx, diakses 3 Agustus 2014.

Nalar *Ahlussunah Wal Jama›ah* ala NU adalah nalar keislaman yang menggunakan jalan tengah antara rasionalitas murni dan nas murni (skripturalis). Oleh sebab itu, sumber rujukan ilmu-ilmu (fiqih) keislaman NU tidak hanya bersumber pada Al-Qur›an, Sunnah, tetapi akal pikiran-empirik. Nalar keilmuan inilah yang digunakan Abu Hasan Al-Asy›ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam membangun ilmu-ilmu teologi, dan ilmu-ilmu fiqih dengan empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi›i, dan Hanbali, dan Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dalam bidang tasawuf yang terintegrasi dengan syariat.[68] Menurut Gus Dur, rukun dan paham *ahlussunnah wal jamaah* ala NU dapat digambarkan sebagai berikut:

> "Andai kita tinggalkan perumusan yang sudah ada tentang *al-Usus al-tsalatsah fi I'tiqadi ahlissunnah wal Jamaah* (bertauhid mengikuti Imam al-Asy'ari dan al-Maturidi, berfiqh mengikuti salah satu madzhab empat dan berakhlaq sesuai dengan perumusan Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali) dan kita ambil patokan paling sederhana seperti yang diusulkan di atas, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan umat Islam tetap belum terwujud. Perpecahan hebat di lingkungan umat Islam diakibatkan oleh perbedaan besar dalam soal-soal luar aqidah, maka yang terjadi adalah perbedaan dalam penerapan aqidah itu sendiri dalam masalah-masalah nyata yang timbul dalam kehidupan. Kaum Ahlussunnah wal Jam'ah di lingkungan Nahdlatul Ulama menggunakan segala kelengkapan (alat) dan *istimbath al-ahkam*, termasuk *usulul al-fiqh*, *qawaid al-fiqh*, dan *hikmat al-tasry'* dalam merumuskan keputusan hukum agama mereka, sedangkan orang lain hanya menggunakan *istinbath* dari (pengambilan langsung dari dalam naqli tanpa terlalu mementingkan penggunaan alat-alat tersebut di atas dalil naqli itu) dalam mengambil keputusan. Biar bagaimanapun juga, tidak akan ada kesepakatan cara (*wasail*, metode) di kalangan kaum muslimin, dan tetap akan ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf al-ara'*) di antara mereka

[68] *Paham keagamaan*, http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,7-t,paham+keagamaan-.phpx, diakses 3 Agustus 2014.

sebagai akibat sebagaimana diperkuat oleh kaidah *ikhtilaf al-ummah rahmah*".[69]

Dengan demikian, nalar *Ahlussunnah wal Jama'ah* ala NU adalah nalar keislaman yang mengikuti jejak sunnah Nabi saw dan ijma' ulama. Dengan mengikuti ijma' ulama, nalar NU ini membedakan diri dengan nalar Islam modernis yang tidak mau mengikuti ijma' ulama.[70] Dalam nalar akidah dan fiqih NU, agama yang bersumberkan wahyu bersifat normatif-permanen, sedangkan budaya sebagai hasil perbuatan manusia terus berkembang dan berubah. Dari hasil interaksi antara norma dan budaya ini, lahirlah beragam tradisi dan budaya yang sahih, misalnya adanya tari 'seudati', cara hidup santri, budaya menghormati kyai dan sebagainya yang merupakan wawasan budaya dari agama secara langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mempersoalkan dalilnya. Demikian juga umat Islam abangan yang menjauhi 'ma lima' (mabuk, berjudi, mencuri, berbuat amoral, mengisap ganja) belum tentu akan menerima larangan itu dengan norma agama Islam, tetapi mereka akan menerima dengan alasan-alasan budaya. Oleh sebab itu, rekonsiliasi antara budaya dan agama dilakukan bukan karena kekhawatiran adanya ketegangan antara keduanya, tetapi secara fitrah kedunya memang bisa bertemu secara rasional-keimanan. Dengan demikian, akomodasi terhadap budaya-budaya tersebut bukanlah terjadi secara terpaksa, tetapi berjalan secara alami, yang mana hal ini menandai terjadinya proses pribumisasi nilai-nilai akidah atau fiqih dalam kehidupan masyarakat Indonesia.[71]

---

[69] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlusunnah wal Jamaah di Lingungan NU*, http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 20 Juni 2016; lihat juga Abdurrahman Wahid, "Kata Pengantar", dalam KH Said Aqil Siroj, *Ahlussunnah wal Jamaah: Sebuah Kritik Historis* (Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008).

[70] Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 148-149.

[71] Abdurrahman Wahid, *Islam, Budaya dan Pribumisasi*, http://www.nu.or.id/post/read/60985/pribumisasi-islam, diakses 20 Juni 2016; lihat Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan,* (Depok: Desantara, 2001).

> "Masjid Demak adalah sebuah contoh yang konkret dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada masjid tersebut diambilkan dari konsep 'Meru' dari masa pra-Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim, iman, Islam dan ihsan. Pada mulanya orang baru beriman saja, kemudian ia melaksanakan Islam ketika telah menyadari pentingnya syari'at. Barulah ia mamasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) dengan mendalami tasawuf, hakekat dan ma'rifat".[72]

Dengan adanya penerapan prinsip moderasi, akulturasi dan pribumisasi itu, nalar ke-NU-an selalu mampu mengakomodir perkembangan zaman dan tempat. Dalam realitas hidup kemanusiaan dan kenegaraan, nalar *Ahlussunnah wal Jama'ah* ala NU mengajarkan beberapa pinsip pokok; (a) taqwa pada Allah swt dan tidak mati kecuali mati dalam keadaan Islam; (b) menjalin hubungan tali persaudaraan sesama Muslim; (c) berbuat kebajikan pada sesama, kerabat dan saudara; (d) menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda; (e) menghindari perpecahan dan permusuhan antara sesama; (f) menjalin hubungan tali persaudaraan; (g) berpegang teguh pada tali agama Allah dan sunnah Nabi saw; dan (h) mengikuti paham ulama salaf seperti, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Hambali.[73]

Sejak berdirinya NU telah mewakafkan diri untuk mengusulkan, mendukung dan mempertahankan negara Pancasila. Nalar fiqih ke-NU-an yang diajarkan adalah nalar fiqih yang mengedepankan nasionalisme dan NKRI, sehingga perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan RI menjadi keniscayaan dan keharusan bagi umat Islam. Menurut Gus Dur,

---

[72] Abdurrahman Wahid, *Islam, Budaya dan Pribumisasi*, http://www.nu.or.id/post/read/60985/pribumisasi-islam, diakses 20 Juni 2016.

[73] Muhammad Hasyim Asy'arie, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*: *Analisis tentang Hadis Kematian, Tanda-tanda Kiamat dan Pemahaman tentang Sunnah dan Bid'ah*, terj. Ngabdurrohman al-Jawi, (Jakarta: LTM PBNU dan Pesantren Cianjur, 2011), hal. 25-27.

"Pada tanggal 28 Oktober 1945, Pengurus Besar (Hoofd Bestuur) Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya, mengeluarkan sebuah resolusi yang dikenal sebutan resolusi Jihad. Dalam resolusi itu, disebutkan bahwa mempertahankan Republik Indonesia (RI) adalah kewajiban kaum muslimin berjihad di negeri ini. Padahal, waktu itu, RI bukanlah negara Islam melainkan negara Pancasila. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa mendirikan negara Islam bukanlah sebuah kewajiban agama. Ini sesuai sepenuhnya dengan kenyataan bahwa Islam tidak pernah memiliki konsep resmi tentang bentuk negara, melainkan yang ada hanyalah kewajiban mendirikan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat atau orang banyak".[74]

"Pada tahun 1984, NU mengokohkan penggunaan Islam tidak sebagai ideologi negara melalui keputusan Muktamar di Situbondo, bahwa asas NU adalah Pancasila. Ini berarti perubahan pengertian asas yang semula berarti landasan kemasyarakatan menjadi landasan kenegaraan. Dengan keputusan itu, NU menegaskan sekali lagi, bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi negara, melainkan sebuah keyakinan masyarakat yang harus mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Muktamar mengakui perubahan arti ini karena paham Ahlussunnah wal Jama'ah selamanya mengutamakan kepentingan negara, yang saat itu memahami asas sebagai sebuah keyakinan negara".[75]

Sejarah pergulatan politik NU tersebut tidak lepas dari karakter dasar gerakan NU yang mengajarkan nalar atau madzhab *tawassuthiyah* yang mengalir di kalangan ulama NU, di antaranya KH Abd Wahid Hasyim, putra KH Hasyim Asy'arie. Ketika awal pendirian Negara

---

[74] Abdurrahman Wahid, *NU: Modernisasi Tumbuh dari Tradisionalisme,* [h]ttp://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme, diakses 20 Juni 2016; lihat Abdurrahman Wahid, *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, (Yogyakarta: *LKi*S, 2002).

[75] Abdurrahman Wahid, *NU: Modernisasi Tumbuh dari Tradisionalisme,* [h]ttp://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme, diakses 20 Juni 2016.

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi perdebatan yang sengit antara kelompok nasionalis dengan kelompok Muslim yang akhirnya melahirkan Piagam Jakarta, tetapi sebagian wilayah Timur tidak sepakat dengan Piagam Jakarta itu karena ada kata-kata tendensi yang mengarah pada agama tertentu, yakni agama Islam.[76] Tanggal 18 Agustus 1945 terjadi kesepakatan untuk mengubah apa yang terdapat dalam Piagam Jakarta, yang diubah oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yakni tujuh kata setelah Ketuhanan, yang semula berbunyi: "……dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya," diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebelum sidang untuk mencapai kesepakatan tersebut, Ir Muhammad Hatta mengajak rapat tim kecil terlebih dahulu yang diajak pada waktu itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, KH Abd Wahid Hasyim, Mr Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan.[77]

Dengan rumusan teologi Ahlusunnah wal Jamaah ala NU itu, kita umat Islam Indonesia terutama warga NU tidak perlu merombak rumusan dan bangunan teologi dan fiqih NU itu, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana rumusan dan nalar keilmuan NU itu dapat memberikan manfaat dan berguna untuk kemajuan umat dan bangsa Indonesia. Yang kita perlukan saat ini bukanlah mengembangkan (perumusan kembali) aqidah yang sudah *muttafaq 'alaih* selama berabad-abad, tetapi pengembangan dasar-dasar umum penerapan aqidah/teologi yang sudah diterima di lingkungan Nahdlatul Ulama yang perlu dilakukan sesuai

---

[76] Sofyan Hadi, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia", *Jurnal Millah,* Vol. X, No 2, Februari 2011, hlm. 228-229.

[77] Dalam Piagam Jakarta telah disepakati antara kelompok nasionalis; Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A A Maramis dan Muhammad Yamin, dan kelompok agamawan Muslim; KH Abdul Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, H Agus Salim, Abikusno Tjokrosurojoredaksinya dengan rumusan redaksi yang berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemluknya". Namun demikian, karena ada keberatan dari wilayah Timur yang mayoritas beragama non-Islam, Ir Muhammad Hatta mengajak rembuk kembali dengan KH A Wahid Hasyim dan tokoh Muslim lainnya. Faisal Ismail, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, (Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI, 2001), hlm. 21, 51, 55 dan 60-65; Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*..., hlm. 39-40.

dengan kaidah "*al-ashlu baqau ma kana ala makana*" dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[78]

Nalar teologi *Ahlusunnah wal Jamaah* ala NU itu dapat digambarkan dengan meminjam pemikiran KH Hasyim Muzadi sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana tata hubungan agama dengan negara yang menyelamatkan keduanya. Agama dilindungi negara dan negara teraspirasi oleh agama, tetapi keduanya tetap berada dalam bingkai nasionalisme dan bingkai pluralitas. *Kedua*, moderasi di bidang ekonomi adalah terwujudnya pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pembangunan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan ekonomi. *Ketiga*, moderasi di bidang hukum adalah penegakkan hukum secara legal formal yang dilakukan tidak boleh menghilangkan substansi hukum formal, sehingga penegakkan hukum dapat melahirkan kemaslahatan masyarakat. *Ketiga*, moderasi di bidang sosial adalah mengatur identitas masing-masing individu/kelompok dan tidak membenturkan identitas satu dengan yang lain, sehingga paham moderasi dapat mendukung pro eksistensi maupun multi eksistensi. Dengan kata lain, masing-masing orang memiliki eksitensi sesuai keyakinan agama dan kepribadiannya tanpa harus bentrok antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan zero eksistensi dimana eksistensi semua kemudian dilebur atau eksistensi itu dibiarkan berbenturan antara satu dengan yang lainnya. *Keempat*, moderasi di bidang budaya adalah bagaimana eksistensi budaya Indonesia dapat melahirkan karakter bangsa, dan mempertahankan serta mengangkat harkat martabat Indonesia di hadapan bangsa lainnya. *Kelima*, moderasi di bidang politik adalah nalar keilmuan yang mengajarkan hubungan keseimbangan antara perwakilan dengan amanat (rakyat), sehingga di sini seimbang antara keterwakilan dengan amanah yang diberikan rakyat. Bangunan keilmuan dan budaya bangsa tersebut luar biasa luhur dan tidak dimiliki oleh bangsa lainnya, tetapi sayangnya kita sebagai

[78] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlusunnah wal Jamaah di Lingkungan NU*, http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 20 Juni 2016.

bangsa yang besar sering meremehkannya lalu diganti dengan konsep luar negeri yang jauh lebih murah, untuk tidak mengatakan murahan.[79]

Adapun kerangka umum nalar teologi moderasi Ahlusunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama dalam menjawab masalah-masalah kehidupan masa kini harus memasukan unsur-unsur berikut. *Pertama*, pandangan bahwa seluruh aspek hidup ini adalah bernilai ibadah (*al-hayatu 'ibadatun kulluha*), sehingga kita bertugas memelihara kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk memelihara kelestarian sumber-sumber alam, memelihara sesama manusia dari segala bentuk pelanggaran dan penindasan serta meningkatkan kecerdasan bangsa. *Kedua*, kejujuran hidup merupakan sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menuju hidup yang adil dan sejahtera melalui sikap dan tindakan yang memperlakukan orang lain seperti pada diri sendiri dan mengakui hak mayoritas bangsa untuk menentukan arah kehidupan bersama. *Ketiga*, *akhlakul karimah*, budi pekerti yang luhur dengan memberikan contoh hidup yang mulia dan menata sistem kehidupan bangsa dan negara berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran.[80]

Dalam tata kehidupan ke-Indonesia-an, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa negara-negara Eropa meminta kepada Indonesia agar senantiasa memelihara dan mengembangkan nalar (teologi) Islam yang moderat, toleran dan damai. Setelah mendarat dari kunjungannya ke Eropa, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 23 April 2016, ia menyampaikan bahwa negara-negara Eropa memberikan "apresiasi dan harapan yang tinggi terhadap peran Indonesia untuk perdamaian melalui pengembangan Islam yang moderat, demokratis, dan toleran".[81]

---

[79] http://www.beritasatu.com/nasional/322254-hasyim-muzadi-masyarakat-dunia-kehilangan-rasa-spiritualisme.html, diakses 20 Juni 2016.

[80] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlusunnah wal Jamaah di Lingkungan NU*, http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 20 Juni 2016.

[81] *Jokowi: Eropa Minta Indonesia Kembangkan Islam yang Moderat* , https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/23/078765300/jokowi-eropa-minta-indonesia-kembangkan-islam-yang-moderat, diakses 30 Juni 2016.

(Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato di Parlemen Kerajaan Inggris di Royal Robing Room, Istana Westminster, London, Inggris, 19 April 2016.)[82]

Dalam pandangan Presiden Joko Widodo, nilai-nilai (teologi) Islam yang damai, moderat, demokratis, dan toleran menjadi senjata diplomatis bagi Indonesia, sehingga Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia bisa menjadi contoh cara hidup beragama yang damai, toleran dan moderat. Dengan adanya deskripsi iklim kehidupan sosial dan politik-keagamaan yang baik, maka dengan ini Eropa kemudian menaruh kepercayaan besar pada sistem perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, ada sejumlah program kerjasama yang sudah ditandatangani selama kunjungan Joko Widodo ke Eropa dalam sejumlah bidang, seperti bidang pendidikan kejuruan dengan Jerman, kerja sama ekonomi kreatif dengan Inggris, dan kerja sama bidang maritim dan pengelolaan air dengan Belanda.[83]

---

[82] *Jokowi: Eropa Minta Indonesia Kembangkan Islam yang Moderat* , https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/23/078765300/jokowi-eropa-minta-indonesia-kembangkan-islam-yang-moderat, diakses 30 Juni 2016.

[83] *Jokowi: Eropa Minta Indonesia Kembangkan Islam yang Moderat* , https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/23/078765300/jokowi-eropa-minta-indonesia-kembangkan-islam-yang-moderat, diakses 30 Juni 2016.

Dengan meminjam bahasa Hasan Hanafi, program kerjasama sama Joko Widodo itu merupakan salah satu bagian dari pergeseran nalar teologi Islam dari nalar teologi abstrak-spekulatif kepada nalar teologi Islam humanis-empiris, yakni program kerja itu sebagai ibadah yang tidak hanya berjalan dalam tataran akidah murni dan konsep saja, tetapi sudah berusaha mencapai tataran humanis-empiris karena bertujuan memenuhi kebutuhan hidup riil masyarakat dan bangsa Indonesia. Jika program-program kerjasama dengan sejumlah negara itu dapat terwujud, maka itulah yang dikenal dengan nalar teologi Islam humanis-empiris, yakni program kerja seorang Muslim yang lahir dari akidah dan keyakinan agamanya sebagai ibadah untuk memberikan suasana kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat dan bangsa tanpa terkecuali. Ibadah sosial ini lebih besar pahalanya daripada pahala ibadah personal seperti shalat sunnah karena memberikan suasana dan iklim kerja yang kondusif bagi para pencari nafkah dan kerja untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kesejahteraan umat dan bangsa. Oleh sebab itu, kerja-kerja membangun iklim ekonomi yang kondusif itu bagi para pemimpin adalah wajib hukumnya, jika tidak dilakukan, maka akan berdosa.

Oleh sebab itu, tugas pemimpin baik umara' maupun ulama bukan hanya mengarahkan umat agar berpegang pada nalar teologi Islam yang toleran-moderat dan berwawasan kebangsaan, tetapi juga harus mampu memberikan dukungan dan iklim kerja yang kondusif dan adil, sebab memenuhi kebutuhan pokok ekonomi merupakan bagian dari *asasul khams* dalam ajaran fiqih, yakni pada bagian *hifdz al-mal* (menjamin dan menjaga stabilitas ekonomi).

C. NALAR TEOLOGI AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH SEBAGAI LANDASAN IJTIHAD FIQIH KE-NU-AN

Dalam hal ini, kita harus berjuang menegakkan ajaran akidah Islam yang bersifat plural sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan toleransi dan moderasi dalam menjalankan ajaran syariat/Islam yang berbeda dengan syariat agama lainnya. Basis ajaran

Islam dalam sejarahnya yang berpijak pada aqidah Nabi Muhammad saw berkembang dalam suasana yang toleran dan moderat.[84]

> "Diceritakan dalam hadits bahwa ketika utusan Nasrani (segolongan Kristen) dari Najran yang sedang berkunjung kepada Nabi untuk membicarakan hal-hal yang sedang mereka perselisihkan hendak melakukan shalatnya, Nabi mengajak mereka untuk beribadat di musalah di rumahnya sendiri, meskipun perbedaan pendapat tentang aqidah tak dapat diatasi".[85]

Namun demikian, citra teologi Islam yang humanis, toleran dan moderat itu seolah tenggelam ke dalam sekat-sekat primordialisme yang mewarnai capaian pemikiran akidah Islam pada masa pertengahan dan bahkan masa kini. Apalagi produk-produk akidah/fiqih zaman itu menjadi barometer tersendiri yang dikemudian hari telah menyihir kesadaran umat Islam masa kini. Oleh sebab itu, akidah Islam masa lalu yang seringkali dipahami sebagai *blue print* (cetak biru) yang serba paripurna perlu ditinjau ulang.[86]

Sikap toleransi dan humanis Islam yang diajarkan Nabi Muhammad saw tersebut tidak bertahan lama. Sejarah kerajaan-kerajaan Islam pasca pemerintahan empat khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, kemudian memperaktekkan paham *millet* yang di dalamnya mereka mengikuti syariat. Adapun praktik-praktik pelaksanaan akidah Islam seperti gaya Pakistan, Sudan, dan Saudi Arabia belum memberikan profil ideal yang bisa dijadikan contoh dalam membangun negara karena belum mampu mencontoh dan menggali substansi ajaran Nabi Muhammad saw sebagai insan kamil (manusia sempurna) sebagai citra Allah yang sermpura di muka bumi.[87]

---

[84] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 282.

[85] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, ...*, hlm. 282.

[86] Nurcholish Madjid dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2004), hlm. 127.

[87] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan...*, hlm. 282.

Dalam konsepsi Abdul Karim al-Jili, Rasulullah sebagai citra Allah sawt yang sempurna yang dikenal dengan "insan kamil" telah mampu mewujudkan citra Allah secara utuh dalam membangun kehidupan umat manusia baik secara spiritual maupun material. Menurut al-Jili, Nabi Muhammad saw merupakan personifikasi insal kamil yang paling paripurna di antara Nabi lainnya yang hanya sempurna, sehingga Rasulullah saw patut menjadi suri tauladan yang harus diikuti dan dicontoh oleh umat manusia.[88]

Dalam konteks kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia, terutama bagi umat Islam, Joko Widodo, dalam *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015* menyatakan bahwa kita harus berusaha bersama dengan santiasa mengajak umat Islam di seluruh tanah air untuk bersama-sama melindungi bangsa dan negara kita dari semua bentuk ancaman radikalisme dan terorisme. Paham keagamaan Islam yang radikal harus dihindari dan dijauhi dari umat Islam Indonesia, dan sekaligus kita harus selalu berupaya mengajak umat Islam menuju jalan akidah Islam yang toleran, moderat dan santun.[89] Demikian dinyatakan Joko Widodo:

> "Mari kita sadarkan saudara-saudara kita yang memilih jalan yang salah dalam berdakwah dan mensyiarkan agama Islam. Semoga Allah SWT mengabulkan niat baik dan cita-cita mulia kita bersama, dengan petunjuk dan ridho-Nya kepada bangsa Indonesia dalam membangun hari esok yang lebih baik".[90]

---

[88] Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabi oleh al-Jili*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 122-123; bandingkan dengan Abdul Karim al-Jili, *al-Insan al-Kamil fi Ma'rifat al-Awahir wa al-Awail*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).

[89] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[90] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Degan demikian, kita harus mampu membangun nalar keilmuan, sikap dan tindakan yang mencerminkan sikap Rasulullah saw, baik dalam berpikir, berbicara, maupun bertindak. Dalam bekerja, kita harus jujur, amanah, cerdas, dan selalu menyampaikan kebenaran. Dalam berdakwah, kita harus mampu mewujudkan perilaku umat Islam yang santun, toleran, dan menjahui tindakan kekerasan, dengan senantiasa meneladani ajaran Nabi Muhammad saw.[91]

Oleh sebab itu, kita harus menghindari firqah/aliran yang kurang atau tidak selamat serta sekaligus mengikuti firqah yang selamat dengan senantiasa mengajak firqah yang kurang atau tidak selamat menuju ajaran akidah Islam sebenarnya yang toleran, moderat dan rukun. Dalam memperhatikan masalah perkembangan aliran-aliran keagamaan yang sesat, Presiden Joko Widodo bersama Mensesneg Pratikno serta Menteri Agama berdialog dengan Majlis Ulama Indonesia di Istana Merdeka Jakarta sebagaimana dikutip dari hasil foto Antara berikut.[92]

[91] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[92] *MUI: Ada 300 Lebih Aliran Sesat di Indonesia,* http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160121180616-12-105893/mui-ada-300-lebih-aliran-sesat-di-indonesia/, diakses 8 Juni 2016.

MUI mencatat ada sekitar 300 aliran kepercayaan yang tergolong sesat hingga saat ini, tetapi aliran/golongan itu biasa muncul dan menghilang sewaktu-waktu. Aliran sesat pada dasarnya sudah terpantau sejak 1995, namun aliran sesat itu muncul dan menghilang dengan nama yang berbeda-bebada. Salah satu aliran sesat yang terpantau MUI saat ini adalah Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan salah satu agama yang diakui di Indonesia, yakni agama Islam. Organisasi tersebut juga diketahui hasil metamorfosis dari *Al-Qiyadah Al-Islamiyah* yang sudah dilarang kegiatannya sejak 2007 oleh Jaksa Agung.[93]

Pada saat membuka Munas MUI IX di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa, 25 Agustus 2015, Presiden RI Joko Widodo meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga dan merawat nalar Islam yang moderat, yakni di tengah, di jalan yang lurus dan tidak ekstrem serta umat tidak keluar dari rel ajarannya yang benar. Konsep Islam *Wasathiyyah* dalam tema Musyawarah Nasional IX MUI ini diharapkan menjadi muara pemikiran berbagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam, bahkan tema tersebut ibarat muara yang sesungguhnya bisa dijadikan tempat untuk bertemunya banyak sungai, terutama dua sungai besar, yaitu "Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan".[94] Lebih lanjut, Joko Widodo memberikan arahan agar mengembangkan nalar akidah (teologi) Islam Indonesia yang moderat, toleran, dan inklusif.

> "Menurut Jokowi, sungai-sungai itu bertemu pada sebuah muara yang memiliki tujuan akhir mulia, yakni Islam untuk Indonesia yang berkeadilan dan berkeadaban dan Islam yang *rahmatan lil alamin*. "Sehingga sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim,

---

[93] *MUI: Ada 300 Lebih Aliran Sesat di Indonesia,* http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160121180616-12-105893/mui-ada-300-lebih-aliran-sesat-di-indonesia/, diakses 8 Juni 2016.

[94] *Jokowi Minta MUI Jadi Muara Pemikiran Semua Ormas Islam,* https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694909/jokowi-minta-mui-jadi-muara-pemikiran-semua-ormas-islam, diakses 6 Juni 2016.

> MUI adalah pelopor dalam mewujudkan umat tengahan yang moderat, toleran, inklusif, rukun dan damai," ujarnya. Jokowi menyebut MUI sebagai tenda besar sejati bagi umat Islam yang majemuk, baik yang bergabung di ormas maupun tidak. "Kemajemukan umat Islam tersebut menjadikan dialog intra-umat Islam menjadi sangat penting demi tegaknya umat tengahan dan ukhuwah Islamiyah," kata dia".[95]

Dengan demikian, arah kebijakan Joko Widodo dalam bidang agama terutama (teologi) Islam adalah "*Islam moderat di Tanah Air, Islam yang tidak ekstrem, Islam yang penuh kelapangdadaan*". Nalar teologi Islam yang moderat, toleran dan inklusif ini menjadi landasan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kokoh dan terbebas dari ekstrimisme dan radikalisme yang sering sesat-menyesatkan.[96]

Dengan meminjam bahasa Haryatmoko, kebijakan Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi pemimpin yang mempunyai integritas publik, yakni menjamin perdamaian dan toleransi, membuka wacana sosial dan politik kreatif-inkulsif serta menjamin rasa aman, dan rasa saling percaya, sehingga politik bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk kesejahteraan bersama.[97] Dalam bahasa F X Hadi Rudyatmo, Walikota Surakarta Periode 2016-2021, pemimpin hadir bukan untuk menguasai, tetapi hadir untuk mengabdi dan melayani masyarakat-bangsa, yang mana hal ini telah menjadi prinsip dan komitmen Joko Widodo bersama dirinya sejak pemilihan kepala daerah pertama hingga periode kedua, bahkan menurutnya hingga kini sebagai Presiden RI.[98]

---

[95] *Jokowi Minta MUI Jadi Muara Pemikiran Semua Ormas Islam,* https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694909/jokowi-minta-mui-jadi-muara-pemikiran-semua-ormas-islam, diakses 6 Juni 2016.

[96] *Jokowi Minta MUI Jadi Muara Pemikiran Semua Ormas Islam,* https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694909/jokowi-minta-mui-jadi-muara-pemikiran-semua-ormas-islam, diakses 6 Juni 2016.

[97] Haryatmoko, *Etika Publik untuk Pejabat Publik dan Politisi*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 84-85.

[98] Hasil Wawancara dengan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, tanggal 24 Juni 2016 Jam 18 WIB di Kantor Walikota Surakarta.

Adapun kriteria firqah/golongan yang sesat/tidak selamat dan firqah yang selamat dapat digambarkan dalam rumusan Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan 10 Kriteria Aliran Sesat yang dikemukakan dalam penutupan Rapat Kerja Nasional MUI di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa 6 November 2007, yaitu *Pertama*, mengingkari salah satu dari rukun iman yang berjumlah enam, semisal mengingkari qada' dan qadar Allah swt. *Kedua*, meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah, semisal menyakini kalau imam atau tokohnya terbebas dari dosa. *Ketiga*, meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an, seperti meyakini ada nabi dan rasul baru setelah Nabi Muhammad saw atau meyakin adanya wahyu yang turun setelah Rasulullah/Nabi Muhammad wafat. *Keempat*, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Qur'an. *Kelima*, melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan Hadist/Sunnah Rasulullah. *Ketujuh*, menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. *Kedelapan*, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. *Kesembilan*, mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu. *Kesepuluh*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya, dan misalnya juga kita tidak boleh shalat di masjid mereka jika tidak sealiran.[99] Berdasarkan 10 kriteria tersebut, golongan/firqah yang selamat dengan golongan yang kurang/tidak selamat dapat kita gambarkan sebagai berikut:

1. Firqah Yang Selamat

Menurut Yahya Ismail, dalam karyanya *Manaj al-Sunnah fi al-'Alaqah baina al-Hakim wa al-Mahkum* menjelaskan bahwa dalam aliran teologi Islam muncul sejumlah firqah yang merupakan kelompok perselisihan dalam sejarah umat Islam yang berhubungan dengan masalah akidah dan politik. Menurut al-Syahrastani, firqah adalah hal

[99] Mimin, *10 Kriteria Aliran Sesat MUI yang Perlu Diwaspadai Pengurus Rohis*, http://rohis.itsar.org/10-kriteria-aliran-sesat-mui-yang-perlu-diwaspadai-pengurus-rohis/, diakses 8 Juni 2016.

yang menyendiri di dalam salah satu di antara akidah yang empat, yaitu masalah seputar (a) sifat Allah dan keesaannya, (b) takdir dan adil, (c) janji dan ancaman, asma dan hukum-hukum, (d) pendengaran, akal, kenabian dan imamah.[100]

Al-Syahrastani menyebutkan dengan menyitir hadis Nabi saw bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, tetapi hanya satu yang selamat, yang lainnya binasa. Siapakah itu, yakni orang-orang yang mengikuti sunnah dan jama'ah. Kemudian apakah yang dimaksud dengan sunnah dan jamaah, yakni "apa yang aku dan para sahabatku praktikkan.[101]

Menurut Yahya Ismail, faktor-faktor yang menimbulkan firqah adalah sebagai berikut: (a) cenderung berpendapat menurut pikiran sendiri, (b) tajamnya perselisihan dalam bidang fiqih, (c) emosi yang berlebihan, (d) kekosongan jiwa para penguasa dan rakyat dari agama, (e) perselisihan dalam masalah asma, sifat, dan perbuatan Allah, (f) hilangnya peran penguasa dalam menjaga agama, umat dan beredarnya rasa dengki di kalangan umat, (g) berani menetapkan kedudukan sahabat Nabi saw tanpa dasar yang kuat, (h) rendahnya kesetiaan dan bai'at kepada pemerintahan yang sah, (i) mementingkan diri sendiri dan rakus dalam segala hal, (j) hilangnya kebenaran dan unggulnya hawa nafsu, dan (k) sedikitnya ilmu yang dimiliki umat, bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa yang ada dalam firqah bukanlah orang-orang kafir tetapi orang-orang mukmin yang tersesat dan berdosa. Perpecahan pada

---

[100] Kata *al-farq* berarti *al-tasyattut* atau *al-tafkik* (berpecah belah). *Al-farq* adalah lawan kata dari *al-jam'u* (kumpulan atau himpunan), *al-farq* juga ada yang mengartikn sebagai "bagian dari yang terpisah. Menurut Ibn Hajar, al-firqah adalah sebagai kontradiksi yang menimbulkan fitnah dan pertikaian. Menurut Diyauddin Rais dalam karyanya *Nadlariyat Siyasah Islamiyah* menyebutkan bahwa istilah ahlussunnah tidak dikenal sebelum Hasan Basri tetapi mereka menyebutnya dengan nama ahlul hadis, tabi'in, para ulama, atau *qurra'*. Yahya Ismail, *Manaj al-Sunnah fi al-'Alaqah baina al-Hakim wa al-Mahkum* yang sudah diterjemahkan dengan judul *"Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspekif Sunnah,* terj. Andi Suherman, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 107-108.

[101] Muhammad Ibn Abd al-Karim Ahmad al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal: Aliran-Aliran Teologi dalam Islam*, terj. Syuaidi Asy'ari, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 33.

kondisi tertentu memang harus ada kalau memang ketaatan harus ada. Seseorang perlu bergabung dengan jamaah atau firqah yang selamat.[102]

Nalar teologi Islam masa lalu terlihat masih sibuk mengulas masalah yang abstrak yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah aktual kehidupan manusia, sedangkan nalar teologi Islam sesungguhnya merupakan pondasi dasar dari ilmu agama Islam, sehingga ilmu teologi Islam seharusnya mampu menjawab masalah-masalah aktual secara rasional dan aktual, bukan secara mistis yang tidak ada pertanggungjawaban rasionalnya. Sebab, ilmu teologi sesungguhnya ilmu yang rasional karena berasal dari hasil ijtihad ulama mengenai nalar keilmuan tentang esistensi Tuhan, eksistensi alam seisinya, dan hubungan antara keduanya. Demikian juga ilmu teologi banyak mengulas masalah konflik aliran yang tujuannya untuk memperkuat masing-masing kelompok, bukan mencari titik temu. Karena nalar teologi Islam masing-masing kelompok bertahan dengan pendapatnya yang bersifat ekslusif, sehingga kelompok-kelompok/aliran-aliran itu seringkali melahirkan sejumlah konflik ideologis yang akhirnya merembet pada konflik fisik di kalangan aliran-aliran itu, bahkan juga dapat menimbulkan pembangkangan (*bughat*) pada negara. Tindakan eksklusifisme itulah sesungguhnya yang menjadi faktor utama munculnya paham-paham radikal, ekslusif dan keras sehingga cenderung melahirkan pandangan-pandangan negatif terhadap kelompok yang tidak sealiran. Problem teologis yang hanya membahas masalah-masalah yang abstrak atau konflik antar kelmpok itulah yang dikritik oleh Muhammad Abid al-Jabiri (ilmuwan Timur Tengah) dengan lantang. Bagi al-Jabiri, nalar teologi Islam tidak akan mampu menyelesaikan masalah-masalah riil umat manusia jika hanya mengulas masalah-masalah yang abstrak dan konflik tersebut. Oleh sebab itu, para ahli teologi Islam harus menggeser nalar keilmuan teologi Islam yang dianutnya dari nalar tekstual (*al-`aql al-bayânî*) atau yang oleh Mohamed Arkoun dimasukkan ke dalam *al-*

[102]Ismail, *Manaj al-Sunnah.....,* hlm. 109-119.

`aql al-lâhûtî kepada nalar kontekstual[103] yang dapat dikenal dengan nalar teologi Islam humanis-transformatif.

Dalam masalah kehendak dan kekuasaan Tuhan, Muktazilah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki kehendak dan kekuasaan yang terbatas, Ia tidak bisa bebas secara lepas, tetapi dibatasi oleh kendak dan kekuasannya sendiri, yaitu Allah telah memberikan kebebasan dalam memilih atau melakukan tidakannya, sehingga tidak bisa mengubah sehendaknya aturan-aturan yang telah diciptakan oleh Allah. Demikian juga Allah berkewajiban memenuhi janji yang telah dibuat oleh-Nya pada manusia mengenai balasan amal kebaikan dan keburukan, Ia tidak bisa bebas sekehendaknya memberikan pahala pada yang dikehendaki, tetapi harus berasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya. Sementara itu, teologi Asy'ariyah berkeyakinan bahwa Allah memiliki kehendak dan kekuasaan mutlak yang tidak bisa dibatasi oleh siapa pun dan apa pun yang ada. Allah swt bebas berkehendak pada manusia, bahkan pada orang yang baik-pun, Allah tidak wajib memasukkan ke surga, dan Allah juga tidak bersalah jika memasukkannya ke neraka.[104]

Demikian juga dalam masalah keadilan Tuhan, Muktazilah dan Asy'ariah berpendapat bahwa Tuhan adalah Mahaadil. Namun, ketika menjelaskan konsep keadilan Tuhan tersebut, mereka berbeda pendapat. Muktazilah memahami keadilan dari sisi manusia. Bagi Muktazilah, keadilan itu berhubungan dengan hak manusia yang berarti bahwa keadilan merupakan pemberian hak pada yang berhak. Oleh sebab itu, Allah wajib memberikan pahala atau balasan yang baik pada orang yang baik, dan juga wajib menghukum orang yang jahat. Sementara itu, Asy'ariyah memandang keadilan dari sudut pandang kehendak dan kekuasaan mutlak Allah swt, sehingga Allah swt memiliki otoritas mutlak yang tidak dibatasi oleh aturan apa pun. Dengan demikian, keadilan Allah swt bermakna kebebasan Allah swt untuk melakukan segala hal

[103]Lihat Mohamed Arkoun, *al-Fikr al-Ushûlî wa Istihâlah al-Ta'shîl* (Beirut: Dar al-Saqi, 2002), hlm. 308; lihat juga Islah Gusmian, "Metodologi Penafsiran Emansipatoris: Ilmu Sosial sebagai Alat Analisis Teks Kitab Suci" dalam *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, (Temanggung: STAINU Press, 2008), hlm. 5.

[104]A. Athaillah, *Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional .....*, hlm. 245.

terhadap makhluk-Nya tanpa pembatasan apa pun. Oleh sebab itu, Allah swt berhak memasukkan orang jahat ke surga atau memasukkan orang yang baik ke neraka.[105]

Selanjutnya, nalar teologi *Ahlussunnah wal Jamaah* ala NU memiliki dasar keyakinan dan keilmuan sebagai berikut, yakni bidang akidah mengikuti ajaran imam Asy'ari dan Al-Maturidi, bidng fiqih mengikuti salah satu madzhab empat, dan bidang akhlak/tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali. Kaum *Ahlussunnah wal Jam'ah* ala NU telah menggunakan segala kelengkapan (alat) dan *istimbath al-ahkam*, termasuk *usulul al-fiqh*, *qawaid al-fiqh*, dan *hikmat al-tasry'* dalam merumuskan ilmu-ilmu agama Islam. Kalau kita membahas pengembangan ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah*, maka caranya bukanlah dengan mengembangkan (perumusan kembali) aqidah yang sudah *muttafaq 'alaih* selama berabad-abad, tetapi dengan mengembangkan dasar-dasar umum penerapan teologi Islam yang sudah diterima secara umum di lingkungan Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, *al-usus al-tsalatsah* yang sudah menjadi konsesus itu tetap pada keasliannya, sesuai dengan kaidah "*al-ashlu baqau ma kana ala makana*", tetapi kita harus selalu kreatif untuk mengembangkan nalar teologi tersebut dari orientasi teologi lama kepada orientasi teologi baru yang humanis-transformatif.[106]

Dalam kehidupan dewasa ini, kita harus melakukan reorientasi nalar teologi *ahlussunnah wal jamaah* dengan tetap berpijak pada bangunan dasar teologi yang ada, tetapi dengan pengembangan pemahaman dan penerapannya. Pengembangan teologi yang sudah ada tanpa mengubah teologi itu sendiri dapat dirumuskan sebagai upaya pengembangan ajaran

---

[105]A. Athaillah, *Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional...,* hlm. 291-292; Harun Nasution "Pandangan Islam tentang Keadilan" dan " Kaum Muktazilah dan Pandangan Rasinalnya", dalam dalam Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 66-69 dan 132.

[106] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Lingkungan NU,* http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 8 Juni 2016.

(*ta'lim*) *Ahlussunnah wal Jamaah*. Pengembangan ajaran itu mengambil bentuk dua kerja utama berikut.[107]

> "*Pertama*, pengenalan pertumbuhan kesejarahan ajaran *Ahlussunnah wal Jamaah* yang meliputi pengkajian kembali sejarah pertumbuhan *Ahlussunnah wal Jamaah* dan dasar-dasar umum penerapannya di berbagai negara dan bangsa, semenjak masa lalu dan sekarang. Ini meliputi pengkajian wilayah (*dirasat al-aqalim al-muslimah*/*area studies of Islamic people*), dari Afrika Barat hingga ke Oceania dan Suriname. Kekhususan dasar umum masing-masing wilayah harus dipelajari secara teliti, untuk memungkinkan pengenalan mendalam dan terperinci atas praktik-praktik ke-*ahlussunnah*-an. *Kedua*, perumusan dasar-dasar umum kehidupan bermasyarakat di kalangan *Ahlussunnah wal Jamaah*, meliputi bidang-bidang berikut; (1) pandangan tentang tempat manusia dalam kehidupan alam; (2) pandangan tentang ilmu, teknologi, dan pengetahuan; (3) pandangan ekonomis tentang pengaturan kehidupan masyarakat; (4) pandangan tentang hubungan individu (*syakhs*) dan masyarakat (*mujtama'*); (5) pandangan tentang tradisi dan penyegarannya melalui kelembagaan hukum, pendidikan, politik dan budaya; (6) pandangan tentang cara-cara pengembangan masyarakat; dan (7) asas-asas penerapan ajaran agama dalam kehidupan".[108]

Dengan adanya pemahaman nalar teologi *Ahlussunnah wal Jamaah* ala NU ini, umat Islam akan semakin kokoh dan aktual dalam memahami dan mengamalkannya baik sebagai sikap hidup, pandangan hiup, dan sistem nilai (*manhaj al-qiyam al-mutsuliyyah*) yang secara khusus akan memberikan kebulatan gambaran watak hidup *Ahlussunnah wal Jamaah* (*syakhsyiyatu ma tamassaka bi aqidati Ahlissunnah wal Jamaah*).

---

[107] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Lingkungan NU,* http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 8 Juni 2016.

[108] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Lingkungan NU,* http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 8 Juni 2016.

Adapun langkah konkrit penerapan teologi dalam tataran empiris itu dapat dilakukan dalam dua pendekatan: *Pertama*, pendekatan untuk penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui kerja nyata, baik di bidang pertanian, perburuhan, industri kecil, kesehatan masyarakat, pendidikan keterampilan, dan seterusnya. *Kedua*, organisasi atau arah yang ditempuh oleh strategi ormas (NU) harus fokus pada pelayanan kebutuhan pokok mayoritas bangsa, yaitu memberdayakan kaum fakir-miskin dan yang berpenghasilan rendah. Inilah nalar teologi NU, yakni nalar teologi humanis-transformatif yang bekerja bukan hanya untuk membahas hal-hal asbtrak-spekulatif saja tetapi juga sekaligus bekerja nyata dalam membenahi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi seperti masalah kemiskinan, pengangguran, PHK, narkoba, kejahatan seksual, dll.[109]

Senada dengan nalar teologi NU, Hasan Hanafi juga mengemukakan pendapatnya, bahwa nalar teologi Islam seharusnya ketika mengulas masalah keadilan, maka keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan Tuhan yang sudah menjadi nalar kehidupan umat manusia, bukan hanya berbicara keadilan Tuhan saja tetapi sudah menjelma menjadi keadilan yang dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia, ketika mengulas masalah kasih sayang, maka yang dimaksudkan adalah kasih sayang Tuhan yang sudah menjelma menjadi perbuatan manusia, sehingga selalu mengasihi dan menyayangi manusia, dan ketika mengulas masalah-masalah kebebasan, maka kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan Tuhan yang sudah menjelma menjadi iklim kehidupan yang memberikan kebebasan bagi kehidupan umat beragama dan partisipasi publik.[110] Oleh sebab itu, Hasan Hanafi mengemukakan bahwa teologi Islam tidak hanya bermakna pembahasan wacana tentang proyeksi cita-cita manusia yang

[109] Abdurrahman Wahid, *Pengembangan Ahlussunnah wal Jamaah di Lingkungan NU,* http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 8 Juni 2016.

[110] Hasan Hanafi, *Min al-Aqidah ila al-Tsaurah,* Jilid I (Beirut: Maktabah Madbulah, t.th), hlm. 20-24; Islah Gusmian, "Metodologi Penafsiran Emansipatoris: Ilmu Sosial sebagai Alat Analisis Teks Kitab Suci" dalam *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, (Temanggung: STAINU Press, 2008), hlm. 5.

berdasarkan pada Tuhan, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai sebuah revolusi sosial-politik dan ekonomi untuk membebaskan kaum fakir-miskin dari ketertindasan dan kemelaratannya menuju pada keadilan dan kesejahteraan kemakmuran, baik lahir maupun batin.[111]

Dengan meminjam nalar teologi Hasan Hanafi (Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Kairo, Mesir), kebijakan Joko Widodo sebagai Walikota Surakarta pada waktu itu yang membantu dan melayani para pedagang kecil dengan pendekatan yang humanis dan kekeluargaan merupakan profil dari upaya menggeser oreintasi teologi spekulatif menjadi teologi humanis-transformatif. Dengan kata lain, Joko Widodo telah berusaha menerjemahkan nilai-nilai kasih sayang Tuhan yang mulia menjadi perilaku manusia, dan kebijkan Joko Widodo dalam membantu dan mambangun ekonomi yang berpihak pada kaum du'afa' senafas dengan nalar teologi Gus Dur.

Lebih lanjut, kini Presiden Joko Widodo menandaskan bahwa kita harus mampu memaknai pesan-pesan (teologis) Islam dari peringatan kelahirannya Nabi Muhammad saw sebagai upaya untuk meningkatkan peran umat Islam menuju Islam yang *rahmatan lilalamin*, Islam yang memberi rahmat bagi semesta alam, membangun tatanan peradaban Islam yang peduli, menebarkan perdamaian, keadilan dan toleransi dengan senantiasa tidak hanya mengejar kesalehan pribadi saja, tapi juga kesalehan sosial, membantu dan memberdayakan umat dengan mengutamakan yang lemah dan miskin untuk mencapai kehidupan harmonis, serta bergotong royong untuk menghindarkan potensi-potensi gesekan sosial yang kemudian dapat menyebabkan ambruknya jembatan kebangsaan.[112]

> "Sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik, umat yang senantiasa membangun

[111] E Kusnadiningrat, *Hassan Hanafi, Islam, Oposisi, dan Revolusi*, http://islamlib.com/tokoh/hassan-hanafi/, diakses 4 Juli 2016.

[112] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

> solidaritas sosial di antara sesama manusia, umat yang tidak gampang dilanda kebencian, tidak gampang dilanda kedengkian, umat yang berkehendak merangkul, dan bukan memukul eksistensi kelompok lain".[113]

Pesan-pesan nalar teologi humanis-transformatif itu sudah pernah diterapkan ketika Joko Widodo menjabat sebagai Walikota Surakarta. Dalam melakukan proses pemindahan pedagang, ia senantiasa memperhatikan hak-hak dan kewajiban para pedagang pasar, bahkan kepindahan para pedagang pasar bukan dengan Satpol Pamong Praja, tetapi justru para pedagang itulah yang dengan sukarela, yang mana Walikota juga diarak oleh para pedagang pasar. Kebijakan Joko Widodo ini sesungguhnya juga merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan Tuhan dalam tataran kehidupan praktis kemanusiaan. Dengan kata lain, kalau Tuhan memerintahkan penegakkan keadilan pada siapa pun termasuk kaum du'afa', maka umat manusia sebagai khalifah di muka bumi harus mampu menjadikan pedoman perilakunya dalam menegakkan keadilan di muka bumi.

Inilah simbol pergeseran paradigma dari pemindahan pedagang secara elitis menggunakan pengamanan Satpol PP pada pemindahan yang merakyat dengan kesadaran. Kebijakan Joko Widodo ini juga dapat dikategorikan sebagai kebijakan teologis yang membumi dalam nalar teologi Gus Dur. Dalam bahasa Syaikh Abdul Qadir Jailani RA dapat disebutkan dalam karyanya, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani* dengan sebutan "pewaris Nabi saw, sahabat dan tabi'in" karena telah melanjutkan kerja-kerja keimanan dan amal shaleh dari Nabi saw, para sahabat, dan tabi'in untuk membantu dan membangun umat manusia menuju kesejahteraannya, baik lahir maupun batin.

> "Banyak di antara mereka yang menduduki kedudukan Nabi saw, yakni melanjutkan kerja beliau, melanjutkan kerja para sahabat dan tabi'in. Mereka mengamalkan apa yang telah

[113] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

disampaikan oleh Nabi, sahabat, maupun tabi'in, sehingga Nabi saw akan senang kepada mereka, bahkan Allah swt membanggakan mereka kepada para malaikat. Kesibukan mereka bukan sekadar bekerja, tetapi mereka sibuk membangun manusia.... Sesungguhnya kamu bekerja untuk saling memberi dan menerima".[114]

Dengan kata lain, kita dapat menyebutkan bahwa apa yang dikerjakan Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari kerja iman dan amal shaleh sebagaimana dilakukan dalam sunnah para nabi yang selalu bekerja untuk membangun kesejahteraan umat, baik lahir maupun batin, sehingga layak disematkan kepadanya gelar, "*al-'ulama' waratsatul anbiya' ".* Di sisi Allah swt, siapa pun yang beriman akan mendapat kehormatan dengan menjadi *ahlul jannah* (penghuni surga) jika mengerjakan amal ibadah dan amal shaleh serta membelanjakan hartanya di jalan Allah swt (*fi sabilillah*), termasuk membangun kesejahteraan manusia, sebagaimana berfirman Allah:[115]

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka (Q.S. at-Taubah [9]: 111).

Selanjutnya, gagasan dan kebijakan yang dikeluarkan Joko Widodo yang mengutamakan rakyat kecil dan kaum lemah menjadi tema sentral dalam kebijakan pembangunan masyarakat di Kota Surakarta. Jika dianalisis dari pemikiran Hassan Hanafi dan nalar teologi ke-NU-an, gagasan dan kebijakan Joko Widodo itu sesunggunya memiliki spirit yang senafas dalam membuat kebijakan yang membumi dan merakyat, bahkan praktik beragama yang diwujudkan dengan membangun tatanan

[114] Syaikh Abdul Qadir Jailani RA, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani* yang telah diterjemahkan oleh Masrahan Ahmad dengan judul *Jalan Menuju Cinta Ilahi,* (Yogyakarta: Citra Media, 2007), hlm. 96.

[115] Syaikh Abdul Qadir Jailani RA, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani...,* hlm. 57.

yang baik tidak hanya mencerminkan sebagai wujud teologi humanis tetapi juga sekaligus masuk kategori transformatif karena sistemnya yang dibenahi. Ketika masih menjabat sebagai Walikota Surakarta dalam hal penggunaan anggaran daerah, Joko Widodo membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat sebagaimana dinyatakan oleh Joko Widodo berikut:

> "APBD itu harus sebanyak-banyaknya digunakan untuk masyarakat, utamanya masyarakat kurang mampu,» kata Jokowi, yang mengenakan jas hitam saat diwawancarai BBC Indonesia. Namun menurutnya, itu tidak berarti pihaknya menolak kehadiran investor, yang disebutnya «dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi kota». «Tetapi jangan investasi yang menggerogoti ekonomi kecil,» tandasnya. «Misalnya (investasi berupa pendirian) supermarket, yang nanti bisa berbenturan dengan pasar tradisional». «Saya tidak anti mal. Tetapi kita sebagai pemerintah kota harus mengendalikan mereka, membatasi mereka».[116]

(Foto Walikota Surakarta, Tahun 2011).[117]

[116] *Memimpin Solo ala Jokowi*, dimuat 4 Agustus 2011 - 15:02 WIB, dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.shtml

[117] *Memimpin Solo ala Jokowi*, dimuat 4 Agustus 2011 - 15:02 WIB, dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.shtml

Pemindahan para pedagang dengan kesadarannya sendiri itu menjadi simbol juga dari transformasi dari ajaran *fiqhul akbar* (yang di dalamnya tercakup teologi Islam) yang mengajarkan kebebasan bagi umat manusia kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan dalam pemindahan pedagang pasar dan penataan sistem pasar di Surakarta yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Walikota pada waktu itu sebagai wujud nyata implementasi teologi Islam. Inilah yang dimaksud dengan nalar teologi Islam humanis-transformatif yang diharapkan mampu membangun tatanan yang baik, bukan hanya mengulas masalah aliran atau kelompok mana yang selamat atau celaka di akhirat saja, tetapi juga untuk memberikan perhatian pada upaya bagaimana manusia itu diberikan kasih sayang, diberikan keadilan, dan diberikan kebebasan dalam sistem pasar yang baik, yang sesungguhnya disadari atau tidak, Joko Widodo pada waktu itu telah mempraktikkan nalar teologi Islam humanis-transformatif.

Sementara itu, nalar teologi Islam lama masih fokus mengulas masalah-masalah ketuhanan dengan melupakan masalah riil yang dihadapi manusia, sehingga tidak mampu mendeteksi adanya hubungan sebab akibat dalam kehidupan manusia. Salah satu contohnya fenomena kemiskinan yang terjadi di kalangan umat seringkali dikaitkan dengan kehendak dan takdir Allah.[118] Nalar teologi Islam spekulatif inilah yang hendak diubah oleh Hasan Hanafi menjadi nalar teologi Islam humanis-transformatif, sehingga sebagai ilmu dasar agama Islam (ushuluddin) dapat menjadi pedoman dalam membangun pemikiran dan tindakan konkrit di masyarakat dan negara.

Kebijakan Joko Widodo sebagai Walikota pada waktu itu yang memperhatikan dan memberdayakan kaum lemah termasuk para pedagang pasar jika dipoterat dari nalar teologi Islam humanis-transformatif itu, maka ia merupakan bagian dari pergeseran nalar keilmuan teologi Islam klasik pada nalar teologi Islam humanis-transformatif. Inilah nalar teologi Islam yang benar, bukan nalar teologi Islam ekslusif dan elitis yang hanya tahu menyalahkan tetapi tidak mau

[118] Saiful Muzani (ed.), *Islam Rasional...*, hlm. 122.

berdiskusi dan hanya mengaku paling benar, tetapi tidak pernah berbuat nyata dalam kehidupan manusia.

Nalar teologi Islam humanis-transformatif itu sesungguhnya adalah teologi yang diajarkan Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan umat Islam, dimana Nabi saw selalu mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam secara doktrinal dan aktual. Namun yang jadi objek kajian ini bukan norma agama Islam yang baku, yang tidak bisa diubah. Sebab, jika norma ubudiyah diubah, maka akan menjadi sesat, misalnya shalat dluhur 4 rakaat diubah menjadi 2 rakaat, maka menurut ajaran fiqih itu jelas akan dinilai sesat, bahkan bisa dikenai hukuman pidana karena sudah menodai paham agama Islam yang baku. Sedangkan unsur aktual teologi yang diajarkan oleh Nabi saw sangat memerlukan pemikiran dan kajian manusia untuk dikembangkan, demikian juga dinamika ilmu fiqih dan ilmu tasawuf. Adapun unsur utama bahan dasar teologi tidak bisa diubah, misalnya eksistensi Tuhan sudah pasti ada, tetapi bagaimana memahami sifat Tuhan, maka para ulama teologi berbeda-beda pendapat.

Jika ada nalar teologi/akidah sesat yang tidak sesuai dengan nalar keagamaan Islam yang baku, maka pemerintah RI menyiapkan instrumen hukum, yakni Kejaksaan setempat akan mencari dan mendalami bukti-bukti penodaan agama yang meresahkan masyarakat untuk ditindaklanjuti secara hukum. Fatwa MUI tahun 1975 menyerukan semua umat Islam yang tersesat untuk kembali kepada ajaran (teologi) Islam yang benar dan kepada umat Islam yang berfaham *ahlussunnah wal jamaah* agar meningkatkan kewaspadaan dari paham selainnya, seperti syi'ah. Fatwa MUI tahun 1975 mengeluarkan fatwa larangan untuk mengikuti paham/nalar keagamaan yang menyimpang atau tersesat.[119] Dengan demikian, nalar *ahlussunnah wal jamaah* ini dinilai yang paling sesuai dan cocok untuk berkembang dan dikembang di Indonesia karena nalar teologi Islam ini mampu mencontoh dan merepsentasikan suri tauladan Nabi Muhammad saw secara baik dan sempurna dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

[119] KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

Apa yang dilakukan oleh Joko Widodo semasa menjadi Walikota sesungguhnya juga seirama dan sama dengan nalar keilmuan Presiden RI Keempat, KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang juga berusaha menanamkan nalar teologi Islam yang berbasis pada nas agama (al-Qur'an dan Sunnah) dengan mendeskripsikan kondisi riil umat Islam tanpa harus membenturkan antara satu aliran teologi dengan aliran lainnya. Menurut Gus Dur, Islam sebagai akidah umat Islam tidak cukup hanya menjadi ekspresi keimanan saja, tetapi harus menjadi pendorong untuk membangun umat manusia secara rukun, adil, sejahterah dan makmur. Dengan meminjam istilah Gus Dur, teologi Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi diri manusia dalam menjawab keanyataan faktual sebagaimana gagasan dan kebijakan Joko Widodo yang telah mempraktikannya seperti proses pemindahan pedagang pasar secara sukarela menjadi salah satu bagian penting dari implementasi sifat teologi Islam ini, yakni kasih sayang yang dimiliki Tuhan menyembul di hati sanubari Joko Widodo yang kemudian menjadi kebijakan yang rasional dan realistis sehingga terbangun tatanan pasar yang baik dan kondusif. Sementara itu, menurut Gus Dur, nalar teologi *ahlusunnah wal jamaah* ala NU itu akan berbeda sama sekali dengan aliran keagamaan Islam yang selalu menyuarakan pendirian negara Islam, tetapi dengan cara-cara anarkis-radikal walaupun menggunakan simbol-simbol baju Islam. Aliran radikal yang terakhir ini terjadi karena mereka sebagai kaum agamawan tidak mengerti substansi ajaran teologi Islam, sehingga tidak mengerti bagaimana menerapkan teologi Islam secara benar dan baik di masyarakat. Bahkan aliran keagamaan atau teologi Islam yang terakhir ini –yang dikenal dengan aliran radikal-ekstrim- menyuarakan pendirian khilafah atau negara Islam. Sebuah profil negara yang belum pernah ada contoh profilnya yang sudah terbukti menyejahterakan rakyatnya dan membangun hidup yang rukun, adil, sejahterah dan makmur sebagaimana gambaran al-Qur'an, *baldatun thayyibatun*.[120]

[120]Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 366-367; Ahmad Baso, *Islam Liberal Sebagai Ideologi*, Gerbang, Vol. 06, No 03. Pebruari-April 2000, hlm. 126-127.

Adapun salah satu contoh nalar teologi Islam humanis-transformatif dari kebijakan Joko Widodo adalah ketika beliau hendak memberantas dengan sangat serius mengenai tindak pencurian ikan yang kerap dilakukan kapal asing di perairan Indonesia. Beliau mengatakan; "Kami serius (memberantas pencurian ikan)," tegas Presiden kepada wartawan saat berada di KMP Portlink III ketika beilau sedang menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten, ke Bakauheni, Lampung, pada hari Selasa tanggal 25 November 2014. Kebijakan ini adalah sebagai wujud memerangi *illegal fishing* yang akan menguras sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.[121]

Dalam hal pemberantasan *illegal fishing,* Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan pada *Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal 29 Juni 2016,* di Istana Negara, Jakarta sebagai berikut: *Pertama*, ia memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Satgas 115 dalam menangkap kapal ilegal, kapal asing ilegal, dan dalam menjaga sumber daya laut Indonesia. Oleh sebab itu, kekompakan dan kerja sama yang sangat baik di lapangan antar aparat, antar lembaga dan antar instansi harus dijaga untuk menangkal kerugian negara akibat *illegal fishing* . "Angka yang sangat besar sekali karena memang *illegal fishing* yang lalu lalang di perairan kita, di laut kita bertahun-tahun tidak pernah mereka dijamah oleh hukum kita. Berapa setiap hari lalu lalang *illegal fishing* sebelumnya? 7.000, paling sedikit 7.000 kapal". *Kedua*, ia menyampaikan bahwa setelah memberantas *illegal fishing*, yang paling penting saat ini adalah menyiapkan industri perikanan dan kemaritiman agar semuanya terjaga, menyiapkan infrastruktur, budaya dan pertahanan kemaritiman agar sumber daya alam laut bisa dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.[122] Lebih lanjut, ia menyampaikan

[121] http://news.okezone.com/read/2014/11/25/340/1070300/jokowi-kembali-ancam-kapal-asing-pencuri-ikan.

[122] *Pengarahan Presiden Joko Widodo Pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Rabu, 29 Juni 2016, di Istana Negara, Jakarta,* Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **29 Juni 2016; 983 Views.** Kategori: Transkrip Pidato, http://setkab.go.id/pengarahan-presiden-joko-widodo-pada-rapat-koordinasi-nasional-satuan-tugas-pemberantasan-penangkapan-ikan-

perlunya koordinasi yang intensif antar lembaga dan konsistensi/ keistiqamahan dalam bekerja ini.

> "Jangan berjalan sendiri-sendiri. Perkuat kerja sama, perkuat sinergi antar lembaga mulai dari pusat sampai ke daerah, baik bupati, baik wali kota, di atasnya baik gubernur, agar kalau ada hal-hal yang memang perlu diinformasikan, perlu disampaikan kepada kita, sampaikan secepat-cepatnya. Hal seperti ini jangan pernah berhenti. Konsistensi itu akan menjadikan nanti kebiasaan-kebiasaan baik kita dan nanti akan menjadi sebuah budaya kerja kita. Dan saya juga tidak ingin lagi mendengar ada lembaga/oknum aparat yang menjadi *backing* yang mem-*back up illegal fishing*, tidak ada lagi. Termasuk di dalamnya masyarakat juga harus diedukasi untuk tidak mau berkolaborasi dengan pelaku *illegal fishing* dan menjadi bagian dari upaya pemberantasan aksi *illegal fishing*....Terakhir, tadi sudah saya sampaikan bahwa penanganan *illegal fishing* di negara kita sudah mulai menunjukkan hasilnya. Stok ikan laut yang meningkat ini harus dimanfaatkan. Sehingga perencanaan yang baik, persiapan yang baik dalam rangka membangun industri perikanan kita harus disiapkan betul sehingga meningkatkan kesejahteraan nelayan, memenuhi kebutuhan konsumsi ikan lokal, dan juga bisa mendatangkan devisa bagi ekspor kita".[123]

Pembangunan perekonomian sektor kelautan atau perikanan harus dilakukan dengan teknologi modern, yakni melangkah ke industri perikanan yang modern, pengolahan, pengalengan agar bisa memberikan nilai tambah yang besar bagi negara Indonesia terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, seluruh instansi terkait harus saling berkoordinasi untuk menyiapkan infrastukturnya karena investasi

---

secara-ilegal-satgas-115-rabu-29-juni-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

[123] *Pengarahan Presiden Joko Widodo Pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Rabu, 29 Juni 2016, di Istana Negara, Jakarta,* Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **29 Juni 2016; 983 Views.** Kategori: Transkrip Pidato, http://setkab.go.id/pengarahan-presiden-joko-widodo-pada-rapat-koordinasi-nasional-satuan-tugas-pemberantasan-penangkapan-ikan-secara-ilegal-satgas-115-rabu-29-juni-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

untuk pengembangan industri perikanan akan luar biasa besar karena adanya permintaan dari luar sangat banyak, permintaan untuk ekspor juga sangat banyak.[124]

Apa yang bisa dipahami dari kebijakan Joko Widodo itu adalah bahwa mengentaskan kemiskinan nelayan tidak cukup hanya membantu dana/alat tangkap ikan dan keterampilan nelayan dalam menangkap ikan, tetapi juga harus mampu memotong akar masalah sistemik yang menyebabkan nelayan termiskinkan, sehingga harus memerangi *illegal fishing* dan juga yang terbaru hendak dimasukkan di program tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) sehingga dengan demikian, ikan bisa ditangkap oleh nelayan karena ikannya ada, tidak habis dicuri, dan biaya operasional yang sering dicekik oleh rentenir nantinya bisa diselesaikan dengan akses keuangan daerah itu. Kebijakan ini merupakan penerapan etika tanggung jawab E Levinas yang muncul dari Joko Widodo karena hadir langsung di lapangan untuk menyaksikan langsung kondisi laut Indonesia yang sering dicuri Ikannya dan kondisi nelayan Indonesia.

Substansi kebijakan ini adalah bahwa kemiskinan bagi nelayan janganlah disebutkan sebagai takdir atau kesalahan personal, tetapi juga harus dibangun infrastruktur yang mampu menyokong lahirnya kesejahteraan, yakni iklim usaha yang sehat dan sistem ekonomi Indonesia yang kuat dengan adanya penangkalan terhadap pencuri ikan, maka pendapatan kaum nelayan diharapkan bisa meningkat dan perusahaan nasional yang bergerak di bidang perikanan juga diharapkan akan semakin berkembang. Inilah yang dimaksud dengan penerapan nalar teologi Islam transformatif yang dibangun untuk menjawab kelemahan teologi Islam Jabariah yang menyalahkan Tuhan dan teologi Islam qadariyah atau Muktazilah yang sering menyalahkan individu manusianya. Kebijakan Joko Widodo itu masuk kategori implementasi

---

[124] *Pengarahan Presiden Joko Widodo Pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Rabu, 29 Juni 2016, di Istana Negara, Jakarta,* Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **29 Juni 2016; 983 Views.** Kategori: Transkrip Pidato, http://setkab.go.id/pengarahan-presiden-joko-widodo-pada-rapat-koordinasi-nasional-satuan-tugas-pemberantasan-penangkapan-ikan-secara-ilegal-satgas-115-rabu-29-juni-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

dari nalar teologi Islam humanis transformatif. Demikian juga teori kritis berbicara bukan hanya menjelaskan masalah ketimpangan sosial yang dinarasikan, tetapi juga sekaligus membangun kesadaran kritis di kalangan nelayan untuk menghindari rentenir, tidak berkolaborasi dengan *illegal fishing*, dan sekaligus membangun sistem yang baik dan kondusif bagi kaum nelayan.

Dalam nalar fiqih ke-NU-an yang diyakini membumi, gagasan dan kebijakan Joko Widodo merupakan implementasi pergeseran dari nalar fiqih teosentris-ideologis menjadi nalar fiqih humanis-transformatif. Orientasi berpikir inilah yang diterapkan dalam menyusun nalar fiqih ke-NU-an dimana ia tidak hanya mementingkan terlaksananya aspek bunyi literal nas hukum agama (al-Qur'an dan Sunnah), tetapi juga memperhatikan substansi dari kepentingan nas hukum agama yang memiliki tujuan mulia untuk mendukung terciptanya kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an yang menekankan pentingnya memelihara kemaslahatan manusia disebutkan oleh Gus Dur di antaranya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

> Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu (Q.S. al-Nisa', 4: 135).

Ayat ini dipahami Gus Dur, bahwa orang-orang beriman hendaknya menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi bagi Tuhan walaupun mengenai dirinya sendiri, orang tua dan kerabat. Dengan meminjam bahasa Gus Dur, kebijakan Joko Widodo mengenai *illegal fishing* merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan di Indonesia dan juga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai saksi bagi Tuhan untuk menegakkan keadilan, sehingga harapan kemakmuran dan kesejahteraan

bangsa Indonesia di masa depan dapat terwujud dengan optimal. Demikian juga untuk menjaga dan memelihara kepentingan manusia, maka perlu dijaga persamaan hak dan status di antara sesama manusia sebagaimana ketentuan al-Qur'an:[125]

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah [2]: 42).

Demikian juga kebijakan Joko Widodo ketika merelokasi para pedagang pasar itu pada dasarnya sudah sesuai dengan prinsip ayat tersebut dimana merelokasi untuk mewujudkan kemajuan pasar rakyat itu adalah tujuan yang mulia dan baik sesuai dengan amanah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang kemudian diikuti dengan kebijakan yang baik dengan melakukan proses musyawarah dan pendekatan yang baik dan humanis serta membumi. Inilah yang dimaksud oleh Gus Dur dari tafsir ayat itu bahwa mempunyai tujuan baik untuk menerapkan nilai-nilai fiqih itu tidak cukup jika tidak diimbangi dengan metode penerapan yang baik.

Lebih lanjut, praktik hidup membaur dan membudaya yang ditunjukkan dalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta merupakan kebijakan yang visioner dan rasional. Selama ini kalau ada penertiban PKL selalu dengan pendekatan legalistik dan penertiban dari satpol PP, sedangkan Joko Widodo membuat kebijakan sebalikya dengan membuat kebijakan relokasi PKL dengan cara kemanusiaan, bahkan ada kirab perpindahan PKL dari lokasi lama kepada lokasi baru. Ia juga mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang isinya mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern, yakni harus berjarak minimal 500 meter. Untuk melestarikan pasar tradisional, ia juga membuat kebijakan-kebijakan inovatif.[126] Relokasi pedagang pasar

---

[125] KH Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului*.., hlm. 184-185.

[126] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan*..., hlm. 214-215.

yang dilakukan oleh Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari upaya penerapan ajaran teologi Islam yang mengajarkan beberapa nilai dasar sebagaimana diatur dalam al-Qur'an, yaitu *Pertama*, prinsip kesetaraan di antara sesama. Ini dapat dilihat dari ayat yang menjelaskan asas dan dasar penciptaan manusia.[127]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

> Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. (Q.S. al-Hujurat, 49:13).

*A*yat ini menggambarkan status dan derajat manusia yang setara dan ketaqwaan itulah yang menjadi ukurannya sehingga perilaku manusia seharusnya mencerminkan sikap humanis dan membumi bukan melangit atau elitis. Itulah maksud dari berpegang pada ajaran teologi Islam yang selamat, yakni teologi yang mengajarkan kedamaian dan kemoderatan dan keberpihakan kepada kaum lemah.[128]

Kedua, golongan yang selamat dan diridlai Allah sebagaimana digambarkan dalam ayat berikut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

> Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (Q.S. Ali Imron, 3:85)

Ketiga, jika mereka bisa meminggirkan duri yang ada di tengah jalan agar tidak terkena injak seseorang merupakan pahala besar. Demikian

[127] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..*, hlm. 185.

[128] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..*, hlm. 185.

juga dengan berbuat baik dan membangun masyarakat agar sejahterah dan makmur dengan tindakan nyata adalah tindakan mulia daripada hanya sekadar berbicara tanpa ada buktinya.[129] Hal ini dijelaskan dalam ayat berikut:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: «Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?» (Q.S. al-Fushshilat, 41: 33).

Keempat, ayat ini mengulas bagaimana umat Islam mengajarkan ajaran teologi Islam dengan cara-cara yang bijaksana dan ramah, bukan dengan cara-cara kekerasan. Demikian juga kebijakan pemimpin yang tepat adalah kebijakan yang memiliki tujuan baik dan sekaligus menggunakan cara-cara yang baik dalam menyampaikan kebijakan tersebut sebagaimana dilakukan Joko Widodo sewaktu menjadi Walikota di Surakarta. Hal ini sesuai dengan firman Allah berikut.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma›ruf dan mencegah dari yang munkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S. Ali Imran, 3: 104).

Ayat ini mengajarkan nilai-nilai humansime yang harus diintegrasikan ke dalam aksi nyata untuk membangun kehidupan umat manusia atau bangsa yang sejahterah dan makmur. Kebijakan Joko Widodo tidak ada yang diskriminatif, bahkan pada non-Muslim. Kebijakan ini sesuai dengan ajaran teologi Islam dalam Surat al-Fushshilat

[129] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..,* hlm. 186.

ayat 33 dan surat Ali Imran ayat 104 yang menyatakan bahwa semua amal perbuatan akan mendapatkan balasan bagi siapa saja baik bagi muslim maupun non Muslim, bahkan *terlihat amal kebaikan (fi'lu al-khair) dapat diberikan kepada siapa saja termasuk orang non-Muslim.*[130]

Nalar teologi Islam humanis-transformatif yang menjadi arus utama nalar teologi ke-NU-an in juga dapat dilihat dalam kebijakan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Walikota Surakarta yang tidak pernah memperlakukan diskriminatif terhadap para pemeluk agama yang ada di Surakarta, bahkan ia telah berhasil membangun hubungan yang harmonis dan rukun di antara sesama pemeluk agama di walayah Surakarta. Hal ini diakui dan dinyatakan oleh Joko Widodo sebagaimana dikutip BBC:

> "Di sini komplit, ada fundamentalis Kristen, ada fundamentalis Islam, fundamentalis kejawen juga masih ada...," ungkapnya, terus-terang. Sebagai pemimpin, Jokowi mengaku memberi akses yang sama kepada semua warganya- demi memajukan Solo. "Jangan sampai tersumbat komunikasi, jangan sampai saluran ide gagasan tidak bisa tersampaikan kepada kita," katanya. Menurutnya, komunikasi dengan siapapun sangat diperlukan. "Dan itu sangat mendinginkan psikologi kota." "Kota ini akan menjadi dingin, sejuk, kalau komunikasi baik dengan siapapun," tandas Jokowi yang dikenal lebih sering menemui warganya ketimbang duduk di belakang meja kerjanya".[131]

Dalam nalar teologi ke-NU-an yang humanis-transformatif, gagasan dan kebijakan Joko Widodo mencerminkan nalar teologi tersebut, bahkan jika ditelaah ke akar sejarah lahirnya negera. Gagasan dan kebijakan Joko Widodo memiliki relevansi yang erat dengan gagasan para pendiri negara seperti KH A Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosujoso, KH A Kahar Muzakkir, H Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, dan Teuku Mohammad Hassan yang mempunyai spirit dan semangat

---

[130] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..,* hlm. 186.

[131] *Memimpin Solo ala Jokowi*, dimuat 4 Agustus 2011 - 15:02 WIB, dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.shtml

juang untuk memperjuangkan negara yang hanya tidak berdasarkan pada dan untuk agama tertentu, melainkan negara bangsa yang mengakui, melindungi dan mengkomodir beragam kepentingan agama, budaya dan tradisi. Titik temu itu dapat dijumpai di dalam Pancasila dimana ajaran agama-agama, termasuk ajaran Islam, dapat berjalan bersinergi tanpa ada konflik.[132] Dalam sudut pandang teologi Islam, pendirian dan pembangunan negara ini dilakukan dengan menekankan pelaksanaan substansi ajaran agama (Islam) melalui pelaksanaan prinsip ajaran yang dikenal dengan *maqasid al-syari'ah,* yaitu kemaslahatan umum (*al-maslahahh al-'ammah, the common good*).[133] Bahkan melalui Pancasila, dapat menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmah li al-'alamain*) dalam arti sebenarnya, sehingga setiap orang bisa saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawinya.[134]

Nalar teologi ke-NU-an dapat dibangun dengan sejumlah cara, misalnya melalui kajian terhadap karya-karya tafsir (hukum), al-Qur'an dan Hadis, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan ruang dan waktu. Nalar teologi ke-NU-an bukanlah pemurnian teologi yang berlebihan sebagaimana paham salafi/wahabi, tetapi berusaha melakukan kajian mendalam untuk melahirkan paham teologi Islam yang membumi.[135]

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

[132] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..,* hlm. 138.

[133] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..,* hlm. 139.

[134] Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului..,* hlm. 139.

[135] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. 246-247.

saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S.al-Hujurat [49]: 13).

Ayat tersebut dapat menjadi spirit teologi Islam dalam kehidupan agama yang plural sesuai dengan fitrah terciptanya manusia. Fiqih kebangsaan Arab tentunya berbeda dengan fiqih kebangsaan Indonesia walaupun berasal dari satu sumber al-Qur'an dan Hadis, tetapi implementasinya beragam dalam hal *furu'iyah*/hukum cabang. Kata kunci ayat tersebut walaupun mengakui dan mengakomodir adanya pluralitas, tetapi umat Islam harus mencari titik kesamaan pada tataran prinsipil untuk membangun kebersamaan dan ikatan kesatuan dan persatuan yang kokoh bagi NKRI.

2. Firqah Yang Kurang/Tidak Selamat

Sejarah perkembangan dan penyebaran ajaran (teologi) Islam di Indonesia dilakukan oleh para penyebar Islam dengan cara-cara yang damai dan akulturatif. Banyak sejarahwan menyebutkan bahwa ajaran Islam disebarkan di Indonesia, dulu Nusantara, dengan cara-cara yang damai dan akulturatif. Namun demikian dalam perkembangannya, pemahaman terhadap ajaran Islam terus berkembang. Oleh sebab itu, pluralitas pemahaman terhadap ajaran Islam itu dapat memberikan dampak positif dan juga dapat memberikan dampak negatif. Dampak positifnya adalah ajaran Islam moderat yang disampaikan dengan cara-cara damai dan akulturatif telah menimbulkan akseptabiltas yang luar biasa masif di kalangan masyarakat Indonesia pada waktu itu yang hingga kini masih terus berlanjut, yakni syiar-syiar Islam masih menjadi mainstream bangsa di Indonesia, bahkan ajaran Islam *ala ahlussunnah wal jamaah* menjadi pondasi dan penyokong bagi ketahanan dan keberlanjutan NKRI.

Sementara itu, kebebasan yang diberikan negara kepada warga masyarakat tidak sepenuhnya diterima dan diamalkan dengan baik, tetapi justru seringkali digunakan untuk menyebarkan ajaran keagamaan yang sesat dan menyesatkan. Di antara beberapa golongan keagamaan

yang dinilai kurang selamat dan atau sesat telah dinyatakan dalam Fatwa MUI di antaranya, yakni:

Pertama, Jamaah Muslimin Hizbullah. Fatwa MUI 2 Agustus 1978 yang dipimpin oleh KH M Syukri Ghozali menyebutkan bahwa Jamaah Muslimin Hizbullah adalah suatu kelompok yang memiliki paham tersendiri dari kaum Muslim, di dalamnya ada keyakinan dan pemahaman yang agak menyimpang dari al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, golongan ini secara komprehensif pada dasarnya adalah golongan yang masuk kategori kurang selamat, untuk tidak mengatakan tidak selamat sama sekali. Oleh sebab itu, perlu dilakukan usaha-usaha dakwah untuk memerbaiki pemahaman yang keliru tersebut.[136]

Kedua, Islam Jama'ah. Fatwa MUI yang dipimpin Hamka menyatakan, Islam Jama'ah sebagai suatu aliran yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1970-an bertentangan dengan ajaran akidah Islam yang sebenarnya dan penyiarannya akan memancing keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. Sebab, golongan Islam Jama'ah ini memiliki keyakinan menyimpang dan sesat, yakni golongan ini memiliki paham menyimpang, di antaranya ia mewajibkan pemutusan hubungan dengan golongan lainnya walaupun itu orang tuanya, tidak sah shalat di belakang yang bukan golongan Islam Jama'ah, pakaian yang disentuh oleh golongan lain harus dicuci, suami harus memasukkan istrinya ke dalam golongan ini, jika tidak, harus diceraikan, perkawinan yang sah yang direstui oleh Amirul Mukminin, dan khutbah yang sah adalah bahasa Arab, umat Islam harus baiat dan setia pada Amirul Mukminin dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber darinya. Oleh sebab itu, Fatwa MUI menegaskan agar segera melaporkan kepada Kejaksaan setempat jika dijumpai penyebaran akidah Islam Jama'ah ataupun nama lainnya yang pahamnya sama dengan ini.[137]

Ketiga, Ahmadiyah Qadiyan. Setelah dipelajari oleh MUI dalam 9 buku tentang Ahmadiyah Qadiyan, Fatwa MUI 1 Juni 1980 yang dipimpin oleh Hamka memutuskan bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar

[136] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm.37.

[137] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm. 38-39.

Islam. MUI menegaskan bagi mereka yang terlanjur sudah ikut jamaah Ahmadiyah agar supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar dan umat Islam agar mewaspadai atas ajaran sesat tersebut.[138]

Keempat, faham Syi'ah. Fatwa MUI dibawa pimpinan KH Ibrahim Hosen pada 7 Maret 1984 menegaskan bahwa perbedaan pokok antara faham syi'ah dan *ahlussnnah wal jamaah* terutama dalam masalah "imamah yang merupakan rukun agama, sedangkan *ahlusunnah wal jamaah* bukan rukun agama". Hal ini harus diwaspadai oleh para pengikut *ahlusunnah wal jamaah* agar paham syi'ah tersebut tidak masuk ke dalam pahamnya umat Islam *ahlussunnah wal jamaah* yang ada di Indonesia.[139] Problem akidah syi'ah di Indonesia sangat berbahaya karena akan menimbulkan masalah pembangkangan pada pemerintahan yang sah, NKRI, jika dilihat dari sisi akidahnya tentang "imamah".

Kelima, aliran yang tidak mempercayai hadis yang disuarakan oleh Irham Sutarto (Karyawan PT Unilever Indonesia di Jakarta). MUI dibawa pimpinan KH Ibrahim Hosen pada 27 Juni 1994 menyatakan bahwa aliran tersebut sesat dan menyesatkan dan berada di luar agama Islam dan juga pemerintah harus menindak tegas dengan melarang aliran ini di masyarakat.[140]

Keenam, Darul Arqam. Fatwa MUI dibawa pimpinan KH Hasan Basri menyebutkan bahwa Darul Arqam adalah paham yang menyimpang dari akidah Islam dan paham sesat yang menyesatkan. Sebab, sepeninggal Nabi saw tidak ada lagi susulan dari Nabi. Ajaran akidah Islam sudah sempurna sebagaimana firman Allah surat al-Ma'idah ayat 3.[141]

Ketujuh, malaikat Jibril Mendampingi Manusia. Fatwa MUI dibawa pimpinan KH Hasan Basri pada 27 Desember 1997 menyatakan sesat bagi aliran Lia Aminuddin atau lainnya yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mendapatkan ajaran agama dari malaikat Jibril agar mendalami lagi ajaran agama Islam. Aliran ini sesat karena tidak ada satupun wahyu

[138] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm. 40-41.

[139] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm. 46-47.

[140] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm. 52-53.

[141] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm. 54-55.

baik al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menyatakan bahwa malaikat Jibril masih diberi tugas oleh Allah untuk menurunkan ajaran kepada umat manusia, baik ajaran baru maupun sifatnya penjelasan terhadap ajaran agama yang sudah ada. Pengakuan bahwa seseorang didamping oleh malaikat Jibril bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh sebab itu, pengakuan itu dianggap sesat dan menyesatkan.[142]

Kedelapan, Al-Qaeda. Mujahidin Arab atau aktivis Al-Qaeda mulai berdatangan ke Indonesia pada tahun 1997. Pada awalnya Indonesia tidak menjadi perhatian Osama Bin Laden, tetapi yang lebih penting baginya adalah Filipina dan Thailand. Sejak tahun 1999 ketika Indonesia mengalami berbagai kerusuhan, seperti di Ambon dan Poso, maka menjadi perhatian al-Qaeda pimpinan Osama Bin Laden. Menurut laporan penelitian As'ad Ali Said, ada sejumlah kasus aksi teror bom yang dapat digolongkan dilakukan oleh al-Qaeda sebagai pelakunya, di antaranya peledakan bom mobil di depan tempat tinggal duta besar Filipina pada Agustus 2000, bom Natal tahun 2000, bom Mal Atrium Jakarta 2001, bom Bali I pada oktober 2002 dan bom Marriot pada Agustus 2003. Kasus bom tersebut menjadi tanggung jawab al-Qaeda dan Hambali secara lansung karena ia yang memberi perintah dan mengendalikan yang mana sumber dananya dari al-Qaeda.[143] Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an (Q.S. al-Fushshilat [41]: 33 dan Q.S. Ali Imran [3]: 104), dapat dinyatakan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan keagamaan yang sesat dan menyesatkan, bahkan sangat luar biasa membayakan bagi keselamatan umat Islam, bangsa serta negara Indonesia. Oleh sebab itu, haram mutlak berada di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Abdul Karim Zaidan dalam karyanya yang berjudul *al-Wajiz fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syariah* yang menyatakannya dalam kaidah fiqhiyyah: *la dlarara wa la dlirara* (tidak boleh membahayakan pihak lain dan juga tidak membalas bahaya dengan bahaya). Kata kunci dari kaedah

[142] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI....*, hlm. 59-70.

[143] As'ad Ali Said, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 241-249.

fiqhiyah tersebut adalah bahwa membahayakan jiwa, kehormatan dan harta orang lain adalah haram hukumnya.[144]

Selanjutnya, menurut As'ad Ali Said, Mantan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menyebutkan bahwa walaupun Pancasila sudah menjadi kesepakatan final pada awal pendirian NKRI, tidak dinafikan ada pula beberapa golongan dalam masyarakat yang melakukan penentangan, seperti Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia(DI/TII) yang berhasrat mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), atau yang mutakhir oleh Islam Jamaah; juga sejumlah gerakan separatis. Demikian juga masih banyak gerakan radikal mutakhir yang harus dibendung dan dicegah agar tidak mengganggu paham umat Islam Indonesia dan tidak mengancam stabilitas Indonesia.[145]

Kesembilan, Organisasi ISIS. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan fatwa haram terhadap Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), tetapi melalui pendapat KH Ma'ruf Amin, MUI mengharamkan ajaran Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) untuk ada di dunia dan untuk eksis di Indonesia. "Karena (ISIS) itu haram, maka pengikutnya dianggap mendukung hal-hal yang haram." Perjuangan ISIS sudah jelas dan haqqul yakin salah dan tidak sesuai ajaran Islam karena menggunakan cara-cara kekerasan. Oleh sebab itu, menurut KH Ma'ruf Amin, "karena sudah jelas sekali, sesuatu yang sudah jelas tidak perlu ada fatwa.[146]

Sebaliknya, Islam Indonesia yang dikehendaki adalah Islam yang toleran, moderat, rukun, santun dan saling menghargai yang diharapkan akan mampu mendukung kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia, bukan paham Islam yang radikal, sesat, ekstrim dan keras.

Dalam konteks beragama bagi umat Islam di Indonesia, Joko Widodo dalam *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015* menyatakan

---

[144] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syariah* yang sudah diterjemahkan berjudul *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 140

[145] Said, *Al-Qaeda...*, hlm. 392.

[146] *MUI Haramkan Ajaran ISIS*, http://nasional.kompas.com/read/2014/08/07/20033701/MUI.Haramkan.Ajaran.ISIS, diakses 4 Juli 2016

bahwa dalam beragama Islam, kita harus selalu mengikuti keteladanan Rasulullah saw, baik dalam berpikir, berbicara, bertindak, maupun bekerja. Kita harus jujur, amanah, dan selalu menyampaikan kebenaran, cerdas. Demikian juga dalam berdakwah, Rasulullah saw bersikap dan bertindak sangat santun, toleran, dan menghindari tindak kekerasan. Dengan meneladani Rasulullah saw, Joko Widodo meyakini bahwa "Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang bermartabat, bangsa yang beradab, bangsa yang makmur, dan bangsa yang sejahtera". Oleh sebab itu, meneladani Rasulullah saw, harus lebih kita maknai sebagai upaya untuk meningkatkan peran umat Islam menuju Islam yang *rahmatan lilalamin*, dan Islam yang mampu mewujudkan rahmat bagi semesta alam.[147]

> "Untuk itulah, kita perlu membangun tatanan peradaban Islam yang peduli, tatanan peradaban Islam yang menebarkan perdamaian, tatanan peradaban Islam yang menebarkan keadilan dan toleransi. Tatanan peradaban Islam seperti itu hanya mungkin terwujud kalau kita tidak hanya mengejar kesalehan pribadi, tapi juga mengejar kesalehan sosial, mengutamakan yang lemah dan yang miskin, karena seorang muslim pada dasarnya merupakan bagian dari komunitas umat yang ingin agar kehidupan berjalan harmonis, bersama-sama, bergotong royong, tidak ada gesekan sosial yang menyebabkan ambruknya sebuah jembatan kebangsaan. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik, umat yang senantiasa membangun solidaritas sosial di antara sesama manusia, umat yang tidak gampang dilanda kebencian, tidak gampang dilanda kedengkian, umat yang berkehendak merangkul, dan bukan memukul eksistensi kelompok lain".[148]

---

[147] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

[148] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa beragama atau berakidah Islam harus mampu mewujudkan rasa cinta kepada Rasulullah saw dengan melalui penghayatan dan pengamalan ajarannya untuk melakukan pembangunan dan melayani rakyat secara tulus dan jujur serta kreatif-inovatif. Dengan menguatkan kembali spirit itu, kita akan mampu membangun masyarakat yang berkeadaban, mengedepankan dialog sebagai cara mengatasi perbedaan, saling mengerti dan mewujudkan solusi dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, akan melahirkan tatanan kehidupan yang adil dan semua pihak dapat terhindar dari segala bentuk kerugian.[149]

Berdasarkan data-data golongan keislaman tersebut, dapat dinyatakan bahwa paham ajaran teologi Islam yang memiliki nilai standar kebenaran di antaranya adalah nalar *ahlusunnah wal jama'ah* yang di antaranya dari golongan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang merupakan golongan Islam terbesar di Indonesia yang telah ikut berjasa merintis, memperjuangkan dan mempertahankan NKRI hingga masa kini. Sementara itu, golongan-golongan keagamaan yang kurang/tidak selamat tersebut di atas adalah golongan keagamaan yang sesungguhnya tidak dilandasi oleh pemahaman keagamaan (Islam) yang mendalam sehingga cenderung sepihak, menafikan, dan bahkan mengancam keselamatan golongan atau pihak lainnya serta mengancam eksistensi NKRI. Nalar Ijtihad fiqih ke-NU-an tentu saja berhubungan erat dan bersandar pada paham teologi *ahlusunnah wal jama'ah*, sehingga produk hukum fiqihnya mampu menyesuaikan dengan budaya dan tradisi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan nalar fiqih ke-NU-an yang inklusif, maka tentu akan mampu melahirkan pengikut yang inkusif juga sebagaimana kader NU Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, yang memiliki orientasi

---

index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

[149] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016

iklusif dalam melayani dan memberdayakan umat dan bangsa tanpa diskriminasi.[150]

[150]Lihat, meski demikian, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, kader NU akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden untuk bangsa ini secara keseluruhan. "Walaupun kami sudah duduk di kabinet, tapi kan kami punya tanggung jawab untuk melayani seluruh warga." *Lukman Saifuddin: Menteri Kader NU Layani Semua Warga,* http://www.nu.or.id/post/read/55483/lukman-saifuddin-menteri-kader-nu-layani-semua-warga, diakses 4 Juli 2016.

BAB III

NALAR ITJIHAD FIQIH KE-NU-AN JOKO WIDODO

A. NALAR IJTIHAD 'URF KE-NU-AN

Tradisi dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan '*urf*. Ulama Ushul Fiqh menjelaskan bahwa *'urf* adalah tradisi masyarakat yang terbangun dengan baik dalam perkataan, sikap maupun perilaku. Hal itu juga dikenal sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat.[1] Kategori *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *'urf qawli* sebagai sebuah tradisi perkataan di dalam masyarakat, dan *'urf fi'li* sebagai sebuah tradisi perbuatan yang dikenal dalam bentuk tindakan.[2]

Dalam sudut pandang keabsahannya, '*urf* terbagi menjadi dua macam: *Pertama*, '*urf sahîhah* adalah tradisi yang dikenal dan diamalkan masyarakat serta memiliki relevansi atau kesesuaian dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Di Indonesia, ada tradisi resepsi pernikahan dengan mengundang seluruh saudara, kerabat, kolega dan tetangga, walaupun nasnya hanya mengajarkan walimah cukup memotong

---

[1] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 416-418; Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I,* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 137-139.

[2] Agus Setianto, Mohammad Hidayat, dan Izzudin Abdul Manaf, "'Training Eksekutif Certified Ushul Fiqih Keuangan dan Perbankan Syariah Kontemporer Angkatan I", dalam *Kumpulan Makalah* bagi pelatihan yang diselenggarakan pada 24-25 Februari 2012 di Kantor Pusat MES Jakarta Selatan.

satu ekor kambing, tetapi praktiknya di Indonesia tidak seperti itu. Demikian juga tradisi tabligh musibah yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Bengkulu ketika keluarganya ada yang meninggal dunia, selain dilaksanakan tahlilan yang sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena tradisi ini dilaksanakan sesuai koridor syariat Islam, maka tradisi ini masuk kategori *'urf sahîhah. Kedua*, '*urf fâsidah* adalah tradisi yang dikenal dan dijalani masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Tradisi resepsian bagi pengantin perempuan yang menggunakan pakaian setengah badan, hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.[3]

'Urf sâhihah sebagai bagian dari proses penyerapan dan pengembangan khazanah dan kearifan budaya atau lokal telah terbukti membawa dinamika dan perkembangan penyebaran Islam yang luar biasa fantastis di Nusantara. Berkat kebijaksanaan para walisongo dalam menyebarkan nilai-nilai syariat Islam dengan sifat akulturaltif dan membumi, maka tidak ada kesenjangan antara nilai-nilai syariat Islam dengan budaya setempat. Tradisi doa selametan tiga hari, tujuh hari, dan empat puluh hari yang dilaksanakan masyarakat Islam Indonesia selama ini -yang dikenal dengan tahlilan- merupakan bagian dari pelestarian tradisi sebelum datangnya Islam. *'Urf* tahlilan itu sebagai bagian dari budaya masyarakat Islam Indonesia dapat dikukuhkan menjadi hukum *syara'* dengan kaidah: *al-'adatu syariatun muhakkamtun* (adat dapat dikukuhkan menjadi hukum syariat).[4] Dalam hal tradisi walisongo dapat diambil contoh berikut:

> "Tembang Ilir-ilir oleh Sunan Ampel menjadi bukti adanya interaksi antara syariah Islam/fiqih dengan budaya lokal Nusantara. Yang juga tidak kala pentingnya adalah manifestasi budaya Tabot di Sumatera Barat dan Bengkulu. Dengan

[3] Khallaf, *Ushul Fikih*...., hlm. 79-80.; Agus Setianto, Mohammad Hidayat, dan Izzudin Abdul Manaf, "Training Eksekutif Certified Ushul Fiqih Keuangan dan Perbankan Syariah Kontemporer Angkatan I", dalam *Kumpulan Makalah* bagi pelatihan yang diselenggarakan pada 24-25 Februari 2012 di Kantor Pusat MES Jakarta Selatan.

[4] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara*..., hlm. 113-114; Khallaf, *Ushul Fikih*...., hlm. 79-81.

> mudahnya ekspresi keagamaan kaum Syi'ah menjadi budaya daerah setempat di hadapan tindakan-tindakan "budaya Sunni" dalam beberapa dekade terakhir. Dengan kata lain, pemakaian budaya adat sebagai wahana ekspresi dari yang sebelumnya dikenal sebagai budaya agama/syariah menjadi bukti betapa besar dinamika budaya yang terjadi".[5]

Nilai-nilai ketuhanan yang sudah melembaga dalam kehidupan umat di Nusantara kemudian menjelma menjadi falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam Pancasila dan UUD-NRI 1945. Tradisi berideologi negara di Indonesia menegaskan pentingnya nilai-nilai ketuhanan yang dimuat dalam sila pertama Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan tersebut digunakan untuk memperkokoh persatuan, persaudaraan, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan.[6] Demikian juga tradisi pemilihan kepala daerah yang dilakukan di Indonesia merupakan bagian dari upaya menyerap aspirasi dan mewujudkan sistem pemerintahan yang berpihak pada masyarakat. Dalam ketentuan calon kepala daerah disebutkan bahwa calon kepala daerah ditentukan dengan regulasi normatif, di antaranya, berpendidikan minimal SMA, usia minimal 30 tahun untuk menjadi calon gubernur, dan 25 tahun untuk menjadi calon bupati/walikota.[7] Dalam regulasi pemilihan kepala daerah itu dapat dipahami sebagai regulasi hukum yang tidak independen, tetapi dependen terhadap kepentingan masyarakat sehingga jika sudah tidak relevan dengan kepentingan masyarakat, bisa diusulkan untuk diubah. Dengan demikian, standarisasi ukuran kebenaran aturan itu terletak pada fungsi dan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Dalam term '*urf,* kebenaran regulasi bergantung pada fungsi atau manfaatnya, bukan pada regulasinya sendiri saja.[8]

---

[5] Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Gus Dur Multikultural*, (Yogyakarta: Kaukabah dan IAIN Bengkulu Press, 2013).

[6] Zuhairi Misrawi, "Inspirasi Pancasila untuk Dunia Arab", *Kompas*, 24 Januari 2015, hlm. 7-8.

[7] Koran Tempo, 24 Januari 2015, hlm. 8.

[8] Khallaf, *Ushul Fikih*...., hlm. 81-82.

Dalil naqli *urf* menyebutkan yang intinya, bahwa segala apa yang dipandang dan dinilai baik oleh masyarakat Muslim dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan, bahwa hal itu di sisi Allah swt juga baik (baca: al-Sunnah).[9] Adapun dalil naqli '*urf* dari ayat al-Qur'an menyatakan bahwa Allah swt tidak menghendaki terjadinya kesulitan dalam menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (Q.S. al-Hajj [22]: 78).

Untuk mewujudkan orientasi ayat al-Qur'an tersebut, Nabi Muhammad saw dalam sejarahnya membangun tata nilai (fiqih) Islam berdasarkan asas akulturasi budaya masyarakat. Sejumlah tradisi masyarakat kemudian menjadi aturan normatif agama (fiqih) Islam.[10] Nabi memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang setara bagi semua warga negara tanpa ada diskriminasi. Kaum Muslim dan non-Muslim memiliki derajat dan hak yang setara dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.[11]

Dalam hal *'urf*, Imam Hanafi pernah menolak implementasi qiyas dengan mengedepankan *'urf* masyarakat karena menurutnya dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar bagi umat manusia.[12] Imam Malik telah menjadikan '*urf* sebagai landasan ijtihad fiqih, yakni menjadikan tradisi kaum Muslim atau ulama Madinah sebagai sumber pertimbangan dalam pembangunan hukum Islam.[13] Demikian juga

---

[9] Zahrah, *Ushul Fikih*..., hlm. 417-418.

[10] Said Aqiel Siradj, "Wanita Presiden", Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 313.

[11] Glenn D. Paige, dkk (eds.) *Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Sosial*, terj. M. Taufiq Rahman (Yogyakarta: *LK*iS, 1998)

[12] M Noor Harisuddin, "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas", dalam *Jurnal al-'Adalah* Vol 9 No 3 (Jember: STAIN Press, 2006), hlm. 123-124.

[13] M Noor Harisuddin, "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas", dalam *Jurnal al-'Adalah*..., hlm. 123-124.

Imam al-Khatib al-Bagdadi sebagai salah seorang pengikut Imam Syafii juga menjadikan '*urf* sebagai dasar dalam melakukan ijtihad hukum fiqih.[14] Tradisi akulturasi hukum fiqh dengan budaya di Indonesia juga diterapkan oleh Gus Dur dengan sebutan "pribumisasi fiqih/ Islam". Prinsip yang hendak dibangun Gus Dur adalah bagaimana fiqih Islam tidak diuniversalisasikan, tetapi disosialisasikan dengan metode akulturatif, sehingga karakternya bisa berbeda-beda walaupun prinsipnya sama. *'Urf* dalam terminologi Gus Dur dipahami sebagai bagian dari upaya menjadikan hukum fiqh bukan hanya wujud pelaksanaan ajaran formal saja, tetapi juga sekaligus menjadi kerangka teoritis dalam membangun hukum fiqih.[15]

Para pendiri bangsa telah melembagakan nilai-nilai fiqih Islam dalam tata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang sangat visioner dan mengakomodir kearifan budaya bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dengan penyusunan Pembukaan UUD-NRI 1945 yang bersifat universal dan visioner, tidak sektarian.[16] Dalam membangun NKRI yang plural tidak bisa dibangun dengan dasar yang sektarian, tetapi harus mampu mengakomodir keberagaman dalam segala aspeknya.[17] Keberhasilan itu tidak lepas dari pengaruh ulama NU, KH Bisyri Syamsuri, KH Wahab Hasbullah, KH A Wahid Hasyim, KH As'ad Syamsul Arifin, dan KH Mahfud Siddiq yang telah mentradisikan berpikir universal dan akulturatif dalam fiqih Islam. Mereka merupakan tokoh pejuang yang memiliki nasionalisme sejati yang telah menanamkan ideologi kebangsaan Indonesia. Sebelum Indonesia lahir, para ulama tersebut telah menegaskan pada Muktamar NU Ttahun 1936 di Kalimantan bahwa

---

[14] M Noor Harisuddin, "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas", dalam *Jurnal al-'Adalah*..., hlm. 124.

[15] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 19; Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara*....., hlm. 109-112; Ahmad Baso, "Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcholisd Madjid Versus Abdurrahman Wahid", dalam *Gerbang*, Vol. 06, No 03. Pebruari-April 2000.

[16] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 191-192.

[17] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 22-23.

jika Nusantara merdeka hendaknya dibangun dengan prinsip *dar al-salam*, bukan *darul Islam*.[18]

Gus Dur sebagai tokoh NU memberikan contoh dalam membangun dan memelihara tradisi Nusantara dengan mengemukakan pemikiran dan gerakan Syekh Arsyad, Ulama dari Kalimantan, yang telah melakukan pembaruan nilai-nilai hukum fiqh dengan cara mengakomodir nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan diintegrasikan menjadi ajaran syariat Islam yang khas terutama dalam masalah pembagian warisan.[19]

Dalam hal melestarikan budaya atau lingkungan, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa "*terlalu fokus terhadap ekonomi, membuat kita melupakan lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiringan dengan terjaganya kualitas dan sustainabilitas lingkungan kita*".[20] Statemen ini memiliki nilai filosofis dan makna yang mendalam dalam tradisi fiqih NU yang mengedepankan aspek kemaslahatan publik, dimana NU menekankan perlunya menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana *'urf* telah mendidik masyarakat agar bisa berbuat dan bertindak seiring dan selaras dengan pemeliharan dan kelestarian lingkungan hidup manusia sebagai penghuninya.

Dalam hal melestarikan *'urf,* Joko Widodo mempratikkan nalar keagamaan Islam yang berwawasan universal-membumi. Ia menyebutkan bahwa "saya (kata Jokowi) bagian dari Islam yang *rahmatan lil alamin*. Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di Negara RI yang memegang teguh UUD '45. Bhinneka Tunggal Ika adalah rahmat dari Tuhan".[21]

Kastoyo Ramelan mengisahkan bahwa implementasi nilai-nilai syariat/fiqih telah menjadi bagian dari sejarah hidup Joko Widodo dimana ia telah beragama Islam sejak kecil, dan sebelum menjadi Wali Kota Solo, ia telah menunaikan ibadah haji dan umrah bersama Istrinya berkali-kali.

---

[18] Majalan Risalah NU, Edisi 27 Tahun 2011, hlm. 54.

[19] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita....*, hlm. 251.

[20] https://www.facebook.com/JKWofficial?fref=ts, diakses 11 Desember 2014.

[21] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 27.

Dalam kehidupan keluarganya, semuanya dikenal sebagai Muslim yang taat melaksanakan syariat Islam.[22] Oleh sebab itu, kebijakannya selalu mencermikan nilai-nilai fiqih ke-NU-an yang mengakar, merakyat, dan merepresentasikan nilai-nilai luhur budaya.

Praktik hidup membaur itu ditunjukkan dalam kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. Selama ini menjadi rahasia umum, kalau ada penertiban PKL selalu dengan pendekatan legalistik dan penertiban dari satpol PP setempat, Joko Widodo membuat kebijakan yang sebalikya, ia membuat kebijakan relokasi PKL dengan cara kemanusiaan, bahkan ada kirab perpindahan PKL dari lokasi lama ke lokasi baru. Ia juga mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, yang isinya mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern harus berjarak minimal 500 meter. Untuk melakukan pelestarian pasar tradisional, ia membuat kebijakan-kebijakan inovatif. Demikian juga pelayanan perizinan yang membutuhkan berbulan-bulan kemudian bisa disimpelkan dari biasanya 90 hari menjadi enam hari. Regulasi ini dalam bahasa fiqih dikenal dalam kaidah: *taqlil al-takalif,* menyedikitkan beban kewajiban.[23]

Dalam bahasa Gus Dur, nalar fiqih Islam yang diperlukan masyarakat Indonesia adalah nalar fiqih yang bersifat universal-membumi, bukan formalisasi norma-norma fiqih dalam tata kehidupan kenegaraan. Sebab, jika formalisasi nalar fiqih itu terjadi, akan terjadi tindakan diskriminatif terhadap kelompok non-Muslim sebagai warga negara. Dengan demikian, fiqih Islam sebagai bagian dari norma agama Islam tidak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam jika tidak dipahami secara utuh. Apalagi Pancasila dan UUD 1945 itu sesungguhnya berasal dari nilai-nilai Islam, sehingga aliran keagamaan Islam Indonesia yang benar semestinya harus menerima eksistensi ideologi Pancasila.[24] Lebih lanjut Joko Widodo mengatakan:

---

[22] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 27.

[23] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 214-215.

[24] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 21-22.

> "saya (kata Jokowi) ingin meneguhkan Islam *rahmatan lil alamin* di negeri ini. Islam yang menebar rahmat keselamatan kedamaian bagi umat di kehidupan duiawi dan ketenteraman di akhirat nanti. Waktu saya bertemu Gus Dur di Solo,[25] tatkala menjadi Wali Kota Solo, Gus Dur menasehati agar menjaga Islam yang ramah dan toleran".[26]

Dalam penjelasan Kastoyo Ramelan, nalar Islam/fiqih Indonesia memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan wajah Islam Timur Tengah yang keras dan penuh konflik berdarah-darah. Nalar fiqih Indonesia mengedepankan wajah ramah dan toleran, sehingga kerukunan dan kedamaian menjadi pedoman hidup bersama dalam bermasyarakat dan berbangsa. Joko Widodo menyatakan bahwa nalar keislaman atau fiqih Indonesia bersifat toleran dan moderat berkat ajarannya karena ketika membaca ayat al-Qur'an diawali dengan membaca *basmalah*, yang artinya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. "Allah swt adalah sumber kasih sayang", tandas Jokowi.[27]

---

[25] Pertemuan Joko Widodo dengan Gus Dur pada waktu itu sudah diramalkan akan jadi Presiden, yakni pada acara pada tanggal 8 Januari 2006, Gus Dur hadir di Solo dalam acara "Njejegake Sakaguru Nusantara" (Menegakkan Kembali Sokoguru Nusantara). Hal ini dapat dibaca dalam narasi berikut: *"Husein mengisahkan, sebelum acara orasi, Gus Dur mampir di Loji Gamdrung, rumah dinas Walikota Solo untuk melakukan dialog bersama para tokoh di antaranya KH Moeslim Rifa'i Imampuro (Mbah Liem), dan Jokowi yang ketika itu baru sekitar 6 bulan menjabat Walikota Solo. Dalam sebuah diskusi ringan yang melibatkan banyak tokoh tersebut, tiba-tiba Mbah Liem menepuk pundak Gus Dur sambil berkata, "Njenengan harus jadi presiden lagi Gus?" "Mboten ngaten (tidak begitu), Mbah," jawab Gus Dur. Kemudian Gus Dur melanjutkan perkataanya. "Siapapun yang dikehendaki rakyat, termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi Walikota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden!".* Pada waktu itu, Jokowi belum ada tanda-tanda akan dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ketika Gus Dur menyebut nama Jokowi, Jokowi hanya tersenyum. Dipikirnya mungkin hanya bercanda Gus Dur saja. Namun, ternyata ucapan Gus Dur itu menjadi kenyataan, jadi Presiden Indonesia. *Jokowi Presiden, Ternyata Sudah Diramalkan Gus Dur,* http://www.nu.or.id/post/read/56217/jokowi-presiden-ternyata-sudah-diramalkan-gus-dur, diakses 4 Juli 2016.

[26] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 27-28.

[27] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 28.

Dalam konteks pluralitas, nalar fiqih ke-NU-an menawarkan beberapa ide penting, yakni *Pertama*, penanaman nilai-nilai pluralitas dan wawasan fiqih/Islam humanis transformatif mulai dari sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Nalar fiqih humanis transformatif akan menyumbangkan dukungan positif bagi pembangunan tata kehidupan yang majemuk. *Kedua*, menanamkan nalar fiqih egaliter terhadap masyarakat dengan pemberian uswatun hasanah dari pemuka agama/fuqaha' untuk mewujudkan pemikiran, sikap dan perilaku yang inklusif dengan mengedepankan sikap universal etik dalam merespons pluralitas internal dan antarumat beragama. *Ketiga*, penguatan forum-forum komunikasi antarumat beragama. *Keempat*, partai politik perlu mempertimbangkan kembali simbol-simbol agama dalam memperjuangkan kepentingan kelompok.[28]

Tradisi fiqih/syariat Islam yang sudah berkembang dan mengakar jauh sebelum Jokowi lahir turut mewarnai kepribadian dan keluarga Jokowi. Menurut Kastoyo Ramelan, "sebelum dia jadi Wali Kota atau setelah jadi Gubernur, dia teratur sembahyang Jum'at, shalat wajib teratur, puasa teratur, zakat teratur". Dengan meminjam teorinya Simuh, mantan Guru Besar Tasawuf IAIN (saat ini UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal itu adalah kriteria bagi sifat seorang santri di Jawa yang menjalankan syariat Islam misalnya shalat lima waktu baik pernah belajar di Pesantren atau tidak pernah belajar di Pesantren.[29]

Dalam membangun budaya keislaman, Joko Widodo menghendaki nalar Islam yang santun dan ramah, bukan Islam kaum fundamentalis dan kaum radikal, dia juga mengaku bukanlah bagian dari paham (fiqih) keislaman yang arogan dan menghunus pedang di tangan. Ia mengidealkan nalar keislaman yang mengajarkan keramahan, kesantunan, kedamaian, dan kesejukan. Oleh sebab itu, nilai-nilai (fiqih) keislaman tersebut merupakan bagian dari penggalian *'urf* atau budaya masyarakat Indonesia yang luhur dan dapat dijadikan sebagai landasan

---

[28] *Majalah Risalah NU*, Edisi 27 Tahun 2011, hlm. 59.

[29] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 50-51.

dalam pembangunan wawasan dan praktik keislaman di Negara ini.[30] Dengan meminjam bahasa M Amin Abdullah (Guru Besar UIN Sunan Kalijaga), nalar fiqih Joko Widodo itu memiliki kecenderungan berpijak pada pendekatan keislaman fenomenologis karena menekankan penggalian paham yang esensial-universal, bukan hanya formal-legalistik.[31] Di sinilah "pesan utama" dari hermeneutika fenomenologi Paul Riceour juga berbicara.

Upaya menggali nilai-nilai luhur budaya masyarakat Indonesia menjadi arus utama pemikiran dan gerak langkah Joko Widodo dalam membangun dan menerapkan nalar fiqih Islamnya. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa kita tidak boleh menjadi bagian dari kelompok Islam yang bertujuan menegakkan negara Islam dan bukan bagian dari kelompok Islam yang menebar teror dan kebencian.[32] Adapun yang dikehendaki dalam hal ini adalah Islam yang berpaham moderat, yakni nalar Islam yang sudah mengakar sejak sebelum Kemerdekaan RI terutama telah muncul pada acara Muktamar NU Tahun 1936 yang menyuarakan perlunya mendirikan *darus salam* (negara harmoni) yang mampu mencapai kemaslahatan umum, bukan *darul Islam* (negara Islam).

Prinsip (fiqih) keislaman Joko Widodo tersebut dapat dinilai relevan dengan nalar fiqih ke-NU-an yang juga menawarkan prinsip kemaslahatan umum sebagai dasar pijak dalam membangun tata hukum dan sistem kenegaraan. Prinsip kemaslahatan publik itu kemudian didasarkan pada lima prinsip, yaitu kesalamatan paham keagamaan dari paksaan dan diskriminasi yang di negara kita dikenal dalam sila pertama Pancasila dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan prinsip berikutnya adalah keselamatan fisik dari tindakan kejahatan fisik dan teror, kesalamatan akal pikiran dari pemaksaaan, keselamatan kehormatan dan keluarga dari penodaan moral, dan kesalamatan dalam

---

[30] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 56.

[31] M Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 11.

[32] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 56-57.

jaminan stabilitas perekonomian. Prinsip-prinsip keselamatan fisik dan seterusnya merupakan bagian dari prinsip "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab", Persatuan Indonesia, dan seterusnya.[33]

Dalam membangun kemaslahatan publik, Joko Widodo menyatakan bahwa paham keislaman atau fiqih Indonesia yang harus ditegakkan adalah fiqih toleran dan moderat sebagaimana pesan dalam *basmalah*.[34] Dalam hal kemaslahatan publik, Abdul Wahab Khallaf dalam karyanya *'Ilmu Ushul Fiqh* juga menegaskan bahwa kemaslahatan itu harus digunakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia yang sebanyak-banyaknya, atau menolak kemadlaratan mereka, dan bukan hanya untuk kemaslahatan personal saja (*yajlibu naf'an li akbari 'adadin min al-nas aw yadfa'u dararan 'an hum wa laisat li mashlahatil fardin*).[35]

Dengan meminjam bahasa Jimly Asshiddiqie, paham keislaman Joko Widodo adalah terbuka dan toleran, yaitu berorientasi pada prinsip dasar, sedangkan praktiknya dilaksanakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat secara fleksibel. Ideologi ini menutup kemungkinan arogansi kelompok tertentu atau personal terhadap kelompok atau person lainnya, tetapi sebaliknya juga mengajarkan sikap terbuka terhadap berbagai dinamika kehidupan masyarakat dan sistem negara demokratis. Sementara itu, ideologi tertutup memiliki paradigma keilmuan yang dianggap sakral dan harus diterima sebagai kebenaran dogmatis dan apriori. Ideologi ini menolak adanya paham yang berbeda. Kecenderungan ideologi ini lahir dari atas, bukan datang dari arus bawah atau *grassroot*.[36]

Dengan meminjam bahasa Rumadi yang menolak penegakkan negara Islam, kita dapat menilai bahwa Joko Widodo tidak akan setuju 100% dengan itu, bahkan yang dikehendaki dan diperjuangkan adalah negara Indonesia yang berdasarkan asas-asas universal yang mampu

---

[33] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan...,* hlm.180

[34] Kastoyo Ramelan, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan...*, hlm. 28.

[35] Khallaf, *'Ilmu ushul Fiqh..,* hlm. 87.

[36] Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi,* Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia., hlm. 2-4.

mengakomodir pluralitas hidup bersama dan membangun tata hukum kenegaraan yang egaliter. Alasannya, tidak bisa diterima Arabisasi dalam sistem bernegara, tetapi sebaliknya yang harus dibangun sistem hukum kenegaraan yang berwawasan keindonesiaan sebagaimana paham keislaman atau fiqih ulama Indonesia yang berwawasan humanis-transformatif.[37]

Secara historis, dalam karya Munawir Aziz yang berjudul *Pahlawan Santri: Tulang Punggung Pergerakan Nasional*, dijelaskan bahwa peran kiai atau santri dalam mengawal perjuangan kemerdekaan RI tidak bisa dilupakan dalam narasi sejarah Indonesia. Para kiai dan santri telah terbukti berjuang tanpa pamrih dalam mendirikan dan mempertahankan ideologi Pancasila dalam wadah NKRI. Para kiai dan santri telah menjadi benteng NKRI dari segala macam ancaman selama berabad-abad, dari serbuan kolonial, agresi militer hingga ancaman terhadap ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.[38]

Santri dan ulama merupakan salah satu elemen masyarakat yang sangat disegani Belanda, terutama ulama dan santri yang mengikuti tarekat. Sebab, siapa sangka sebenarnya Pangeran Diponegoro adalah Mursyid Tarekat Qodiriyah. Nama aslinya Abdul Hamid[39] asal Yogyakarta yang pernah mengaji ilmu agama pertama di Pondok Pesanten Tegalsari Jetis Ponorogo yang diasuh KH Hasan Basri, mengaji tasfir Jalalain kepada KH Baidlowi, Bagelan, dan mengaji ilmu hikmah kepada KH Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman Magelang. Selama masa 5 tahun (1825-1830) perlawanan Pangeran Dipenegoro dengan Belanda, Belanda hampir mengalami kekalahan akibat habisnya bekal melawan

[37] Hasil Wawancara Redaktur JIL dengan Dr. Rumadi dan Abd Moqsith Ghazali: Gus Dur Adalah Jendela, Garansi, Lokomotif http://islamlib.com/id/artikel/gus-dur-adalah-jendela-garansi-lokomotif/ diakses 10 Agustus 2010.

[38] *Teladan Perjuangan Para Santri*, Majalah Risalah NU, Eidisi 61 Tahun X 1437 H, Juni 2016, hlm. 60.

[39] *Ulama Nusantara dalam Perjuangan,* Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X 1437 H, Mei 2016, hlm. 23-25.

Diponegoro, sehingga Belanda menggunakan akal liciknya yang akhirnya menangkapnya.[40]

Adapun nama lengkap sang pangeran adalah KH Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Herucokro Senopati Ing Alogo Sayyidin Pranotogomo Amirul Mu'minin Khalifatullah Tanah Jawi Pengeran Diponegoro. Menurut KH Maimun Zubair, Rembang, di Kamar Diponegoro di Eks Karesidenan Kedu, ada tiga peninggalan, yakni al-Qur'an, tasbih dan kitab taqrib. Al-Qur'an sebagai sumber agama dan simbol dari seorang Muslim dan tasbih sebagai simbol ahli dzikir. Pangeran Diponegoro menganut Mazhab Syafii, sehingga salat tarawih 20 rekaat, salat subuh dengan qunut, salat Jum'at dua kali adzan, dan salat id di Masjid bukan di lapangan. Demikian juga Ki Hajar Dewantara juga seorang santri dari Kiai Sulaiman Zainuddin di Daerah Kalasan, Perambanan, Utara Kota Yogyakarta, dan Ki Hajar juga mengaji kitab kuning pada Kiai Onggamaya di Bagelan. Demikian juga penyusun lagu syukur, "*Dari yakinku teguh/ Hati ikhlasku penuh/ Akan karuniaMU/ Tanah Air pusaka/ Indonesia merdeka/ Syukur aku sembahkan/ Ke hadiratMu Tuhan*" adalah Sayyid Husein al-Mutahhar. Dia adalah cucu Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad saw. Sayyid juga menciptakan lagu Hari Kemerdekaan yang cengkoknya mirip suara adzan, *"17 Agustus tahun 45/Itulah hari kemerdekaan kita/Hari merdeka Nusa dan bangsa/ Hari lahirnya Bangsa Indonesia/Merdeka/Sekali merdeka tetap merdeka/ Selama hayat masih dikandung badan/Kita tetap setia, tetap setia/ Mempertahankan Indonesia/ Kita tetap setia, tetap setia/Membela negara kita"*. Tidak hanya itu, bahkan ketika Bung Karno hendak membaca teks Proklamasi Kemerdekaan RI minta didampingi putra kiai, Bung Hatta. Bung Hatta adalah putra dari Buya Haji Jamil, Guru Tariqah Nasyabandiyah Kholidiyah, yang berasal dari Kampung Batuampar, Mayakumbung, Sumatera Barat.[41] Demikian juga peran perjuangan santri

[40] *Ulama Nusantara dalam Perjuangan,* Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X 1437 H, Mei 2016, hlm. 23-24.

[41] *Ulama Nusantara dalam Perjuangan,* Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X 1437 H, Mei 2016, hlm. 23-24.

atau umat Islam seluruh Indonesia juga diakui oleh Muhammadiyah dalam melawan penjajah.

> "Muhammadiyah mengakui keberadaan dan peranan dunia pesantren dalam perjuangan kemerdekaan, sebagaimana kalangan umat Islam lainnya di seluruh kepulauan Indonesia dalam perang melawan penjajah. Umat Islam di Aceh dan Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan daerah-daerah lain-lain yang tidak dapat disebut satu persatu. Semua berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada yang satu lebih penting dibandingkan dengan lainnya. Umat Islam di Aceh bahkan sangat gagah berani dalam melakukan perang terhadap Belanda, ketika daerah-daerah lain sudah lama jatuh sebagai negeri jajahan".[42]

Demikian juga pesantren NU memiliki kesamaan komitmen dengan pendirian NKRI. Hal ini dibuktikan dari hampir seluruh Pesantren menjadi pusat pendidikan lahir dan batin untuk melawan penjajah. Di antara Pesantren yang terlibat dalam perjuangan Kemerdekaan RI adalah Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri Jawa Timur berdiri pada tahun 1927. Pada tahun 1939, jumlah santri Pesantren Al-Falah sudah mencapai 200 orang. Ketika Jepang datang untuk menjajah Republik Indonesia, Pesantren al-Falah menjadi pusat pendidikan lahir dan batin bagi santri untuk melawan penjajah. Pada waktu itu, santri Pesantren Al-Falah hanya tersisa enam orang, sisanya pulang ke daerah asalnya untuk berjuang melawan penjajah.[43] Demikian juga visi dan misi Pesantren Nurul Jadid Probolinggo yang didirikan oleh al-marhum KH Zaini Mun'im. Ia memiliki semangat juang yang tinggi dalam melawan penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kolonial. Ini terlihat sejak masa mudanya, terutama setelah beliau pulang dari Makkah (1934) yang

---

[42] http://www.suaramuhammadiyah.id/2015/12/03/seputar-hari-santri/3/, diakses 4 Juli 2016

[43] Aji Setiawan, "Mengaji dan Menjaga Moralitas Bangsa", Rubrik Pesantren, *Majalah Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 77.

sudah berperan aktif dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan melawan Jepang maupun Belanda.[44]

> "Semangat melawan penindasan, ketidakadilan dan kesewenang wenangan telah tertanam di dalam diri Kiai Zaini Mun'im. Ini terlihat sejak masa mudanya, terutama setelah beliau pulang dari Makkah (1934). Ketika itu, beliau mulai memperhatikan berbagai persoalan yang melilit kehidupan masyarakat sekitarnya dan terlibat langsung dalam kancah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak, khususnya dalam bidang sosial-ekonomi, beliau aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Pamekasan. Meski sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Panggung Galis, beliau tidak segan segan ikut terjun langsung menangani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama tentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda di bidang pertanian (tembakau). Selain itu, beliau juga aktif terlibat sebagai pejuang dalam mempertahankan NKRI, baik pada masa pendudukan Jepang dan Belanda. Pada masa Jepang beliau dipercaya sebagai pimpinan Barisan Pembela Tanah Air (PETA). Beliau pernah dikempe (suatu tanda akan dihukum mati) oleh tentara Jepang, namun akhirnya masih bisa diselamatkan. Selanjutnya, beliau juga dipercaya sebagai pimpinan Sabilillah ketika melakukan Serangan Umum 16 Agustus 1947 terhadap bala tentara Belanda yang menguasai Kota Pamekasan".[45]

KH Zaini Mun'im, pendiri dan pengasuh PP Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur, merupakan salah seorang tokoh NU yang kharismatik. Ia pernah terpilih dalam jajaran anggota dewan nasional Partai NU dari 79 orang, sehingga ia terlibat dalam pentas politik nasional. Selanjutnya, ia terpilih sebagai Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur sejak tahun

---

[44] *Biografi KH Zaini Mun'im,* http://www.nuruljadid.net/biografi-kh-zaini-munim.html, diakses 8 Juni 2016

[45] *Biografi KH Zaini Mun'im,* http://www.nuruljadid.net/biografi-kh-zaini-munim.html, diakses 8 Juni 2016; lihat juga *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016

1960. Dalam kegiatan ke-NU-an, ia masuk-masuk ke pedalaman –yang sekarang dikenal dengan "blusukan"-[46] kampung, pedesaan dan pesisiran untuk berdakwah dan mencerdaskan umat dan bangsa. Sebagai wujud kesadaran sosial dan keagamaannya yang tinggi bagi umat dan bangsa, ia berpendapat bahwa *"orang yang hidup di Indonesia kemudian tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah ekonominya saja dan pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita harus memikirkan perjuangan rakyat banyak"*.[47]

> "Beliau sosok pejuang yang tak mengenal lelah, naik-turun gunung, keluar masuk pelosok desa menjalankan misi kerisalahan Nabi Muhammad saw menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan advokasi kepada masyarakat, memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Beliau tidak pernah surut dalam medan perjuangan, walaupun beliau harus menerima resiko dimasukkan penjara karena kegigihan beliau membela hak-hak rakyat, khususnya pada saat itu pembelaan terhadap petani tembakau".[48]

Kedua pesantren itu di samping memiliki komitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan RI, juga memiliki komitmen memberantas kemaksiatan yang hal ini dapat ditelisik dari sejarah berdirinya yang sama-sama hendak memberantas maksiat di sekitar pesantren tersebut. Sejarah pesantren yang memiliki komitmen dalam membangun semangat perjuangan dan menegakkan keimanan serta keadilan digambarkan oleh KH Said Aqil Siraj, juga telah menjadi ruh dari lahirnya pesantren NU yang lahir dari ajaran Nabi Muhammad saw yang selalu mengajarkan keimanan dan ketaqwaan pada saat bersamaan membangun masyarakat yang damai dan sejahterah. Oleh sebab itu, kata kunci nalar fiqih ke-NU-annya yang mengajarkan pesan-pesan

---

[46] Bahasa Jawa yang terkenal di era Joko Widodo.

[47] *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016

[48] *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016

keadamaian dan kesejahteraan bersumber dari spirit perjuangan dan ajaran Nabi Saw dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.[49]

Ajaran fiqih ke-NU-an itu sangat menghargai nilai-nilai budaya setempat selama tidak melanggar nilai-nilai syariat. Jadi antara formalisme berupa keadilan dan susbtansialisme berupa kemakmuran/kesejahteraan harus menjadi perhatian kita semua, karena itu Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo menegaskan hal tersebut.

(Sumber Foto dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo diakses 12 Desember 2014)

Komitmen pemerintahan Joko Widodo sangat jelas dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpinnya, yakni membangun semangat kebangsaan dalam mengangkat harkat dan martabat seluruh elemen bangsa Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraannya, yang termuat dalam Pidato Kenegaraan Pertama pada tanggal 20 Oktober 2014 sesaat setelah pelantikan dengan judul "Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi" di hadapan tamu dan undangan yang hadir di Ruang Sidang Paripurna I Gedung MPR/DPR RI sebagai berikut:

[49] KH Said Aqil Siraj, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun*, (Jakarta: LTNU, 2014), hlm. 51.

> "Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga Negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin, Negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi".[50]

Peradaban bangsa Indonesia yang diproyeksikan Presiden Joko Widodo adalah bukan hanya untuk membangun keadilan dan kesejahteraan yang berdasarkan pada asas legal formalnya saja sebagaimana gagasan John Austin (pakar hukum), tetapi prinsip pemerintahan yang hendak diwujudkan adalah berdasarkan asas legal formal/konstitusi dan aspirasi masyarakat sebagaimana gagasan Von Savigny (pakar hukum), sehingga prinsip pelayanan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan yang utama. Prinsip keadilan itu adalah prinsip yang diharapkan oleh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara utuh baik substansi maupun formalitasnya (baca: *justice as fairness* dari John Rawls). Dengan kata lain, tatanan hukum yang hendak dibangun adalah

[50] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo diakses 12 Desember 2014

tatanan hukum yang baik yang memenuhi asas prosedural dan asas implementasi yang baik.[51]

Pernyataan Joko Widodo yang menyebutkan pada awal pidato kenegaraannya dengan "kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spiritual yang dalam,"[52] menunjukkan sebuah ungkapan yang menggambarkan, peradaban bangsa yang hendak dibangun oleh Joko Widodo adalah untuk membangun peradaban bangsa yang lahir dari jati diri dan karakter dirinya yang memiliki spirit keagamaan sebagaimana juga telah digariskan oleh pendiri bangsa ini dengan sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila pertama Pancasila itu menjadi sumber dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan keadilan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam sistem hukum nasional, hukum Islam menjadi salah satu sumber pembangunan hukum nasional di Indonesia. Rumusan sistem hukum nasional itu telah mengambarkan adanya spirit hidup beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD-NRI 1945. Secara spesifik, agama Islam mengajarkan bahwa sumber dasar fiqih adalah al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman dalam membangun tata aturan hukum untuk menjalankan roda kehidupan sosial-budaya dan politik hukum.

Pernyataan Joko Widodo pada kalimat "Kini saatnya, bersama-sama...mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan"[53] menggambarkan bahwa pembangunan hidup berbangsa dan benegara tidak akan terwujud tanpa adanya kebersamaan, kebersamaan juga tidak akan tewujud tanpa adanya spirit kebersamaan, spirit kebersamaan tidak akan terwujud tanpa adanya titik kebersamaan dalam membangun negeri ini walaupun bisa saja tetap ada perbedaan dalam kepribadian dan

---

[51] Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 48-51.

[52] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

[53] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

kebudayaan. Disinilah teori ijtihad *'urf* dalam hukum Islam memberikan gambaran bahwa kita hidup harus berlandaskan *'urf shahihah* (kerifan budaya lokal).

Pernyataan Joko Widodo pada kalimat: "Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar"[54] menandaskan bahwa tugas membangun keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh elemen bangsa hanya bisa diwujudkan jika dilakukan bersama-sama dengan kerja keras dan semangat persatuan. *Persatuan* dan *gotong royong* adalah dua kata yang saling terkait, gotong royong yang mengandaikan adanya kebersamaan dalam membangun bangsa tidak akan mencapai tujuan jika tidak diikuti adanya persatuan baik dalam aspek ide, konsep, kebijakan dan implementasi produk hukumnya. Demikian juga sebaliknya. Dua kata tersebut mengandaikan wacana post-modernisme, yaitu bahwa kebersamaan yang dibangun oleh modernisme seringkali adalah kebersamaan semu, sebagaimana misal di sejumlah perumahan modern, seseorang sering berada dalam satu kompleks tetapi masing-masing mereka tidak saling mengenal. Formulasi kebersamaan ini sama dengan berkumpulnya sepeda motor berjumlah sepuluh, tetapi masing-masing sepeda itu tidak saling berkerjasama, hanya berkulmpul bersama saja. Inilah model gaya hidup yang ditawarkan oleh modernisme, sementara itu model gaya hidup yang ditawarkan oleh Joko Widodo, adalah wacana post-modernisme, sehingga wacana kebijakan kenegaraan yang ditawarkan adalah gotong royong yang diikuti dengan rasa persatuan yang sesungguhnya yang disadari oleh masing-masing warga.

Pernyataan Joko Widodo pada kalimat: "Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan"[55] mengandaikan bahwa sistem pemerintahan yang ideal adalah sistem

[54] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

[55] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

pemerintahan yang selalu merasakan apa yang dirasakan oleh warga masyarakat. Umar Ibn Khattab juga merupakan khalifah/pemimpin negara yang mengajarkan sikap pelayanan yang prima kepada warga dan setiap pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan oleh warganya. Oleh sebab itu, pernyatan Presiden RI tersebut sangat sesuai dengan kaidah; *tashārruf al-imām ala ar-rā'iyah manûthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan).[56]

Pernyataan Joko Widodo pada kalimat: "Saya yakin, Negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh Konstitusi"[57] menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, misalnya bagaimana menyelesaikan kasus pencurian ikan, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum yang tegas dan berdaulat.

B. NALAR IJTIHAD MASLAHAT KE-NU-AN

Nalar kemaslahatan merupakan teori ijtihad hukum yang berbasis pada nilai esensial dari kepentingan umat manusia dalam membangun hukum fiqih. Esensi kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan utama dari legislasi hukum fiqih. Itulah yang dimaksud dengan *mashlaḥah* dalam pengertian "kebaikan" (*shalâḥ*) atau kemanfaatan (*naf'u*). Untuk mencapai kemaslahatan itu, maka nalar keilmuan yang digunakan adalah dengan mencegah, mengantisipasi dan menghidari segala bentuk bahaya atau bencana yang dapat menimpa manusia, sehingga tujuan hidup manusia dapat dicapai dengan baik dan bermanfaat. Dalam fiqih, yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah upaya mewujudkan kemanfaatan hidup bagi manusia berdasarkan regulasi hukum Allah swt berupa memelihara agama, akal, jiwa, keturunan/kehormatan dan harta benda. Dalam bahasa Abdul Wahab

---

[56] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 211.

[57] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

Khallaf, tujuan nalar kemaslahatan adalah untuk mendatangkan "*al-manfa'ah*" (kenikmatan) dan juga sekaligus menolak datangnya kemadlaratan.[58] Dalam pandangan pakar hukum Islam semisal At-Tufi, dalil hukum *mashlahah* menjadi pondasi pembangunan hukum/fiqih Islam yang paling mendasar dan dapat menafikan ketentuan hukum yang tersurat dalam nas al-Qur'an dan Hadis. Dalil teori maslahah itu adalah firman Allah swt berikut:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: Dia sama sekali tidak menjadikan bagimu dalam agama adalah suatu kesulitan (Q.S. al-Hajj [22]: 78).

Ayat al-Qur'an ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menerapkan ijtihad kemaslahatan untuk mencapai target terwujudnya kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Tidak ada tujuan lain diundangkannya hukum fiqh kecuali untuk mewujudkan lahirnya maslahah, bahkan Allah swt tidak menghendaki adanya kesulitan dengan lahirnya hukum fiqh, tetapi yang dikehendaki adalah untuk mewujudkan kemudahan dan keselamatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana firman Allah swt berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki datangnya kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki datangnya kesukaran bagimu (Q.S. al-Baqarah [2]: 185).

Dalam nalar fiqih ke-NU-an, Gus Dur menandaskan bahwa prinsip kemudahan itu berupa kemaslahatan publik dalam sistem hukum nasional menjadi dasar pijak dalam legislasi hukum sebagaimana juga telah ditegaskan dalam sila Pancasila, "Keadilan sosial bagi seluruh

[58] Moh Dahlan, *Abdullah...*, hlm. 178-179. Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fikih...*, hlm. 198-199; Muhammad Sa'îd Ramdlân al-Bûthî, *Dawâbith al-Mashlahah fî Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Libanon: Mu'assasah al-Risâlah, 2001), hlm. 27-28; Wahbah Al-Zukhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami* Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 803-804 dan 821.

rakyat Indonesia". Prinsip utama ayat tersebut yang dalam bahasa hukum fiqh dikenal dengan kemaslahatan publik atau umum, juga telah diinternalisasi dalam UUD-NRI Tahun 1945 yang menandaskan bahwa tujuan NKRI adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.[59] Dalam bahasa hukum NU, nalar *al-mashlahah al-'ammah* dikenal dengan "kesejahteraan" sebagaimana juga dirumuskan dalam Pembukaan UUD-NRI 1945 yang dikenal dengan "masyarakat yang adil dan makmur". Dengan demikian, bahasa hukum fiqih NU sebagaimana juga bahasa hukum NKRI adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum bagi orang banyak, bukan sebagian orang saja, sehingga terminologi yang digunakan adalah adil dan makmur.[60] Prinsip penyelenggaraan hukum di NKRI adalah untuk mewujudkan "negara yang adil dan makmur" menurut UUD-NRI tahun 1945 memiliki kesamaan prinsip dengan pencapaian kesejahteraan sebagaimana dimaksud fiqih ke-NU-an.[61] Dalam bahasa ahli hukum positif, Radbruch, keadilan itu memiliki kekuatan normatif dan sekaligus konstitutif bagi pembangunan hukum.[62]

Dalam bahasa hukum/fiqih ke-NU-an, komponen pokok untuk mewujudkan kemaslahatan publik didasarkan pada beberapa prinsip legislasi hukum fiqh, yaitu menjaga keselamatan fisik (*hifdz al-nafs*), menjaga keselamatan keyakinan (*hifdz al-din*), menjaga keselamatan keturunan atau kehormatan (*hifdz al-nasl aw al-'ird*), menjaga keselamatan harta benda dan menjaga keselamatan profesi (*hifdz al-'aql*), dan juga *hifdz al-mal* (memelihara stabilitas ekonomi).[63]

Dalam bahasa fiqih ke-NU-an, menjaga keselamatan fisik (*hifdz al-nafs*) tidak bisa diwujudkan tanpa adanya regulasi hukum yang

---

[59] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 168-169.

[60] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 211-212.

[61] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 177-178.

[62] Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, (Surabaya: CV Kita, 2007), hlm. 151-152.

[63] Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 546-548.

ditegakkan oleh pemerintah dengan menerapkan asas keadilan bagi semua warga masyarakat tanpa kecuali sesuai dengan proporsi hak-hak yang dimilikinya. Dengan adanya regulasi hukum yang berada di atas sesamanya akan mampu mendorong lahirnya keadilan sosial yang hakiki. Pandangan hidup (w*orldview, weltanschauung*) ini merupakan nilai universal yang menjadi landasan dalam pembentukan regulasi hukum nasional di Indonesia.[64]

Dalam sistem penganggaran dan realisasi anggaran belanja negara RI, semua kebijakan juga merujuk kepada nilai-nilai universal tersebut, sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh arapatur negara harus berimplikasi manfaat bagi warga masyarakat. Sebab, prinsip bernegara kita adalah untuk mewujudkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", bukan bagi aparatur negara, sehingga realisasi anggaran belanja negara harus mencerminkan pelayanan dan berfungsi bagi kemaslahatan hidup warga masyarakat. Salah satu contohnya misalnya, kegiatan seminar atau workshop hanya bisa dibayar honor narasumber dan moderatornya jika yang menjadi sasaran utama audiens seminar atau workshop adalah warga masyarakat atau eselon satu lainnya, bukan aparatur negara dalam eselon satu yang sama. Ini menunjukkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI tentang Standar Biaya Masukan ataupun Surat Edaran Menteri Keuangan RI tentang Standar Biaya Masukan Lainnya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) baik yang berlaku untuk tahun anggaran 2014 ataupun 2015 sama prinsipnya sebesar-besarnya adalah untuk masyarakat. Hal ini seiring dan seirama dengan sila Pancasila yang menyebutkan: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dengan meminjam bahasa Haryatmoko, Guru Besar Filsafat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, nilai etis filosofis regulasi PMK tersebut mengandaikan bahwa setiap kebijakan publik dibangun dari sistem hukum untuk mempertimbangkan kemaslahatan publik.

---

[64] Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam ..,* hlm. 546.

Kesadaran moral tidak hanya kesalehan pribadi tetapi juga dari kompetensi teknis, leadership, dan efektifitasnya. Kompetensi etika publik mengandaikan kompetensi teknis dan kepemimpinan.[65]

Dalam kasus kebijakan hukum Presiden Joko Widodo, pemberlakuan hukuman mati bagi bandar narkoba sangat benar dan relevan dengan perintah hukum fiqh yang menetapkan larangan tegas bagi pelaku yang merusak dan mengancam keselamatan jiwa dan akal pikiran manusia/bangsa Indonesia. Sebab, tindakan pelaku bandar narkoba itu merupakan tindakan melawan hukum baik dari sisi hukum agama Islam maupun hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Dari sudut pandang prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), kebijakan hukum Presiden Joko Widodo bisa jadi kurang tepat karena yang menjadi pijakan legislasi hukum dalam hak asasi manusia internasional adalah hak hidup personal, bukan implikasi hukum yang dilakukan pelaku bandar narkoba yang justru dapat mengancam keselamatan jiwa/akal pikiran bangsa Indonesia secara umum. Oleh sebab itu, kritik atau penolakan dari sejumlah pihak luar negeri wajar terutama yang berprinsip pada HAM individual. Oleh sebab itu, kebijakan hukum Pemerintah RI dengan menerapkan hukuman mati bagi pelaku bandar narkoba telah sesuai dengan regulasi hukum nasional sebagaimana disandarkan dalam nilai-nilai Pancasila, UUD-NRI 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Joko Widodo menyatakan pada hari Selasa (24/2/015), bahwa eksekusi terpidana hukuman mati, sebagian besar adalah berasal dari tuduhan terkait narkoba, yang tidak akan ditunda. Dalam pemberlakuan hukuman mati ini, ia mengingatkan negara-negara lain untuk menghormati hak Indonesia untuk menjalankan hukuman mati.[66] Ia menyatakan: "Pertama-tama saya harus mengatakan dengan tegas bahwa tidak boleh ada intervensi terhadap hukuman mati karena ini

---

[65] Haryatmoko, *Etika Publik untuk Pejabat Publik dan Politisi*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 79.

[66] http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/presiden-jokowi-hukuman-mati-tak-akan-ditunda/, diakses 26 Februari 2015.

merupakan hak kita sebagai negara yang berdaulat untuk menjalankan hukum yang berlaku".[67]

Walaupun telah ditelpon oleh sejumah pihak luar negeri mengenai hukuman mati, tetapi proses hukum tetap jalan, bahkan Pengadilan Jakarta sebelumnya telah menolak upaya banding dari dua warga Asing, setelah permohonan mereka untuk mendapat grasi atau pengampunan ditolak oleh presiden.[68]

Dalam hal pemeliharaan keyakinan agama, hukm fiqih mengatur regulasi hukum yang memberikan jaminan kebebasan dalam meyakini dan mengamalkan ajaran agama Islam. Dalam madzhab hukum fiqh, ada kebebasan untuk mengamalkan nalar ijtihad hukum dan produk hukum dari para Imam Madzhab baik dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii maupun Imam Hambali. Jika mereka memiliki kemampuan berijtihad, maka mereka dapat melakukan *ittiba' manhaji* (mengikuti nalar kajian hukumnya tetapi produk hukumnya bisa berbeda). Jika mereka hanya memiliki kemampuan untuk memahami produk hukum hasil ijtihad Imam Madzhab, maka mereka dapat melakukan *ittiba' qauli*

[67] http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/presiden-jokowi-hukuman-mati-tak-akan-ditunda/, diakses 26 Februari 2015.

[68] http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/presiden-jokowi-hukuman-mati-tak-akan-ditunda/, diakses 26 Februari 2015.

(mengikuti pendapat para Imam Madzhab). Nalar ijtihad hukum fiqih ke-NU-an ini memberikan ruang kebebasan kepada umat manusia untuk mengekspresikan ajaran hukum agamanya.

Dalam nalar kajian hukum NU disebutkan bahwa jaminan keselamatan keyakinan agama bagi warga masyarakat menjadi pondasi dalam menjalin hubungan antar sesama warga masyarakat dan kerja sama di antara mereka. Dalam sejarahnya, nalar ijtihad NU telah berhasil mendobrak segala bentuk kebodohan dan kebiadaban dengan bentuk peradaban baru yang manusiawi, toleran, mdoerat dan akomodatif terhadap segala bentuk dinamika kehidupan yang baik dan maslahah.[69]

Dalam bidang jaminan pemeliharaan keluarga, hukum fiqh mengajarkan adanya kemaslahatan keluarga. Jaminan kemaslahatan keluarga tidak akan terwujud tanpa adanya regulasi hukum keluarga Islam. Di Indonesia, regulasi hukum keluarga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kemudian infrasturkturnya diatur dalam kepenghuluan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama. Hal itu jika akan dilakukan akad nikah dan urusan yang terkait, jika urusannya adalah masalah perceraian dalam rumah tangga, maka diatur dalam Pengadilan Agama yang saat ini dibawah naungan Mahkamah Agung. Regulasi hukum keluarga memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan kemudian dilengkapi dengan KHI. Jaminan keselamatan keluarga dijamin oleh hukum fiqh karena hal ini menjadi landasan awal untuk membangun tata hukum secara global. Proses dialektis yang terjadi dalam lingkup masyarakat yang terkecil akan mempengaruhi lingkup masyarakat yang terbesar, sehingga *maqasid al-syari'* memberikan perhatian khusus terhadap urusan rumah tangga melalui *hifdz al-nasl*.[70]

---

[69] Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam* ..., hlm. 546.

[70] Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam* ...,hlm. 547.

Demikian juga untuk menjaga dan memelihara akal pikiran (*hifdz al-'aql*). Pemeliharaan akal pikiran dilakukan dengan menegakkan hukuman yang tegas terhadap segala bentuk yang merusak akal pikiran manusia, misalnya adanya narkoba akan menimbulkan kerusakan akal pikiran manusia, di samping jiwanya yang terera dalam *hifdz al-nasf*. Oleh sebab itu, Pemerintah RI saat ini menegaskan tidak ada ampun bagi para bandar narkoba, sebab faktanya mereka telah merusak masa depan generasi bangsa dan meracuni akal pikiran anak bangsa. Dengan kebijakan pemerintah dalam bidang hukum yang tegas, maka akal pikiran bangsa ini diharapkan akan terjaga dari segala bentuk ancaman dan penyakit itu. Selain itu, ada juga ideologi kaum agamawan radikal-ekstrim yang juga dapat merusak gaya pemikiran dan hidup generasi bangsa karena mereka dapat meracuni pemikiran dan perilaku anak bangsa dengan ide-ide yang sesat dan menolak eksistensi NKRI, sehingga eksistensi kaum agamawan radikal-ekstrim ini harus diredam dan direvolusi akidah dan paradigma keilmuannya agar supaya mereka kembali pada jalan akidah dan fiqih yang toleran, santun, dan moderat sebagaimana paham *ahlussunnah wal jamaah* ala NU. Oleh sebab itu, NU sebagai organsiasi Sosial Keagamaan Islam yang moderat memiliki peran penting untuk menciptakan generasi yang toleran, santun dan moderat yang memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh.[71]

Di samping itu, ada juga jaminan keselamatan harta benda yang termaktub dalam asas-asas fiqih ke-NU-an. Jaminan keselamatan harta benda merupakan hak fundamental karena akan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, hukum fiqh mengatur distribusi dan cara mendapatkan harta benda dengan cara yang baik dan proporsional. Dalam upaya mendistribusikan harta benda kemudian diatur sejumlah regulasi hukum, semisal regulasi zakat, infaq, dan wakaf. Adapun dalam cara mendapatkan harta benda diatur dengan tradisi jual beli/bisnis, hutang piutang, bagi hasil, sewa, gadai dan lain-lain. Dalam regulasi hukum fiqh, hak milik personal dan kolektif

[71] Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam ..,* hlm. 548-549.

diatur dengan seimbang dan proporsional.[72] Demikian juga dalam pembelanjaannya diatur regulasi hukum fiqih yang melarang tindakan israf/berlebihan dimana hal ini biasanya konotasinya mengarah pada gaya hidup konsumerisme yang dapat menyebabkan inflasi. Gaya hidup konsumerisme ini sangat *trending* di era pasar bebas ini walaupun hal itu sesungguhnya tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, Joko Widodo berusaha mengubah nalar ekonomi Indonesia yang memiliki kecenderungan konsumeristik/ dari nalar ekonomi konsumtif pada nalar ekonomi produktif, dan pembangunan juga perlu memprioritaskan daerah pinggiran/desa-desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada sebagaimana dinyatakan dalam Pidato Kenegaraannya tahun 2015.

> "Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".[73]

Nalar transformatif pembangunan ekonomi dibangun dengan mengubah orientasi dari nalar ekonomi konsumtif pada nalar ekonomi produktif. Pembangunan juga harus mengedepankan daerah pinggiran, desa, dan pantai dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan/teknologi yang ada dengan sikap kreatif, inovatif dan gigih. Orientasi pembangunan ekonomi ini merupakan bagian dari konsistensi

---

[72] Abdurrahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam ...*, hlm. 548.

[73] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Hut Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 14 Agustus 2015.

gaya pemikiran dan tindakan Joko Widodo yang selalu memperhatikan anak bangsa yang tertinggal dan lembah baik dari sisi pengetahuan maupun ekonomi sebagaimana gaya pemikiran dan tindakannya ketika menjadi Walikota Surakarta, dimana dijelaskan oleh Susanto, seorang Sopir Taksi, yang mengatakan bahwa gaya pemikiran dan perilaku Joko Widodo yang merakyat dan memperhatikan nasib rakyat bawah tetap mengalir dalam jiwanya yang dahulu ia selalu mengontrol dan jalan/blusukan malam-malam untuk meninjau kondisi rakyatnya yang jualan angkringan dan rakyat umum lainnya.[74] Dalam konteks blusukan ini, jika teori etika tanggung jawab Emanuel Levinas digunakan untuk mengurainya akan melahirkan analisa bahwa tindakan blusukan Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari upaya mempertembal tanggung jawab dan mendekatkan teori/kebijakan pemkot dengan kebutuhan rakyat Surakarta.

Dalam membangun sektor ekonomi kemaritiman, Joko Widodo menerapkan kebijakan hukum yang tegas terhadap para pencuri ikan di laut. Walaupun ada banyak kritik dan perlawanan dari negara-negara tetangga, tetapi ia tetap tegas menindak para pencui ikan demi membangun infrastruktur/iklim ekonomi kemaritiman yang kondusif bagi kaum nelayan, di samping program percepatan akses keuangan daerah yang sedang digalakkan untuk memutus mata rantai rentener dalam hal pemberian modal bagi kaum nelayan. Cara penyelesaian ini dalam nalar hermenutika Paul Riceour dikenal dengan "pesan utama" yang jika diterapkan dalam hal ini dikenal dengan penyelesaian utuh atau komprehensif. Adapun dalam nalar teori kritis dikenal dengan penyelesaian humanis transformatif karena unsur manusia menjadi pertimbangan utama yang mana kritik terhadap realitas sektor kemaritiman bukan hanya sekadar teori, tetapi juga sekaligus usaha nyata untuk mengubah sistem ekonomi kemaritiman yang tidak baik itu menuju sistem dan keadaan yang kondusif.

[74] Hasil Wawancara dengan warga Surakarta, Susanto, Sopir Taxi Bandara Adi Sumarmo, tanggal 22 Juni 2016.

C. MENUJU NALAR IJTIHAD FIQIH IRFANI KE-NU-AN: REINTERPRETASI KONSEPSI RIDDAH

Kata *riddah* bersumber dari kata kerja *irtadda* yang mempunyai arti "kembali", mundur, atau "membalik",[75] sedangkan kata *riddah* berarti kondisi kembali atau *murtad*.[76] Kata murtad dalam terminologi ini menandakan bahwa seseorang mundur dari keyakinan agama Islam jika sejak awal beragama Islam, atau kembali kepada keadaan kafir sebagaimana kondisi semula jika sebelumnya berasal dari agama non Islam. Dalam terminologi "kembali", kata *riddah* memiliki trend populer pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq karena diketahui kaum yang beragama Islam kemudian kembali lagi pada keadaan semula, yakni kondisi kafir. Kondisi ini dilakukan oleh golongan yang beragama Islam sebagai simbol identitas bangsa saja, bukan sebagai simbol agama kepercayaan pada Allah swt. Adapun golongan yang beragama Islam sebagai simbol dan sistem keyakinan pada Allah swt tetap memiliki komitmen dan semangat jihad yang kuat untuk menegakkan ajaran Islam/fiqih walaupun dalam kondisi apa pun. Mereka tetap setia dan taat pada pemerintahan Abu Bakar.[77] Golongan yang beragama Islam sebagai simbol bangsa saja tidak mau mengikuti dan mentaati regulasi hukum yang ditetapkan oleh pemerintahan Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar mewajibkan zakat pada seluruh kaum Muslim, tetapi orang yang beragama Islam simbolik itu tidak mau membayar zakat. Sikap perlawanan terhadap kebijakan Abu Bakar inilah yang kemudian telah menyebabkan diberi label *ahl-riddah*.[78]

---

[75] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 486.

[76] Munawwir, *Al-Munawwir..,* hlm. 486; Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, dalam J. Milton Cowan (ed.), (t.tp., t.th.,), hlm. 333-334.

[77] David Litle, John Kelsay dan Abdullaziz A. Sachedina, *Kebebasan Beragama dan Hak-hak Asasi Manusia; Kajian Lintas Kultural,* terj. Riyanto, (Yogyakata: Pustaka Pelajar & ACAdeMIA, 1997), hlm. xiv-xv.

[78] Soekama Karya, dkk, *Ensiklopedi Mini: Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Islam, 1996), hlm. 4; Moh Dahlan, *Konsep HAM Menurut Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im*, (Yogyakarta: Tesis S2 IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 41.

Pemerintahan Abu Bakar telah mengintruksikan perang melawan warga yang tidak mentaati peraturan pemerintah dalam bidang pembayaran zakat. Kebijakan ini berdasarkan firman Allah swt (Q.S. An-Nisa' [4]: 89) yang memerintahkan pada kaum beriman untuk melawan setiap penentang kebijakan pemerintahan Islam atau kaum Muslim dan larangan menjadikan mereka sebagai bagian dari pemerintahan Islam. Kebijakan hukum itu juga diperkuat dengan firman Allah swt (Q.S. al-Ma'aidah [5]: 33) yang menjelaskan bahwa balasan bagi kaum perusak dan yang memerangi Allah swt dan Rasul-nya adalah dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik, atau diasingkan dari tempat kelahiran negaranya. Demikian juga diperintahkan untuk memerangi kaum kafir dan kaum yang tidak mau mengikuti aturan hukum Allah, kecuali mereka mau mentaati aturan hukum Allah yang dibuktikan dengan membayar *jizyah* (Q.S. at-Taubat [9]: 29). Aturan hukum tersebut diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad saw yang menjelaskan bahwa siapa pun yang keluar dari agama Islam kepada non-Islam, maka wajib diperangi atau dibunuh.[79] Kaum pemeluk agama Islam yang pindah agama dari Islam pada non-Islam akan mendapatkan sanksi hukum berupa hukuman mati. Regulasi hukum ini wajib dilaksanakan oleh pemerintah atau kaum Muslim.[80]

Pemerintahan Abu Bakar juga menetapkan kebijakan hukum yang mewajibkan warganya untuk menjalankan perintah agama berupa shalat lima waktu dan menunaikan zakat. Namun demikian, kaum non-Muslim atau *Ahlul Kitab* berkewajiban menunaikan pembayaran *jizyah* pada pemerintah yang sah.[81] Aturan ini berlaku bagi kaum non-Muslim atau *Ahlul Kitab* yang hidup berdampingan dan bekerjasama dengan kaum Muslim dalam kehidupan sosial-kenegaraan. Adapun kategorisasi kafir/

---

[79] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz IV (Surabaya: al-Hidayah, t.th.,) hlm. 195 -197.

[80] Zainuddin, *I'anah al- Thalibin*, Juz IV. (Semarang: Thaha Putra, t.th.), hlm. 200; Abdullaziz A. Sachedina, *Kebebasan Beragama...,* hlm. xv-xvi; Moh Dahlan, *Konsep HAM ....,* hlm. 42.

[81] Khalid Duran, "Religious Liberty dan Human Rights in Sudan", dalam Leonard Swidler (ed.), *Religious Liberty and Human Rights in Nations and in Religions*, (New York: Ecumenical Press Philadelphia,1986), hlm. 72.

kufr atau non-Muslim dalam istilah terbagi menjadi enam macam:[82] *Pertama*, *kufr inkar* adalah kategori kafir yang tidak mengakui eksistensi Allah, Rasul-Nya, dan semua regulasi hukum disampaikannya. Dalam ilmu teologi, kafir ini tidak mengakui eksistensi Allah dalam segala aspeknya sebagai pencipta, pemelihara ataupun pengatur, ia mengakui bahwa alam seisinya ada dengan sendirinya.[83] Kaum kafir ini masuk kategori materialis karena ia hanya mengakui eksistensi yang empiris faktual bukan immaterial[84] dan bukan eksistensi alam empiris.[85] *Kedua*, *kufr juhud* adalah golongan kafir yang mengakui akan adanya Allah swt beserta segala ajaran-Nya dengan hati, tetapi tidak menyatakan secara tegas dengan perkataan. *Ketiga*, *kufr mu'anadah* adalah golongan kafir yang tahu akan eksistensi Allah dengan pengakuan hati dan lidah, tetapi tidak mau menjadikannya sebagai landasan keyakinan atau akidah karena merasa gengsi dan sikap permusuhan. *Keempat*, *kufr nifaq* adalah golongan kafir yang menyatakan pengakuan dengan lisannya terhadap eksistensi Allah, Rasul-Nya, dan semua ajaran-Nya, tetapi tidak mengakuinya dengan hati. *Kelima, kufr syirik* adalah golongan kafir yang menyatakan pengakuannya pada eksistensi Allah , Rasul, dan semua ajaran-Nya, tetapi menyandingkan atau menyekutukan dengan wujud lainnya. *Keenam, kufr irtidad* adalah golongan kafir yang kembali lagi pada keadaan semula yang kafir setelah memeluk agama Islam.[86]

Dalam Muktamar Ke-32 NU di Makassar 2010, Komisi Bahstul Masail Ad-Diniyyah al-Mauduiyyah menjelaskan bahwa paham NU juga memberikan definisi kufr syirik dengan tambahan kriteria bid'ah. Dalam hal bid'ah, NU menjelaskan bahwa ada *bid'ah hasanah* yang berarti

---

[82] Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 144-145.

[83] Munawwir, *Al-Munawwir...*, hlm. 1257; golongan "ateisme" adalah golongan yang tidak percaya sama sekali pada eksistensi Tuhan. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat,* (Jakarta: Gramedia,2000), hlm. 94.

[84] Materialisme adalah golongan yang mengakui sesuatu yang nyata hanya pada materi. Bagus, *Kamus..,* hlm. 593.

[85] Naturalisme adalah golongan yang berkeyakinan alam semesta membutuhkan eksistensi supranatural. Bagus, *Kamus...,* hlm. 688-689.

[86] Abdullaziz A. Sachedina, *Kebebasan Beragama...*, hlm. xv-vi; Moh Dahlan, *Konsep HAM ...*, hlm. 43-44.

sesuatu yang baru tetapi sesuai dengan syariat Islam, dan ada *bid'ah dlalalah* yang berarti sesuatu yang baru tetapi bertentangan dengan syariat Islam.[87]

Dalam masalah *riddah*, ada beberapa pemahaman di antaranya; *riddah* dipahami sebagai tindakan perlawanan terhadap segala bentuk kebijakan pemerintahan yang sah atau melawan konstitusi. Dalam kategori ini, wacana *riddah* menjadi lumrah dan universal terhadap semua pemeluk agama, bukan hanya kaum yang keluar dari agama Islam versi paham kaum fiqih lama sebagaimana pandangan kitab *I'anatut Thalibin*. Sementara itu, dalam analisis kontemporer, tidak semua orang yang keluar dari paham agama Islam diberi label murtad, tetapi hanya yang memiliki motif melawan kebijakan pemerintahan yang sah saja yang diberi label *murtad*.[88]

Dalam tradisi Nahdlatul Ulama sebagaimana dinukil dari Ibnu Hajar al-Haitsami, menjelaskan dalam karyanya *Tuhfah al-Muhtaj*, bahwa terminologi murtad atau kaum non-Muslim tidak bisa dipahami sebagaimana paham kaum tekstualis, Nahdlatul Ulama memiliki pandangan hukum bahwa kaum non-Muslim tidak boleh dijatuhi hukuman atau tindakan pidana karena dia keluar dari agama Islam. Sebab, regulasi hukum fiqih yang sesungguhnya tidak menyebutkan demikian. Bahkan status sebagai kaum non-Muslim atau kaum murtad dalam hal akidah tidak dipermasalahkan untuk mengambil peran penting dalam mengatur dan menjadi pemimpin daerah atau wilayah jika kondisinya akan membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan kaum Muslim atau bangsa. Penyerahan amanah pada kaum kafir/non-Muslim dibolehkan untuk menjalankan dan mewujudkan kemaslahatan hidup kaum Muslim atau bangsa. Dalam ibarah hukum dapat diambil keputusan hukum bahwa kaum Murtad akidah tidak bisa dijatuhi hukuman mati atau diisolir dari peran publik. Bahkan sebaliknya, jika peran dan fungsinya dibutuhkan untuk menegakkan keadilan

[87] *Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 58-59.

[88] Badingkan dengan Karen Amstrong, *Islam; Sejarah Singkat*, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 36; Moh Dahlan, *Konsep HAM ...*, hlm.45.

dan kemaslahatan kaum Muslim atau bangsa pada umumnya, dapat dibolehkan menjadi pejabat publik. Namun demikian, rakyat atau yang mengangkatnya tetap berkewajiban untuk memperhatikan dan mengawasi jalannya amanah yang diserahkan pada yang bersangkutan sebagaimana juga diserahkan kepada kaum Muslim.[89]

Nalar fiqih *Jam'iyyah Nahdlatul Ulama* (NU) atau dalam istilah di sini ditulis ke-NU-an tidak menetapkan hukum pidana pada kaum Muslim yang pindah agama kepada agama non-Islam, tetapi kepindahan agama sebagai bagian dari pilihan dari person untuk memeluk agama Islam. Nalar fiqih ke-NU-an menghargai eksisensi hak asasi manusia dari umat manusia untuk menentukan pilihan agama, tidak ada paksaan dalam memeluk agama, dan kewajiban masuk agama Islam secara kaffah tidak mesti bersifat kelembagaan sebagaimana firman Allah Surat al-Baqarah ayat 208, tetapi juga bisa bermakna filosofis yang berarti kewajiban untuk tunduk pada regulasi hukum yang sah dan diakuinya sebagaimana juga menjadi prinsip dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945.[90] Oleh sebab itu, nalar fiqih ke-NU-an menetapkan bahwa statemen Qur'an yang menyatakan *telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu* (أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) bermakna bahwa kesempurnaan bukan berarti final tanpa perubahan tetapi makna *kamal* tersebut bertingkat tingkat sebagaimana terminologi ulama sufi dengan istilah *insan kamil*.[91] Oleh sebab itu, istilah kesempurnaan tidak berarti tidak ada perubahan sama sekali dan siap pakai tetapi kesempurnaan secara global dan filosofis sehingga pesan dan ajaran hukum/fiqih Islam bisa mencakup dan mengakomodir semua permasalahan hidup manusia yang dinamis dan variatif.

---

[89] **Mahbub Ma'afi Ramdlan,** *Kebolehan Mengangkat Pemimpin Non Muslim***, Laporan Bahstul Masail,** http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,59-id,55652-lang,id-c,bahtsul+masail-t,Kebolehan+Mengangkat+Pemimpin+Non+Muslim-.phpx, diakses 20 Januari 2014.

[90] Muhammad Rifai, *Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 104.

[91] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 102-103.

Fleksibilitas nalar fiqih ke-NU-an dapat dicerna dan didalami dari kajian-kajian pembahasan hukum yang bersifat moderat dan tidak fanatis. Ketika warga Jakarta banyak menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI, maka NU menetapkan kebijakan hukum melalui Bahstul Masail yang menyatakan bahwa seorang non-Muslim dibolehkan menjadi pemimpin publik dengan syarat dapat menjamin tegaknya kemaslahatan kaum Muslim dan bangsa. Nalar fiqih ke-NU-an ini menjadi salah satu model kajian fiqih yang dapat dikembangkan di Indonesia. Arah fiqih ke-NU-an menghendaki pembangunan dan pelembagaan norma-norma fiqih secara substantif, bukan hanya formalnya saja. Hal ini dapat dibangun nalar fiqih ke-NU-an yang elastis dan fleksibel karena memang sifat dasar dari hukum fiqh yang elastis dan fleksibel sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa Islam dalam hal ini norma fiqih dapat selalu sesuai dengan dinamika ruang dan waktu (*al-Islām shālihun likulli zamānin wa makānin*).[92]

Dalam pembangunan fiqih ke-NU-an, pijakan dasarnya adalah kesejahteraan umum atau dalam terminologi ushul fiqh dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah* yang artinya kemaslahatan umum. Semua fuqaha' NU selalu mendasarkan keputusan hukumnya pada kemaslahatan umum. Ibarah-ibarah kitab kuning yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hukum sebagaimana kasus hukum pemimpin non-Muslim adalah kemaslahatan umum, bukan semata-mata regulasi hukum literlek sebagaimana penukilan terhadap karya Ibnu Hajar tersebut. Pertimbangan kemaslahatan umum itu juga dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan hukum publik sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa *tashārruf al-imām ala ar-rā'iyah manûthun bi al-mashlahah* (kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan).[93]

Nalar fiqih ke-NU-an dapat juga diteliti dari sejarah pembangunan wacana keilmuan Islam yang disebarkan dan disampaikan pada warga

---

[92] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 102-103.

[93] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 211.

masyarakat dengan senantiasa memperhatikan kearifan lokal atau budaya, sehingga tidak semua yang tidak masuk akal kemudian dinilai bid'ah atau irasional, tetapi ada hal yang bisa diakomodir sebagai *karamah auliyah Allah* menurut KH Said Aqiel ketika mengisahkan norma irfani dalam fiqih ke-NU-an dengan menarasikan sejarah sahabat dan wali/ulama sebagai berikut.

> "Sayyidina Umar dalam khotbahnya melihat pasukan di daerah Soviet akan terjebak oleh musuh. Padahal, Sayidina Umar berada di Madinah. Pasukan dan komandan kaget mendengar suara Umar yang mengingatkan mereka".[94]

> "Sayidina Umar dapat surat dari Gubernur Mesir Amr bin Ash yang mengeluhkan Sungai Nil yang minta tumbal wanita cantik setiap kering. Sayidina Umar lantas menulis surat: Dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Kalau kamu mengalirkan air karena Allah, ayo keluarkan air kamu. Tapi kalau kamu mengirim air karena tumbal wanita cantik, tidak usah mengalir, kami tidak butuh airmu". Surat itu dilempar ke sungai Nil. Kemudian datanglah airnya. Hal ini memang tidak masuk akal dan dalil nashnya juga tidak ada. Tapi, nyata".[95]

> "Sunan Kalijaga atau Raden Muhammad Said ke sana ke mari bawa jago untuk diadu dengan syarat jika kalah masuk Islam. Ternyata jago Sunan Kalijaga tidak pernah kalah. Akhirnya orang berbondong-bondong masuk Islam. Sunan Gunung Jati juga melumpuhkan ilmu ki Kuwu Sangkan Bupati Cirebon, biasanya bisa terbang jadi macet. Kalau malam kelihatan macan karena baju Antakusuma, macet. Mau terbang gak bisa. Akhirnya Kuwu Sangkan masuk Islam".[96]

Sejarah tersebut menandakan bahwa nalar fiqih ke-NU-an tidak menafikan nalar keilmuan dan praktik pengamalan ilmu keislaman yang bersifat irfani atau suprarasional. Sebab, fenomena itu adalah sesuatu

---

[94] *Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 52-53.

[95] *Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 53.

[96] *Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 53.

yang faktual ada walaupun tidak bisa dinalar dengan logika manusia biasa. Namun demikian, tidak semua yang suprarasional dianggap *bid'ah dlalalah,* tetapi jika hal itu membawa kemaslahatan umat dibolehkan menurut nalar fiqih ke-NU-an.

Secara normatif religius, nalar fiqih irfani tersebut telah dikisahkan dalam sejarah Musa yang memiliki tongkat menjadi ular dan penyelamatan Nabi Ibrahim dari api, berkat sikap tawakkalnya yang sepenuhnya pada Allah swt, maka Allah swt menyelamatannya.

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى . قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى

Artinya: Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa?. Berkata Musa: «Ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya, dan aku pukul (daun) dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya». (Q.S. Thaha [20]: 17-18)

Menurut penafsiran Syaikh Abdul Qadir Jailani, Allah swt berkata kepadanya, "Lemparkanlah ia wahai Musa", lalu Musa melemparkannya, setelahnya, menjadi ular besar sehingga Musa lari darinya, maka Allah swt berfirman kepadanya,"Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikan kepada bentuknya semula". Hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan qudrah Allah kepada nabi Musa as agar tidak gentar menghadapi Fir'aun.[97]

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

Artinya: Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim», (Q.S. al-Anbiya' [21]: 69)

Menurut Syaikh Abdul Qadir Jailani, Nabi Ibrahim a.s selalu bertawakkal, baik ketika masih kecil maupun ketika sudah tua, berkat

[97] Syaikh Abdul Qadir Jailani RA, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani* ..., hlm. 192.

ketauhidan dan keikhlasan-nya ketika Ibrahim dimasukkan/berada dalam api itu, maka sifat api itu berubah menjadi sejuk yang tidak menyakitkan. Ini adalah mukjizat yang diberikan Allah swt kepada Nabi Ibrahim .a.s, tetapi hal ini juga bisa terjadi kepada setiap hamba jika telah mentauhidkan Allah dan ikhlas dengan-Nya, maka Ia akan melindungi dan memasukkannya ke dalam takwin-Nya. Bahkan takwin-Nya terkadang diserahkan kepadanya dan itulah yang dikenal *karamah* (sifat keistimewaan) yang diberikan kepada kekasih Allah (*waliyullah*).[98] Takwin dalam bentuk *karamah* itu juga telah diberikan oleh Allah swt kepada kekasih-Nya, ulama-ulama pejuang Kemerdekaan RI ketika mempertahankannya pada perang 10 November di Surabaya[99] ketika melawan NICA Inggris, para ulama/kiai telah mengambil bagian penting dan berperan aktif untuk mengalahkan pasukan lawan yang bersenjata lengkap dan modern. Berkat karamah para ulama, Pesawat NICA 4 jatuh, bahkan tidak ada satu pun bom NICA yang jatuh di Surabaya, karena ketika pesawat mau ngebom, maka ia dilempar oleh biji tasbih oleh kiai Abbas Buntet. Ini dalilnya berada dalam nalar fiqih irfani ke-NU-an, bukan bayani atau burhani.[100]

Secara historis, Nabi Muhammad saw juga pernah menghadapi kaum kafir dengan jumlah yang sangat besar, sedangkan jumlah pasukan Nabi saw hanya sedikit, tidak sebanding antara pasukan Nabi saw dan pasukan musuh, yakni ketika perang badar, pasukan Nabi saw hanyalah berjumlah 319 orang, dua ratus pasukan kuda dan tujuh puluh pasukan unta, sedangkan dari pihak lawan berjumlah seribu orang, enam ratus

---

[98] Syaikh Abdul Qadir Jailani RA, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani ....*, hlm. 58-59.

[99] Adapun beragam di antaranya adalah ada yang berpendapat bahwa jihad adalah segala daya upaya yang maksimal untuk menciptakan kemaslahatan manusia, dan ada yang juga berpendapat bahwa jihad adalah segala daya upaya yang maksimal untuk menindak tegas para pelanggar hukum yang sah. M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an..,* hlm. 679-686; *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi, Tuhan,* terj. Satrio Wahono dkk., (Bandung: Mizan, dan Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 385; Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,), hlm. 410. .

[100] *Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 53.

memakai baju tempur anti peluru, seratus pasukan kuda dan ratusan pasukan unta. Perang badar ini berakhir dengan kekalahan telak di pihak lawan, kaum kafir dan kemenangan bagi Nabi saw beserta pasukannya. Rahasia kemenangan ini tentu saja tidak lepas dari pertolongan atau karunia Allah swt kepada Nabi saw berupa mukjizat.[101]

Secara normatif-konstitusi, UUD-NRI sesungguhnya telah menempatkan nalar irfani sebagai landasan utama dalam hidup bernegara, sehingga Pembukaan UUD-NRI 1945 memiliki susunan redaksi sebagaimana tampak pada sebagiannya berikut: "susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.» Ini menunjukkan bahwa nalar hidup bernegara di Indonesia tidak bisa lepas dari landasan filosofi/prinsip-prinsip agama, walaupun NKRI tidak berdasarkan pada agama tertentu. Apalagi kalimat sebelumnya sudah ditegaskan bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan RI itu atas berkat rahmat Allah swt sebagaimana tampak pada sebagian redaksinya berikut: «Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.»

Secara filosofis, dengan meminjam pemikiran Noeng Muhadjir, peristiwa perang 10 November itu dapat dikategorikan dengan "empiris transendental", buktinya ada secara empiris, tetapi prosesnya untuk mencapai secara empiris itu tidak bisa dicapai dengan logika rasional, sebagaimana juga adanya "berkah" dan "ketenangan-ketenteraman jiwa" setelah melaksanakan ibadah shalat secara khusyu'.[102]

---

[101] M M al-A'zami, *The History of The Qur'anic Text: From Revelation to Compilation*, terj. Sohirin Solohin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 35.

[102] Penjelasan Prof Dr. H Noeng Muhadjir dalam kuliah S-2 pada Konsentrasi Filsafat Islam Prodi Agama dan Filsafat Program Pascasrjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001/2013.

Dalam konteks nalar fiqih irfani, kita dapat menangkap dari pemikiran Joko Widodo dalam *Sambutan Walikota Surakarta pada Akhirus Sanah Play Group dan TKIT Istiqomah Penumping Surakarta, 11 Juni 2011* yang mengampaikan pesan-pesan nalar keislaman (fiqih) irfani yang menekankan perlunya mendidik anak didik secara seimbang antara kemampuan intelektual, kemampuan fisik, kemampuan sosial dan kemampuan spiritualnya.[103] Dengan kata lain, yang hendak ia katakan bahwa nalar keilmuan yang hendak dibangun adalah wacana keilmuan yang utuh dan komprehensif karena nalar keilmuan irfani yang dalam hal ini disebut dengan "kemampuan spiritual" merupakan puncak tahapan dari nalar pemahaman (fiqih) bayani dan burhani.

> "Jangan sampai kita terjebak hanya mengejar kecerdasan intelektual saja, nilai mata pelajaran yang baik, tetapi melupakan ajaran-ajaran moral dan budi pekerti. Keseimbangan kesemuanya sangat diperlukan sehingga dapat membentuk anak menjadi generasi yang unggul dan berkualitas. Ini adalah tugas kita semua, baik sekolah, orang tua, pemerintah dan masyarakat".[104]

---

[103]Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *spirituality* yang dikenal dalam bahasa Arabnya adalah *ruhaniyyat* atau *ma'nawiyat*. Yang pertama berakar pada kata *ruh*, sedang yang kedua berakar pada *ma'na* yang berarti esensi. Kedua kata itu bermakna batiniah, menyangkut segala sesuatu yang berada dalam dunia yang lebih tinggi dari dunia realitas. Spiritualitas Islam tidak hanya berkonotasi esoteris, tetapi juga sekaligus eksoteris. Dengan demikian, spiritualitas dalam Islam merupakan jalan untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang lebih bersifat batiniah, sedangkan dimensi lahiriah sebagai jalan menuju dunia spiritualitas. Oleh sebab itu, Nabi saw bersabda: "Syari'ah adalah ungkapanku, Thariqah adalah perilakuku, dan Haqiqah adalah keadaan jiwaku". Demikian juga diungkapkan dalam term sufistik, "Barang siapa yang menjalani dunia tasawuf tanpa mengindahkan ajaran Syari'ah, maka ia seorang yang sesat (*zindiq*)". Islam mengakui aspek lahiriah dalam tataran syariah, sedangkan aspek batiniah dalam tataran tawasuf. Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat: Menepis Tudingan, Meluruskan Pemahaman*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 233-238.

[104]Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Akhirus Sanah Play Group dan TKIT Istiqomah Penumping Surakarta, 11 Juni 2011*, khusus data sambutan Walikota bersumber dari Data-data Dokumen Humas dan Protokol Pemerintah Kota Surakarta (24 Juni 2016).

Dalam tataran praktis, nalar fiqih irfani yang bisa dibangun dari pemikiran Joko Widodo adalah usaha untuk mengembangkan rasionalitas melalui belajar, memperhalus akhlakul karimah melalui penerapan sopan santun dan hormat pada orang tua, guru dan sesama, serta memperdalam spiritualitas melalui kekhusu'an dalam berdoa dan beribadah.[105] Walaupun demikian, ketika seseorang sudah sampai pada titik tertinggi spiritualitasnya bukan berarti lepas dari tanggung jawab sosial kemasyarakatan, tetapi justru semakin tinggi nilai spritualitas/ keimanan seseorang, maka ia seharusnya semakin halus dan luhur budi pekertinya dalam kehidupan empiris sosial kemasyarakatan sebagaimana disampaikan oleh Joko Widodo dalam sambutan pemberangkatan Jama'ah Haji Surakarta.

> "Ibadah Haji akan berdampak luas bagi manusia, tidak hanya fisik maupun rohani tetapi juga kehidupan sosial kemasyarakatan. Haji mabrur yang sangat dirindukan akan membawa kemashlahatan terhadap kehidupan manusia. Begitu juga dengan banyaknya haji dari Kota Solo, sepulangnya dari tanah suci diharapkan mampu membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik".[106]

Apa yang dapat kita simpulkan dari arahan dan sambutan Joko Widodo adalah bahwa kesalehan spiritual harus berimplikasi pada kesalehan personal dan sosial kemasyarakatan serta kebangsaan, sehingga dengan pendalaman spiritualitas melalui doa warga Surakarta (dalam hal ini Jama'ah Haji tahun 2009) akan tetap terpelihara dan terjaga suasana yang adem ayem, hidup rukun damai, dan nyaman tentram dalam suasana kehidupan yang plural,[107] sehingga dengan naik haji, maka kita berharap akan menambah kekuatan keimanan dan semangat

---

[105]Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Akhirus Sanah Play Group dan TKIT Istiqomah Penumping Surakarta, 11 Juni 2011.*

[106] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009.*

[107]Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009.*

hidup damai, rukun dan toleran dalam pluralitas, serta menghindari tindakan tercela.

Dengan meminjam pemikiran Guru Besar Jurusan Fiqih dan Madzhab Islam Universitas Damaskus, Wahbah Az-Zukhaili, arahan Joko Widodo tersebut sesungguhnya hendak menegaskan bahwa umat manusia Indonesia hendaknya mampu membangun keharmonisan dan keseimbangan dalam hidupnya baik aspek jasmani, akal maupun rohani, baik aspek kepentingan pribadi maupun masyarakat, dan baik aspek kemampuan materi maupun rohani.[108]

> "Selama berhaji, calon haji dilarang bertengkar, berperang, menumpahkan darah, dan tak boleh merusak tanaman yang terdapat di tanah Haramain itu. Sebuah pendidikan karakter dan perilaku yang positif yang akan berdampak terhadap kehidupan seorang Muslim yang harus selalu menjaga keserasian dan harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana pesan Rasullallah SAW *"Hai semua manusia, Allah telah mewajibkan atasmu untuk haji, maka berhajilah kalian. Siapa yang berhaji karena Allah, lalu tidak berkata atau berbuat keji dan fasik, ia akan keluar dari semua dosa-dosanya bagaikan pada saat ia dilahirkan oleh ibunya. Dan, melakukan ibadah umrah hingga umrah tahun depan menjadi penebus dosa yang terjadi di antara kedua umrah itu. Sungguh, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.» (HR Bukhari dan Muslim)*".[109]

Kita dapat menangkap pesan-pesan utama dari arahan dan sambutan Joko Widodo tersebut terutama jika dilihat dari sudut pandang nalar fiqih irfani semisal bagaimana seseorang yang sudah naik haji harus menampilkan diri sebagai orang yang sudah meningkat akhlak dan spiritualitas/keimanannya sehingga ketika orang yang berhaji sudah

---

[108]Wahbah Az-Zukhaili, *al-Qur'an al-Karim: Bunyah al-Tasyri'iyyah wa Khasha'ishuh al-Khadlariyyah*, yang diterjemahkan oleh Sayrif Hade Masyah dan Ali Efendi Anshori, dengan judul *al-Qur'an Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta: Mustaqiim, 2002), hlm. 111.

[109] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009*.

menyelesaikan haji dan balik ke tanah air, maka ia seharusnya mampu memancarkan nilai-nilai mulia dan indah dari keimanan tersebut ke dalam tataran empiris sosial kemasyarakatan.

Konsistensi isi pesan sambutan Joko Widodo masih tetap seirama antara tahun 2009 dengan sambutan pemberangkatan haji sebelumnya tahun 2006, yakni (a) secara praktis, diharapkan pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik yang dimulai dari niat yang lurus mencari ridla Allah, jalin komunkasi dan ukhuwah Islamiyah, jaga kesehatan fisik, mental dan spiritual, dan (b) diharapkan orang yang telah menunaikan ibadah haji akan menjadi manusia teladan yang kemudian tercemin dan terpatri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan/kesalehan sosialnya. Dalam hal tersebut, pada saat sambutan tanggal 25 Desember 2006, Joko Widodo sebagai Walikota berharap akan terbangun jalinan yang erat antara kesalehan spiritual-personal dengan kesalehan sosial-kemasyarakatan/kolektif setelah pulang dari tanah suci, Makkah dan Madinah.[110]

[110] *Solopos*, 6 Desember 2006, hlm. 8.

sembilan merk produk ... an ringan ditarik dari pasaran karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tentang pro-

pur dengan HKO jenis ... ason, metampiron, deksametason, CTM, allupurinol, sildena-

Bersambung ke Hal 8 Kol 5

Espos/Burhan Aris Nugraha

PELEPASAN CALHAJ SOLO—Sebanyak 402 jemaah calon haji (Calhaj) asal Solo yang tergabung dalam Kloter 22 diberangkatkan dari Pendhapi Gedhe Balaikota, Solo, Selasa (5/12), menuju Asrama Haji Donohudan. Tampak Calhaj bersalaman dengan Walikota Joko Widodo seusai mengikuti upacara pelepasan.

47 Calhaj dirujuk ke RS Dr Moewardi

Walikota lepas 402 Calhaj Solo

Solo (Espos)

Sebanyak 402 orang calon haji (Calhaj) asal Kota Solo dilepas Walikota Solo Joko Widodo di Pendapi Gede Balaikota Solo, Selasa (5/12).

Para Calhaj tersebut merupakan anggota kelompok penerbangan (Kloter) 22 Embarkasi Adisumarmo Solo.

Data Kantor Departemen Agama (Depag) Kota Solo mengungkapkan total jemaah Calhaj Kota Solo yang diberangkatkan pada tahun 1427 H/2006 M berjumlah 980 orang.

Pemberangkatan para jemaah Calhaj tersebut dibagi dalam empat Kloter yakni Kloter 22, 32, 44, dan 78. Dalam pelepasan tersebut, Walikota Solo saat memberikan sambutannya mengungkapkan bahwa seseorang yang bergelar haji adalah manusia teladan. Sehingga harapan masyarakat terhadap para haji tersebut mampu melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing dalam bungkus kesalehan sosial.

Bersambung ke Hal 8 Kol 1

Jadwal pemberangkatan Calhaj

Hari/tanggal	Kloter	Asal	Berangkat	Pesawat
Rabu (6/12)	22	Kota Solo	19.00 WIB	GA 6108
Rabu (6/12)	23	Kab Purworejo	22.00 WIB	GA 6208

Sumber : PPIH Embarkasi Adisumarmo

Walikota lepas ..... sambungan dari Hal 1

"Luruskan niat ibadah haji untuk mengharap rida Allah," tuturnya.

Dikatakannya, ada beberapa hal yang harus senantiasa diingat dan dilakukan para jemaah Calhaj ketika menunaikan ibadah haji. Setelah meluruskan niat untuk menggapai rida Allah, para Calhaj harus menjalin komunikasi serta ukhuwah islamiyah di antara sesama Calhaj selama berada di Tanah Suci. Selanjutnya yakni menjaga kondisi kesehatan, baik fisik, mental maupun spiritual. Pasalnya, imbuh Jokowi, para Calhaj akan menempuh perjalanan rohani yang panjang dan melelahkan. Sehingga kesegaran jasmani serta ruhani merupakan hal yang harus dijaga.

Di bagian lain, sebanyak 47 Calhaj embarkasi Adisumarmo hingga hari ke-9 pemberangkatan jemaah haji telah dirujuk ke Rumah Sakit Dr Moewardi Solo karena sakit.

"Hingga hari ini (kemarin) sebanyak 47 jemaah Calhaj embarkasi Adisumarmo telah dirujuk ke RS Dr Moewardi, antara lain karena menderita sakit pernapasan, jantung, dan hepatitis," kata Koordinator Humas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Adisumarmo, H. Akhmad Su'aidi, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali.

Karena itu, katanya, mereka terpaksa tidak bisa berangkat bersama kelompok mereka. Saat ini mereka menjalani perawatan, dan jika nanti telah sembuh akan diberangkatkan dengan kloter lain.

Selain itu, katanya, ada enam jemaah yang gagal berangkat karena sedang hamil. Sesuai surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Kesehatan dengan Menteri Agama, katanya, ibu hamil yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat adalah usia kandungan 14-26 minggu.

Sementara itu dilaporkan, Depag akan memberikan tindakan tegas kepada Saudi Arabian Air Lines (SAAL) karena keterlambatan tiga penerbangan haji menuju Madinah dari Embarkasi Hang Nadim Batam. Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Razali Jaya, di Batam. "Saya sudah lapor ke menteri, dan dijawab Dirjen yang akan menindak tegas SAAL," kata Razali. Ia mengatakan pesawat SAAL telah tiga kali secara berturut-turut mengalami keterlambatan penerbangan pada Kloter 1, 2, dan 3.

Sementara itu Manager Operasional Saudi Arabian Air Lines Heldi Yanuar mengatakan akan mematuhi standar penerbangan internasional yang berlaku. ❑ **m48/Ant/dtc**

(Walikota melepas Jamaah Haji Solo Tahun 2006)

Nalar irfani (baca: spiritualitas) itu terpatri dalam sambutan Joko Widodo tersebut yang mengatakan perlunya me-"luruskan niat ibadah (haji) mengharap ridla Allah".[111] Kata sambutan tersebut memiliki muatan makna dalam sudut pandang kajian fiqih Islam bahwa setiap amal perbuatan –menurut Wahbah Az-Zukhaili-tidak akan diterima di sisi Allah jika tidak didasari asas "niat baik dan taqwa yang disertai amal shaleh. Sebab niat itu sebagai timbangan, dasar dan yang mengarahkan suatu perbuatan" dan sekaligus standarisasi mengukur keikhlasan amal perbuatan seseorang dari niat baiknya sebagaimana firman Allah:[112]

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

[111] *Solopos*, 6 Desember 2006, hlm. 8.

[112] Wahbah Az-Zukhaili, *al-Qur'an al-Karim: Bunyah al-Tasyri'iyyah wa Khasha'ishuh al-Khadlariyyah...*, 205.

> Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Q.S. al-Bayyinah [98]: 5).

Kata sambutan Joko Widdo yang mengaitkan ibadah ritual (Haji) dengan ibadah/kesalehan sosial tersebut -dalam sudut pandang Wahbah Az-Zukhaili- memiliki spirit yang berakar pada ayat yang berbunyi; æó í ðÞö í ãðæ¸ ¸áÕøóáó¸Éó æó í ðÄúÊðæ¸ ¸áÒøóßó¸É (mendirikan shalat dan menunaikan zakat), yang artinya bahwa bagaimana niat yang baik dan ibadah yang ikhlas akan mampu melahirkan kesalehan sosial, yakni shalat sebagai ibadah yang lebih banyak spiritualitas daripada dimensi sosialnya, dan kemudian diikuti dengan ibadah zakat sebagai ibadah yang lebih banyak dimensi sosial daripada spiritualitasnya.[113] Dengan kata lain, hubungan antara nalar bayani dan/burhani –seperti amal shaleh/kesalehan sosial- yang bertumpu pada rasionalitas tafsir agama Islam harus dihubungan dengan nalar irfani -yang berhubungan dengan niat baik, ikhlas, dan akhlakul karimah/kesalehan pribadi.

Dalam bahasa Ibnu Arabi, shalat itu memiliki dimensi *Haqq* (batin) (yang terdiri dari tahmid, takbir, tasbih, dan perkenan Allah terhadap ucapan-ucapan hamba-Nya) dan dimensi *khalq* (lahir) (yang merupakan permohonan seorang mukmin di dalam shalat dan segala tindakan yang menjadi bagian shalat) yang merupakan satu kesatuan. Menurut Ibnu Arabi, dasar pemikiran ini adalah ayat al-Qur'an yang berbunyi: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (yang artinya: "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu", Q.S. al-Baqarah [2]:152). Ayat ini diperjelas dengan hadis Qudsi yang berbunyi: *qassamtu al-shalata baini wa baina 'abdi nishfaini fa nishfuha li wa nishfuha li 'abdi wa li 'abdi ma saala* (yang artinya: "Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian: satu bagian untuk-Ku dan satu bagian lagi untuk hamba-

---

[113] Wahbah Az-Zukhaili, *al-Qur'an al-Karim: Bunyah al-Tasyri'iyyah wa Khasha'ishuh al-Khadlariyyah...*, hlm. 205.

Ku; dan untuk hamba-Ku apa yang dimintanya").[114] *Haqq*[115] adalah Tuhan yang menjadi muara niat baik/tulus dari aktivitas-aktivitas amal shaleh, sedangkan *khalq* adalah plural sebagai aktivitas-aktivitas amal shaleh dari hamba. Dengan demikian, unsur spiritualitas adalah unsur yang berhubungan langsung dengan Tuhan, sedangkan unsur sosial adalah yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia, yani *tajalli* (penampakan sifat-sifat Tuhan, seperti sifat kasih sayang dan adil) dalam diri manusia (*mushalli*/orang yang shalat) dalam kehidupan sosial.

Dalam kerangka *tajalli* tersebut, nalar fiqih irfani Joko Widodo berwujud dalam usaha melakukan *tajalli* (aksiologi) nilai-nilai Qur'ani dalam "menata kehidupan bangsa Indonesia agar lebih maju, lebih toleran, dan bebas dari kemiskinan" sebagaimana sudah dilakukan Nabi Muhammad saw ketika "mentransformasi bangsa Arab menjadi beradab dan berkemajuan". Hal ini harus dilakukan karena agenda transformasi bangsa Indonesia masih banyak yang harus dilakukan dengan membenahi "masalah-masalah kemiskinan, masalah ketimpangan—ketimpangan sosial, ketimpangan antarwilayah. Dan sampai sekarang, wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga belum terhubung dengan baik. Sampai sekarang integrasi ekonomi nasional juga belum kuat dan belum produktif".[116]

Kehalusan irfani (baca: spiritualitas) dalam keluruhan budi pekerti atau akhlakul karimah diharapkan menjelma dalam amal shaleh sosial yang di sini jika dilihat dari nalar fiqih ke-NU-an KH Hasyim Asy'ari

---

[114] Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi*...., hlm. 97-98; bandingan dengan Muhyiddin Ibnu Arabi, *Fushuh al-Hikam*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1946).

[115] Menurut Muhyiddin Ibnu 'Arabi, *al-Haqq ta'ala lahu ithlaq al-wujud min ghairi taqyidin wa huwa al-khair al-mahdla alladzi la syarra fihi* (yang artinya: Tuhan adalah Wujud Mutlak tanpa batas, dan Ia adalah Kebaikan Murni, yang tidak terdapat pada-Nya keburukan). Yunasril Ali, *Manusia Citra Ilahi*...., hlm. 103.

[116] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Nuzulul Quran* Tahun 1437 H/2016 M, Selasa, 21 Juni 2016, di Istana Negara Jakarta, oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **21 Jun 2016 ; 2406 Views**Kategori: Transkrip Pidato,http://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowi-pada-peringatan-nuzulul-quran-tahun-1437-h2016-m-selasa-21-juni-2016-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

dapat dinyatakan bahwa kesalehan personal/ibadah ritual harus menjelma dalam perilaku amal sosial yang baik dan memberikan rahmat dalam pluralitas hidup. Apalagi pluralitas hidup manusia sesungguhnya adalah rahmat dan karunia agung yang dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kreatifitas untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan umat dalam bidang apa pun bisa dicapai, termasuk dalam bidang ekonomi sebagaimana spirit firman Allah yang menyatakan bahwa "Allah swt menghendaki kemudahan" (Q.S. al-Baqarah [2]: 185) dan juga mengikuti sifat sunnah Nabi saw yang menyatakan bahwa "Aku (kata Nabi saw) diutus untuk memberikan kemudahan dan keluasan". Dari spirit ini dalam bidang muamalah, nalar fiqih ke-NU-an memberikan keleluasaan untuk berijtihad dan bekerja sesuai dengan asas manfaat dan maslahah yang hakiki bagi umat manusia.[117]

Nalar fiqih irfani yang melahirkan paham/tindakan pluralitas ini dapat kita pahami dari Joko Widodo (sebagaimana direkam dari hasil wawancara dengan Walikota Surakarta saat ini, FX Hadi Rudyatmo) yang dalam keseharian dan kebijakannya selalu mau berjabat tangan dengan siapa pun, menerima siapa saja tanpa membeda-bedakan atas dasar suku, etnis, budaya, status sosial, ataupun agamanya, semuanya diterima dengan tangan terbuka dan egaliter. Tindakan Joko Widodo ini sesungguhnya bagian dari penerapan ajaran ideologi Pancasila yang menganut kebhinekaan. Oleh sebab itu, nalar pluralitas Joko Widodo di sini bukan hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi sudah melakukannya dalam tataran empiris baik sewaktu di Surakarta, di Jakarta, dan bahkan hingga kini sebagai Presiden RI.[118]

Dengan kata lain, nalar irfani hendak menyampaikan wacana keilmuan (fiqih) Islam yang komprehensif sebagaimana idealitas "pesan utama" hermeneutika fenomenologis Paul Riceour untuk mencapai "kesadaran transendental" (baca: Edmund Husserl), yakni kesadaran yang mengatasi segala bentuk partikularitas sebagaimana tata hidup

[117] KH M Hasyim Asy'ari, *Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin* dalam Ishomuddin Haziq (ed), *Irsyad al-Syari* ..., hlm. 91-94.

[118] Hasil Wawancara dengan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, tanggal 24 Juni 2016 Jam 18 WIB di Kantor Walikota Surakarta.

beragama Surakarta yang bisa dipertemukan dalam satu titik temu kerja-kerja sosial dan pembangunan masyarakat Surakarta, tetapi sekaligus menghayati partikularitasnya karena semua pemeluk agama bekerja berdasarkan niat tulus/ikhlas dari masing-masing ajaran agama untuk membangun kesejahteraan masyarakat bersama. Oleh sebab itu, kita dapat mengatakan bahwa nalar ijtihad irfani Joko Widodo di sini hendak menurunkan paham pluralitas hidup dari konsep menjadi praktis, sehingga pluralitas itu bukan hanya sekadar aksi konseptual, tetapi juga sekaligus aksi sosial. Nalar keilmuan irfani ini dalam bahasa Haryatmoko, Guru Besar Filsafat Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dapat dikenal dengan "universalitas konkrit",[119] yakni universal karena seluruh umat beragama bisa berpartisipasi dalam satu kerja, tetapi sekaligus niat tulus/ikhlas bekerja lahir dari ajaran masing-masing agama yang partikular.

D. BLUSUKAN SEBAGAI TRADISI DAKWAH KIAI

Secara etimologis, kata "blusukan" berasal dari bahasa Jawa, dari kata dasar blusuk yang berarti 'masuk' dan akhiran –an (afiks verba) yang berarti 'masuk-masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu'. Dalam bahasa Jawa blusukan merupakan verba, seperti dolanan 'bermain', sarungan 'memakai sarung', dan oyak-oyakan 'kejar-kejaran'.[120]

Hubungan kata blusukan dengan nalar fiqih adalah bahwa blusukan sesungguhnya memiliki substansi makna yang mirip, yakni "sebagai usaha mengenali dan mengetahui sesuatu hingga pada akar masalah sesungguhnya". Demikian juga fiqih memiliki makna usaha untuk mengetahui sesuatu hingga mendalam tentang sesuatu, tetapi hanya

[119] Lihat, Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta: Kompas, 2003)

[120] Kata blusukan jika dibandingkan dengan kosa kata lain dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "Kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia, afiks –an pada umumnya membentuk kata benda dan berarti 'hasil' atau yang di-', misalnya, arahan 'hasil mengarahkan atau yang dijadikan arah', rujukan 'yang dirujuk', pimpinan 'hasil memimpin', dan suruhan 'yang disuruh'. Jadi, kata blusukan diserap ke dalam bahasa Indonesia secara utuh". *Apa arti kata blusukan yang sebenarnya?,* http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-arti-kata-blusukan-yang-sebenarnya, diakses 3 Juli 2016.

terbatas pada masalah hukum fiqih saja, sedangkan blusukan pada semua akar masalah. Oleh sebab itu, tujuan makna tersebut mirip, tetapi fiqih spesifik pada pengetahuan syara'. Dalam bahasa Yusuf al-Qardawi, pembangunan nalar fiqih tidak bisa hanya berlandaskan pada dalil-dalil normatif dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi saja, tetapi harus juga memperhatikan realitas empiris yang menjadi kebutuhan umat manusia baik dari sisi manfaat maupun madlaratnya.[121]

Yusuf Qardawi dengan mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa seorang mufti atau ahli hukum Islam dalam memutuskan hukum/fatwa harus berlandaskan setidaknya dua aspek: *Pertama*, memahami realitas, sebab-akibat dan isyarat-isyaratnya secara cermat. *Kedua*, memahami norma-norma fiqih dalam kitab suci al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, seorang ahli fiqih harus memiliki pengetahuan realitas yang mendalam dan mampu memadukannya dengan nilai-nilai fiqih, karena manusia sebagai pengguna hukum tidak hanya hidup dalam tataran normatif fiqih tetapi juga hidup dalam realitas yang sedang dihadapi. Hal ini diperkuat dengan kisah Nabi Yusuf yang sampai pada kesimpulan faktual-empiris, bahwa robeknya baju di belakang menunjukkan bebas dan bersihnya Nabi Yusuf dari perbuatan maksiat. *"Inilah yang menjadikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menetapkan wajibanya perubahan fatwa/hukum sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan kultur"*.[122]

Dengan meminjam bahasa Yusuf Qardawi, dalil blusukan adalah sama dengan pandangan ahli fiqih yang mewajibkan untuk memahami realitas secara objektif dengan berbagai dimensi, unsur-unsur, dan dorongan-dorongan, sehingga dalam merumsukan keputusan hukum/kebijakan hukum berdasarkan pada pemahaman hukum/fiqih normatif dan pengetahuan realitas kehidupan manusia secara komprehensif, setelah itu baru diputuskan ketentuan hukumnya.[123]

---

[121] Yusuf Qardawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslim di Tengah Masyarakat nn-Muslim*, terj. Adillah Obid, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 89.

[122] Yusuf Qardawi, *Fiqih Minoritas...,* hlm. 52-53.

[123] Yusuf Qardawi, *Fiqih Minoritas...,* hlm. 54.

Dengan merujuk pada pemikiran Soekarno, blusukan sesungguhnya merupakan bagian dari salah satu cara kerja seorang nasionalis yang hendak berusaha mengetahui keadaan secara faktual, yakni "berani membukakan mata di muka keadaan-keadaan yang nyata itu". Setelah mengetahui keadaan faktual, kita harus mengabdi pada kenyataan untuk memperbaiki keadaan masyarakat dan sekaligus menolak segala bentuk perilaku yang menyengsarakan rakyat bawah.[124]

Pembangunan nalar fiqih ke-NU-an yang berlandaskan pada realitas faktual dikisahkan oleh Gus Dur[125] dalam masalah fatwa kentongan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat, sempat terjadi beda pendapat antara KH Hasyim Asy'ari dengan KH Faqih Maskumambang, tetapi kemudian yang diambil adalah fatwa yang lebih dekat dengan realitas empiris hidup manusia. [126] Dalam ayat al-Qur'an dijelaskan perlunya memperhatikan realitas empiris sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan.

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى
الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

> Artinya : Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?, Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?, Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (Q.S. al-Ghasyiyyah [88]: 17-20).

Sebaliknya, al-Qur'an melarang seseorang atau ahli fiqih untuk memutuskan sesuatu atau perkara hukum tanpa menggunakan menggunakan penglihatan, pendengaran, dan hati nurani yang mendalam.

---

[124] Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Kholid O Santoso (ed), (Bandung: Sega Arsy, 2015), hlm. 84.

[125] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita…..*, hlm. 235.

[126] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita…..*, hlm. 235.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai (Q.S. al-'A'raf [7]: 179).

Dalam kegiatan blusukan itu, ada upaya untuk melihat, mendengar dan kesadaran hati untuk mencari solusi serta upaya untuk merumuskan kebijakan yang hendak diambilnya, sehingga pertimbangan yang berlandaskan pada realitas empiris akan bersifat utuh, tidak parsial. Hal itu juga menjadi penekanan dalam al-Qur'an bahwa dalam segala kebijakan dan keputusan yang bersifat publik harus berdasarkan pertimbangan dan analisis yang utuh, bukan parsial.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 208)

ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ
تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ
ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah [2]: 208).

Dalam upaya memahami realitas empiris, nalar *ahlussunnah wal jamaah* sebagaimana dirumuskan kembali oleh Pengurus Wilayah NU Jawa Timur menekankan setidaknya tiga hal: *Pertama*, nalar moderatisme ala KH Hasyim Asy'arie. *Kedua*, apreasiasi terhadap budaya yang baik dan sesuai dengan norma fiqih. *Ketiga*, apresiasi terhadap masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kepentingan publik, yakni *mabadi' khayru ummah* seperti *al-shidqu* (jujur), *al-'amanah wa al-wafa' bi al-'ahdi* (menepati janji), *al-'adalah* (adil), *al-ta'awun* (kerjasama) dan *al-istiqamah* (konsisten).[127]

[127] Zuhairi Misrawi, *Hadratusysyaikh Hasyim Asy'arie: Modratisme, Keuamatan,*

Dengan meminjam termnologi Tafsir al-Qur'an Tematik Kementerian Agama RI, blusukan merupakan bagian dari pelaksanaan amanah untuk mengetahui secara empiris kebutuhan rakyat, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan akan memberikan manfaat yang tepat dan kondusif bagi rakyat/masyarakat. Oleh sebab itu, kewajiban menunaikan amanah bagi setiap pemimpin menjadi perhatian serius dalam al-Qur'an sehingga kata-kata amanah terulang sebanyak 9 kali, di antaranya sebagai berikut:[128] Pada bagian pertama ini mengulas masalah pengertian amanah yang terdapat dalam al-Qur'an, yang menegaskan, bahwa seorang pemimpin harus mampu menyampaikannya pada yang berhak dan memelihara apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

> Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S. an-Nisa' [4]: 58)

Dalam tafsir al-Zamakhsyari, ayat ini merupakan perintah umum terhadap siapa saja yang mengemban amanah agar menunaikannya serta perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum. Dalam Tafsir al-Dar al-Mantsur disebutkan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum Allah dan menunaikan amanah yang diembannya, sedangkan kewajiban rakyat adalah mendengarkan, mentaati dan wajib melaksanakan perintahnya. Sementara itu, Tafsir al-Razi menyebutkan bahwa ayat tersebut berhubungan dengan masalah kewajiban bagi seorang mukmin untuk menunaikan amanah baik urusan

---

dan Kebangsaan, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 148-149.

[128] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetap Solusi*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 185.

dunia maupun urusan akhirat. Berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa menunaikan amanah merupakan amal shaleh, maka menunaikan amanah (*adaul amanati*) merupakan bagian dari amal shaleh.[129]

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ

Artinya: Mereka berkata: «Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. (Q.S. Yusuf [12]: 11)

Dalam Tafsir al-Razi, kata لَا تَأْمَنَّا diartikan dengan makna, saudara-saudara Yusuf berkata, jangan khawatir keadaan Yusuf, kami mencintainya dan akan memperlakukannya dengan baik. Dalam Tafsir Abu al-Saud disebutkan bahwa mengapa ayah tidak mempercayakan amanah kepada kami tentang Yusuf, sedangkan engkau adalah ayahku dan kami adalah anak-anakmu serta Yusuf adalah saudara kami. Oleh sebab itu, kami pasti akan menjaganya dengan baik dan mencintainya.[130] Dalam pengertian ini, amanah sama dengan memelihara tanggung jawab sebaimana mestinya dan tidak mencederainya.

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

Artinya: Berkata Ya›qub: «Bagaimana aku akan mempercayakannya (Bunyamin) kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya (Yusuf) kepada kamu dahulu?». Maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyanyang diantara para penyanyang. (Q.S. Yusuf [12]: 64)

[129] Lihat, *al-Maktabah al-Syamilah, al-Qur'an al-Karim wa Tafsiruhu.*

[130] Lihat, *al-Maktabah al-Syamilah, al-Qur'an al-Karim wa Tafsiruhu.*

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ

Artinya: Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang (penukaran) mereka, dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata: «Wahai ayah kami apa lagi yang kita inginkan. Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami, dan kami akan dapat memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan sukatan (gandum) seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah (bagi raja Mesir)». (Q.S. Yusuf [12]: 65)

Pada bagian kedua mengulas amanah yang harus ditunaikan jika seseorang telah mendapatkan amanah. Oleh sebab itu, untuk menjamin adanya pelaksanaan amanah itu harus ada ikatan janji yang bisa berbentuk jaminan/pakta integritas dalam bahasa umum di Indonesia.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu›amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. al-Baqarah [2]: 283)

Pada bagian ketiga mengulas amanah dalam memerintah, yakni mendapatkan kepercayaan untuk memegang amanah, sehingga memegang kendali untuk memerintah, serta amanah mengerjakan pekerjaan.

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ

Artinya: Dan raja berkata: «Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku». Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata: «Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami (Q.S. Yusuf [12]: 54)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: «Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya». (Q.S. al-Qassas [28]: 26)

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut mengulas amanah yang telah dipercayakan pada seseorang atau pemimpin harus dipahami, dipegang, dan dijalankan dengan baik dan konsekuen, bagaimana caranya agar penunaian amanah dapat terlaksana dengan baik, maka salah satu caranya adalah dengan melihat langsung apa yang menjadi masalah riil dan menyerap aspirasi/mendengar apa-apa yang menjadi masalah itu, dalam kebiasaan Joko Widodo dikenal dengan blusukan, sehingga bisa menyimpulkan dan mengambil kebijakan yang tepat dan prospektif.

Inilah makna kasus pemanggilan Yusuf untuk menghadap raja yang berarti bahwa setiap amanah dan pemberian amanah harus dijalankan sebagai tanggung jawab dan dikontrol dalam pendelegasiannya agar bisa berjalan efektif dan efesien.

Dari sisi rakyat, dalam menunaikan amanah, perintah untuk taat kepada penguasa didahului dengan perintah menunaikan amanah (Q.S. an-Nisa' [4]: 58-59). Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan amanah menjadi pondasi dalam mentaati kebijakan penguasa. Salah satu bentuk menunaikan amanah adalah berbuat adil pada siapa pun tanpa terkecuali, sehingga seluruh rakyat/masyarakat harus mendapatkan perlakuan adil dari penguasa/negara baik yang berada di perkotaan, pesisiran, pedesaan maupun daerah terpencil-terluar.[131]

Dengan meminjam pemikiran Fatwa MUI, blusukan pada dasarnya merupakan bagian dari langkah koordinasi dan sinergi yang bersifat langsung dengan *stakeholders* atau masyarakat dalam rangka merumuskan perencanaan terpadu dan manhaj shahih baik secara teoritis maupun praktis. Fatwa MUI tersebut berdasarkan dalil-dalil fiqih Islam.[132]

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu

[131] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 560-561.

[132] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI...*, hlm. 844.

Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali Imran [3]: 103)

Dengan fatwa MUI tersebut, pengambilan keputusan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip perencanaan terpadu, manhaj shahih, terkoordinir, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontra produktif, serta mengedepankan semangat kekeluargaan (*ukhuwah*), moderasi (*tawassuth*), keseimbangan (*tawazun*), dinamis dan dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Adapun cara untuk mencapainya salah satunya adalah dengan blusukan -yang selama ini dilakukan Joko Widodo-, sehingga dengannya, ia dapat melihat, mendengar dan mengmbil langkah-langkah tindak lanjut yang tepat.[133] Dengan demikian, maka langkah-langkah pengambilan kebijakan itu dapat mencapai sasaran dan bermanfaat bagi semua elemen masyarakat dan bangsa tanpa kecuali.

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8)

Dengan blusukan itu, langkah-langkah pengambilan kebijakan -yang bernuasa fiqih ke-NU-an- dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran serta merepresentasikan kepentingan umum/aspirasi masyarakat. Dalam melakukan penyerapan aspirasi dan pembangunan kepentingan umum tidak boleh ada diskriminasi, tetapi harus mencakup dan mengakomodir semua elemen masyarakat/bangsa tanpa melihat latarbelakang suku, ras,

[133] Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI*.., hlm. 844.

etnis, bahasa, agama dan golongan. Inilah falsafah hidup yang diakui Pancasila dan juga al-Qur'an tersebut sebagai sumber fiqih ke-NU-an.[134]

Hal ini sesuai dengan visi "revolusi mental" pemerintahan Joko Widodo-M Jusuf Kalla yang hendak membangun tiga pilar Trisakti yang pernah diutarakan oleh Presiden RI Pertama, Ir Soekarno, dalam pidatonya tahun 1963, yakni "Indonesia yang berdaulat secara politik", "Indonesia yang mandiri secara ekonomi", dan "Indonesia yang berkepribadian secara sosial budaya". Tiga agenda visi itu mengandaikan adanya sikap keterbukaan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bersama, kecerdasan bangsa dan perdamaian yang abadi dalam kebhinekaan.[135] Kebhinekaan itu dalam nalar fiqih ke-NU-an menjadi arus utama pemikiran dan gerakan dakwah NU.

> "Bukankah kitab suci al-Qur'an menyatakan, "Sesungguhnya telah Kuciptakan kalian (dalam bentuk) lelaki dan perempuan dan Kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa (*innâ khalaqnâ kum min dzakarin wa untsâ wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li ta'ârafû innâ akramakum 'inda Allâhi atqâkum*)" (QS al-Hujurat [49]:13) Ayat ini jelas membenarkan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Namun Allah juga berfirman dalam kitab suci-Nya itu: "Dan berpeganglah kalian kepada tali Allah (secara) keseluruhan dan janganlah bercerai-berai/terpecah belah (*wa' tashimû bi habli allâhi jamî'an wa lâ tafarraqû*)" (QS Ali Imran [3]:103). Ayat ini menunjukkan kepada kita, bahwa yang dilarang bukannya perbedaan pandangan melainkan bersikap terpecah-belah satu dari yang lain. Hal ini diperkuat oleh sebuah ayat lain: "Bekerjasamalah kalian dalam (bekerja untuk) kebaikan dan ketakwaan (*ta'âwanû 'alâ al-birri wa al-taqwâ*)" (QS al-Maidah

[134] M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 568.

[135] Joko Widodo, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html, diakses 30 Juni 2016.

[5]:2) yang jelas-jelas mengharuskan kita melakukan koordinasi berbagai kegiatan. Tetapi, kerjasama seperti itu hanya dapat dilakukan oleh kepemimpinan tunggal dalam berbagai gerakan Islam".[136]

Dalam hal ini, ada keikhlasan yang dikedepankan oleh ulama-ulama NU, yakni ada kesadaran untuk meleburkan kepentingan diri dan organisasi NU ke dalam kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada egosentrisme dan fanatisme ekslusif dalam nalar keilmuan NU. Dengan demikian, blusukan dalam nalar fiqih ke-NU-an pada dasarnya merupakan bagian dari gerakan dakwah *bil hal* (dakwah dengan tindakan) –yang sekarang dikenal dengan "blusukan"- untuk membangun masyarakat yang intelek dan taat beragama, memiliki etos kerja yang tinggi, dan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dalam hal ini salah satu contohnya, KH Zaini Mun'im, pendiri Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur yang juga tokoh NU kharismatik pada zamannya yang melakukan dakwah bil hal masuk ke pedalaman kampung, pedesaan dan pesisiran (atau blusukan) untuk berdakwah dan mencerdaskan umat dan bangsa, baik dalam bidang agama, sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam gerakan dakwah bil hal itu, ada kedekatan hubungan emosional antara kiai Zaini dan umat seperti hubungan anak dan orang tua.[137]

[136] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda*....., hlm. 236-237; Abdurrahman Wahid, *Tata Krama dan 'Ummatan Wahidatan,* http://www.nu.or.id/post/read/53490/tata-krama-dan-lsquoummatan-wahidatan, diakses 20 Juni 2016.

[137] *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016.

BAB IV

NALAR FIQIH KE-NU-AN JOKO WIDODO DALAM KEHIDUPAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN

A. FIQIH JIHAD KEBANGSAAN

M Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata ”jihad” dalam al-Qur’an diulang sebanyak empat puluh satu kali dalam beragam bentuknya. Kata jihad berasal dari huruf j-h-d yang pada asal muasal artinya adalah kesulitan atau kesukaran.[1] Kata “jihad” diambil dari asal kata *jahd* yang bermakna “letih atau sukar.” Sukar dan lelah menjadi kata kunci dari terminologi kata jihad sehingga jika memerlukan kesungguhan karena dihadapkan pada kesulitan. Di samping itu, ada ulama yang berpendapat bahwa kata jihad berasal dari akar kata *juhd* yang bermakna “kemampuan”. Kemampuan seseorang untuk melakukan tekad dan kehendak yang menjadi tujuannya dengan segenap daya upaya.[2] Dengan kata lain, jihad memiliki pengertian segala daya upaya untuk melaksanakan sesuatu dengan maksimal atau perjuang yang dilakukan dengan sungguh-sungguh,[3] sehingga pelaksanaan jihad harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sebagai jalan kemudahan, bukan

---

[1] M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur’an...*, hlm. 560-561.

[2] M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur’an.....*, hlm. 501.

[3] Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 489.

jalan kesulitan. Oleh sebab itu, Allah swt tidak menjadikan agama sebagai perangkap yang menjadikan pemeluknya mengalami kesempitan.[4]

Secara historis, jihad yang dilakukan Muhammad saw adalah dimaksudkan untuk mewujudkan revolusi akidah dan ibadah masyarakat dari akidah jahiliyah menuju akidah Islamiyah. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, ia melakukan revolusi mental, sikap dan perilaku masyarakat Arab yang sombong (takabbur), beringas, dan mudah bertengkar dalam suksesi kepemimpinan, tidak mudah bersatu dan memiliki kecenderungan terpecah belah menuju budaya Islam yang toleran, santun, ramah dan saling menghargai.

Kesuksesan Nabi saw melakukan revolusi bagi masyarakat Arab terwujud karena ia telah memberikan sumbangan nyata dalam menyelesaikan masalah-masalah Masyarakat Arab. Sukses histori Nabi di Makkah telah menjadi parameter dalam membangun dan menata sistem sosial-politik masyarakat Arab di Madinah. Rahasia kesuksesan Nabi saw melakukan revolusi bagi Masyarakat Arab disebabkan karena revolusi itu dimulai dari akidahnya. Nabi saw melakukan pelurusan dan pembinaan akidah agar umat bisa menganut dan mengamalkan akidah Islamiyah. Nabi saw telah berhasil membangun tata kehidupan masyarakat yang awalnya berdasarkan suku, golongan dan kelompok kemudian berdasarkan pada nilai-nilai akidah agama Islam. Sukses membangun *ukhuwah Islamiyah*, misalnya diwujudkan dengan terbangunnya perjanjian setia antara kaum Muslim Yasrib dengan kaum Muslim dari suku Aus dan Khazraj, Nabi saw lalu melanjutkannya dengan membangun persaudaraan sesama umat manusia (*ukhuwah basyariah*) dan kemudian diakhiri dengan pembangunan persaudaraan berbangsa dan bernegara (*ukhuwah wathaniyah*).[5] Persaudaraan yang inklusif inilah yang menjadi modal dalam membangun keutuhan dan ketahanan negara Madinah yang hal itu bisa menjadi inspirasi dalam membangun keutuhan dan ketahanan NKRI.

---

[4] Surat 22/ al-Hajj: 78.

[5] Isi Piagam Madinah menjadi sumber HAM dalam Islam. Eggi Sudjana, *HAM dalam Persepektif Islam; Mencari Universalitas HAM bagi Tantangan Modernitas yang Hakiki,* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 164.

Sukses histori dapat diwujudkan karena metode jihad yang diterapkan Nabi saw bukan pembangunan dan orientasi fisik yang utama, tetapi mental spiritual dan rasional. Hal ini sesuai dengan pesan al-Qur'an ayat 46 yang menekankan perlunya mengambil pelajaran bagi orang-orang yang berilmu (*al-'alimun*). Hasan Asy-Syarqawi dalam karyanya *Nahwa Manhaj 'Ilmi Islami* menegaskan bahwa jihad yang sesungguhnya adalah melakukan upaya menelaah, kajian dan penyelidikan alam dan makhluk. Al-Qur'an memberikan kebebasan dalam menggunakan dalil-dalil kauniyah untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan.[6] Dengan demikian, dakwah Nabi saw sewaktu di Makkah adalah melakukan perbaikan dan pembenahan akidah dan nalar pemikiran atau revolusi mental untuk menuju pemikiran dan akidah Islamiyah.

Sejak hijrah ke Madinah, Nabi saw mulai melakukan pembangunan riil dan konkrit setelah melakukan perbaikan dan revolusi akidah dan mental di Makkah. Abdulahi Ahmed An-Na'im, Ilmuwan Muslim terkemuka asal Sudan, juga memberikan penilaian poitif terhadap kebijakan Nabi Muhammad yang sangat tepat ketika ia membangun masyarakat Arab di Makah. Ajaran hukum dan regulasi Islam masa Makkah mencerminkan nilai-nilai universal-humanis, tidak ada yang bernada diskriminatif. Pesan-pesan agama Islam yang universal-humanis itulah yang memberikan harapan besar bagi kemajuan sebuah bangsa dan masyarakat. Hal ini terbukti ketika Nabi saw melakukan pembangunan tata kehidupan sosial kemasyarakatan, dapat berhasil mewujudkannya baik intern kaum Muslim maupun antar umat dengan non-Muslim.[7] Pluralitas beragama dan suku di Madinah menjadi tantangan tersendiri bagi Nabi saw. Oleh sebab itu, keberhasilan Nabi saw dalam melakukan revolusi akidah dan mental di Makkah telah menjadi parameter ketika beliau membangun masyarakat Madinah. Persaudaraan

---

[6] Hasan Asy-Syarqawi dalam karyanya *Nahwa Manhaj 'Ilmi Islami* yang diterjemahkan dengan judul *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press,1994),hlm. 196-197.

[7] Moh Dahlan, *Abdullahi Ahmad An-Naim: Epistemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

yang dibangun tersebut diawali dengan pembangunan persaudaraan internal kaum Muslim, yaitu antara kelompok *Anshar* dan kelompok *Muhajirin*.[8] Setelah sukses membangun *ukhuwah Islamiyah*, Nabi saw lalu membangun *ukhuwah basyariah* (persaudaraan sesama manusia) antara kaum Muslim dan non-Muslim dengan melakukan perjanjian tertulis yang dikenal "Piagam Madinah". Perjanjian ini menetapkan persamaan hak dan kewajiban bagi pemeluk agama dalam kehidupan sosial dan politik.[9]

Aktivitas Nabi saw tersebut merupakan *jihad al-akbar* (perjuangan yang agung dan mulia) membangun *ukhuwah Islamiyah* dan *ukhuwah basyarih*. Di Indonesia, Ulama Nahdlatul Ulama yang dikomandoi oleh KH M Hasyim Asy'arie kemudian melakukan *jihad al-akbar* sebagaimana dilakukan Nabi saw. KH Hasyim Asy'arie mengeluarkan fatwa resolusi Jihad yang isinya; *fardu ain* (kewajiban personal) membela tanah air yang dihuni oleh warga masyarakat yang plural. *Siapa-siapa yang gugur dianggap mati syahid. Dan siapa-siapa yang tidak membela Negara atau berkhianat diberikan hukuman mati atau dibunuh.* Oleh sebab itu, fatwa resolusi jihad tersebut telah melahirkan api jihad di kalangan santri yang bergabung dalam Hizbullah untuk melawan penjajah dan peristiwa itu kemudian melahirkan peristiwa 10 November.[10]

> "Bung Tomo setelah menghadap Kiai Hasyim, dengan semangat yang berapi-api meneriakan semangat perang, jihad melawan penjajah. Kata-kata *Allahu Akbar* sebanyak tiga kali yang diucapkan adalah pesan Kiai Hasyim yang harus ia ucapkannya di akhir pidato perangnya. Akhirnya, sekutu gagal total melawan tentara Hizbullah, bahkan saat itu pimpinan pasukan sekutu

---

[8] Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabawiyah,* Jilid 1. (Mathbaah Muhammad Ali Shubih, t.th.), hlm. 303.; dan lihat juga, Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam..,*

[9] Nabi Muhammad saw telah melatakkan prinsip-prinsip persamaan hak dan kewajiban dalam tata kehidupan di negara Madinah. Bahkan Nabi saw melarang menyakiti non-Muslim yang tidak bersalah. Momoon al-Rasheed, "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Sosial", dalam Glenn D. Paige, dkk., (eds.), *Islam and Nonviolence*, *Islam tanpa Kekerasan*, terjemahan M. Taufiq Rahman, (Yogyakarta: LkiS, 1998), hlm.121.

[10] Majalan Risalah NU, *Laporan Utama*, Edisi 41 Tahun 2013, hlm. 42.

Brigjen Mallaby tewas di tangan santri. Penggantinya Mayjen Mansergh pun tewas oleh senjata santri".[11]

Walaupun demikian, jihad fisik tersebut tetap bukanlah pilihan pertama, tetapi yang dikedepankan oleh KH Hasyim adalah jihad yang dialogis dan diplomatis, sehingga jihad fisik adalah pilihan akhir setelah tidak ada jalan dialogis dan diplomasi. Hal ini dapat disimak dari kisah KH M Hasyim ketika ditahan oleh Jepang, para kiai bereaksi dan melawan Jepang, tetapi KH M Hasyim memiliki taktik yang halus dengan mengutus KH Wahab Hasbullah dan KH A Wahid Hasyim, putranya, untuk menemui pimpinan kolonial Jepang di Jakarta. Hasilnya, KH M Hasyim kemudian dilepaskan oleh Jepang. Ujian berikutnya adalah permintaan kolonial Jepang untuk menambah setoran hasil bumi melalui para kiai diminta untuk memberikan legitimasi dalil-dalil agama. KH M Hasyim dengan berat hati dan dengan wawasan jauh ke depan menerimanya dengan syarat tidak diselewengkan, tetapi para kiai yang lain menolaknya. Kebijakan politis santun KH M Hasyim membuahkan hasil dimana Jepang kemudian menawarkan pelatihan militer. Tawaran itu diterimanya karena menurut KH M Hasyim kalau negara ini merdeka, juga memerlukan tentara. Hal ini terbukti ketika Jepang menyerah tanpa syarat lantaran Hirosima dan Nagasaki di Bom pada tanggal 4 dan 9 Agustus, maka para santri yang terlatih kemudian berhasil melakukan perlawanan terhadap para penjajah.[12]

Kebijakan politik KH M Hasyim tersebut merupakan keputusan yang memiliki dasar hukum fiqih yang kuat berdasarkan nalar fiqih irfani, bukan berdasarkan nalar fiqih bayani sebagaimana paham para kiai yang menentang kebijakan KH M Hasyim ketika menghadapi Jepang. Pembangunan ijtihad hukum KH M Hasyim tersebut tidak hanya dilandasi nalar fiqih bayani tetapi juga dilengkapi nalar fiqih irfani sehingga ia menelurkan keputusan hukum bukan hanya berdasarkan kemampuan akal pikir tetapi juga melalui nalar spiritual. Oleh sebab itu, keputusan hukum fiqihnya memiliki jangkauan kebenaran masa depan.

---

[11] Majalan Risalah NU, *Laporan Utama*, Edisi 41 Tahun 2013, hlm. 42.

[12] Majalan Risalah NU, *Laporan Utama*, Edisi 41 Tahun 2013, hlm. 40-41.

Nalar fiqih irfani telah menjadi tradisi di kalangan ulama sufi sebagaimana Imam al-Bushiri dan tradisi NU. Ia telah melahirkan sejumlah bait syair pada Rasulullah yang isinya di antaranya pujian pada Rasulullah dan Jihad. Nalar fiqih irfani Imam al-Bushiri diwujudkan dengan mengarang *bait syair* yang ditujukan pada Rasulullah dan setiap membaca satu bait selalu diikuti dengan bacaan: *"mawla ya shalli wasallim daiman abada/'ala habibika khairil khalqi kullihimi" (Tuhanku, berikanlah salawat dan salam yang abadi/kepada kekasih-Mu yang sebaik semua makhluk)*. Faktanya, setelah selesai mengarang dan membaca *bait syair* itu, Nabi saw mengusapkan tangan pada tubuh Imam al-Bushiri yang sakit dan setelah bangun, al-Bushiri sembuh total dari sakitnya.[13] Kondisi ini dalam kajian fiqih irfani dapat dibenarkan, karena pembuktian kebenaran fiqih tidak hanya melalui akal pikiran, empiris/burhani, tetapi tidak kalah pentingnya juga pembuktian irfani/spiritual.

Nalar fiqih Irfani yang hendak dikembangkan NU adalah untuk mewujudkan tradisi keberlakuan fiqih/hukum Islam yang mampu memelihara dan mempertahankan tradisi kultural masyarakat dan bangsa Indonesia yang berideologikan Pancasila yang oleh KH Ahmad Siddiq pada Muktamar NU ke 27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur dirumuskan sebagai "Hasil final perjuangan umat Islam". Hal ini merupakan *jihad al-akbar* dari NU dalam memperjuangkan dan mempertahkan NKRI sebagai *share holder* (pemilik saham).[14]

Nalar fiqih irfani ini memiliki aksentuasi tidak hanya membangun masyarakat Islam berdasarkan rasa keislaman, tetapi juga berdasarkan rasa kebangsaan. Spirit ini berdasarkan firman Allah swt surat at-Thaubah ayat 122 yang menekankan perlunya pendalaman ilmu pengetahuan agama yang berguna untuk membangun masyarakat. Dalam hal ini, NU telah berhasil memperjuangkan dan menegakkan NKRI sebagai cita-cita final dan sebagai penyangga harapan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai

---

[13] Majalah Risalah, *Mutolaah*, Edisi 34 Tahun 2012, hlm. 64.

[14] Said Aqil Siraj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun*,(Jakarta: LT NU, 2014), hlm. 22-26

Dasar Negara mencerminkan nilai-nilai fiqih Ahlussunnah wal Jamaah, sila pertama mencerminkan nilai tauhid, sedangkan empat sila lainnya mencerminkan amal shaleh, sehingga dalam nalar fiqih NU dapat dinilai bahwa "menjalankan nilai-nilai Pancasila" sama dengan menjalankan syariat Islam.[15]

Nalar fiqih NU memberikan kriteria dalam berjihad melalui beberapa tahapan, yaitu tradisi bertahap dalam penyampaian dan pelaksanaannya, mengurangi beban, dan meniadakan kesulitan. Kotekstualisasi fiqih Irfani dilakukan oleh para wali dan dilanjutkan oleh ulama NU walaupun tidak mudah, tetapi bahkan sering dianggap bid'ah. Hal ini berdasarkan ajaran Islam dan Nabi saw sendiri telah memberikan ibarah mengenai sikap akomodasi dan akulturasi terhadap tradisi luhur sebagaimana tradisi puasa, haji dan lainnya, tetapi hal itu tidak mencemari keluhuran dan sakralitas ajaran Islam. Akulturasi Islam dalam budaya setempat juga dilakukan oleh ulama NU dengan merumuskan dan menerima Pancasila sebagai filosofi dan dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[16]

Spirit fiqih NU itu juga menjadi spirit bagi paham kebangsaan Joko Widodo yang menyatakan pada saat Pidato Kepresidenan Pertama ketika pelantikan bahwa "*Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*".[17]

Nalar fiqih ke-NU-an sejak awal telah menetapkan tujuan berdirinya Negara sebagaimana juga menjadi kebijakan Joko Widodo adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat atau bangsa. Nalar fiqih ke-NU-an menargetkan berdirinya negara yang bertujuan untuk

---

[15] Said Siraj, *Islam Sumber Inspirasi...,* hlm. 85, 88, dan 95.

[16] Said Siraj, *Islam Sumber Inspirasi...,* hlm. 140-141.

[17] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014

membentuk negara hukum (*rechtstaats*) yang mampu menciptakan kemaslahatan berupa pengayoman, perlindungan dan pemberian jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, baik kemaslahatan bidang akidah dengan pemberian kebebasan beragama, keadilan, penegakkan hak asasi manusia, penegakan hak atas kepemilikan harta, maupun penegakan kehormatan diri dan keluarga.[18]

Dalam menjalankan dan menerapkan hukum fiqh, kita perlu menerapkannya dengan hati nurani/nalar irfani agar dapat mengambil keputusan dengan benar, jujur, adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Implementasi hukum fiqh akan tegak dengan sesungguhnya jika hati nurani menyertainya sehingga setiap keputusannya akan membawa maslahat bagi umat dan bangsa.[19]

Berdasarkan paparan tersebut di atas, jihad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: *Pertama*, *jihad al-akbar* (jihad yang agung dan mulia), yaitu perjuangan yang sungguh-sungguh untuk melawan daya emosi dan kehendak diri sendiri baik berupa nafsu maupun daya intelektual yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Al-Qur'an mengkisahkan hawa nafsu dalam kisah Nabi Yusuf.[20] Lebih lanjut, al-Qur'an menyatakan bahwa ketika Iblis dikutuk oleh Allah, Iblis bersumpah dihadapan-Nya.[21] Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan perlawanan setan atau iblis terhadap manusia agar menjadi sesat.[22]

Kedua, *jihad al-asghar* (jihad yang kecil), yaitu perjuangan untuk melawan musuh dengan menggunakan senjata atau alat perang lainnya dengan tujuan untuk menegakkan ajaran agama Islam.[23] Salah satu

---

[18] Said Siraj, *Islam Sumber Inspirasi...,* hlm. 156.

[19] Said Siraj, *Islam Sumber Inspirasi...,* hlm. 161.

[20] Surat 12 / Yusuf : 52.

[21] Surat 7 / al – A 'raf : 16-17.

[22] M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an..,* hlm. 667-679.

[23] Adapun makna tentang jihad memiliki beragam pendapat, ada yang berpendapat bahwa jihad adalah segala usaha maksimal untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, dan ada yang juga berpendapat bahwa jihad adalah segala usaha maksimal untuk menindak tegas para pelanggarnya. M Quraish Sihab, *Wawasan Al-Qur'an..,* hlm. 679-686; Amstrong, *Berperang Demi Tuhan..,* hlm.

bentuk jihad jenis kedua ini adalah perang para pejuang Indonesia melawan penjajah.

> "Perang 10 November ketika melawan NICA Inggris di Surabaya, peran kiai sangat penting bisa mengalahkan pasukan lawan dengan senjata lengkap dan modern. Pesawat NICA 4 jatuh. Tidak ada satu pun bom NICA jatuh di Surabaya. Pesawat mau ngebom dilempar oleh biji tasbih oleh kiai Abbas Buntet. Ini tidak ada dalil yang sahih, tetapi ini fakta dan nyata atas karamah dan maunah Allah swt".[24]

Dengan demikian, jihad fisik menjadi salah satu bentuk jihad yang penting dan pilihan terakhir dalam *jihad al-asghar*, tetapi yang terpenting dalam nalar fiqih ke-NU-an pada dasarnya bagaimana firman Allah swt yang menjelaskan masalah hukum fiqh dapat memberikan kemudahan dan menghindarkan dari kesulitan sebagaimana pesan al-Qur'an ayat 78 yang menyebutkan bahwa agama Islam dilahirkan ke dunia bukan untuk memberikan beban atau menyulitkan umat atau bangsa, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan umat atau bangsa.

Pernyataan Presiden RI yang mengatakan bahwa "tugas sejarah yang berat itu"[25] yang disampaikan pada pidato kenegaraan tanggal 20 Oktober 2014 adalah wujud jihad kebangsaan yang harus dilakukan sebagaimana juga pernah digelorakan oleh KH Hasyim Asy'arie. Jihad kebangsaan yang dimaksud oleh beliau adalah jihad memerdekakan dari dari segala bentuk penjajahan dari Kolonial Belanda. Jihad kebangsaan itu telah melahirkan semangat patriotisme para pejuang Muslim untuk mengusir penjajah. Jihad kebangsaan yang dilakukan KH Hasyim Asy'arie dilanjutkan pada tanggal 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy'arie bersama sejumlah Ulama NU Jawa Timur mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk melawan pasukan kolonial Belanda dan Inggris. Isi resolusi

---

385; Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.,), hlm. 410. .

[24] *Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 53.

[25] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo diakses 12 Desember 2014

jihad itu adalah bahwa "*fardu ain (wajib) hukumnya membela tanah air. Siapa-siapa yang gugur dianggap mati syahid. Dan siapa-siapa yang tidak membela negara atau berkhianat diberikan hukuman mati atau dibunuh*". Seluruh umat Islam dengan semangat nasionalisme dan patriotisme terus maju, maka pada tanggal 10 November 1945 terbangun semangat untuk melawan penjajah tersebut. Untuk itu, peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional.[26]

Walaupun Ulama NU telah berjuang di depan untuk melakukan perlawanan terhadap para penjajah, tetapi tidak ada satu pun yang menuntut negara ini menjadi negara Islam sebagaimana negara Arab Saudi yang mendasarkan diri pada al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama tetap berpendirian dengan memposisikan hukum Islam seagai bagian dari budaya hukum yang harus dilaksanakan warga masyarakat Muslim dan kemudian dapat menjadi sumber dalam pembangunan hukum nasional, bukan menjadi sumber satu-satunya. Nalar Ijtihad hukum NU ini merupakan nalar ijtihad dinamis yang dalam pemikiran Philip K Hitti dikenal dengan tahapan keislaman ketiga, yaitu tahapan Islam yang telah menjadi budaya, sedangkan tahap awalnya adalah Islam sebagai agama yang diajarkan Nabi Muhammad saw ketika berada di Makkah, dan tahapan keislaman yang kedua adalah Islam sebagai negara yang dipraktikkan di Madinah.[27]

Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menunjuk Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan terobosan baru dari keadaan biasanya. Kebijakan Joko Widodo ini merupakan kebijakan baru yang bertujuan untuk mewujudkan hasil sesuai dengan harapan publik. Dalam tradisi sufistik, pilihan-pilihan baru ini atau berbeda ini (*khilaf* yang berarti "berbeda dengan yang lainnya") dalam bahasa pesantren sering dimiliki oleh para pengasuh pesantren yang

---

[26] Zuhairi Misrawi, *Hadratusysyaikh Hasyim Asy'arie: Modratisme, Keuamatan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 86-90; Majalah Risalah, Edisi 4 Tahun 2013, hlm. 42..

[27] Philip K Hitti, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 181-182.

memiliki kedalaman spiritual yang tinggi, sehingga kebijakannya seringkali menimbulkan kontroversi dari segi logika nalar manusia, tetapi dari sisi logika substantifnya ternyata dapat memberikan out put yang diterima karena memberikan banyak manfaat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh nalar rasional. Nalar spiritual/irfani merupakan pilihan-pilihan yang sangat bijak dan arif ketika nalar rasional tidak mampu memberikan solusi terbaik. Pilihan ini bukanlah pilihan yang keluar dari kodrat kemanusiaan, tetapi pilihan nalar spiritual/irfani masih dalam koridor nalar kemanusiaan tetapi berada dalam wilayah nalar spiritual/irfani yang bersumber dari daya kemampuan hati nurani manusia. Pilihan kebijakan berdasarkan nalar irfani ini seringkali sulit untuk goyah karena sudah melalui jalur yang suci berupa "karamah" dari Allah swt bagi seseorang yang sholeh, wara' atau *auliya' Illah* (kekasih Allah).

Kebijakan yang tampil beda dengan kebanyakan logika umum rasional juga dialami oleh Nabi Musa AS ketika memprotes kebijakan Nabi Hidir AS menjadi tanda bahwa Nabi Musa menggunakan nalar rasional/bayani, sedangkan Nabi Hidir menggunakan nalar irfani, akhirnya yang benar adalah Nabi Hidir AS. Demikianlah kira-kira perumpamaannya dalam mengambil kebijakan publik, tidak bisa hanya menggunakan nalar rasional-empiris, ideologi Pancasila juga mengakmodir nalar irfani melalui sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. FIQIH KAUM PINGGIRAN

Dalam memperjuangan kaum marhaen, Soekarno menyebutkan bahwa cara perjuangan yang tidak ngelamun, tetapi gerakan perjuangan yang rasional dan cara perjuang yang menurut kenyataan dan cara perjuangan yang modern. Adapun yang dimaksud dengan kaum marhaen adalah kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain, sehingga kaum marhaen bukan saja kaum proletar (buruh), tetapi juga kaum tani-melarat dan kaum

melarat lainnya, "misalnya kaum dagang kecil, kaum ngarit, kaum tukang kaleng, kaum gerobag, kaum nelayan, dan kaum lain-lain".[28]

Dalam menjawab masalah-masalah kemelaratan/ ketimpangan dan kemiskinan itu, secara normatif religius dan konseptual, Presiden Joko Widodo menekankan perlunya mengambil dan merujuk pada spirit nilai-nilai keagamaan, kitab suci. Oleh sebab itu, pada acara peringatan Nuzulul Qur'an bulan Juni 2016, Joko Widodo kemudian mengajak seluruh umat Islam Indonesia untuk kembali pada kitab suci, al-Qur'an, yang mengajarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf)*, saling memahami (*tafahum*), dan saling kerja sama/tolong menolong (*ta'awun)* dalam semua aspek kehidupan, serta bekerja keras -dengan senantiasa diiringi sikap sabar, tawakal, belajar, optimis, dan kreatif- untuk mengubah nasib bangsa Indonesia (yang saat ini masih banyak masalah, baik berupa kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketimpangan antarwilayah di Indonesia) agar menjadi bangsa pemenang[29] dengan "penyelesaian komprehensif" -yang dikenal dengan "pesan utama" dalam hermeneutika fenomenologis Paul Riceour, "kesadaran transendental" dalam bahasa Edmund Husserl, teori kritis dalam bahasa Mansour Fakih dan nalar irfani dalam bahasa Abed al-Jabiri.

> "Oleh sebab itu, sebagai upaya memerangi itu, memerangi kemiskinan, mendorong investasi, pemerintah sekarang fokus melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan deregulasi aturan-aturan yang menghambat pembangunan ekonomi nasional kita. Membangun infrastruktur untuk mewujudkan hubungan konektivitas antarwilayah di tanah air. Membangun sumber daya manusia Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara yang lain....Saya yakin apabila kita bersandar terus pada tuntunan Al-Quran, insya Allah di ujung jalan, di

[28] Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Kholid O Santoso (ed), (Bandung: Sega Arsy, 2015), hlm. 140-141.

[29] *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Nuzulul Quran* Tahun 1437 H/2016 M, Selasa, 21 Juni 2016, di Istana Negara Jakarta**,** oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **21 Jun 2016 ; 2406 Views**Kategori: Transkrip Pidato**,**http://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowi-pada-peringatan-nuzulul-quran-tahun-1437-h2016-m-selasa-21-juni-2016-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016

ujung jembatan, di ujung pelabuhan, Indonesia akan menjadi lebih baik. Indonesia akan bebas dari kemiskinan. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bahagia lahir dan batin".[30]

Pernyataan Joko Widodo yang mengatakan; "Saya yakin apabila kita bersandar terus pada tuntunan Al Quran, insya Allah di ujung jalan, di ujung jembatan, di ujung pelabuhan, Indonesia akan menjadi lebih baik" mencerminkan wujud nalar irfani/spiritualitas yang komprehensif sebagaimana diajarkan dan diamalkan Nabi Muhammad saw, yakni bagaimana spirit/nilai-nilai al-Qur'an menghiasi orang-orang Muslim yang akan/sedang mengerjakan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, atau pembangunan pelabuhan, sehingga kualitasnya menjadi unggul sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam dokumen kontraknya. Jadi antara *ruh*/ spirit/ konsep/ dokumen kontrak dengan amal/ perbuatan/ pelaksanaan teknis selalu harus ada korelasi dan hubungan intensif. Oleh sebab itu, Alwi Shihab, Cendekiawan Muslim Indonesia, menyatakan bahwa spiritualitas Islam tidak hanya bermakna esoteris, tetapi juga sekaligus eksoteris. Dengan demikian, spiritualitas Islam mengandaikan aspek konsep/batiniah/tasawuf dan praktis/ lahiriah/syari'ah.[31]

Dengan meminjam pemikiran Imam Suprayogo, Guru Besar UIN Malang, pernyataan Joko Widodo yang menyatakan; "Sekarang kita perlu tuntunan Al Quran untuk menata kehidupan bangsa Indonesia agar lebih maju, lebih toleran, dan bebas dari kemiskinan" menunjukkan komitmen politik bahwa jika nilai-nilai al-Qur'an menjadi kekuatan pembangunan peradaban di Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan dan

---

[30] *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Nuzulul Quran* Tahun 1437 H/2016 M, Selasa, 21 Juni 2016, di Istana Negara Jakarta**,** oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **21 Jun 2016 ; 2406 Views**Kategori: Transkrip Pidato**,**http://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowi-pada-peringatan-nuzulul-quran-tahun-1437-h2016-m-selasa-21-juni-2016-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016

[31] Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat: Menepis Tudingan, Meluruskan Pemahaman*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 233-238.

ketimpangan, akan lebih cepat dan strategis untuk berhasil.[32] Dengan kerangka keilmuan Imam Suprayogo ini, komitmen politik untuk menerapkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan kemasyarakan dan kebangsaan menjadi bagian dari kerja-kerja risalah Nabi saw, misi sahabat dan tabi'in, maka profil Presiden Joko Widodo layak disematkan pada beliau sebutan "kiai[33] politik"/ "ulama politik", yakni pemimpin elit Muslim yang berkuasa dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Qur'ani/kitab suci sebagai pewaris kerja-kerja dakwah Nabi saw, sahabat, dan tabi'in dalam membangun kebaikan, keimanan, dan amal shaleh baik bagi diri, masyarakat maupun bangsa.[34]

Secara ideologis, nilai-nilai agama menjadi bagian sangat penting dalam falsafah Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan secara filsafat, dengan menggunakan bahasa Immanuel Kant, paradigma keilmuan Imam Suprayo dapat dinilai sangat masuk akal karena nilai-nilai agama/kitab suci –yang dikenal dengan "postulate"- memiliki nilai kekuatan yang selalu mengontrol dalam diri manusia yang beriman dan beragama, sehingga kontrol akan selalu menjadi bagian integral dalam diri manusia itu. Oleh sebab itu, orang yang beragama akan memiliki energi komitmen lebih daripada orang yang tidak beragama, sehingga pembangunan masyarakat dan bangsa akan sangat strategis dan akan lebih cepat tercapai jika nilai-nilai agama/kitab suci dijadikan spirit.

---

[32] Imam Suprayogo, *Memelihara Sangkar Ilmu...*, hlm. 169.

[33] Kiai/ulama adalah elit agama yang berperan membina dan memberdayakan keimanan dan amal shaleh bagi umat.

[34] Dalam pemikiran Imam Suprayogo, tipe kiai dibagi menjadi beberapa varian, yakni Pertama, sikap kiai spiritual yang berarti, seorang yang tidak ikut campur dalam masalah politik. *Kedua,* kiai politik yang berarti, seorang kiai yang ikut andil dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bernuansa politik, yakni pembangunan keimanan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial-ekonomi. *Ketiga*, kiai advokatif yang berarti, seorang kiai yang mendapat bantuan dari hal-hal yang berkaitan dengan politik. *Keempat*, kiai mitra kritis yang berarti, seorang kiai yang tidak mau berkecimpung dalam hal politik tetapi hanya mengkritisi hal-hal politik. Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana, *Kiyai Dan Politik* (Resensi Buku), http://hamdanhusein.blogspot.co.id/2014/09/kiyai-dan-politik-resensi-buku.html, diakses 15 Juli 2016; lihat, Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).

Dalam tataran praktis, Presiden Joko Widodo telah membuat kebijakan publik –komprehensif- yang berpihak pada warga masyarakat yang melarat/miskin dan pembangunan infrastruktur yang lebih diprioritaskan bagi daerah pinggiran, termasuk daerah perbatasan, baik fisik maupun non-fisik. Baginya, kemajuan suatu daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sangat ditentukan oleh visi, misi atau desain pembangunan yang hendak dicapai dan dilaksanakan yang harus menjadi perhatian serius. Kunci kesuksesan pembangunan daerah terluar atau perbatasan bukan hanya semata-mata karena adanya faktor sumber daya alam yang melimpah ruah, tetapi juga sangat ditentukan oleh arah kebijakan pemerintahan itu sendiri dalam menjalankan program pembangunan itu. Ketika Presiden Jokowi diwawancarai di VIP Room Bandara Juwata Tarakan sesaat setelah mendarat dari kunjungan di perbatasan, Nunukan, (16/12) sekitar pukul 15.45 wita, mengatakan:

> "Kalau ada kebijakan publik yang baik dan tepat Kaltara itu maju, bukan karena SDA. Kebijakan publik itu apa, artinya mendesain provinsinya untuk menjadi apa, mendesain kabupaten dan kotanya untuk menjadi apa. Desainnya dulu jelas. Perencanaan dulu jelas, visi ke depan juga jelas. Dan kebijakan publiknya mendukung untuk mencapai itu (percepatan pembangunan). Kelemahan kita (tandas Jokowi, pen) selama ini, perbatasan itu diserahkan kepada 27 kementerian. Anggarannya 16 triliun tersebar. Ini tidak fokus. Ke depan kita fokus saja, mungkin dua atau tiga kementerian fokus urusi itu (perbatasan), baik fisiknya maupun masyarakatnya. 16 triliun itu bukan uang sedikit".[35]

Joko Widodo berjanji akan mulai menggarap perbatasan tahun depan. Dengan strategi akan memangkas kewenangan Kementerian yang mengurusi perbatasan. Jika sejauh ini perbatasan diurusi 27 Kementerian, ia akan memfokuskan pada tiga Kementerian yang akan mengatur dan mengurusi pembangunan perbatasan. Perkiraan Kementerian tersebut, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan

[35] http://m.tribunnews.com/regional/2014/12/17/jokowi-janji-garap-perbatasan-mulai-tahun-depan, diakses 24 Mei 2015

Bappenas. Kondisi daerah perbatasan merupakan hal yang mendesak yang harus segera ditangani dan harus segera dibangun agar tidak tertinggal dari daerah lainnya.[36]

Dalam bahasa ilmu fiqh, kebijakan ini dikenal dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan primer (*mashlaḥah daruriyyah*). Kebutuhan pembangunan ini masuk kategori kebutuhan primer karena jika tidak dipenuhi, maka mereka akan tertinggal dan akan kalah bersaing dengan negara-negara lainnya, terutama menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Jenis kemaslahatan ini adalah tingkat kemaslahatan yang wajib dipenuhi untuk menjaga dan menegakkan eksistensi manusia, sehingga jika tidak dipenuhi kebutuhan primer ini, maka akan menimbulkan bencana dan kebinasaan.[37] Pembahasan fiqih ini masuk juga kategori fikih lingkungan karena yang dibahas adalah lingkungan daerah terpencil/terluar yang harus mendapat perhatian dan menjadi keharusan dari segi agama karena hal itu merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kemajuan seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

[36] http://m.tribunnews.com/regional/2014/12/17/jokowi-janji-garap-perbatasan-mulai-tahun-depan, diakses 24 Mei 2015

[37] Zahrah, *Ushul Fiqih*...., hlm. 553-555; Muhammad Khalid Masud, *Fisalafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1996), hlm. 245-246.

Presiden Jokowi saat tiba di Kotabaru Kalimantan Selatan
untuk peringatan Hari Nusantara (Antara)

Dalam kunjungannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa penanganan kawasan perbatasan harus dilakukan dengan lebih terarah dan terfokus, sehingga anggaran yang mencapai Rp16 triliun per tahun yang tersebar ke berbagai kementerian itu akan dikelola dengan baik secara lebih integral dan komprehensif. Permasalahan perbatasan yang harus diatasi tidak hanya pembangunan infrastruktur saja tetapi juga peningkatan taraf kesejahteraan warga di perbatasan. Hal ini penting karena menurutnya "Infrastruktur akan menunjang kesejahteraan". Dengan kenaikan anggaran secara bertahap dan pengelolaan yang baik, maka daerah perbatasan diharapkan akan tergarap dan terbangun dengan lebih baik. Menurutnya, "sebuah provinsi atau kabupaten bahkan negara maju tidak tergantung kepada sumber daya alam tetapi yang penting kebijakan publik yang baik dan tepat. Poinnya di situ".[38] Dalam konteks ini, teori Levinas dipraktikkan, yakni bahwa kehadiran Joko Widodo di area pembangunan merupakan wujud dari penerapan

[38] http://geotimes.co.id/menurut-jokowi-ini-sebab-kegagalan-pembangunan-di-perbatasan/, diakses 24 Mei 2015.

etika tanggung jawab Levinas yang menjelaskan bahwa tanggung jawab tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya kehadiran dan kesaksian langsung, sedangkan dalam nalar teologi ke-NU-an dikenal dengan nalar teologi/fiqih transformatif, yakni membangun sistem yang dibenahi, disamping aspek lainnya yang terkait.

Pembangunan daerah pinggiran yang juga menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan daerah pemukinan kumuh dengan anggaran sebesar Rp 4 triliun. Kebijakan ini untuk menangani pemukiman kumuh hingga mencapai 0% pada tahun 2019. Menurut Joerni Makmoerniati, Kepala Subdirektorat Pengembangan Permukiman Baru Direktorat Pengembangan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dijelaskan dalam data Direktorat Jenderal Cipta Karya, bahwa masih tersisa 12 persen kawasan kumuh di seluruh Indonesia atau sekitar 38.487 hektare yang belum tertangani. Dia menjelaskan bahwa target untuk menangani masalah kawasan kumuh selama lima tahun ke depan seluas 38.487 hektare. Dalam implementasinya, pemerintah pusat akan menangani langsung penyelesaian permukiman kumuh jika jumlah luasnya berada di atas 15 hektare, sedangkan jika jumlah kawasan kumuh itu di bawah luas 15 hektare, akan didelegasikan pada pemerintah daerah melalui perjanjian kerja sama dengan pemerintah pusat.[39]

Kebijakan untuk membangun dalam rangka menata dan memperbaiki daerah pemukiman kumuh merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi-JK yang hendak berpihak pada masyarakat kecil, buruh, tani dan pedagang asongan. Program pembangunan dan penuntasan kasus-kasus kawasan kumuh harus ditangani dengan serius karena kondisi itu menjadi bagian dari masalah bangsa kita dan sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran yang diderita oleh masyarakat selama ini. Program ini merupakan program yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia, sehingga realisasi program penyelesaian kawasan kumuh akan memberikan sumbangan bagi pemberdayaan

[39] http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/22/173668525/menata-rumah-kumuh-pemerintah-sediakan-ongkos-rp-4-triliun, diakses 24 Mei 2015

masyarakat kecil dan du'afa' menuju pembangunan kawasan yang ramah lingkungan, indah, tertib, rapi, dan bersahabat untuk mendukung suasana lingkungan dan udara yang sehat.

Menurut Zuhairi Misrawi, spirit pembangunan tersebut sesuai dengan nalar fiqih ke-NU-an yang menegaskan bahwa pelaksanaan pesan-pesan agama/fiqih Islam harus diiringi dengan pemberdayaan kaum fakir miskin, sehingga pesan-pesan ritual transendental/spiritual yang dilaksanakan dalam agama Islam tidak akan sempurna jika tidak memberikan implikasi sosial (baca: Q.S. al-Ma'un [107]: 1-7). Oleh sebab itu, pesan nalar fiqih ke-NU-an menurut Zuhairi Misrawi adalah nalar fiqih transformasi sosial.[40]

Sejarah membuktikan sejak zaman Belanda hingga era reformasi, bahwa kebijakan pemerintah selalu mengedepakan orang per kotaan, misalnya ketika beras, telor, daging dan ikan mahal harganya, maka pemerintah akan segera menurunkan dan berusaha melakukan operasi pasar sehingga harga menjadi lebih murah. Sementara itu, ketika harga pupuk mahal, harga cabei murah, sawah kekeringan atau kebanjiran, maka kondisi itu dianggap seolah-olah hal biasa, bukan emergensi. Kenapa hal itu terjadi, karena penduduk desa (atau nelayan) tidak memiliki akses langsung pada jalan raya, mereka kurang terkoordinir, terutama masyarakat desa, jauh dari jalan raya, sehingga sulit untuk melakukan demonstrasi menuntut hak dan aspirasinya. Di samping itu masyarakat desa/nelayan masih bisa hidup sederhana dan apa adanya dengan menyesuaikan diri dengan kondisi hasil tanaman alam atau hasil laut. Sementara itu, masyarakat perkotaan akan mudah mengorganisir diri/turun ke jalan karena aksesnya dekat, dan faktanya mereka akan sulit menghadapi hidupnya, jika tidak bisa menjangkau membeli makanan pokok, sebab mereka tidak bisa hidup dengan hasil tanaman alam atau laut karena mereka pada umumnya tidak memiliki lahan itu. Hasil penelitian Muhammad Ari Sumartana menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan tidak memiliki tuntutan yang beragam dan mendesak, termasuk dalam bidang pendidikan, bahkan mereka menyekolahkan

[40] Zuhairi Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi.....*, hlm. 289.

pendidikan anaknya lebih karena perintah agama, perintah orang tua sebagaimana berikut:

> "Pandangan masyarakat terhadap fungsi pendidikdn formal belum berfungsi sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas anak, pendidikan formal yang tinggi dirasa kurang dari aspek ekonomi, tidak bisa dirasakan langsung oleh dan yang menyelesaikan studi disamping memiliki fungsi positif dan negatif. Tindakan menyekolahkan anak dimaknai sebagai perintah agama, sebuah investasi masa depan, upaya meningkatkan status sosial, mengentaskan kemiskinan dan sebagai bentuk ketaatan kepada pini sepuh. Pengambilan keputusan dalam menyekolahkan anak dilakukan dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan anak, daya dukung ekonomi keluarga, idealisme orang tua, analisis pasar kerja, dan mendapat sekolah dan modal nekat. Pelapisan sosial belum bisa dipakai sebagai ukuran tingkat aspirasi pendidikan masyarakat desa, tidak ada keteraturan antara pelapisan sosial dengan tingkat aspirasi pendidikan".[41]

Inilah kekayaan budaya pada masyarakat pedesaan yang perlu dikembangkan sebagai pelengkap dari pembangunan terhadap sarana fisik masyarakat pedesaan atau pinggiran. Tradisi yang juga menurut Presiden Jokowi harus dikembangkan dan digerakkan sebagaimana dinyatakan dalam pidato kenegaraannya:

---

[41] Muhammad Ari Sumartana, *Aspirasi pendidikan masyarakat desa : Penelitian di Mulyodadi Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tesis UGM, 2002), lihat http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=20272

(Dokumen: antaranews.com)

> "Kita membutuhkan lebih banyak lagi pejuang-pejuang pembangunan seperti Saudara-saudara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas, Etos Kerja, dan semangat Gotong Royong. Untuk itu, pada hari ini saya menegaskan kembali perlunya gerakan nasional revolusi mental. Gerakan tersebut akan menyuburkan kembali nilai-nilai semangat juang, optimisme, kerja keras, kesantunan, tatakrama, dan memperkokoh karakter bangsa, serta memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".[42]

Semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat desa hingga masa kini menjadi catatan tersendiri dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo. Tradisi luhur itu diakui oleh Sunyoto Usman, Guru Besar FISIP UGM, merupakan realitas yang jika dibawa ke dunia modern atau dunia perkotaan masih relevan. Ia mengilustrasikan kasus

[42] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Hut Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_hut_ri_70.pdf, diakses 15 Agustus 2015.

pedagang Angkringan Yogyakarta yang mana mereka berasal dari desa, tetapi sampai di perkotaan mereka masih tetap memelihara tradisi luhur itu, yakni kerjasama/gotong royong, *reciprocal relationship* (saling diuntungkan).

> "Dari situ mereka mendapatkan pemasok makanan seperti nasi kucing, sate usus, gorengan, dan lain-lain. Untuk gerobak pun sudah disediakan oleh sang "juragan". Para migran tersebut tinggal mencari tempat di Jogja yang masih lowong untuk berjualan angkringan. Dari modal sosial atau kepercayaan seperti itulah mereka bisa *survival* pada kerasnya hidup dan sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya di desa asal mereka. *Trust* dalam artian antara pedagang dan pemasok sudah saling percaya, tidak berkhianat antar-satu dengan lainnya. Pedagang tidak mengambil dari pemasok lain, pemasok pun tidak menjual ke pedagang lain. *Reciprocal relationship* adalah saling diuntungkan dalam perdagangan. Sama-sama untung karena pemasok tidak perlu capek-capek menjual nasi kucing dan lainnya, pedagang tidak perlu keluar modal hanya tinggal menjual dan mengambil sedikit keuntungannya. Kemudian *networking* yaitu jejaring sosial dalam artian antara sesama pemasok dan sesama pedagang sudah memiliki ikatan kuat dalam perdagangan dan tidak akan melanggar etika perdagangan".[43]

Presiden Joko Widodo saat ini sedang berusaha memberdayakan dan merangkul masyarakat yang berada di pedesaan atau secara umum, yang ada di pinggiran atau tersisihkan. Ia berusaha mengangkat dan menempatkan pada pusaran perhatian utama untuk pembangunan, seperti masyarakat Aceh. Oleh sebab itu, ia hadir langsung ke Naggroe Aceh Darussalam yang dianggapnya sebagai salah satu bagian vital dalam membangun peradaban Islam dan perdamaian untuk meneguhkan NKRI. Ia menyampaikan:

---

[43] Muhammad Ari Sumartana, *Aspirasi pendidikan masyarakat desa : Penelitian di Mulyodadi Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tesis UGM, 2002), lihat http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=20272

"Saya sangat berbahagia sekali di hari kemenangan ini, di hari yang fitri ini bisa bersama-sama dengan masyarakat Aceh. Saya berlebaran di sini, kenapa saya pilih Aceh? Kenapa saya pilih Aceh? Karena Aceh itu Serambi Mekkah, dan berada di paling barat dari wilayah kita Republik Indonesia. Dan ini pertama kali, biasanya memang Presiden itu kalau *pas* hari raya Idul Fitri pasti di Jakarta.....Dan, kita semua tahu bahwa Banda Aceh ini kota yang sangat bersejarah, pusat peradaban Islam di Indonesia. Masyarakat Aceh harus sadar itu bahwa Banda Aceh, Aceh ini adalah pusat peradaban Islam di Indonesia. Dan, juga kota atau provinsi yang menjadi bagian pembentuk ke-Indonesia-an kita, membuat Republik ini tetap tegak berdiri. Dulu juga salah satunya karena Aceh, karena masyarakat Aceh, untuk mengingatkan, hingga kita berharap di Aceh menjadi pintu gerbang perdamaian, pintu gerbang persemaian nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai perdamaian. Saya senang sekali saat ini di Aceh, di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, sehingga kita hanya sekarang berfikir bagaimana ekonomi di Nangroe Aceh Darussalam ini bisa bergerak dengan baik. Saya *udah* berkali-kali bertemu dengan Bapak Gubernur untuk melihat peluang-peluang bagaimana meningkatkan ekonomi di sini. Dan, saya lihat juga di sini banyak sekali peluang-peluang itu dan kita berharap ke depan Aceh menjadi sebuah lokomotif ekonomi, karena dulu saya ingat tahun ‹85-an, ‹86 Lhokseumawe sudah menjadi sebuah lokomotif ekonomi tapi karena sesuatu hal sehingga berhenti darinya. *Insya* Allah nanti akan kita carikan solusi bersama agar bisa hidup dan menjadi lokomotif utama lagi".[44]

Kehadiran Presiden Joko Widodo tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan masyarakat Indonesia yang sebagian kurang

[44] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembagian Sembako Usai Sholat Idul Fitri 1436 H di PLTD Apung, Kampung Punge, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam Tanggal 17 Juli 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9596&Itemid=26, diakses 15 Agustus 2015.

mendapat perhatian, kemudian diperhatikan dan hendak diangkat tingkat kesejahteraannya. Pendekatan keagamaan, kebudayaan dan ekonomi memiliki peran penting karena fenomena krisis dunia, termasuk Yunani, disebabkan oleh faktor ekonomi salah satunya. Kebijakan Joko Widodo untuk membangun kesejahteraan secara utuh dan menyeluruh bagi masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari komitmennya dalam menjalankan ajaran agama, terutama yang tertuang dalam al-Qur'an yang memiliki komitmen untuk mengangkat derajat orang yang marginal, miskin, biadab menjadi masyarakat yang beradab, bermartabat, kaya, dan santun, berakhlakul karimah. Dorongan untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan menjadi perhatian serius dari Joko Widodo dalam berbagai kesempatan dinyatakannya dengan tegas, seperti dalam peringatan Nuzulul Qur'an.

> "Al-Qur'an diturunkan pertama kali oleh Allah SWT kepada Nabi Besar Muhammad SAW dalam situasi masyarakat Arab yang berada pada titik terendah dalam kehidupan dan peradaban mereka. Namun demikian, Al-Qur'an bukanlah khusus untuk mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an adalah petunjuk dan rahmat bagi semua umat manusia. Hal itu sesuai dengan isi Surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan bahwa Al Qur'an yang diturunkan pada Bulan Suci Ramadhan adalah petunjuk, adalah pembeda antara yang haq dan yang bathil.....Sebagai petunjuk yang terang-benderang mengenai yang haq dan yang bathil, Al-Qur'an mendatangkan revolusi yang mendasar pada perikehidupan manusia. Al-Qur'an mendatangkan revolusi batin mengenai nilai-nilai kemanusiaan, mengenai nilai-nilai toleransi, mengenai nilai-nilai keadilan. Al-Qur'an mendatangkan revolusi sosial karena mengatur hubungan antarmanusia secara terhormat dan bermartabat. Al-Qur'an mendatangkan revolusi ekonomi karena mengharamkan penghisapan, eksploitasi yang berlebihan terhadap alam dan lingkungan hidup, serta menggariskan secara tegas kejujuran kita dalam berbisnis".[45]

[45] Joko Widodo, *Sambutan Presiden RI Pada Peringatan Nuzulul Qur›an Nasional*, di Jakarta, tgl 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&ta

Kebijakan Joko Widodo yang berpihak pada masyarakat marginal/pinggiran pada dasarnya merupakan implementasi dari pesan suci al-Qur'an yang selalu memperhatikan kaum du'afa'. Sebab, jika mereka bisa berdaya, maka akan menjadi penopang dan pendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta negara. Keberpihakan dan kedekatan Presiden Joko Widodo dengan masyarakat masih tetap tampak dan menunjukkan tidak ada jarak antara ia dengan masyarakat. Hal itu tampak pada acara blusukan Presiden Joko Widodo di Lampung.[46]

Blusukan ke lapangan tersebut untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi konseptual-praktis yang terdekat dengan fakta lapangan bagi masyarakat bawah semisal pedagang adalah salah satu usaha kerja nyata dan kerja cerdas yang menjadi prinsip agama Islam. Oleh sebab itu, Ir Soekarno dalam *Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur'an* di

sk=view&id=9534&Itemid=26, diakses 15 Agustus 2015.

[46] *Presiden RI Joko Widodo Blusukan di Pasar Gudang Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis 11 Februari 2016*, http://presidenri.go.id/kabar-presiden/koleksi-foto.html, diakses 30 Juni 2016

Istana Negara Jakarta, 15 Maret 1960 juga telah menggariskan amanah pentingnya spirit kerja, yakni kita sebagai umat harus menjadi umat yang aktif beramal, bukan umat yang pendiam atau pasif, hanya sekadar tahu. Menurutnya, benar perkataan ulama, bahwa agama Islam adalah agama amal. Dalam hal ini, Ir Soekarno kemudian mengutip pesan surat al-Fatihah yang berisi permohonan petunjuk; "*Tetapi kita, apakah kita cukup dengan mendapat petunjuk, itulah jalan yang baik? Tidak!...Kita harus berjalan melalui jalan yang benar itu, jangan melalui jalan yang tidak benar. Dus kita harus berjalan, dus kita harus berbuat, dus kita ini beramal, tidak cukup kita dengan hanya mengetahui mana jalan yang benar*".[47]

Dalam bahasa Yusuf al-Qardawi, pemberdayaan kaum miskin/masyarakat bawah merupakan kewajiban dalam fiqih Islam. Sebab, substansi fiqih Islam tidak lain dan tidak bukan, kecuali untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, sehingga fiqih Islam menekankan perlunya mengedepankan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'amm*) terutama bagi masyarakat yang fakir dan miskin.[48]

Selain berdasarkan etika tanggung jawab Levinas, pemikiran Yusuf Qardawi juga memiliki kesamaan persepsi dan pandangan yang sama dengan kebijakan Joko Widodo dalam menjawab masalah-masalah kemasyarakatan, yakni memahami masalah dengan sebenarnya dan faktual melalui blusukan. Menurut Yusuf Qardawi, kebijakan hukum harus dibangun berdasarkan pada pemahaman dan pengetahuan realitas secara eksplisit, mampu memadukan antara kewajiban dan realitas, karena manusia tidak hanya hidup dalam kewajiban noramtif fiqih tetapi juga hidup dalam realitas yang sedang dihadapi, sebagaimana kisah Nabi Yusuf yang sampai pada kesimpulan faktual-empiris, bahwa robeknya

---

[47] Soekarno, "Islam, Agama Amal", dalam Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara Jakarta, 15 Maret 1960 dalam R Soemarjono (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, (Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015), hlm. 203.

[48] Yusuf Qardawi, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslim di Tengah Masyarakat nn-Muslim*, terj. Adillah Obid, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 89.

baju di belakang menunjukkan bebas dan bersihnya Nabi Yusuf dari perbuatan maksiat.[49]

Dalil blusukan dalam memutuskan dan merumuskan kebijakan hukum dalam memberdayakan kaum miskin dijelaskan lebih lanjut Yusuf Qardawi bahwa ahli fiqih memiliki kewajiban untuk memahami realitas secara objektif dengan berbagai dimensi, unsur-unsur, dan dorongan-dorongan dengan berusaha mengetahui aspek positif dan negatifnya, manfaat dan madlaratnya, sehingga dalam menentukan kebijakan dalam pemberdayaan kaum marginal tidak cukup hanya berdasarkan pembentukan nalar hukum/fiqih normatif saja, tetapi harus berdasarkan pengetahuan realitas kehidupan manusia.[50]

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo menyampaikan:

> "Konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional. Paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih. Dengan cara itu juga, kita akan manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional".[51]

---

[49] Yusuf Qardawi, *Fiqih Minoritas...,* hlm. 52-53.

[50] Yusuf Qardawi, *Fiqih Minoritas...,* hlm. 54.

[51] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_h ut_ri_70.

Dalam pidato tersebut, Joko Widodo menyebutkan bahwa implementasi kebijakan hukum, dalam term fiqh dikenal dengan kemaslahatan, yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pinggiran atau pedesaan harus menjadi perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan baik lahir dan batin. Nalar pembangunan yang konsumtif harus diubah menjadi nalar pembangun produktif, dan terutama masyarakat pinggiran dan desa-desa harus mendapatkan perhatian yang serius dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berjiwa kreatif, inovatif dan gigih dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan cara itu, kita akan mampu manfaatkan sumberdaya alam berkat adanya kapasitas sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.[52]

Pidato Joko Widodo yang menyatakan bahwa "pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih" menunjukkan perlunya keberanian dan ketegasan yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam wilayah kekuasannya agar berani mengambil kebijakan dan keputusan untuk menegakkan kebenaran berupa perintah ilahi untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan terhadap umat/masyarakatnya. Keberanian dan ketegasan ini tentu saja berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga dari sisi prosedur benar dan memiliki implikasi manfaat yang besar bagi umat/masyarakat. Signifikansi keberanian dan ketegasan pemimpin dalam menegakkan kebenaran berupa kemakmuran dan kesejahteraan umat/masyarakat juga telah digambarkan oleh nalar fiqih ke-NU-an KH M Hasyim Asyi'arie dengan mengambil i'tibar dari Nabi Muhammad saw, yakni Nabi saw adalah orang yang paling berani yang tidak takut akan

pdf, diakses 15 Agustus 2015

[52] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_h ut_ri_70.pdf, 15 Agustus 2015

resiko apapun termasuk kematian dalam menjunjung tinggi pesan-pesan ilahi (*fi i'lai kalimatillah*) dan menegakkan kebenaran (*iqamatil haqqi*) berupa kesejahteraan dan kemakmuran umat atau masyarakat.[53]

Selain itu, keberanian pemimpin juga harus berpegang pada komitmen untuk menjunjung tinggi pesan-pesan ilahi dan menegakkan kebenaran dalam rangka menjalankan amanah ilahi untuk memperhatikan, melayani, membantu dan membangun tata kehidupan yang mampu mengentaskan kaum du'afa' baik yang berada di bantaran sungai, pesisir, pedesaan, anak terlantar, daerah terpencil maupun daerah perbatasan. Nalar fiqih ke-NU-an KH M Hasyim Asy'arie menyampaikan hal yang sama, bahwa Nabi Muhammad saw sebagai uswatun hasanah (suri tauladan yang baik) senang berbuat baik dan membantu umat manusia, terutama kaum du'afa', kaum fakir miskin, dan anak-anak yatim/terlantar. Beliau tidak suka dan tidak mau membelanjakan harta/kekayaan untuk hura-hura atau kesenangan pribadi atau keluarganya, tetapi justru digunakan menolong dan melayani kepentingan umat atau masyarakatnya yang membutuhkan. Sebagian besar harta/kekayaan pribadi atau anggaran negara itu digunakan untuk kepentingan jalan Allah (*fi sabilillah*) dengan harapan ridla Allah swt, memelihara eksistensi agama (*fi himayah al-din*), menjalankan dakwah, memelihara dan menolong kaum du'afa' (*fi r'ayah al-du'afa' wa al-fuqara'*) atau masyarakat pinggiran dan pedesaan, memerdekakan budak atau mendukung terwujudnya kesejahteraan kaum pekerja/buruh.[54]

C. FIQIH KEMANUSIAAN

Dalam al-Qur'an, kata manusia terdiri dari sejumlah istilah: kata *insan, ins, nas*, atau *unas,* kata *basyar*, dan kata *bani Adam* dan *dzurriyat Adam*. Semua kata digunakan al-Qur'an dengan beragam titik tekannya, tetapi penggunaan kata *insan* menunjukkan totalitas manusia dari jiwa

---

[53] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari...*, hlm. 10.

[54] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari...*, hlm. 15.

dan raganya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya akibat perbedaan fisik, mental dan kecerdasan. Dalam diri manusia sudah ada watak bawaan sejak semula dan sejak lahirnya, yang sejak awal kejadiannya memiliki potensi suci untuk beragama yang lurus dan bertauhid.[55]

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

> Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. al-Rum [30]: 30).

Karena fitra manusia itu suci, maka nalar fiqih ke-NU-an juga memperlakukannya dengan baik dan bermartabat sebagaimana digambarkan oleh KH M Hasyim Asy'arie dengan menyitir suri tauladan Nabi Muhammad saw yang selalu mengajarkan untuk memperlakukan umat/sesama manusia dengan baik dan bermartabat, yakni *wa al-amru bi al-ma'rufi wa al-nahyu 'an al-munkar bi al-luthf wa al-layyin wa daf'u al-sayyi'ah bi al-hasanah wa mu'asyarah al-nas bi wajhin thalaqin wa kalamin hasanin* (menyuru kebaikan dan mencegah kemunkaran dengan cara yang santun dan halus/ramah serta menolak keburukan dengan cara yang baik).[56]

Berangkat dari nilai-nilai fitrah –dalam terminologi Barat dikenal hak asasi- tersebut, sejak awal abad ke-20, para ilmuwan dan praktisi hukum menyadari perlunya menjadikan hukum kodrat sebagai landasan pembangunan hukum bagi perlindungan hak-hak asasi manusia. Hukum kodrat menjadi pedoman dalam perlindungan hak-hak asasi manusia yang pada Abad Pertengahan belum pernah mendapat perhatian secara

---

[55] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 367-375.

[56] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari*..., hlm. 27.

serius, sehingga seringkali jiwa manusia dikorbankan demi alasan ketuhanan. Sebagai prinsip hidup sosial dan personal, pada awal abad ke-20 hukum kodrat menjadi dasar pembangunan tata kehidupan umat manusia secara totalitas. Sebab, Perang Dunia I dan Perang Dunia II telah menjadi saksi sejarah bahwa perang tidak memberikan kemajuan dan kemakmuran bagi tata kehidupan dunia, tetapi hanya meninggalkan luka dan malapetaka bagi umat manusia. Sebagai parameter pembangunan hukum yang berwawasan kemanusiaan, hukum kodrat telah menjadi payung dalam melakukan perlindungan terhadap hak-hak primer sebagaimana hak hidup, perlindungan terhadap hak fundamental yang dimiliki setiap orang sebagaimana hak kebebasan dalam hal beragama dan kebebasan, dan perlindungan terhadap hak-hak yang bersifat sekunder yang diperoleh karena adanya relasi khusus.[57]

Melihat sejarah hidup manusia masa lalu yang kelam akibat adanya berbagai perang atas dasar ras, suku agama, dan politik, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong pembangunan tata kehidupan baru bagi umat manusia yang berlandaskan pada asas kemanusiaan. Tidak ada satu pun norma-norma hukum yang bisa dihidupkan dan ditegakkan jika hal itu mengancam hak-hak asasi manusia sebgai kodratnya. Dalam Piagam PBB, ada jaminan hak hidup, hak kebebasan dan toleransi dalam menjalankan kehidupan bagi umat manusia. Piagam PBB itu berupa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang meletakkan kebebasan dan kesamaan dalam hal martabat bagi umat manusia (pasal 1), serta larangan adanya diskriminasi (dalam pasal 2). Lebih lanjut, Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik juga hendak mewujudkan nilai-nilai universal bagi kehidupan umat manusia dengan tegaknya keadilan, kesetaraan, keamanan dan perdamaian.[58]

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945.

---

[57] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 89-90.

[58] Dahlan, *Abdullahi...*, hlm. 261-262.

Sebagai hukum dasar, UUD-NRI 1945 bukan hanya dokumen hukum tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur bangsa, falsafah dan cita-cita hidup berbangsa yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan negara. Dalam konteks jaminan hak-hak kemanusiaan, Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) UUD-NRI 1945 pasca amandemen menyebutkan:[59]

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

> "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Demikian juga Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD-NRI 1945 memberikan ulasan tentang dasar negara dan kebebasan beragama bagi bangsa Indonesia, sehingga hak-hak dasar dan martabat manusia tetap dijaga dan dihormati serta harus diperlakukan adil bagi semua agama yang diakui negara.

> "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

> "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Nalar fiqih yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan tema sentral untuk menegakkan hak-hak asasi manusia atau hak asasi rakyat sehingga hak-hak dasar dan hak sekundernya bisa terpenuhi. Oleh sebab itu, kita perlu melakuan penafsiran kembali (reinterpretasi) terhadap norma-norma hukum fiqih sebagaimana telah diterapkan ratusan tahun

[59] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Seketariat Jenderal MPR-RI, Cet XII, 2013, hlm. xv.

lamanya untuk memasukkan perkembangan zaman ke dalam norma hukum fiqih.[60] Dalam hal ini, ada prinsip universal fiqih/hukum Islam yang memiliki lima asas pokok yang harus dipelihara agar sendi-sendi kehidupan manusia bisa tegak, yakni *al-dlaruriatul khams* yang bisa dijabarkan berikut: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan/kehormatan, dan memelihara harta.[61]

Asas pemeliharan hidup manusia itu dikenal oleh John Stuart Mill dengan "kebaikan sebanyak mungkin bagi sebanyak mungkin jumlah orang" (*the greatest good for the greatest number*).[62] Menurut analisis Abdul Wahab Khallaf, asas pembangunan kemaslahatan hidup umat manusia harus ditegkkan secara hakiki dan untuk kebanyakan orang, yakni *yajlibu naf'an li akbari 'adadin min al-nas aw yadfa'u dararan 'an hum wa laisat li mashlahatil fardin* (menarik manfaat sebesar mungkin bagi sebagian besar jumlah umat manusia atau menolak kemudlaratan bagi mereka, dan bukan jenis kemaslahatan yang bersifat personal).[63]

Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-70 Tanggal 14 Agustus 2015, Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan asas-asas fundamental kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia harus menjadi perhatian serius, sehingga semua elemen bangsa diharapkan berjuang sepenuhnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Tradisi luhur hidup berbangsa dan bernegara harus senantiasa diperhatikan dan menjaga tradisi luhur yang telah digariskan oleh para pendahulu yang telah berhasil menjadikan negara ini merdeka dan lepas dari penjajah. Ia menyatakan:

> "Semua itu menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, kita harus percaya diri, harus optimis, bahwa kita dapat mengatasi segala

---

[60] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 305.

[61] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan...*, hlm.180

[62] Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, (Surabaya: CV Kita, 2007), hlm. 110.

[63] Khallaf, *'Ilmu ushul Fiqh..*, hlm. 87.

> persoalan yang menghadang di hadapan kita. Selama ini kita terjebak pada pemahaman bahwa melambannya perekonomian global, yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal kalau kita cermati lebih seksama, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, sekali lagi, menipisnya nilai kesantunan dan tatakrama, juga berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa".[64]

Dalam bahasa ilmu ushul fiqh, *'urf* sebagai bagiaan esensial yang dapat menopang eksistensi hak-hak asasi manusia harus dilestarikan sebagaimana budaya kesantunan yang menjadi ciri khas budaya bangsa dalam pergaulan nasional maupun internasional. Ciri khas kesantunan itulah yang menjadi modal dasar dalam penyelenggaraan negara dan membangun tata kehidupan kenegaraan dengan asas penegakkan hukum yang berbasis kearifan budaya dan bangsa, bukan hanya semata-mata dengan asas legal formalitas saja.

Nalar fiqh ke-NU-an memberikan apresiasi yang begitu tinggi terhadap kearifan budaya atau lokal sebagai bagian dari upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai asasi yang terdapat dalam diri manusia, sehingga Najmuddin Ath-Thufi, seorang Ulama Ushul fiqh, berpendapat bahwa jika ada pertentangan antara kepentingan kemaslahatan manusia dengan nas syara', maka yang didahulukan adalah nilai-nilai kemaslahatan manusia. Nalar fiqh ke-NU-an memberikan apresiasi yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan aspek yang mendukungnya, sehingga unsur-unsur kearifan budaya atau nilai-nilai kemanusiaan menjadi pertimbangan penting dalam Lajnah Bahtsul Masa'il NU.

KH M Hasyim Asy'arie, pendiri NU, menyebutkan bahwa menghargai Nabi Muhammad merupakan kewajiban bagi setiap umat

---

[64] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_h ut_ri_70.pdf, 15 Agustus 2015

Islam. Oleh sebab itu, menghormati, mengagungkan, dan mengingat akan jasa-jasa dan keberhasilan beliau dalam menyebarkan ajaran Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam merupakan keniscayaan. Qadli Iyadl menegaskan bahwa umat Islam berkewajiban menghormati dan mengagungkan Nabi Saw terutama ketika dilaksanakan peringatan Maulid Nabi saw, disebutkan dalam hadist dan sunnahnya, serta didengar namanya. Oleh sebab itu, Qadli Iyadl dalam kitabnya *al-Syifa' fi Huquq al-Musthafa* menyebutkan bahwa kita wajib menghormati Nabi Muhammad saw baik sewaktu beliau masih hidup maupun sesudah wafatnya.[65]

Nilai-nilai ajaran hukum fiqh yang bisa diambil dari deskripsi kitab Hasyim Asy'arie tersebut adalah bahwa setiap umat manusia memiliki kewajiban menghormati dan menghargai jasa-jasa serta melestarikan tradisi baik yang sudah digariskan. Hal inilah yang ditekankan oleh ajaran NU untuk selalu memelihara tradisi lama ulama salaf yang baik dan mengambil tradisi yang baru yang lebih baik (*al-muhafadlah ala al-qadlim al-shaleh wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*). Demikian juga apa yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jokowi, telah berusaha menghormati dan menghargai para pendahulunya dengan ucapan penghormatan. Tradisi ini harus dilanjutkan dan dilestarikan karena Timur Tengah selalu berperang karena tidak ada tradisi menghargai dan menghormati jasa-jasa pendahulunya sebagai manusia yang telah berjuang dan berkoban demi negaranya.

Dalam bahasa ushul fiqh dikenal istilah *hifdz al-nafs*, yang berarti bahwa umat Islam harus mampu menghargai dan menghormati eksistensi jiwa dan diri seseorang, bahkan berterima kasih pada orang yang berbuat baik. Bahkan dinyatakan bahwa *man lam yasykurinnas, lam yasykurillah* yang dalam bahasa lugasnya bahwa, "barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia yang berjasa, maka Allah juga tidak akan menerima rasa syukurnya dari orang tersebut". Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo disebutkan penghormatan

[65] Muhammad Hasyim Asy'arie, *al-Tambihat al-Wajibat li man yashna'u al-Maulid bi al-Munkarat*, (Jombang: Ma'had Tebuireng, t.th), hlm. 28.

pada para pendahulunya, di antaranya pada Bapak BJ Habibie, Presiden Republik Indonesia Ketiga; Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia Kelima; Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam, beserta Ibu Ani Yudhoyono; Bapak Try Sutrisno dan Bapak Hamzah Haz; Bapak Boediono beserta Ibu Herawati Boediono; Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; dan Ibu Karlina Umar Wirahadikusumah.[66]

Nalar fiqih ke-NU-an juga menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak menghargai dan mengapresiasi karya manusia yang telah berjasa, maka dia berarti juga tidak menghargai dan mengapresiasi Allah (*man la yasykurinnas lam yasykurillah*). Pidato Presiden Joko Widodo tersebut merupakan bentuk dari implementasi dari nilai-nilai ajaran fiqih yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, yakni menghargai para pendahulunya.

Bentuk-bentuk menghargai hak-hak dasar atau asasi manusia merupakan nilai dasar fiqih Islam yang memberikan ruang dan gerak setiap umat manusia untuk menjaga dan memelihara hak-hak dasarnya. Nilai-nilai fundamental fiqih ke-NU-an menolak paham kelompok Islam radikal yang hanya mengamalkan warisan fiqih lama pada tataran kententuan legal-formalnya saja dan tidak sampai menggali substansi norma-norma fiqih dan ushul fiqih. Oleh sebab itu, nilai-nilai kebebasan beragama yang diajarkan fiqih ke-NU-an perlu dijadikan arus utama pemikiran dan gerakan untuk menentang gerakan kaum radikal ekstrimis. Sebab, umat Islam Indonesia sesungguhnya memerlukan nilai-nilai fundamental fiqih yang mengajarkan kebebasan beragama dan paham moderasi dalam hidup beragama dan berbangsa di Indonesia.

Prinsip moderasi fiqih ke-NU-an itu juga menjadi bagian pokok dari spirit gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun

---

[66] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_h ut_ri_70.pdf, diakses 15 Agustus 2015.

hubungan internasional dan membela hak-hak warga negara di dunia, termasuk di Palestina. Indonesia melalui kepemimpinan Joko Widodo sangat perhatian pada upaya-upaya melindungi dan mempertahankan hak-hak asasi manusia sebagaimana diwujudkan dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia, menjadi penengah konflik, memberikan kepemimpinan dalam pembuatan norma-norma regional dan global. Joko Widodo juga terus memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak asasi atau harga warga negara dengan memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam menciptakan keamanan di Asia Tenggara, serta memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia. "*Indonesia juga terus mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dan kedzaliman serta menyerukan agar saudara-saudara Muslim di Timur Tengah meletakkan senjata dan berdamai demi kepentingan ukhuwah Islamiyah*".[67]

Apa yang disampaikan Joko Widodo merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kaum du'afa' atau negara yang mengalami penjajahan serta perdamaian sesama umat beragama. Perhatian pada kebebasan beragama adalah wujud dari implementasi dari pasal 29 ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Oleh sebab itu, nalar fiqih ke-NU-an sebagai personifikasi dari perpaduan antara norma-norma fiqih dengan budaya nusantara perlu dikembangkan di Indonesia untuk mewujudkan produk hukum fiqih pluralistik, bukan fiqih ekslusif. Demikian juga peraturan perundang-undangan harus mengacu pada norma-norma adat atau agama di masyarakat dan tidak boleh bertentangan. Hal ini sesuai dengan amanah

[67] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_hut_ri_70.pdf, diakses 15 Agustus 2015.

pasal 29 ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Di sinilah hubungan fiqih dengan hak asasi manusia memiliki kaitan erat yang perlu dijaga dan dijamin, yaitu (1) hak untuk hidup. Fiqih mengajarkan *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) sehingga diatur hukuman *qishash* (balasan setimpal) atas pelanggarannya jika melakukan pembunuhan. (2) hak mendapatkan keadilan sebagai pondasi pembangunan kepastian hukum. Fiqih menegaskan adanya kewajiban untuk memelihara keadilan sebagai landasan dasar dalam penegakkan hukum dan hal itu menjadi perintah Allah swt yang selalu dibaca ayatnya oleh khatib Jum'at. (3) hak mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Digambarkan dalam fiqih bahwa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai umat manusia di sisi Allah dan setiap amal perbuatannya akan dinilai secara sama oleh Allah berdasarkan kadar ketaqwaan dan keikhlasannya. (4) perintah mengerjakan kebaikan dan menjahui larangan menjadi norma fiqih yang mendasar bagi pembangunan hukum dan menjadi pondasi dasar dalam melindungi hak-hak dasar manusia, (5) hak berpartisipasi dalam masyarakat dan Negara sebagaimana digambarkan dalam sejarah Islam bahwa peranan perempuan juga penting sebagaimana kisah Rabi'a al-Adawiyah yang menjadi salah satu profil ideal dalam membangun wawasan ilmu tasawuf. (6) hak untuk bebas dari berbagai tuntutan yang tidak beralasan sebagai wujud nyata dari kepastian hukum fiqih. (7) hak mengemukakan pendapat sebagai wujud nyata untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi saw sehingga umat Islam diharuskan mengajarkan ilmu pengetahuan dengan bebas dan objektif pada peserta didik, juga diberikan kebebasan untuk mempertanyakan pendapat-pendapat gurunya secara sopan dan ilmiah. Oleh sebab itu, para ulama seringkali mengakhiri karyanya dengan kalimat *"wallahu 'a'lam bi al-shawab"* (Allah swt yang lebih mengetahui kebenaran yang susungguhnya) yang menunjukkan bahwa para ulama telah memberikan gambaran bahwa ilmu pengetahuan atau pendapat tidak bisa menjadi dogma tetapi harus terus didiskusikan untuk diaktualkan sebagaimana fiqih harus selalu diaktualkan sesuai dengan

kebutuhan ruang dan waktu (*taghayyurr al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*) (8) hak persamaan sebagai pemeluk agama juga diajarkan sehingga fiqih mengajarkan *hifdz al-din* (memelihara eksistensi agama) sebagai keniscayaan bahwa setiap umat manusia memiliki keyakinan atau kepercayaan yang diakui dan harus dilindungi menurut norma fiqih, tidak boleh dinodai atau dipaksakan sebagaimana gambaran yang dikemukakan al-Qur'an bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama (*la ikraha fi al-din*). (9) hak privasi sebagai wujudnya tidak boleh membuka aib orang lain sehingga fiqih melarang *ghibah* (menceritakan keburukan orang lain walaupun orang tersebut melakukannya pada orang lain dengan maksud bathil) dan juga larangan fitnah, (10) hak-hak ekonomi untuk mendapat akses kerja yang layak dan sama, hal ini juga dikemukakan dalam kebijakan Presiden Joko Widodo dengan adanya kewajiban membentuk TIM TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) bagi unsur pimpinan daerah sehingga warga masyarakat diharapkan akan mendapatkan akses keuangan yang mudah untuk berusaha, berinvestasi, menabung, dan meminjamnya untuk keperluan usaha atau bisnis.[68] Demikian juga fiqih mengajarkan *hifdz al-'aql* (memelihara akal), sehingga norma fiqih melarang segala perbuatan yang merusak akal pikiran jika masa lalu yang dilarang adalah hanya tindakan minum-minuman keras, saat ini juga larangan melihat informasi yang tidak baik seperti film porno karena akan merusak pikiran yang melihatnya. Dalam hal yang sama juga narkoba yang akan merusak akal pikiran manusia sehingga norma fiqih melarang perbuatan itu dan sekaligus negara Indonesia melarang keras bagi pelaku atau pengedar atau bandar narkoba, bahkan di bawah kepemimpinan Joko Widodo telah dilakukan eksekusi terhadap sejumlah tahanan narkoba yang sudah diputus secara inkrah oleh pengadilan, bahkan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan intervensi negara luar yang kebetulan warganya menjadi bagian dari salah satu yang terkena hukuman mati. Ketegasan Joko Widodo dalam menghukum para pelaku narkoba menjadi bagian

[68] Bandingkan dengan Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, eds Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, (Yogyakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 368-369.

pokok dari norma fiqih sebagai bagian dasar dari tegaknya kemaslahatan hidup manusia yang asasi (*al-dharuriyah*).

Dengan nalar fiqih ke-NU-an ini, kita dapat menilai gagasan Joko Widodo dari statemennya yang menegaskan bahwa sikap-sikap dan tindakan yang saling menyalahkan, saling mencela, saling mengejek, merasa diri yang paling baik, dan juga tidak saling menyembunyikan kesalahan merupakan tindakan anti kemanusiaan. Sebaliknya, yang harus dipupuk dengan baik adalah membangun rasa kebersamaan, kerukunan, toleransi, dan rasa saling percaya dengan dengan penuh keikhlasan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasi yang akan datang. Dengan harapan bahwa pembangunan dan perbaikan masyarakat, umat, bangsa, dan negara ke arah yang lebih sejahtera dapat terwujud dengan baik berkat lindungan dan rahmat Allah SWT, sehingga mendapat kemudahan, kebaikan, serta ridla-Nya menuju bangsa yang *baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur*.[69]

Dalam menjaga dan membangun perdamaian dunia dan peradaban humanis tersebut, Joko Widodo menyampaikan perlunya menjadi mediasi dalam mengatasi konflik yang ada di dunia terutama konflik yang bernuansa agama di wilayah Timur Tengah, misalnya melalui sosialisasi paham keislaman yang moderat, toleran dan santun kepada warga yang berkonflik dan sekaligus kita tetap memelihara tradisi yang baik itu agar kita senantiasa tetap menjadi contoh paradaban yang ideal bagi dunia Islam lainnya .

> "Ini juga perlu kami sampaikan, mengenai masalah terorisme dan radikalisme. Saya sudah didatangi dan bertemu di beberapa konferensi internasional dari beberapa negara di *Middle East*, di Timur Tengah menyampaikan kepada kita, bahwa Indonesia dianggap sebagai sebuah negara Islam yang mampu betul-betul menerapkan ajaran-ajaran Islam yang

[69] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015*http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016

sesungguhnya. Saya bertanya, «Kenapa?», kepada beliau-beliau. Ya pada kenyataannya di Indonesia, masalah kesantunan, keramahtamahan, masalah toleransi antarsuku, antaragama, antarwilayah itu betul-betul ada".[70]

Joko Widodo menuturkan bahwa mereka menyampaikan permohonan pada kita agar Indonesia berperan aktif dalam membantu untuk menjadi penengah dan motor penggerak bagi perdamaian di Timur Tengah, baik menyangkut kasus terakhir di Yaman maupun di wilayah Timur Tengah lainnya. Kalau kita lihat, negara kita ini dilihat oleh mereka sebagai sebuah negara yang dari luar sebagai negara yang tenteram walaupun tentu kadang-kadang juga ada, konflik kecil-kecil antarkampung.[71] Hal ini menjadi kebanggaan bagi bangsa kita karena adanya kultur dan budaya hidup yang rukun, santun, toleran dan kebersamaan yang baik dengan suasana saling penghargaan dan penghormatan sesama umat yang sangat tinggi.

Dalam rangka membangun nalar fiqih humanis, Joko Widodo menegaskan perlunya menjaga kerukunan berdasarkan prinsip kebhinnekaan yang sudah teruji bertahun-tahun dan kita harapkan lahirnya nalar pengetahuan atau fiqih moderat, yang *rahmatan lil 'alamin* yang tersosialisasi dan terpelihara di masyarakat, sehingga dapat terwujud tatanan kehidupan bernegara yang *tentrem ayem* dan menjaga kesopansantunan serta bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Inilah nalar fiqih humanis yang tertanam dalam gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[72] Oleh sebab itu, ia tidak mau berkompromi dengan gerakan radikal dan ekstrim.

---

[70] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26 6 Juni 2016.

[71] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26 6 Juni 2016.

[72] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Kunjungan kerja*

> "Saya setiap ketemu kepala negara, kepala pemerintahan, mereka saya terangkan 17 ribu pulau Indonesia, 300 etnis lebih, ada dua pertiga adalah air, 250 juta penduduknya. Banyak yang bertanya ke saya, "Mengelolanya seperti apa?" Betapa sangat sulitnya. Ya betul. Oleh sebab itu, dengan NKRI, dengan kebhinnekaan kita, dengan mukadimah, tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum (*Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia/PMII,* pen) tadi. Sekali lagi, yang namanya radikalisme, kemudian gerakan-gerakan ekstremisme ya memang tidak ada kompromi untuk mereka. Jangan ada kompromi dengan mereka. Sekali lagi, yang namanya radikalisme, kemudian gerakan-gerakan ekstremisme ya memang tidak ada kompromi untuk mereka. Jangan ada kompromi dengan mereka".[73]

Dalam nalar fiqih kemanusiaan tersebut, statemen Joko Widodo itu memiliki ruh dan semangat yang mendalam untuk membangun kerukunan, kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk ini. Komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut jika kita telusuri akarnya telah digariskan dalam pikiran-pikiran Islam (fiqih) yang dianut oleh Ir Soekarno yang menyatakan bahwa tidakkah Islam yang sejati telah membawa "segenap peri-kemanusiaan di atas lapangan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan"?, bahkan Nabi Muhammad saw telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dengan ajaran kesetaraan atau persamaan. Lebih lanjut Ir Soekarno mengutip sabda Nabi saw dan ayat al-Qur'an sebagai berikut:

> "Hai, aku ini hanyalah seorang manusia sebagai kamu; sudahlah dilahirkan padaku, bahwa Tuhanmu yalah Tuhan yang satu?" Bukankah *persaudaraan* ini diperintahkan pula oleh ayat 13

---

ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26 6 Juni 2016

[73] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Harlah ke-55 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Nasional al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26 6 Juni 2016.

> Surat al-Hujurat, yang bunyinya: "Hai manusia, sungguhlah kami telah menjadikam kamu dari laki-laki dan...perempuan, dan kami jadikan dari padamu suku-suku dan cabang-cabang keluarga, supaya kamu berkenal-kenalan satu sama lain?"[74]

Demikianlah nilai-nilai gagasan dan kebijakan Joko Widodo yang memiliki hubungan erat dengan nalar fiqih ke-NU-an, yakni nalar fiqih ke-NU-an KH Hasyim Asy'ari yang mengajarkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan melalui adanya ruang pemahaman fiqih yang mengakomodir adanya perbedaan madzhab atau golongan Islam dan pemahaman fiqih yang fleksibel dan elastis, -disamping juga memiliki akar historis dari pemikiran-pemikiran Ir Soekarno-, sehingga kita mampu membangun tatanan hukum/fiqih yang humanis sesuai dengan kepentingan umat manusia dengan adanya ruang kemudahan dan keluasaan dalam memahami dan menjalankan ajaran fiqih (Q.S. al-Baqarah [2]: 185).[75]

Nilai-nilai fiqih kemanusiaan juga terkandung dalam peristiwa Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw. Sebab, shalat yang diperintahkan secara legal-formal dalam fiqih bukan hanya mengandung nilai hikmah *ibadah mahdla* (murni ibadah), tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yakni setiap orang yang menjalankan ibadah, maka shalatnya itu sesungguhnya telah menjadi bagian penting yang menyucikan jiwanya dari segala sifat dan tindakan yang buruk, sehingga dengan jiwa yang suci dan bersih diharapkan akan lahir perilaku dan tindakan yang bersih dan baik pula.[76]

Penyucian jiwa dari hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw juga menjadi amanah Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa kita harus menyingkirkan segala sifat buruk yang dimiliki kita sebagai umat Islam dan menggantinya dengan sifat-sifat mulia, sehingga kita harus

---

[74] Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Kholid O Santoso (ed), (Bandung: Sega Arsy, 2015), hlm. 31.

[75] KH Hasyim Asy'ari, *Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin* dalam Ishomuddin Haziq (ed), *Irsyad al-Syari* ..., hlm. 91-94.

[76] Said Ail Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*..., hlm. 440.

menyingkirkan sifat saling menyalahkan, mencela, mengejek, merasa paling baik, dan juga tidak saling menyembunyikan kesalahan, tetapi sebaliknya kita harus membangun rasa kebersamaan, kerukunan, toleransi, rasa saling percaya, serta sikap penuh keikhlasan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan generasi yang akan datang.[77]

Kebersihan jiwa itu menjadi perhatian nalar fiqih ke-NU-an sebagaimana ditradisikan Nabi Muhammad saw agar umat Islam senantiasa membersihkan hati dan jiwanya dari selain mencari ridla Allah dalam mengerjakan amal shaleh, jangan pernah bekerja dan berbuat untuk kepentingan pribadi, materi, kepentingan kelompok, pujian orang, atau kepentingan kekuasaan pribadi. Inilah sifa-sifat mulia yang harus dimiliki seorang mukmin dan muslim sejati yang beramal shaleh terutama bagi yang berkuasa dan memegang mandat rakyat/masyarakat agar amal perbuatannya untuk tugas pelayanan kepentingan umat dan masyarakat harus selalu diiringi mengharapkan ridla Allah, bukan atas dasar balasan dan pujian dari umat atau masyarakat itu sendiri.[78]

Dalam tataran praktis, nalar fiqih kemanusiaan yang tertanam dalam jiwa Joko Widodo dapat dicermati dan ditelusuri dari kebijakannya terutama ketika beliau masih menjabat sebagai Walikota Surakarta yang mengajarkan dan menerapkan sistem relokasi pasar dengan cara-cara yang damai dan musyawarah bagi para pedagang dari Pasar Banjarsari Surakarta ke Pasar Klitikan Notoharjo Surakarta[79] sehingga kebijakan itu menjadi salah satu model penerapan nalar fiqih kemanusiaan yang benar-benar dirasakan bersahabat dan hadir bersama rakyat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam term fiqih dikenal dengan

---

[77] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016

[78] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari*..., hlm. 26.

[79] Hasil Wawancara dengan Abang Becak, Mardi, tertanggal 23 Juni 2016 di Surakarta.

memelihara stabilitas ekonomi (*hifdz al-mal*). Mengatur stabilitas dan perkembangan ekonomi masyarakat itu baik, tetapi jika tidak diikuti dengan strategi yang baik, tidak akan mewujudkan hasil yang baik pula. Inilah yang dimaksud dalam ayat al-Qur'an menurut Gus Dur bahwa tujuan yang baik itu tidak cukup jika tidak diikuti dengan cara-cara penyampaian/penerapan yang baik.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> Artinya: Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. al-Baqarah, 2; 42).

Demikianlah ayat al-Qur'an mengajarkan pada umat manusia bahwa kita harus menggunakan cara-cara penerapan yang baik bagi berbagai kepentingan manusia bersamaan dengan tujuan yang baik,[80] sebagaimana kasus pemindahan pedagang pasar Banjarsari ke pasar Klitikan Notoharjo yang dilakukan oleh Joko Widodo. Hal itu bisa berhasil karena berdasarkan nalar *'urf*/pemahaman Joko Widodo terhadap budaya/kearifal lokal yang menjadi jiwa dan karakter masyarakat dipahami dan dikelola dengan baik sehingga hal itu melahirkan sikap dan ketaatan yang baik dari para pedagang tersebut pada kebijakan Joko Widodo.

Hal ini juga sesuai dengan nalar fiqih ke-NU-an yang digagas KH M Hasyim Asy'arie yang menyatakan bahwa kalau kita hendak berbuat kebaikan hendaknya dilaksanakan cara-cara yang baik atau hikmah, nasehat atau musyawarah yang baik, dan mengantisipasi tindakan konflik/keburukan dengan cara-cara yang baik dan santun. Demikianlah '*ibarah* kitab karya KH M Hasyim Asy'arie berikut: *Wa min ahsani qaulan min al-rasul shallahu alaihi wa sallam alladzi da'a ila Allah bi al-hikmah wa al-mau'idlah al-hasanah, wa jadil al-nas bi allati hiya ahsanu wa radd al-sayyi'ah bi al-hasanah* (Adapun ungkapan yang tepat

[80] KH Abdurrahman Wahid, *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjo dkk, (peny), (Bandung: Nuansa, 2011), hlm. 184-185.

dari Rasulullah saw yang mengajak kepada jalan Allah dengan bijaksana dan ungkapan-ungkapan yang baik, berdebat dengan manusia dengan cara yang terbaik serta menolak keburukan dengan cara yang baik).[81]

Berdasarkan uraian tersebut, nalar agama (fiqih) Islam telah menyiapkan ajaran yang mengatur urusan dunia dan akhirat, material dan spiritual, iman dan amal. Dalam bahasa Hasan Hanafi, agama Islam tidak hanya membicarakan proyeksi cita-cita manusia yang bersandar pada Tuhan, tetapi juga sekaligus melakukan revolusi keadaan manusia menuju keadaan yang sejahtera baik spiritual dan material, atau adil dan makmur.[82] Kondisi inilah yang justru tidak ditemukan dalam agama-agama pra-modern dan agama modern dalam kajian R N Bellah. Agama modern berbeda dengan agama pra-modern, dimana agama pra-modern hanya mengatur hubungan langsung antara individu manusia dan kenyataan transendental, sedangkan agama modern telah melahirkan struktur baru, dimana agama berada dalam struktur situasi kemanusiaan. Walaupun demikian, hubungan keduanya itu tidaklah terputus.[83]

D. FIQIH EKONOMI KERAKYATAN

Untuk membangun tata kehidupan ekonomi yang baik, maka harus ada keseimbangan antara tata kehidupan masyarakat dan tata kehidupan negara/pemerintahan. Untuk membangun masyarakat yang ideal, Ir Soekarno, Bapak Proklamator Kemerdekaan RI/ Presiden RI Pertama, mengemukakan sistem ekonomi yang mengedepankan demokrasi ekonomi dan Sosio-Nasionalisme,[84] bahkan bagi Ir Soekarno

---

[81] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari*..., hlm. 27.

[82] E Kusnadiningrat, *Hassan Hanafi, Islam, Oposisi, dan Revolusi*, http://islamlib.com/tokoh/hassan-hanafi/, diakses 4 Juli 2016

[83] R N Bellah, "Evolusi Agama", dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 330 dan 335.

[84] Soekarno menyatakan: "Masyarakat yang nanti kita dirikan, haruslah masyarakat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, cara pemerintahan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, republik yang nanti kita dirikan adalah republik sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, suatu republik politik sosial yang tiada

mengatakan bahwa kepincangan yang menyolok dalam struktur sosial di kalangan masyakarat kemudian menyadarkannya untuk menegaskan bahwa kemerdekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri, tetapi kemerdekaan adalah syarat untuk melakukan koreksi yang fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan ekonomi di dalam masyarakat yang termuat dalam dalam UUD-NRI 1945. Ir Soekarno menyatakan:[85]

> "memperbaiki keadaan dalam masyarakat sehingga keadaan yang pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, tidak ada kaum yang papa sengsara, ... jadi yang dicari adalah keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki" [86]

UUD-NRI 1945 telah menegaskan bahwa tujuan NKRI hadir untuk membentuk pemerintahan yang "melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan ini mengandung penugasan aktif kepada negara untuk mewujudkannya".[87] Dengan demikian sistem perekonomian yang hendak dicapai oleh cita-cita pendiri negara ini adalah sistem perekonomian yang empiris-rasional dan berakar pada kebutuhan masyarakat sehingga pemerataan

---

kapitalisme dan tiada imperealisme." Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Kholid O Santoso (ed), (Bandung: Sega Arsy, 2015), hlm. 135.

[85] Zudan Arif Fakhruddin, *Peranan Hukum dalam Merekatkan Kebangsaan Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis ke-30 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, http://jdih.depdagri.go.id/ diakses 2 September 2012

[86] Zudan Arif Fakhruddin, *Peranan Hukum dalam Merekatkan Kebangsaan Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis ke-30 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, *http://jdih.depdagri.go.id/* diakses 2 September 2012

[87] Zudan Arif Fakhruddin, *Peranan Hukum dalam Merekatkan Kebangsaan Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis ke-30 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, *http://jdih.depdagri.go.id/* diakses 2 September 2012

dapat terwujud, di samping pertumbuhan dan prestasi kerja tetap diperhatikan.

Demikian juga filosofi fiqih ekonomi Islam yang bersumber pada ayat-ayat al-Qur'an terutama pada kata *"tijarah"* (Q.S. al-Baqarah [2]: 282 dan an-Nisa', 429) memiliki garis distingsi dengan filosofi ekonomi kapitalis dan sosialis. Spirit ekonomi Islam berdasarkan dan berpijak pada asas keilahian, asas keadilan (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7), dan asas tanggung jawab. Sistem perekonomian Islam itu bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi juga pemerataan sebagaimana perintah ajaran ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah.

Asas ekonomi Islam yang diatur dalam fiqih digambarkan dengan simbol "kesejahteraan" sebagai hal empiris-rasional. Al-Qur'an mendeskripsikan dengan ungkapan "rugi", "untung", dan "panen", misalnya ungkapan perumpamaan perniagaan; وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ yang artinya: "dia di akhirat masuk kategori orang-orang yang merugi (perniagaannya)" (Q.S: Ali Imran [3]: 85). Ayat lain menjelaskan perniagaan dengan ungkapan, yaitu يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا yang artinya: "menghutangi Allah dengan hutang yang baik" (Q. S. al-Baqarah [2]: 245). Demikian juga ayat lainnya menjelaskan dengan ungkapan: مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ yang artinya: "barang siapa yang menghendaki panen akhirat, maka akan Ku-tambahi panennya" (Q. S. al-Syura [42] 20)."[88] Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak boleh berjalan spekulatif, tetapi harus berjalan empiris-rasional. Dalam kehidupan kenegaraan, Gus Dur menyebutkan bahwa ekonomi harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Bahkan seorang orientalis Amerika, Charles Torrey yang mengajukan disertasi pada Universitas Heidelberg di Jerman pada tahun 1860-an mendapati hanya kitab suci al-Qur'an yang menggunakan kata-kata profesional untuk menggambarkan keyakinan dengan ungkapan yang rasional dan logika ekonomi empiris-mutakhir seperti firman Allah berikut.[89]

---

[88] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm 112.

[89] Abdurrahman Wahid, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998),hlm. 164-166.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. al-Hadid, 57:11)

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya memperhatikan aspek-aspek keuntungan dan kemanfaatan yang diperoleh dan diberikan pada orang yang sudah bekerja dengan baik dan profesional. Ada proses pembangunan ekonomi yang proporsional antara kepentingan prestasi kerja dan kepentingan pemerantaan. Pengaturan ini hingga pada sistem pemerataannya menunjukkan bahwa ajaran (fiqih) Islam merupakan ajaran agama yang sempurna, sehingga segala urusan manusia diaturnya baik aspek dunia maupun akhirat. Dalam pandangan H A R Gibb, *Islam is much more than a system of theology, it's a complete civilization.*[90]

"C C Torrey dalam *the Commercial Theological Term in the Quran* menerangkan bahwa al-Qur'an memakai 20 terminologi bisnis. Ungkapan tersebut diulang sebanyak 720 kali. Dua puluh kali bisnis tersebut antara lain; (1) tijarah; (2) bai'; (3) isytara; (4) dain (tadayan); (5) rezeki; (6) riba; (7) dinar; (8) dirham; (9) kismah; (10) mudlarabah; (11) syirkah; (12) rahn; (13) ijarah; (14) amwal; (15) fadilah; (16) akad; (18) mizan (timbangan) dalam perdagangan; (19) kail (takaran) dalam perdagangan; dan (20) warak (mata uang)".[91]

"Nabi Muhammad saw menyebutkan ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadis ia juga menyebutkan bahwa para pedagang sebagai profesi terbaik,

[90] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetap Solusi*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 300.

[91] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi* ..., hlm. 300.

bahkan mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan. *"Hendaklah kamu kuasai perdagangan, karena 90% pintu rezeki dalam perdagangan"* (H.R. Ahmad). *"Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan"* (HR Baihaqi).... Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi. Karena itu, tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik mudlarabah, musyarakah, musahama, murabaha, ijarah, wadiah, wakalah, hawalah, kafalah, jialah, bai' salam, ishtisna', riba, dan ratusan konsep muamalah lainnya....Seluruh kitab fikih Islam membahas masalah muamalah, contoh *al-Umm* (Imam Syafi'i), *Majmu' Syarah Muhazzab* (Imam Nawawi), dan *Majmu' Fatawa* (Ibnu Taimiyah)".[92]

Dengan demikian, Islam sebagai agama yang sempurna yang tidak hanya mengatur masalah-masalah teologi saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah empiris umat, termasuk masalah hajat hidup manusia berupa perekonomian. Bahkan Ibnu Khaldun telah membahas aneka ragam masalah pembahasan ekonomi yang luas semisal tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, pertanian, industri, dan lainnya, sehingga Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan Muslim terkemuka yang mendahului ide-ide Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Robert Malthus.[93]

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah/Islam dalam pengelolaan harta dapat digambarkan dari kebijakan Umar Ibn Khattab, yakni *Pertama*, ambil dengan cara yang benar, artinya negara tidak akan mengambil harta rakyat dengan cara yang tidak benar. *Kedua*, berikan sesuai dengan haknya, artinya sumber kas negara harus berasal dari harta yang baik dan halal. *Ketiga*, cegah dari kebatilan, artinya negara

[92] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi....*, hlm. 300-301.

[93] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi...*, hlm. 301-302.

menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dengan kekayaan.[94] Oleh sebab itu, sebagai agama yang sempurna, kita berkewajiban mengikuti dan menjalankan norma-norma fiqih Islam secara totalitas, bukan parsial atau sebagian saja.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 208)

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

Artinya: Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah

[94] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi* ..., hlm. 84 dan 255.

balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah [2]: 208).

Adapun karakter khusus ekonomi Islam/syariah dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, yakni *Pertama*, secara epistemologis, ekonomi merupakan bagian integral dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang bersumber langsung dari Allah swt. *Kedua*, ekonomi syariah bukan hanya sistem yang mengatur urusan keduniaan, tetapi juga mengatur urusan keakhiratan, semisal baik dan buruk, halal dan haram. Inilah permasalahan utama yang menjadi ciri ekonomi syariah yang selalu mengedepankan aspek etis-moral dimana ada keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, keseimbangan antara pemenuhan kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Seseorang yang memberikan sedekah misalnya bukanlah keputusan irrasional, tetapi *beyond rational*. *Ketiga*, sejumlah teori dan teknis dalam sistem ekonomi konvensional tidak bisa diterapkan dalam sistem ekonomi syariah, semisal sistem riba yang memiliki kecenderungan memaksimalkan keuntungan pribadi yang berlipat-lipat tidak dibenarkan dalam ajaran ekonomi syariah, sehingga distribusi kekayaan menjadi perhatian sistem ekonomi syariah, selain keuntungan personal.[95]

Semasa menjabat Walikota Surakarta, program-program ekonomi kerakyatan Joko Widodo memiliki titik tekan pada penumbuhan, pengembangan dan pelestarian daya tahan dan kompetisi usaha masyarakat menengah dan kecil melalui berbagai program, semisal program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi para pengusaha lokal, pembangunan pasar tradisional, pembangunan iklim usaha yang kondusif, pembangunan tata ruang kota yang indah dan bersih, pemberian modal usaha bagi para pengusaha lokal, pemberian peralatan usaha bagi pengusaha lokal, pemberdayaan usaha taksi lokal. Oleh

[95] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi...*, hlm. 262-263 dan 226.

sebab itu, penguatan ekonomi kerakyatan Joko Widodo itu menjadi salah satu program prioritas pembangunan Kota Solo, sehingga ada beragam program untuk menumbuhkan sentra-sentra industri kecil dan menengah sebagaimana saat ini telah berkembang berbagai jenis usaha batik Solo dengan dukungan pelayanan prosedur perijinan dan keramahan pelayanan aparatur pemerintah kota yang baik bagi rakyat, berbagai upaya peningkatan daya saing produk unggulan daerah baik dari segi mutu maupun pemasarannya melalui berbagai kegiatan dan juga festival batik Solo, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM dengan beragam kebijakan yang berpihak pada para pengusaha lokal, seperti taksi, pembangunan dan penataan pasar tradisional, pembinaan pengusaha batik, dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).[96]

> "Solo juga terkenal dengan sentra industri kecil dan menengah, terutama para perajin batik. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2010 memberikan bantuan alat-alat mesin dan peralatan industri batik sebagai bagian menumbuhkan sentra-sentra indutri kerakyatan yang ada di kota Solo. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan, antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan, namun demikian pertumbuhan ini harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produk-produk lokal namun berkualitas global. Tantangan industri ke depan semakin berat, terlebih lagi dengan adanya kompetisi pasar bebas, kondisi demikian mengharuskan segenap *stakeholders* untuk mengerahkan segala daya dalam mengelola asset dan potensi yang ada untuk digunakan bagi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, diperlukan sikap dan tindakan proaktif segenap *stakeholders* dalam menyikapi kondisi demikian yang nantinya akan pengaruhnya terhadap dunia usaha pada umumnya. Pemerintah Kota Surakarta berharap, dengan pemberian bantuan ini, para industri kerakyatan di kota Solo berkembang dangan baik dan maju sehingga mampu

[96] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Penyerahan Bantuan Mesin dan Peralatan Batik*, Surakarta, 28 Desember 2010.

menciptakan keunggulan kompetitif dan bersaing di pasar global untuk mendukung perekonomian Kota Solo".[97]

Untuk memajukan UMKM, Joko Widodo berusaha melakukan berbagai kegiatan yang mendukung bagi lahirnya iklim usaha yang kondusif, profesional dan kompetitif. Apalagi jumlah UMKM sangat besar di daerah Solo Raya, bahkan perannya UMKM sangat dominan dan strategis dalam mendukung struktur perekonomian Indonesia, sehingga kuantitas UMKM harus diikuti pula dengan meningktkan kualitasnya, yang dengan tindak lanjut pembinaan manajemennya, baik manajemen produk, manajemen hasil maupun manajemen branding.[98]

"Sebab jika UMKM ini dibiarkan dan tidak dibina justru perekonomian Nasional akan lebih dikuasai oleh segelintir pemodal besar/ konglomerat yang ternyata sangat labil terhadap goncangan ekonomi global. UMKM telah membuktikan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu bahkan menjadi katup pengaman pembangunan ekonomi nasional....Selain itu, UMKM juga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan Negara. Beberapa jenis UMKM menjadi sumber devisa Negara, dengan kata lain UMKM telah menjadi investasi bagi Negara. Terutama UKM di bidang pertanian dan kerajinan. Oleh karena itu, Pemerintah kota Surakarta sangat mendukung dalam pengembangan berbagai peralatan yang mendukung kinerja UMKM berbasis teknologi. Bantuan teknis dari Bank Indonesia mengenai pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat membantu bagi keberlanjutan UMKM di masa depan".[99]

---

[97] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Penyerahan Bantuan Mesin dan Peralatan Batik*, Surakarta, 28 Desember 2010.

[98] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Workshop Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Surakarta, 19 Juli 2011.

[99] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Workshop Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Surakarta, 19 Juli 2011.

Program penataan pasar tradisional yang menjadi pusat dan mata pencaharian masyarakat Surakarta juga terus berjalan dan berkembang dengan baik beserta keindahan dan kerapian ruang tata kota di Surakarta. Sebagaimana taman kota yang indah di Kelurahan Stabilan Kecamatan Banjarsari yang sudah dipindah PKL-nya ke pasar tradisional Klitikan Notoharjo. Selanjutnya, dalam pembinaan dan penataan pasar tradisional bukan hanya sekadar pembangunan iklim usahanya saja, tetapi pemerintah kota Surakarta juga memperhatikan aspek modalnya dengan memberikan bantuan stimulus untuk memajukan usaha-usaha yang ditekuni masyarakat. Dengan demikian, Joko Widodo juga mendorong lahirnya sikap kemandirian dan kewirausahaan di masing-masing keluharan dan RW/RT, sehingga fungsi pelayanan yang diharapkan oleh warga masyarakat semakin dekat dan dirasakan manfaatnya.

Inilah salah satu prioritas pembangunan yang diprogramkan Walikota Joko Widodo di kota Solo pada waktu itu adalah *ekonomi kerakyatan*. Ekonomi kerakyatan ini diharapkan tumbuh dan berkembang sehingga membawa kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi yang ada, seperti pemberdayaan dan pembinaan PKL, revitalisasi pembangunan pasar tradisional, pembatasan pendirian mall di tengah kota, dan penguatan sentra-sentra ekonomi rakyat/ UMKM. Oleh sebab itu, pada tingkat RT tahun 2009 telah diberikan dana hibah pada seluruh RT di kota Solo yang sumbernya berasal dari dana cukai tembakau, yang berlanjut tahun 2010 hingga 2011 ini. Jika modal ini bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh RT, maka hal ini akan menjadi embrio terbentuknya koperasi di masing-masing RT.[100]

> "Pemkot punya harapan bahwa dengan modal ini, terjadi perputaran dana di masyarakat, karena dana abadi tersebut dikelola dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Pemkot berkeinginan jika pengguliran dana abadi ini berjalan lancar

[100] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Workshop Pengembangan Ekonomi Kelurahan di Kota Surakarta*, 18 Juli 2011.

maka akan menjadi embrio terbentuknya koperasi-koperasi di masing-masing RT, sebab kegiatan-kegiatannya mengarah pada koperasi namun belum berbadan hukum. Karena untuk menjadi Badan Usaha yang berbadan hukum harus mempunyai kriteria tertentu. Hanya saja jika ***pra koperasi*** yang ada di lingkup RT ini terus dilakukan pembinaan-pembinaan, Pemkot yakin pra koperasi atau badan usaha milik masyarakat ini akan menjadi sebuah koperasi yang berbadan hukum. Kita semua berharap pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, namun yang terpenting adalah bagaimana untuk menjalankan konsep tersebut. Sebab struktur ekonomi kita banyak didominasi oleh usaha kecil, mikro dan menengah yang harus diperhatikan secara khusus. Pemkot yakin bahwa pada suatu saat nanti jika koperasi atau Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) yang ada di kota Solo terus dibina dan dikembangkan, maka eksistensi koperasi sebagai soko guru sistem perekonomian bangsa akan terwujud".[101]

Pembangunan embrio koperasi di masing-masing RT/RW melalui pembinaan yang intensif dari pemerintah Kota akan menjadi titik awal untuk membangun koperasi yang berbadan hukum yang maju dan menjadi soko guru ekonomi masyarakat atau bangsa. Pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah tidak boleh hanya menjadi konsep saja, tetapi harus dijalankan masyarakat bersama-sama atas binaan pemerintah dengan baik dan konsekuen, sehingga struktur ekonomi masyarakat atau bangsa ini akan menjadi sehat dan kokoh berkat kemajuan dari usaha kecil, mikro dan menengah.

Demikian juga kebijakan pembangunan pasar tradisional di Klitikan Notoharjo Surakarta itu merupakan bagian dari upaya membangun dan memberdayakan masyarakat bawah yang sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, bahwa betapa pasar rakyat/ tradisional merupakan elemen penting setelah dibangunnya Masjid.

[101] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Workshop Pengembangan Ekonomi Kelurahan di Kota Surakarta*, 18 Juli 2011.

Sebab, pasar akan menjadi wadah setiap umat manusia untuk berikhtiar mencari nafkah hidupnya secara riil dan empiris, yang salah satunya dalam hal ini adalah perdagangan dengan wadah pasar itu sebagai elemen penting dalam mencari nafkah yang *halalan tayyibah* (halal dan baik).

> "Memang membicarakan masalah ekonomi dari sudut pandang Islam, rasanya perlu pembahasan kompleksitas masalah lebih terinci dan saling melengkapi. Nabi sebagai uswatun hasanah dalam sejarah sewaktu hijrah ke Madinah telah memerintahkan dibangunnya pasar setelah sempurnanya pembangunan masjid di kota tersebut. Ini tentu saja bukan sekadar bangunan fisik sebagai pusat sirkulasinya berbagai komoditas, namun merupakan simbol yang menggambarkan betapa pentingnya "pemasaran'' dalam dunia perekonomian. Lebih jauh lagi perintah Nabi tersebut oleh para ekonom Islam dijadikan sebagai ilham dalam menetapkan pokok-pokok perekonomian secara umum yang ternyata sampai abad ini masih dipakai dan dikenal. Dalam hal ini, Imam Abu Muhammad al-Hubaisyi menggariskan *ushul al-makasib* (pokok sumber ekonomi) dalam tiga hal, yaitu pertanian, perindustrian (termasuk juga kerajinan) dan perdagangan".[102]

Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada RT/RW sesungguhnya merupakan bagian dari usaha mendekatkan masyarakat pada akses berwirausaha sehingga ada kesadaran personal dan kesadaran bersama di tengah-tengah masyarakat untuk memacu kreatifitas dan naluri bisnisnya sebagai inti kesuksesan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam nalar fiqih ke-NU-an, kegiatan bisnis atau wirausaha ini merupakan kewajiban fundamental setelah kewajiban syar'i lainnya. KH MA Sahal Mahfudh menyebutkan:

> "Menyinggung perihal ikhtiar dalam perekonomian, kita ingat akan sebuah hadis yang kurang lebih artinya, «Bekerja

[102]KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya, diakses 20 Juni 2016; KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2004)

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah wajib (fardlu) setelah kewajiban yang lain». Interpretasi hadits ini akan melahirkan kelompok-kelompok manusia produktif atau manusia bersumberdaya tinggi yang sekaligus merupakan inti perekonomian. Berangkat dari kenyataan bahwa Allah tidak memberi rizki dalam bentuk jadi dan siap digunakan, melainkan hanya dipersiapkan sebagai sarana dan sumber daya alam, maka sudah barang tentu untuk mengolahnya, mengikhtiari dalam bentuk industri dan Lain-lain, sangat dibutuhkan kehadiran manusia produktif".[103]

Gagasan pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilakukan Joko Widodo selama menjadi Wakikota Surakarta sesungguhnya memiliki kesamaan dengan gagasan nalar fiqih ke-NU-an yang dirumuskan dan ditawarkan KH MA Sahal Mahfudh (Rais 'Am PBNU Periode 2010-2015) yang menyebutkan bahwa manusia produktif pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki jiwa entrepreneur yang berciri antara lain, memiliki sikap yang peka dan dinamis terhadap kebutuhan sekelilingnya, serta menguasai informasi dan kreativitas yang tinggi, sehingga ia menjadi insan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Profil manusia yang berpotensi, kreatif dan dinamis termasuk dalam bidang pengembangan ekonomi umat/kerakyatan menjadi cita-cita Nabi Muhammad saw sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadits Nabi yang artinya: «Orang mukmin yang kuat (punya potensi) lebih baik ketimbang mukmin yang lemah». Oleh sebab itu, profil Muslim sejati menurut nalar fiqih ke-NU-an adalah sosok manusia yang memiliki etos kerja dan kreatifitas yang tinggi dalam segala bidang, termasuk bidang ekonomi, bukan sosok manusia yang hanya mengandalkan orang lain atau mengandalkan Tuhan tanpa ada ikhtiar sama sekali/fatalisme.[104]

"Dari hadits ini saja, kita bisa menemukan pandangan Islam yang proporsional terhadap ekonomi. Sikap ikhtiar dapat

[103]KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya, diakses 20 Juni 2016.

[104]KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya, diakses 20 Juni 2016.

menghindarkan manusia dari sikap fatalistik (berserah pada nasib) yang secara tegas telah dilarang oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 87, "Janganlah kamu sekalian berputus asa atas rahmat Allah. Tiada orang yang berputus asa kecuali orang-orang kafir». Beberapa hadits Nabi secara tegas memerintahkan ikhtiar dan menempatkannya sebelum tawakal. Tawakal sebagai suatu nilai iman yang sangat luhur tidak bisa diartikan berlawanan dengan ikhtiar, bahkan harus saling berkaitan antara keduanya. Hal ini diisyaratkan oleh Nabi ketika seorang Badui berkata kepadanya, "Aku lepas ontaku (tanpa kendali) dan aku hanya bertawakal." Serta merta Rasul bersabda, "Ikatlah dulu ontamu dan kemudian bertawakallah".[105]

Program pembangunan ekonomi kerakyatan Joko Widodo saat ini juga memiliki kesinambungan dengan beranjak dari masalah-masalah krusial-faktual yang dihadapi masyarakat dan bangsa yang dimulai dari pinggiran/kaum lemah/terbawah serta membenahi infrastrukturnya dengan tidak melupakan perlunya mengubah paradigma berpikirnya melalui revolusi mental, yakni dari budaya konsumtif dan fatalistik pada budaya kreatif/penuh ikhtiar sebagaimana juga telah disuarakan KH MA Sahal Mahfudh.

Dalam membangun masyarakat dan bangsa saat ini, Presiden Joko Widodo telah mengidenfisikasi masalah-masalah dan berbagai tantangan yang dihadapi bersama, yakni *Pertama*, pengangguran. Pengangguran di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2014 masih kira-kira 7,2 juta. *Kedua*, tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia yang juga masih sangat tinggi, diperkirakan di 2014 kemarin masih mencapai angka 10,96% atau 11%. *Ketiga*, kesenjangan sosial yang masih terjadi, baik antara yang kaya dan miskin maupun kesenjangan antarwilayah, baik dari barat, tengah, maupun kawasan Timur. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan ketimpangan sosial ekonomi yang besar. *Keempat*, masalah korupsi. Indeks persepsi korupsi Indonesia di ASEAN angkanya masih mencapai 34, nomor 6 di ASEAN. Kalah dengan Singapura,

[105]KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya, diakses 20 Juni 2016.

Malaysia, Filipina. Sementara itu, kondisi saat ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi global sangat tidak mendukung dan tidak kondusif, baik pertumbuhan ekonomi global maupun keuangan global. Kondisi tersebut merupakan masalah-masalah yang harus kita sampaikan. Tahun ini, target pertumbuhan ekonomi 5,7-5,8, tahun kemarin 5,1, sedangkan semua negara saat ini sudah menurunkan pertumbuhan ekonominya, kita justru menaikkan pertumbuhan ekonomi. Inilah tantangan yang harus kita hadapi dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas-tugas di masing-masing elemen. Dengan gotong-royong dan kerja keras kita semua, baik rakyat, pemerintah, partai, eksekutif, maupun yudikatif, maka kita akan mampu menggerakkan semua potensi yang kita miliki, sehingga tantangan-tantangan yang berat itu dapat kita atasi, yakni dengan sesantiasa menjaga dan mengembangkan tradisi kerjasama dan gotong-royong yang menjadi budaya kita semua.[106]

Penyelesaian masalah-masalah ekonomi bangsa Indonesia ini merujuk pada visi revolusi mental yang diagendakan dalam pemerintahan Joko Widodo. Orientasi pembangunan ekonomi Indonesia adalah untuk memperkuat sendi-sendi perekonomian rakyat dan bangsa Indoensia, sehingga bukan hanya pertumbuhan yang dikejar, tetapi sekaligus pemerataan di seluruh elemen rakyat dan bangsa.

> "Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam terhadap investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri, dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekedar mengedepankan kekuatan pasar, telah menjebak Indonesia sehingga menggantungkan modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama "komprador" Indonesianya".[107]

---

[106] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Kongres Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Hotel Santika Dyandra, Medan Kota, Sumatera Utara, Tanggal 8 April 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9294&Itemid=26.

[107] Joko Widodo, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.

> "Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka kran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Banyak elit politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang selalu diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi harusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanah Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi".[108]

*Dalam hal pembangunan ekonomi ini, Joko Widodo menilai, y*ang paling penting sebetulnya bukan pertumbuhan ekonominya saja, tetapi pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya sekaligus. Ini yang selalu ditinggal yang belakangnya ini, sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi plus pemerataannya yang ideal. Iklim pembangunan ekonomi akan berkembang dengan baik karena ditopang oleh iklim sosial-budaya dan politik yang baik. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus tetap terbangun berdasarkan budaya toleransi, saling hormat-menghormati, harga-menghargai, sehingga dengan demikian, Indonesia akan bisa menjadi sebuah *role model* negara berpenduduk muslim terbesar yang baik di dunia. Oleh sebab itu, iklim kehidupan budaya dan keagamaan yang toleran dan saling menghormati antara kita, selalu mengambil jalan tengah, *ummatan wasathan harus tetap dipelihara sebagai modal untuk membangun bangsa dan mendukung pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan ekonomi di masa kini dan mendatang*.[109]

---

html, diakses 30 Juni 2016.

[108]Joko Widodo, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html, diakses 30 Juni 2016.

[109] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Penutupan Kongres Umat Islam VI di Hotel Inna Garuda Yogyakarta Tanggal 11 Februari 2015*,http://

Dalam masalah pertumbuhan dan pemerataan, nalar fiqih ke-NU-an memiliki pandangan yang sama bahwa sistem perekonomian syariah tidak mengenal sistem kapitalis yang hanya berdasar pada kebebasan kepemilikan individu tanpa batas, sehingga setiap pemilik modal dapat berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan ekonomi kaum dlu'afa atau fakir miskin. Demikian juga sistem perekonomian sosialis yang bertumpu pada sentralisasi kepemilikan negara tanpa memberi kesempatan kepada pemilikan perorangan atau swasta untuk bekerja mengembangkan ekonomi. Dengan demikian, distribusi kekayaan itu penting sehingga disyariatkan pembagian zakat dari orang kaya pada kaum miskin dan fakir, tetapi juga kekayaan bukan dikuasai negara sehingga rakyat tidak punya hak apa-apa. Dalam hal ini, nalar fiqih ke-NU-an membenarkan adanya pemilikan perseorangan, tetapi bukan monopoli dan eksploitasi. Dengan kata lain, perilaku ikhtiar harus seimbang dengan tawakal. Sikap ikhtiar tidak boleh beralih menjadikan seseorang bersikap serakah dan juga sikap tawakal tidak boleh menjadikan seseorang bersikap fatalis. Keduanya harus seimbang. Dengan demikian, nalar fiqih ke-NU-an memiliki pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diwujudkan bersamaan dengan pemerataannya.[110]

Salah satu kebijakan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerataan ekonomi adalah masalah subsidi BBM. Menurut Joko Widodo, dana subsidi ini akan diubah menjadi nantinya secara total, tetapi kondisi ini membutuhkan perubahan pola pikir, pada awal mulanya mungkin akan berat, tetapi kalau program pembangunan nasional ini sudah berjalan, jadi rel kereta api, tol pelabuhan, *airport,* pengalihan subsidi ke pertanian dan nelayan, maka kita akan merasakan bersama tingkat perubahan pembangunan sarana-prasarana/infrastruktur yang sangat signifikan. Kalau seluruh infrastruktur sudah terbangun dengan baik, maka program pembangunan nasional baik fisik maupun non-fisik akan berjalan lancar. Demikian juga berbagai harga kebutuhan pokok

---

www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8776&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

[110] KH MA Sahal Mahfudh, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya, diakses 20 Juni 2016.

maupun harga-harga barang lainnya pasti akan mengalami penurunan seiring dengan turunnya bisa operasional. Program pembangunan infrastruktur ini menjadi perhatian utama pemerintahan saat ini karena biaya transportasi di Indonesia lebih mahal dari negara-negara tetangga, 2,5 sampai 3 kali lipat karena masalah insfratruktur yang belum dibangun. Di samping pembangunan infrastruktur, yang paling berat dan mendesak yang perlu kita lakukan adalah pembangunan sumber daya manusia karena awal 2016 sudah dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN *Economic Community* yang kemudian akan mempengaruhi intensitas lalu-lalang barang dan lalu-lalang orang yang sudah tidak mungkin lagi dicegah. Kondisi tersebut memerlukan persiapan yang serius terutama untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia agar kita bisa berperan aktif dan bisa menguasai dalam pasar ASEAN, sehingga kita tidak hanya menjadi penonton dan objek pasar.[111]

Spirit ekonomi kerakyatan yang hendak dibangun oleh Joko Widodo sesungguhnya memiliki nilai kesamaan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menggambarkan rasionalitas, realitas empiris dan prestasi kerja serta pemerataan dimulai terutama dari kaum yang lemah. Hal ini dapat kita baca dari program kerja Joko Widodo yang dimulai perubahannya dari nalar konsumtif kepada nalar produktif dalam bidang ekonomi sebagaimana dinyatakan Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI tahun 2015. Ia menegaskan bahwa untuk menjaga kepentingan nasional, kita harus melakukan transformasi fundamental perekonomian nasional dari nalar pembangunan konsumtif diubah menjadi produktif, sehingga program kerja yang dicanangkan lebih mengendepankan asas keadilan dan kemakmuran, bukan hanya sekedar serapan anggaran belanja negara. Bahkan oreintasi pembangunan akan dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, sehingga geliat ekonomi bergerak serempak mulai dari pinggiran atau desa-desa dengan ditopang oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

[111] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Kongres Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Hotel Santika Dyandra, Medan Kota, Sumatera Utara Tanggal 18 April 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9283&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

teknologi dengan menggerakkan sektor-sektor produktif atau padat karya dengan tetap berpijak pada perubahan yang produktif, sikap mental yang kreatif, inovatif, dan gigih.[112]

Nalar ekonomi kerakyatan Joko Widdo senafas dengan nalar fiqih ke-NU-an KH M Hasyim Asy'arie yang menyampaikan, bahwa Nabi Muhammad saw sebagai uswatun hasanah (suri tauladan yang baik) senang berbuat baik dan melayani kaum du'afa', kaum fakir miskin, dan anak-anak yatim/terlantar. Harta kekayaan dan anggaran negara tidak digunakan kecuali untuk menolong dan melayani kebutuhan umat atau masyarakatnya. Sebagian besar harta/kekayaan atau anggaran negara itu digunakan untuk membangun dan memberdayakan kaum du'afa' (*fi ri'ayah al-du'afa' wa al-fuqara'*) baik masyarakat pinggiran atau pedesaan maupun kaum pekerja/buruh.[113]

Nalar ekonomi kerakyatan Joko Widodo juga dapat dibaca dari kecenderungan pemikirannya yang berusaha untuk membangun kemandirian melalui pembangunan sistem perekonomian yang baik, semisal pengelolaan zakat bagi umat Islam yang tersistem dan profesional, untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, perlu ada revolusi mental dan karakter bangsa, terutama untuk memantapkan karakter bangsa Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, talenta individual yang kuat daya intelektualnya, serta memiliki jiwa mandiri dan *spirit* untuk berdikari dalam membangun kehidupannya. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemerataan ekonomi juga akan berfungsi memakmurkan dan menyejahterahkan rakyat dan sekaligus sebagai salah satu penangkal munculnya radikalisme dan anarkisme.[114] Pembangunan segala bidang termasuk ekonomi itu

---

[112] Joko Widodo, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 2015* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_h ut_ri_70.pdf, diakses 15 Agustus 2015.

[113] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari*..., hlm. 15.

[114] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra*

akan terbangun dengan optimal jika digalakkan revolusi mental untuk mencapai pembangunan ekonomi baik aspek pertumbuhan maupun pemerataannya.

Apa yang dilakukan Joko Widodo setidaknya merupakan langkah awal untuk mulai menata sistem perekonomian Indonesia yang selama ini masih sulit mengeluarkan masyarakat dari hegemoni politik kemiskinan. Adapun penyebab kemiskinan masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: *Pertama*, kekuatan kelompok bisnis dan kelompok marjinal (petani, nelayan, buru, sektor informal dan lain-lain) yang berat sebelah. *Kedua*, ketidakseimbangan laju perkembangan antar sektor ekonomi akibat tidak akuratnya pilihan strategi pembangunan ekonomi. Akibatnya, kelompok pinggiran semakin banyak yang tersisih dari proses pembangunan ekonomi. *Ketiga*, ketimpangan pembangunan antarsektor ekonomi akibat kegagalan strategi pembangunan, semisal pembangunan industri yang pernah digalakkan tetapi tanpa menyertakan sektor pertanian, sehingga kondisi ini menyebabkan lahirnya kelompok miskin baru. *Keempat*, asimetri hubungan antar wilayah perkotaan dan pedesaan akibat adanya kebijkan pemerintah yang lebih memperhatikan daerah perkotaan daripada pedesaan, semisal produk-produk pertanian dibeli murah di perkotaan, sementara harga hasil industri perkotaan dijual mahal ke daerah pedesaan. Kondisi ini tentu saja akan melahirkan kelompok kemiskinan yang semakin besar.[115]

Dalam menjawab masalah ini, Joko Widodo dalam *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015* menyatakan sebagai berikut, yaitu *Pertama*, pembenahan infrastruktur yang menyebabkan adanya ketimpangan di antara sektor, misalnya bagaimana membuat kebijakan afirmatif untuk memberdayakan kelompok masyarakat pinggiran seperti nelayan, petani

---

Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

[115] Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 239-241.

dan sektor lainnya. *Kedua*, membuat kebijakan yang mampu membangun keseimbangan antar sektor sehingga antar sektor-perkotaan dengan industrinya dengan sektor pedesaan dengan pertaniannya- bisa berkembang dengan seimbang dan setara. *Ketiga*, pembangunan sektor industri harus menyertakan pembangunan sektor pertanian secara seimbang. *Keempat*, kebijakan yang seimbang antara sektor industri perkotaan dengan sektor pedesaan yang identik dengan pertanian atau nelayan bagi kaum nelayan. Tujuanya adalah untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang seiring dengan pemerataannya.[116]

Salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menata salah satu sektor ekonomi Indonesia yang prospektif, yakni kelautan yang berhubungan dengan penangkapan ikan dengan memberdayakan kaum nelayan baik aspek teknis maupun modal sehingga kaum nelayan secara teknis semakin profesional dan secara modal semakin bisa berdaya serta bisa lepas dari lilitan kemiskinan karena adanya iklim usaha perikanan yang tidak kondusif. Oleh sebab itu, Joko Widodo membuat kebijakan dengan melakukan perbaikan aspek infrastruktur yang sangat fundamental, yakni pertama, memperbaiki infrastukrutur karena keberadaan infrastruktur pelabuhan yang masih diragukan kapasitasnya untuk menampung produksi. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dari pelabuhan menuju ke lokasi yang membutuhkannya. Demikian juga investasi dibutuhkan untuk pembangunan irigasi menuju lokasi itu misalnya pembangunan dan perbaikan bagian pelabuhan, bagian jalan dan bagian irigasi. Investasi boleh masuk, tetapi diatur, misalnya 70% harus dipegang oleh BUMN, sedang 30% boleh dipegang swasta. Di Maluku misalnya, ikan itu bukan hanya melimpah, sangat melimpah.[117] Hal itu dijelaskan oleh Joko Widodo berikut:

---

[116] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

[117] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Nasional dan Forum Investasi dan Perdagangan Kadin Indonesia Bagian Timur Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal 25 Mei 2015***, (ed. Sekretariat Negara RI)** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9361&Itemid=26,

"Saya baru lihat sendiri, kalau malam hari, yang namanya kapal itu *kayak* pasar malem kalau malam hari di sekitar itu. Kayak pasar *malem*. Lampunya gemerlapan banyak sekali *ngambili* ikan. Tetapi, sayangnya bukan kapal kita. Kapalnya kapal asing. Dan perlu saya informasikan, di seluruh Tanah Air ada tujuh ribu kapal yang lalu-lalang dibiarkan *ngambili* ikan-ikan kita. *Itungannya* adalah Rp.300 triliun setiap tahun kita kehilangan. Dan itu, menurut saya, hampir 70%-80% ada di bagian timur ikan-ikan itu. Dibiarkan. Inilah juga investasi yang diperlukan oleh Indonesia bagian timur agar ikan-ikan itu tidak diambili oleh mereka dan kita hanya menjadi penonton".[118]

"Ini peluang yang sangat besar sekali. Apa yang harus dilakukan? Ya beli kapal sebanyak-banyaknya, Bapak-Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, terutama yang berasal dari Indonesia bagian timur. Kalau sudah beli *gimana*? Kerja sama dengan nelayan. Terus? Ya ikannya itu diambil. Terus? Buat pabrik *cold storage*. Terus? Buat pabrik pengawetan ikan".[119]

"Investasi *nggak* banyak. Kalau *nggak* bisa dilakukan sendiri, lakukan bersama-sama, konsorsium. Polanya, plasma inti biar nelayan juga bisa mendapatkan sesuatu intinya juga dapat keuntungan. Selalu yang saya sarankan seperti itu. Di Merauke juga sama, sistem yang akan kita bangun adalah inti plasma. Intinya dapat 70%, plasmanya, yang punya lahan, dapat 30%. Semua penduduk mau semuanya. Dikerjakan dengan

---

diakses 4 Juni 2016.

[118] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Nasional dan Forum Investasi dan Perdagangan Kadin Indonesia Bagian Timur Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal 25 Mei 2015*, **(ed. Sekretariat Negara RI)** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9361&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.

[119] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Nasional dan Forum Investasi dan Perdagangan Kadin Indonesia Bagian Timur Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal 25 Mei 2015*, **(ed. Sekretariat Negara RI)** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9361&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.

mekanisasi, tetap, mekanisasi modern. Peluang-peluang seperti itu, setiap saya ke daerah, betul-betul Indonesia bagian timur adalah masa depan kita, masa depan kita, masa depan kita".[120]

Joko Widodo menegaskan bahwa kita jangan sampai kehilangan momentum untuk membangun ekonomi kita dengan melimpahnya kekayaan alam yang sudah tersedia misalnya kasus hilangnya momentum, waktu *booming* minyak. Pondasi fundamental ekonomi sudah kita betul kita bangun, hilang tahun 1970-an 1980-an. Oleh sebab itu, semua produk-produk, yang namanya bahan mentah, harus ada industrialisasi, harus ada hilirisasi dengan cara apa pun harus ditempuh dengan pembagian tugas yang baik dan sistematis, misalnya tugas pemerintah membangun pelabuhan, jalan, dan transportasinya. Demikian juga swasta dibagi tugasnya dengan baik, sehingga ada sinergi yang baik antara pemerintah dan swasta untuk memajukan perekonomian di sektor kelautan.[121]

Dalam konteks ini, Ahmad Erani Yustika juga menawarkan pembenahan dengan cara; (a) pembentukan regulasi yang mengatur hubungan antar pelaku ekonomi yang mampu menyediakan wadah kesetaraan semisal buru dan pemilik modal, petani penggarap dan tuan tanah; (b) menata kembali kepemilikan aset produktif yang sudah timpang semisal fokus pemberian kredit murah bagi pengusaha kecil dan menengah, -yang mana Joko Widodo kemudian membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang tugas dan fungsinya di antaranya terutama melayani usaha-usaha/bisnis masyarakat pinggiran/kaum lemah seperti nelayan/petani, sehingga mereka bisa terlepas dari

---

[120]Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Nasional dan Forum Investasi dan Perdagangan Kadin Indonesia Bagian Timur Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal 25 Mei 2015*, **(ed. Sekretariat Negara RI)** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9361&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.

[121]Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Nasional dan Forum Investasi dan Perdagangan Kadin Indonesia Bagian Timur Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal 25 Mei 2015*, **(ed. Sekretariat Negara RI)** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9361&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.

jeratan rentenir-;[122] (d) transparansi dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak ada kemungkinan pemilik modal menelikung kebijakan yang dirumuskan pemerintah.[123]

E. FIQIH KEBANGSAAN

Istilah bangsa pada awalnya merupakan persatuan organis antara rakyat dan penguasa, dan persatuan itu berdasarkan pada persamaan adat, budaya dan agama sebagai satu kesatuan.[124] Rasa kebangsaan ini muncul dari adanya kesadaran berbangsa, yakni rasa kebersamaan yang muncul secara alamiah karena adanya ikatan sosial yang bersumber dari budaya/wilayah dan sejarah perjuangan masa lalu serta rasa kebersamaan dalam menghadapi berbagai persoalan baru di suatu negara. Oleh sebab itu, rasa kebangsaan dapat ditumbuhkembangkan sesuai dengan karakteristik masing-masing.[125] Dengan pengembangan itu, rasa kebangsaan dapat diwujudkan menjadi "paham kebangsaan" yang relevan dengan kepentingan zamannya.[126]

Dalam al-Qur'an tidak ada kata bangsa karena istilah bangsa baru muncul setelah Revolusi 1789, Parancis menjadi salah satu bangsa besar yang berusaha melebarkan sayapnya. Mesir ketika itu dikuasai oleh Mamluk yang berada dalam naungan Khalifah Usmani, sehingga untuk memisahkan bangsa Mesir dari Mamluk yang kebetulan orang asing diperkenalkanlah oleh Napoleon dalam makmulatnya dengan istilah *al-ummah al-misriyah* yang dipahami sebagai bangsa Mesir. Dalam *Mu'jam al-Wasith* dalam Pusat Bahasa Arab Mesir 1968, bangsa atau

---

[122] Hasil Observasi Lapangan pada Acara Pelantikan TPAKD di Hotel Santika tanggal 3 Juni 2016, yakni kebijakan Presiden RI Joko Widodo tersebut didapat dari pengarahan yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu, Dr. H Ridwan Mukti, M.H.

[123] Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 239-241.

[124] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan...*, hlm. 283.

[125] Otho Hadi, *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, diakses tanggal 11-12-2011, hlm. 3.

[126] Hadi, *Nation and Character Building...*, hlm. 3.

kebangsaan dikenal dengan *qaum* atau *qaumiyah*. Dalam terjemahan al-Qur'an, Departemen Agama RI menggunakan istilah *sya'b* sebagaimana disebutkan dalam surat al-Hujurat.[127]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurat [49]: 13)

Menurut pakar Tafsir Indonesia, M Quraish Shihab, kata *qaum* dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 322, bahkan para Nabi menyeru kaumnya dengan ungkapan "*Ya Qaumi*" (Wahai kaumku/bangsaku) walaupun mereka tidak beriman pada ajarannya. Hal ini disebutkan dalam sejumlah surat dalam al-Qur'an.[128]

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ

Artinya: Shaleh berkata: «Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberi-Nya aku rahmat (kenabian) dari-Nya, maka siapakah yang akan menolong aku dari (azab) Allah jika aku mendurhakai-Nya. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian (Q.S. Hud [11]: 63).

---

[127] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*...., hlm. 433-437.

[128] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*..., hlm. 433-437.

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

Artinya: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat.» (Q.S. Hud [11]: 64)

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

Artinya: Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji[730]. Luth berkata: «Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?» (Q.S. Hud [11]: 78)

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

Artinya: Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu›aib. Ia berkata: «Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu

kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).» (Q.S. Hud [11]: 84).

Menurut M Quraish Shihab, al-Qur'an mengakui dan mengakomodir istilah bangsa atau kebangsaan dengan beberapa unsur/terminologi dalam sejumlah ayat-ayat al-Qur'an yang disebutkan sebagai berikut: *Pertama*, ayat al-Qur'an menjelaskan persatuan/kesatuan yang kemudian dijelaskan dalam ayat al-Qur'an mengenai kesatuan umat. Adapun terminologi umat disebutkan 51 kali dalam al-Qur'an, bahkan menurut Ar-Raghib al-Isfahani –pakar bahasa yang nyusun kamus al-Qur'an- menyebutkan bahwa umat adalah kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan agama, waktu, ataupun tempat, baik pengelompok itu terjadi secara sukarela ataupun terpaksa.[129]

إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku. (Q.S. al-Anbiya' [23]: 92)

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku. (Q.S. al-Mu'minun [23]: 52)

Penyebutan *ummatan wahidah* menandakan bahwa al-Qur'an mengehendaki adanya persatuan dan kesatuan yang lahir dari kesadaran bersama masyarakat/bangsa untuk hidup satu nasib, satu perjuangan dan satu tanah air, bukan penyatuan elemen bangsa atau masyarakat. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan yang dikehendaki al-Qur'an adalah persatuan dan kesatuan yang murni dan fitriyah, bukan penyatuan.

[129] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*...., hlm. 440-441.

Sebab, penyatuan seringkali berakhir dengan perselisihan (baca: Q.S. Ali Imran [3]: 105). Kelenturan makna umat menunjukkan keistimewaan al-Qur'an dalam mengatur nilai-nilai umum dan menyerahkan unsur praktisnya pada masyarakat.[130]

Kedua, asal keturunan. Allah swt menciptakan manusia dari satu keturunan dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal potensi dan memanfaatkannya. Al-Qur'an merestui pengelompokan berdasarkan keturunan selama tidak menimbulkan perpecahan. Tidak ada penolakan atas pengelompokan dalam al-Qur'an.[131]

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ
أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

> Artinya: Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air (Q.S. al-A'raf [7]: 160)

Nabi Muhammad saw juga diperintahkan untuk memberikan peringatan pada keluarga dekatnya yang berarti bahwa pengelompokan pada kerabat terdekat saja yang kecil boleh, apalagi pengelompokan pada elemen yang lebih besar berupa bangsa. Piagam Madinah juga menjadi simbol persatuan bangsa yang dibangun dari beragam agama dan suku yang masing-masing dinamai umat untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Bahkan Nabi Muhammad saw mendapat pembelaan dari keluarganya dekatnya yang bukan Muslim pada waktu itu dengan tegas mengatakan: "Demi Allah, kami tidak akan menyerahkannya (Nabi Muhammad saw) sampai yang terakhir dari gugur". Keterikatan berdasarkan keturunan juga tidak dilarang, bahkan al-Qur'an

[130] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm. 442-443.

[131] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.....*, hlm. 444-445.

mengakomodir ikatan kekeluargaan itu selama tidak menimbulkan perpecahan dan fanatisme berlebihan.[132]

Ketiga, bahasa. Al-Qur'an menghargai bahasa dan keragaman bahasa. Penghargaan pada bahasa tampak sekali sampai-sampai dinyatakan bahwa al-Qur'an diturunkan dalam tujuh bahasa. Al-Qur'an Surat al-Rum menjelaskan pengakuan eksistensi bahasa dan keragamannya.[133]

وَمِنْ ءَايَاتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ

> Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. (Q.S. al-Rum [30]: 22).

Al-Qur'an selain menggunakan bahasa Arab, juga menggunakan kosa kata dari tujuh bahasa, seperti bahasa Romawi, Persia, dan Ibrani, misalnya kata-kata *zamharir, sijjil, qirthas, kafur* dan lainnya. Karena itu, kesatuan bahasa akan menyatukan kesatuan pikiran, sehingga para kolonial seringkali berusaha menghapus bahasa anak negeri. Dalam konteks kebangsaan, bahasa lisan jauh lebih penting dari bahasa pikiran dan perasaaan.[134]

Keempat, adat istiadat. Pikiran dan perasaan umat tercermin dalam adat istiadat. Al-Qur'an menjelaskan adat istiadat dengan jelas dan rinci. Kata *'urf* dan *ma'ruf* mengacu pada adat istiadat dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kebaikan dalam prinsip nalar fiqih. Menurut fuqaha', adat istiadat selama tidak bertentangan nas-nas syar'i baik al-Qur'an maupun Sunnah, maka adat istiadat itu dapat dikukuhkan menjadi hukum fiqih yang sah. (*al-adah al-muhakkamah*).[135]

---

[132] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an....*, hlm. 445-446.

[133] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm. 448-449.

[134] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an....*, hlm. 449-451.

[135] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an....*, hlm. 452-453.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma›ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran [3]: 104)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh (Q.S. al-A'raf [7]: 199)

Kelima, sejarah dan cinta tanah air. Sejarah menjadi elemen penting dalam menentukan sikap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa. Sebab, sejarah masa lalu akan menjadi cermin untuk membangun masa depan. Secara substansial, unsur kesejarahan memiliki arti penting dalam membentuk lahirnya paham kebangsaan. Selain itu, cinta tanah air juga merupakan bagian penting dari hidupnya suatu bangsa sebagai tempat hidup umat yang diikat dalam satu kesatuan bangsa, bahkan cinta tanah air adalah bagian dari iman. Cinta Nabi saw pada tanah air, Kota Makkah, tampak ketika ia meninggalkan Kota Makkah untuk hijrah ke Kota Madinah, sambil bersabda: "*Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai; seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, nicaya aku tidak akan meninggalkannya*". Dalam sabdanya yang lain: "Wahai Allah, cintakanlah Kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan Kota Makkah kepada kami, bahkan lebih (HR. Bukhari, Ahmad, dan Malik). Tidak hanya itu, Nabi Muhammad saw memberikan hukum sebagai mati syahid bagi orang yang gugur membela keluarga,

harta, dan negara, serta menggandengkan membela agama dan negara (Q.S. al-Mumtahanah [60]: 8-9).[136]

Selanjutnya, secara historis, paham kebangsaan Indonesia kita lahir dari budaya luhur yang dimilikinya. Jika ditelusuri ke akar sejarahnya, sebelum Kemerdekaan RI, paham kebangsaan bangsa Indonesia tidak lepas dari budaya yang tumbuh dan berkembang pada masa kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam, dan kerajaan-kerajaan lain yang melahirkan budaya-budaya tradisional yang mengakar hingga masa kini. Hal ini didukung oleh sejumlah prasasti bersejarah yang menggambarkan dinamika hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa kemudian mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis pada lambang negara Garuda Pancasila dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram Burung Garuda. Semboyan ini bermakna: "berbeda-beda tetapi tetap satu jua".[137]

Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keragaman dan perbedaan, baik warna kulit, bahasa, adat budaya, agama, dan perbedaan lainnya. Perbedaan itu oleh para pendahulu dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa yang besar. Ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928 di *Gedung Indonesische Clubgebouw Weltevreden*, Jakarta, para tokoh muda dari berbagai etnik dan daerah menyadari perlunya membangun persatuan dan kesatuan nasional. Dengan Sumpah Pemuda, mereka bersatu dan menegaskan dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia.[138]

Menurut Olaf H Schumann, karakter kebangsaan yang cocok dikembangkan di masa depan harus bersifat terbuka dan humanis sebagaimana tercermin dalam sila kedua Pancasila, yakni *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Karakter kebangsaan dari bangsa Indonesia

[136] M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*...., hlm. 453-456.

[137] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 186.

[138] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*..., hlm. 187-188.

yang perlu dibangun adalah bangsa yang modern-universal melampaui eklusifitas ras, suku, agama dan lainnya. Apalagi pondasi hidup berbangsa yang diletakkan oleh pendiri bangsa sudah pas, yakni paham kebangsaan universal.[139]

> "Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan morma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab diejawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum... kebangsaan yang kita kembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme* (mengagungkan kesukuan/ kedaerahan), melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa".[140]

Sumpah Pemuda yang menghadirkan kesadaran sebagai satu bangsa itu hadir dua tahun setelah berdirinya NU tahun 1926. Oleh sebab itu, NU memiliki kontribusi dalam merintis dan mendukung berdirinya negara Indonesia. Hal ini diperkuat lagi dengan hasil Muktamar NU tahun 1936 di Banjarmasin tentang status tanah Hindia Belanda yang sedang dikuasai oleh Belanda, haruskah dipertahankan dan dibela dari serangan luar. Keputusan Muktamar NU itu menyatakan bahwa membela tanah Hindia Belanda yang sedang dikuasai oleh Belanda wajib dibela menurut hukum agama atau fiqih yang dinukil dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin*

---

[139] Olaf H Schumann, *Menghadapi Tantangan, ...*, hlm. 8-20.

[140] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara...*, hlm. 52.

karya Hasan al-Hadlrami yang dapat dinarasikan berikut: "negeri ini penduduknya sebagian masih menganut dan melaksanakan ajaran agama Islam dan Islam sendiri tidak sedang dalam keadaan diganggu atau diusik". Dengan demikian, kelahiran NU adalah bagian dari dinamika dan pertumbuhan bangsa, yakni sebagai wujud dari kebesaran jiwa para ulama untuk membangun peradaban besar bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Jiwa kebangsaan NU mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara yang menghargai tradisi, pluralitas budaya dan martabat manusia. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu semangat untuk satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.[141]

Konsep bangsa ini mengandaikan beberapa kriteria: *Pertama*, bangsa menjadi acuan pada budaya yang sama, dalam arti dalam memiliki kesamaan sistem gagasan, tanda dan cara bertindak dan berkomunikasi. *Kedua*, bangsa adalah bangunan keyakinan, loyalitas dan solidaritas anggota-anggotanya. *Ketiga*, bangsa merupakan jalinan dari anggota masyarakat yang saling mengakui hak dan kewajiban masing-masing karena memiliki status yang sama. Dengan demikian, bangsa mengandaikan adanya bangunan organisasi sosial yang berdasarkan budaya inklusif dan menghargai hak dan martabat sesama anggota masyarakat. Walaupun paham kebangsaan bersifat inklusif-universal, tetapi akan kurang mendalam jika tidak mendasarkan diri pada nilai partikularitasnya. Oleh sebab itu, KH A Wahid Hasyim menerima Pancasila bukan hanya berdasarkan pertimbangsan paham kebangsaan atau rasional, tetapi juga berdasarkan akidah *ahlussunnah wal jama'ah* NU. Demikian juga Dr Rajiman berdasarkan budaya priyayi, dan Kasimo berdasarkan nilai-nilai agama Kristen, disamping paham kebangsaannya.[142] Dengan partikularisme itu, bahkan para pejuang/pendiri bangsa justru semakin kokoh untuk bersatu dan berjuang melawan penjajah.

---

[141] Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial...*, hlm. 434.

[142] Bandingkan dengan Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan.....*, hlm. 200-201.

Semangat bersatu dan gerakan untuk bersatu menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya konsolidasi perjuangan untuk membebaskan diri dari para penjajah yang sesungguhnya mereka tidak rela Indonesia merdeka, tetapi dengan komitmen dan perjuangan bangsa Indonesia yang kokoh dan teguh, maka bangsa Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu adalah ikrar untuk bersatu padu dari bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa di dalam wadah NKRI.[143]

> "Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri negara dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia".[144]

NKRI yang menjadi wadah menuju cita-cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat mempersatukan berbagai kekhasan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai saripati seluruh filsafat kebangsaan menjadi landasan dan fasalah hidup bangsa Indonesia yang majemuk dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan dan kepentingan. Sebagai nilai dasar yang dianut dan diyakini bangsa, Pancasila adalah ideologi negara dan sumber kaidah hukum yang mengatur NKRI.[145]

Dalam meraih kemerdekaan, peran ulama juga sangat besar termasuk ketika sudah merdeka untuk mempertahankan Kemederkaan RI, di antaranya Ulama Aceh. Ketika bangsa Indonesia merdeka, Jepang kemudian menyebarkan surat selebaran di Aceh yang judulnya: "Kepada Penduduk Indonesia". Isinya "Perang telah selesai. Jepang sudah mengaku tunduk tidak dengan perjanjian". Pada penutupnya tertulis:

---

[143] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa* ..., hlm. 188.

[144] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa* ..., hlm. 188.

[145] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa* .., hlm. 189-190.

"Hiduplah Seri Ratu!!, Hiduplah Indonesia!!'. Yang dimaksud Seri Ratu adalah Raja Belanda. Pada waktu itu ada kegelisahan di kalangan pejuang Aceh karena khawatir orang-orang yang merasa dirugikan selama tiga tahun masa pendudukan Jepang, mereka saat itu merasa gembira akan menyambut kembali kedatangan Belanda. Namun, peristiwa ini tidak berjalan lama hanya beberapa hari saja, karena kabar Proklamasi Kemerdekaan RI telah sampai di Aceh melalui Gazali Yunus, yang mula-mula disampaikan pada Haji Jamin. Setelah mendengar kabar Proklamasi Kemerderkaan RI, seluruh rakyat Aceh bergembira dan kepanikan dengan surat yang isinya "Hidup Seri Ratu!!" telah usai.[146]

Melihat Indonesia merdeka, Belanda tidak senang dan terang-terangan merongrongnya dengan kekuatan Senjata, maka Ulama Aceh kemudian mengadakan rapat pada tanggal 15 Oktober 1945 yang menghasilkan *Makloemat Bersama* yang isinya menyebutkan bahwa perjuangan melawan para penjajah Belanda yang hendak kembali ke Indonesia adalah *Perang Sabil* dan orang yang mati dalam peperangan itu dihukumi mati syahid. Berikut isi lengkap maklumat tersebut:[147]

> "Perang Doenia kedoea jang mendahsjat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimakloemkan kermedekaannja kepada seloeroeh doenia serta telah berdiri Repoeblik Indonesia di bawah pimpinan dari Padoeka Jang Moelia Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Belanda adalah satoe keradjaan jang kechil dan miskin, satoe negeri jang kechil, lebih kechil dari daerah Atjeh dan telah hanchoer leboer. Bangsa dari negeri yang seperti ini kini bertindak melakoekan kechianatannja terhadap tanah air kita Indonesia yang soedah merdeka itoe oentoek didjadjah kembali".[148]

---

[146]Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 79-81.

[147]Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial...*, hlm. 81.

[148]Yang ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 1945 atas nama Ulama Seluruh Aceh, Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial...*, hlm. 81.

Maklumat tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap semangat dan motivasi jihad warga Aceh karena warga tidak ingin hanya mati konyol, sehingga dengan adanya maklumat itu, maka warga Aceh tidak ragu lagi untuk berjuang melawan pihak Belanda. Mengingat gentingnya suasana tanah air, terutama mendengar berita pertempuran pada tanggal 10 Novemver 1945 di Surabaya, maka ulama Aceh kemudian membentuk Laskar Mujahidin pada tanggal 17 November 1945, yang bertempat di ruang belakang Masjid Raya Baitur Rahman Kutaraja (sekarang Banda Aceh) sebagai kelanjutan dari Maklumat Bersama tanggal 15 Oktober 1945.[149]

Peristiwa penting setelah kemerdekaan RI adalah perang melawan Penjajah untuk mempertahakan NKRI dari rong-rongan Belanda yang menggunakan Senjata di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Hal itu terjadi karena Belanda tidak rela Indonesia merdeka dan Belanda bermaksud menguasai kembali Indonesia. Oleh sebab itu, terjadinya pertempuran yang dahsyat dengan Belanda di Surabaya tidak lepas dari pengaruh fatwa resolusi Jihad yang dikeluarkan KH M Hasyim Asy'ari sehingga fatwa itu mampu mempersatukan kekuatan bangsa dan semangat jihad melawan penjajah yang kemudian menghasilkan kemenangan dan Belanda akhirnya mengalami kekalahan.

> "Secara detail gagasan KH. Hasyim Asy'ari dalam mencetuskan fatwa Resolusi Jihad dimana fatwa tersebut mampu menggerakan Pemerintah RI dan seluruh bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam untuk bersama-sama melawan tentara Sekutu yang diboncengi NICA Belanda. Laskar Hizbullah, Fisabilillah, dan seluruh rakyat Indonesia berbekal fatwa jihad Mbah Hasyim yang diteguhkan Resolusi Jihad, pantang mundur menolak kedatangan kolonial. Resolusi Jihad tersebut menyeru seluruh elemen bangsa khususnya umat Islam untuk membela NKRI. Pertempuran 10 November 1945 meletus, laskar ulama-santri dari berbagai daerah berada di garda depan pertempuran. Perjuangan laskar ulama-santri

[149] Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial...*, hlm. 83.

terjadi di berbagai daerah terpompa semangat Resolusi Jihad Mbah Hasyim Asy'ari".[150]

Setelah kemerdekaan, untuk mengisi dan membangun relasi paham kebangsaan dan keagamaan mengalami kerumitan dan pasang surut walaupun akhirnya dicapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam UUD-NRI 1945. Rumitnya membangun hubungan yang serasi antara paham kebangsaan dan paham keislaman dapat dilihat pada kasus kaum Muslim di India. Walaupun menempati urutan kedua terbesar dari segi jumlahnya secara keseluruhan setelah Indonesia, yaitu sekitar seratus juta jiwa warga Muslim India, tetapi mereka mengalami kesulitan luar biasa.[151] Demikian juga sama rumitnya dengan membangun hubungan antara paham kebangsaan dengan paham fiqih, hal yang sama juga kita alami dalam mencari definisi yang pas tentang hubungan paham kebangsaan dan paham keagamaan. Menurut Hatta, inti paham kebangsaan adalah adanya kesamaan dan rasa keterikatan yang bersumber dari hati dan pikiran untuk berjuang mempertahankan nasib dan masa depan yang hendak diperoleh.[152] Hal inilah yang juga menjiwai resolusi Jihad KH M Hasyim Asy'ari untuk melawan penjajah, adanya rasa kesamaan nasib dan tanggung jawab untuk membela tanah air dari penjajah. Sementara itu, gerakan radikal-ekstrimis berbeda dengan nalar fiqih kebangsaan NU.

Adanya arus gerakan kelompok-kemlopok Islam yang memiliki kecenderungan untuk melegislasikan hukum Islam dalam lembaga negara akan menjadikan warga negara non-Muslim menempati warga negara kelas dua jika tidak dilakukan pemilahan dan penempatan yang sepantasnya. Di samping itu, gerakan tersebut juga memiliki kelemahan, berupa sempitnya lingkup yang dijangkau oleh konsep umat dan

---

[150] Fathoni, *Ulama-Santri, Garda Depan Perjuangan Kemerdekaan*, http://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-kemerdekaan diakses 6 Juni 2016; lihat juga *Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014)*

[151] AbdurrahmanWahid, *Pergulatan Negara*...., hlm. 85

[152] Hadi, *Nation and Character Building*..., hlm. 4.

perwakilannya.[153] Kemajemukan ini merupakan nilai mulia dan anugrah yang tak terhingga karena tidak semua bangsa bisa bersatu dalam satu payung bangsa dan negara yang sama walaupun agamanya sama sebagaimana negara-negara Islam di Timur Tengah, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan anugrah yang luar biasa yang harus disyukuri oleh segenap warga.[154]

Dalam tradisi ilmu ushul fiqih, kita wajib memelihara tradisi atau budaya yang baik itu sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang menyebutkan bahwa *al-tsabit bi al-'urf ka al-tasbit bi al-nash* (apa yang sudah menjadi ketetapan suatu tradisi, maka kedudukannya sama dengan ketetapan nas agama).[155] Dengan demikian, wawasan kebangsaan Indonesia yang sudah kita bangun perlu dijaga dan dilestarikan. Hal itu juga memiliki kesamaan tujuan dengan ajaran fiqih ke-NU-an, yakni membangun persamaan nasib dan tujuan untuk memperoleh kesejahteraan bersama -*al-mashlahah al-'ammah*.[156]

Sikap para pendiri bangsa yang telah berjuang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dapat dikategorikan sebagai jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthma'innah*). Jiwa yang lapang dan luas sehingga mudah menerima adanya perbedaan dengan ikhlas. Tidak ada rasa dengki atau hasut terhadap sesama umat beragama.[157] Kondisi ini berbeda dengan gerakan keagamaan radikal, ekstrimis dan sparatis yang hendak mengubah negara bangsa ini menjadi negara agama, yang mana cara beragamanya diterapkan dengan cara keras, marah, bukan dengan santun dan toleran.[158] Mereka juga melakukan penyusupan dan penyerobotan ke mesjid-mesjid, lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, ormas moderat, terutama Muhammadiyah dan NU, untuk membangun dan mendidik

---

[153] AbdurrahmanWahid, *Pergulatan Negara*...., hlm. 87.

[154] Imam Suprayogo, *Persatuan Bangsa*, http://www.facebook.com/note.php?note_id= 10150383606043880, diakses 11 September 2011.

[155] Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh...,* hlm. 90.

[156] Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh...,* hlm. 86.

[157] AbdurrahmanWahid, *Sekedar Mendahului...*, hlm.140.

[158] AbdurrahmanWahid, *Sekedar Mendahului...*, hlm. 144-145.

warga muslim menjadi aliran yang keras dan radikal.[159] Oleh sebab itu, sebagai ideologi perekat untuk membangun rasa kebersamaan dan kesejahteraan bersama, Ideologi Pancasila (bagi NU dan Muhammadiyah) demikian halnya dengan paham fiqih-nya dengan meminjam paradigma Abdul Wahab Khallaf, adalah bahwa pembangunan atau pemberlakukan fiqih itu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mewujudkan kemaslahatan, kemakmuran atau kesejahteraan hidup umat manusia (*anna tasyri' al-ahkam ma qushida bihi illa tahqiq mashalih al-nas*).[160]

Fiqih kebangsaan ini pada dasarnya telah dirintis dan dirumuskan dasar-dasarnya oleh para ulama, seperti Abikusno Tjokrosujoso, KH A Kahar Muzakkir, H Agus Salim, KH A Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku Mohammad Hassan, dan tokoh-tokoh penting lainnya, walaupun mereka tidak eksplisit menyebutnya sebagai fiqih kebangsaan, tetapi hal itu kita bisa melihat dari gerakan mereka yang tidak kenal lelah dan tidak kenal putus asa untuk memperjuangkan dan mempertahakan negara yang tidak berdasarkan pada dan untuk agama tertentu, tetapi negara bangsa yang mengakui dan melindungi kemaslahatan hidup bersama bagi segenap agama dalam keragaman budaya dan tradisi.[161] Jadi apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa itu adalah jalan moderasi, bukan ekstrim atau "*alghuluww.* (Q.S. Al-Maidah,5 : 77). Menurut Muchlis Hanafi, kata ini digunakan sebanyak dua kali dalam al-Qur'an dengan arti "melampaui batas" (*mujâwazah al-hadd*), yang memiliki spirit bahwa al-Qur'an tidak menghendaki kondisi ekstrims itu. Demikian juga Rasulullah SAW

[159] AbdurrahmanWahid, *Sekedar Mendahului...*, hlm. 146-147.

[160] At-Thufi menyatakan bahwa *al-mashlahah aqwâ adillah al-syar'i* (maslahah itu menjadi dalil syara' yang paling kuat). Sementara itu, al-Syakhrastani menjelaskan bahwa keselamatan itu tidak mungkin dicapai hanya secara individu, tetapi harus berjama'ah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 84; Wahbah al-Zukhailî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî,* Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 817-818; al-Syakhrastani, *Al-Milal wa al-Nihal: Aliran-aliran Teologi dalam Islam*, terj. Syuadi Asy'ari, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 33.

[161] AbdurrahmanWahid, *Sekedar Mendahului..*, hlm. 138-139.

bersabda yang artinya: *Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan (melampaui batas)...* (HR.Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).[162]

Jika ditelusuri ke akar sejarahnya, spirit paham kebangsaan itu juga pernah digagas KH M Hasyim Asy'arie dalam karyanya yang berjudul "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in" yang menyebutkan bahwa para *salafus shaleh* (ulama salaf yang *'allama, wara'* dan *qana'a*) membangun relasi kerja dengan sesamanya berdasarkan kesadaran hati nurani dan keadilan tidak hanya dengan yang sepaham, tetapi juga dengan yang menentangnya. Para ulama dan *umara'* seharusnya senantiasa memerintah dan mendorong pada persamaan nasib dan perjuangan untuk membangun kemaslahatan bersama tanpa kecuali termasuk pada kaum non-Muslim (*ahlu al-dzimmah*). Oleh sebab itu, kepahlawanan itu menurutnya adalah rela berkoban (*al-istihanah bi al-maut*) membela kebenaran dan menolong yang terdlalimi, menjaga dan memelihara keyakinan, martabat serta hak-hak bangsa, serta sabar dalam menerima kesulitan/ rasa sakit dalam menunaikan tugas kenegaraan serta jihad melawan sikap egosentrime (*li nushrah al-haq wa musa'adah al-madzlum, wa li hifdz al-yaqin wa al-syarf wa ri'ayah al-huquq... wa fi al-shabr 'ala al-alam li adai al-wajib wa jihad al-nafs al-ammarah bi al-su'*).[163]

Pada waktu menjabat sebagai Walikota, Joko Widodo dalam *Sambutan Upacara Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 01 Oktober 2011* menyampaikan bahwa dengan melestarikan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia yang besar dan bhinneka ini dapat mencapai suatu kehidupan bersatu, berdaulat adil dan makmur di hadapan bangsa-bangsa lainnya dengan "semangat kerukunan dan keutuhan, semangat

[162] Kata *wasath* (tengah) memiliki lawanan kata dengan kata pinggir (*altharf*). Oleh sebab itu, sikap *tawassuth* (pertengahan) dalam kehidupan apa pun akan selalu berlawanan dengan sikap *tatharruf* (pinggiran). Dalam kamus bahasa Arab modern, kata *tatharruf* mempunyai beragam makna, yakni "radikal", "ekstrim" dan "berlebihan". Muchlis M. Hanafi, "Konsep al-Washatiyyah dalam Islam", *HARMONI:* Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. VIII No. 32 (Oktober - Desember 2009), hlm. 39-40.

[163] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari...*, hlm. 32-33.

persatuan dan kebersamaan, sikap tenggang rasa dan setia kawan, sikap tolong menolong dan gotong royong". Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa yang besar dan bhinneka ini harus mampu memahami, meresapi dan mengamalkan arti dan semangat nilai-nilai Pancasila sehingga bisa bermanfaat dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa,[164] tidak lupa juga kita harus meningkatkan kompetensi intelektualitas, mentalitas, dan spiritualitas/moralitas sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak boleh parsial, sebagai bangsa yang besar. Dengan pemahaman keilmuan dan spiritualitas yang utuh, maka tidak akan mudah tergoda dengan iming-iming kemewahan duniawi atau materi, tetapi semua aktivitasnya hanya bertujuan mengabdi pada Allah swt secara tekun, istiqamah, ikhlas dan profesional dalam memberdayakan, menolong dan membangun kemakmuran hidup sesama umat manusia beserta alam ciptaan-Nya.

Sebagaimana prinsip fiqih ke-NU-an yang menjadikan aspirasi dan kemaslahatan umat menjadi titik sentral. Demikian juga dalam kehidupan kebangsaan, rakyat menjadi titik sentral dalam pengambilan dan penerapan kebijakan publik karena rakyat menjadi pemegang kedaulatan, yang berarti sumber kekuasaan negara. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat berhak untuk berpartisipasi aktif dan mengontrol arah dan implementasi kebijakan penguasa sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, hukum menjadi rujukan dan pedoman dalam menentukan arah dan implementasi kebijakan kenegaraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD-NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD-NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen yang menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".[165]

---

[164]Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

[165]Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah,* (Malang: In-Trans Publishing, 2008),

Dalam menjawab asas kedaulatan rakyat bagi bangsa Indonesia ini, rakyat kemudian menjadi titik sentral dalam pengambilan kebijakan dan realisasinya, sehingga pemerintah berfungsi tidak lain dan tidak bukan, kecuali melayani kepentingan dan tuntutan rakyat atau warga masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan fungsi pelayanan pada warga masyarakat dibuatnya regulasi yang mengatur, sehingga setiap kebijakan dan realisasinya harus bisa diakses dan dipertanggungjawabkan secara umum pada warga masyarakat. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan dan transparansi kebijakan pemerintah bagi warga masyarakat seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dirasa perlu melakukan pembinaan dan pelatihan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang baik.

> "Diberlakukanya Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) memiliki konsekuensi logis bagi kita semua, mulai dari pembentukan Komisi Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta perangkat lainya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan dapat diakses oleh publik, seperti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan DPA, pemungutan pajak & retribusi, dan kegiatan lainnya, apakah benar-benar transparan, sesuai SOP, sesuai dengan aturan yang ada, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah sebetulnya inti dari UU Keterbukaan Informasi Publik. Jika UU tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, tidak akan ada permasalahan dengan implementasi UU tersebut, namun jika UU tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan justru akan menjadi bumerang yang pada akhirnya akan menyulitkan tugas-tugas PPID".[166]

Dalam sambutannya, Walikota Joko Widodo pada waktu itu menegaskan bahwa seluruh aparat pemerintah/SKPD Kota Surakarta agar berusaha menguasai dengan sebaik-baiknya semua data dan

---

hlm. 268-271.

[166]Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Bimbingan Teknis PPID*, Surakarta, 12 April 2011.

informasi yang diperlukan sehingga dapat segera diakses dengan cepat dan tepat. Dengan kegiatan pelatihan ini, ia berharap dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, bagaimana mengelola dan mendokumentasikan informasi dengan baik dan benar.[167] Pelatihan tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian pemerintahan Joko Widodo di Surakarta. Lebih lanjut menurut penuturan warga Surakarta, kebijakan Joko Widodo semasa menjabat Walikota sangat mengedepankan kepentingan rakyat atau warga negara, sehingga berbagai kebijakannya dirasakan berpihak pada rakyat, semisal pelayanan aparatur pemerintah yang sangat baik dan cepat, masalah pembangunan pasar tradisional, pembinaan dan bantuan pinjaman kredit bagi UMKM/PKL, pembatasan pasar modern, pengembangan usaha taksi lokal, dan penataan tata kota yang rapi dan indah.[168]

Dalam era global, Joko Widodo dalam *Sambutan Walikota Surakarta pada Wisuda Sarjana S-1 ke 23 Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul 'Ulum* Surakarta, 11 Oktober 2011 menyebutkan bahwa pembangunan sumber daya bangsa yang bermutu, berdaya saing dan mandiri serta bermoral menjadi tuntutan mendesak yang harus menjadi perhatian semua elemen bangsa, termasuk lembaga pendidikan.

> "Pada era global saat ini, SDM berkualitas dan profesional sebuah kebutuhan. Untuk itu, kembangkan terus kepercayaan dan kualitas diri, sehingga mampu mengubah lingkungan menjadi lebih baik. Pendidikan tinggi secara khusus memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan daya saing bangsa. Sinyalemen dari masyarakat yang mengatakan banyaknya lulusan perguruan tinggi kurang siap terjun dalam dunia kerja harus menjadi perhatian. Peningkatan daya saing menjadi sebuah tuntutan, artinya lembaga pendidikan tinggi harus mampu mencetak kader-kader pembangunan yang berkualitas, baik mentalitas dan moralitas maupun intelektualitasnya. Ibarat sebuah bangunan, mentalitas dan moralitas adalah

[167] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Bimbingan Teknis PPID*, Surakarta, 12 April 2011.

[168] Hasil Wawancara dengan Sopir Taksi, Yudi, tanggal 25 Juni 2016.

pondasinya, sedang intelektualitas adalah tiang penyangga yang paling utama. Ketiganya harus kuat, kokoh dan saling bersinergi".[169]

Dalam kesempatan yang lain, Joko Widodo juga menekankan perlunya membangun wawasan anak bangsa yang berpijak pada budaya luhur dengan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Dengan kata lain, perkembangan zaman harus terus diikuti dengan tetap menjaga jati diri bangsa dan kearifan budaya lokal yang dimiliki.

> "Pada era global saat ini...Akademi Pariwisata mandala Bhakti diharapkan berperan dalam memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan aktual, mampu memperkuat revitalisasi aset dan potensi-potensi lokal untuk berkembang secara optimal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan daerah dan daya saing daerah....Pembangunan pelaku budaya maupun pembangunan kepariwisataan harus tetap berbasiskan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Hal ini diharapkan agar nilai-nilai pariwisata tidak kehilangan arah maupun jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang luhur harus ditransfer melalui pendidikan akademik. Pembangunan Kota Solo tetap berlandaskan kepada budaya dan karakter kota Solo, sebagai Kota Budaya, Semboyan *' Solo Past as Solo Future'* mampu memberikan semangat dan motivasi warga Kota Solo untuk menyongsong Kota Solo sebagai Kota modern yang tetap berlandaskan pada karakter budaya Jawa".[170]

Pembangunan anak bangsa harus berorientasi pada upaya menggali potensi dan meningkatkan profesionalitas yang berdaya saing dan berlandaskan moralitas yang luhur serta kedalaman spiritual. Dengan demikian, pembangunan pendidikan anak bangsa bukan hanya mengejar kemampuan intelektualitas dan mentalitas, tetapi juga

---

[169] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Wisuda Sarjana S-1 ke 23 Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul 'Ulum* Surakarta, 11 Oktober 2011.

[170] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Wisuda D-IIi Perhotelan Akademi Pariwisata Mandala Bhakti Surakarta,* Surakarta, 29 Desember 2011.

sekaligus kemampuan moralitas/spiritualitas. Dengan kata lain, Joko Widodo hendak mengatakan bahwa pembangunan anak bangsa harus menghasilkan *out put* yang dapat membuka peluang kerja serta mampu menciptakan suasana yang bermoral dan religius, sehingga generasi bangsa di masa depan memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memiliki kedalaman spiritual.[171]

Demikian juga pada saat ini, Presiden Joko Widodo tetap konsisten menekankan perlunya memelihara dan mengembangkan rasa kebangsaan yang berakar pada budaya luhur dengan seantiasa berusaha membangun kesadaran sebagai bangsa yang besar dan diikuti sarana pendukungnya berupa pembangunan kemampuan intelektualitas, profesionalitas dan moralitas/spiritualitas serta menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar. Ini adalah sebuah kebanggaan sebagai bangsa. Nasionalisme[172] kita harus ditunjukkan karena ini adalah jendela kita, halaman muka kita. Ketika orang masuk ke negara kita, mereka merasakan, "Oh ini negara besar."[173] Lebih lanjut, leluhur bangsa Indonesia -yang juga berasal dari beragam latarbelakang- telah membuat sumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan bukan satu agama. Oleh sebab itu, sebagai warisan asli nusantara, spirit *bhinneka tunggal ika* sebagai identitas kebangsaan harus selalu kita rawat agar cita-cita bersama mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan berdaulat dapat terus menggema dalam jiwa seluruh bangsa Indonesia. Secara khusus bagi umat Kristiani, Pancasila diharapkan menjadi aktivitas dalam menjalankan iman, harap, dan kasih Tuhan.

---

[171] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Wisuda Sarjana Stie Wijaya Mulya Surakarta*, 22 Januari 2011.

[172] Seorang nasionalis harus berani membukakan mata di muka keadaan-keadaan yang nyata. Ia harus mengabdi kepada kenyataan, yakni seorang yang mau memperbaiki masyarakat dan anti penjajahan yang menyebabkan rakyat melarat. Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Kholid O Santoso (ed), (Bandung: Sega Arsy, 2015), hlm. 84.

[173] Doorstop Presiden Republik Indonesia Peninjauan ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat 23 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11379&Itemid=26, diakses 4 Juni 16

Demikian juga bagi agama lainnya hendaknya nilai-nilai religius itu mewarnai segala perjuangannya dalam kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menumbuhkembangkan diri menjadi insan Indonesia yang mandiri, yang berdikari dan berjiwa merdeka, serta mengamalkan nilai-nilai keutamaan, seperti nilai-nilai budi pekerti, kepatutan, sopan santun, kepantasan, gotong royong, dan toleransi.[174]

Dalam acara *Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015,* Presiden Joko Widodo menekankan perlunya mengembangkan wawasan kebangsaan bagi umat Islam di Indonesia dengan meneladani ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw.

> "Sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik, umat yang senantiasa membangun solidaritas sosial di antara sesama manusia, umat yang tidak gampang dilanda kebencian, tidak gampang dilanda kedengkian, umat yang berkehendak merangkul, dan bukan memukul eksistensi kelompok lain".[175]

Dengan mengikuti dan meneladani sunnah Rasulullah saw, kita sebagai bangsa akan menjadi bangsa yang bermartabat, beradab, makmur, dan sejahtera. Oleh sebab itu, paham kebangsaan yang hendak dikemukakan di sini dalam term fiqih kebangsaan adalah bahwa profil fiqih kebangsaan berupa upaya menumbuhkembangkan nilai-nilai fiqih yang mampu membangun kesadaran berkorban, berjuang, rasa kebersamaan/solidaritas, dan kerukunan serta kerjasama dalam

---

[174] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Natal Nasional Tahun 2015 Kupang, Nusa Tenggara Timur 2 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10676&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

[175] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016.

menjawab perkembangan zaman yang begitu pesat. Inilah nalar fiqih kebangsaan yang dapat dibaca dari pemikiran Joko Widodo.[176]

Begitu pentingnya Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw itu bagi pembangunan wawasan pemahaman (fiqih) kebangsaan, Presiden RI Pertama, Ir Soekarno, dalam *Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw* di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, 6 Agustus 1963 menegaskan perlunya menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw agar kita bisa mengingat dan mengikuti suri tauladan Nabi Muhamamd saw yang memiliki "jiwa besar, jiwa pejuang yang sehebat-hebatnya", bahkan ajaran Nabi Muhammad saw telah menjadi dasar kerangka tujuan revolusi Indonesia. "*Semangat ajaran itu membawa kita pada perjuangan. Semangat ajaran itu membawa kita rela berkorban untuk mencapai maksud kita. Semangat ajaran itu yang membawa kita pada revolusi Indonesia*".[177] Dengan cara demikian, kita akan menjadi umat yang terbaik dan bangsa yang unggul.

Dalam nalar fiqih ke-NU-an, untuk menjadi *khairah ummah* (umat yang terbaik), kita seharusnya mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad saw, sahabat-sahabat, tabiin, tabiit tabiin dan ulama *salafus shaleh*. Ulama *salafus shaleh* memberikan keterangan agar umat Islam selalu belajar ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmunya dengan senantiasa mengharap ridla Allah swt dan kesenangan akhirat serta tidak materialistis (*min ghairi 'an yakuna lahu ghardun dunyawiyun*).[178]

Dalam nalar fiqih ke-NU-an, KH Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa umat atau bangsa Indonesia harus memiliki jati diri dan jiwa nasionalisme tersendiri yang mampu menerima adanya perbedaan

---

[176] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[177] Soekarno, "Shirathal Mustaqim, Jalan Yang Benar", dalam Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, 6 Agustus 1963, dalam R Soemarjono (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin....*, hlm. 275-276.

[178] KH M Hasyim Asy'arie, "Irsyad al-Mu'min ila Sairati Sayyidi al-Mursalin wa Man Tabi'ahu min al-Shabah wa al Tabi'in", dalam *Irsyad al-Sari...*, hlm. 40.

madzhab atau golongan dalam agama Islam dan perbedaan golongan bukanlah dianggap sebagai penghambat kemajuan, tetapi justru wahana untuk membangun kemajuan agama, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, norma fiqih ke-NU-an mengajarkan norma-norma yang mudah dan elastis, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama Islam tidak sulit untuk mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan yang majemuk sebagaimana spirit firman Allah: "Allah swt menghendaki kemudahan" (Q.S. al-Baqarah [2]: 185) dan juga mengikuti sunnah Nabi saw: "Aku (kata Nabi saw) diutus untuk memberikan kemudahan dan keluasan". Semua norma fiqih itu bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang fitrah dan bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia[179]

Dalam keputusan Fatwa MUI, umat Islam dan pemerintah berkewajiban menerima, menghormati dan menunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap senantiasa menghargai keragaman budaya dan kultur yang berlaku, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan mentaati peraturan peraturan-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar normatif penghargaan nilai-nilai/hak asasi asasi manusia tertera dalam sejumlah ayat al-Qur'an di antaranya:[180]

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Q.S. al-Isra' [17]: 70).

---

[179] KH Hasyim Asy'ari, *Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin* dalam Ishomuddin Haziq (ed), *Irsyad al-Syari* ..., hlm. 91-94.

[180] KH Ma'ruf Amin dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*...., hlm. 404-405.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

> Artinya: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (Q.S. Yunus [10]: 99).

Dalam bahasa Gus Dur, fiqih kebangsaan adalah fiqih yang mengedepankan prinsip keadilan sesuai UUD-NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan NKRI adalah untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran secara bersama.[181] Inilah fiqih kebangsaan yang berakar pada prinsip *al-mashlahah al-'ammah* (yang dalam bahasa kita dirumuskan dengan kata "kesejahteraan"). Dalam pembukaan UUD-NRI 1945, hal itu dirumuskan sebagai masyarakat yang adil dan makmur. Adil dan makmur memiliki arah lebih mementingkan kepentingan orang banyak dari kepentingan orang tertentu.[182] Dengan demikian, prinsip fiqih kebangsaan adalah membangun negara yang adil dan makmur menurut UUD-NRI 1945 menjadi sama nilainya dengan pencapaian kemaslahatan umum yang dimaksudkan oleh fiqih ke-NU-an.[183] Untuk membangun kepastian hukum dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan, maka prinsip keadilan harus ditegakkan sebagai unsur konstitutif dalam pembangunan regulasi hukum.[184]

Dengan demikian, tidak ada kewajiban pendirian negara Islam di Indonesia karena kemaslahatan umat Islam Indonesia dapat

---

[181] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 168.

[182] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 211.

[183] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita...*, hlm. 177.

[184] Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, (Surabaya: CV Kita, 2007), hlm. 151.

tercapai dengan baik, justru jika mendirikan negara Islam malah akan menimbulkan konflik. Sebab, bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural yang tidak bisa hidup bersama dan bersatu tanpa adanya falsafah negara yang memayungi. Demikian juga fiqih ke-NU-an tidak mewajibkan pendirian negara Islam, yang diharuskan adalah *darus salam* (negara harmoni),[185] bahkan Gus Dur berpendapat bahwa Ibn Taimiyah saja berpendapat kebolehan imam berbilang yang berarti tidak ada keharusan mendirikan Negara Islam (NI).[186] Jadi, kemaslahatan menjadi esensi utama dalam membangun tata kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan pertimbangan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) menjadi prioritas dalam membangun kebijakan kebangsaan dan kenegaraan (baca: *tashārruf al-imām ala ar-rā'iyah manûthun bi al-mashlahah*).[187]

Dalam hal menjaga kemaslahatan umat dan bangsa, KH Zaini Mun'im sebagai salah satu tokoh NU yang kharismatik sudah pernah mengusulkan agar "NU Kembali ke Khittah" pada Muktamar NU ke-25 tanggal 20 s/d 25 Desember 1971 di Surabaya. Baginya, program-program NU harus dipisahkan antara kegiatan politik dan kegiatan keumatannya. Sebab, jika NU tidak memisahkan secara jelas antara kegiatan politik dan keumatannya, maka Islamnya yang akan menjadi korban, bukan mustahil ada orang menentang Islam secara terang-terangan karena persoalan politik. Dengan demikian, nalar fiqih ke-NU-an pada waktu itu sudah diarahkan agar menjadi basis pendukung dan penjaga keberlangsungan keutuhan dan ketahanan hidup berbangsa walaupun waktu itu belum bisa terwujud.[188]

Gagasan itu baru terwujud pada Muktamar NU tahun 1984 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur, yakni "NU kembali ke Khittah" dengan aktor

---

[185] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 104.

[186] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 104.

[187] Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*...., hlm. 211.

[188] *Biografi KH Zaini Mun'im*, http://www.nuruljadid.net/biografi-kh-zaini-munim.html, diakses 8 Juni 2016.

utama penggeraknya adalah KH Abdurrahman Wahid dan KH Ahmad Siddiq. Keputusan hukum fiqih tersebut memiliki muatan nilai-nilai kebangsaan bahwa NU tidak hanya wajib membangun kemaslahatan bagi kaum Muslim saja, tetapi juga menjadi kerangka pemikiran dan perjuangan dalam mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan secara umum. Dengan demikian, nalar fiqih NU dapat menjadi etika sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, hukum fiqih dapat menjadi peraturan perundangan-undangan jika sudah diakomodir dalam legislasi hukum di Indonesia,[189] misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 1), Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 94), dan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 115).

Dalam hal membangun persaudaraan, KH Said Aqiel Siraj (Ketua Umum PBNU Periode 2010-2015 dan 2015-2020) menyebutkan bahwa nalar fiqih ke-NU-an bersendikan tiga prinsip persaudaraan: *Pertama*, *ukhuwah nahdliyah* (persaudaraan ke-NU-an) adalah untuk konsolidasi organisasi NU untuk merumuskan dan menerapkan program-program perjuangan NU. *Kedua*, *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama umat Islam) adalah untuk memperdekat perbedaan dan membangun sinergi keumatan untuk memakmurkan syiar-syiar Islam dan gerakan dakwah untuk kemaslahatan umum serta menetralisir gerakan-gerakan radikal agar menjadi moderat. *Ketiga*, *ukhuwah wathoniyah* (persaudaraan sesama bangsa) adalah untuk merajut dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam koridor Pancasila, UUD-NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat prinsip ini tidak boleh diubah karena sudah final. Sebagai organisasi terbesar di tanah air, NU bertekad

[189] Ahmad Baso, "Islam Liberal Sebagai Ideologi Nurcholish Madjid versus Abdurrahman Wahid", dalam Gerbang, Vol 6. No 03, Pebruari-April 2000, hlm. 126-127; Robert W Hefner, "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization*, (Pricenton: Pricenton University Press, 2005), hlm. 278-279.

menjadikan diri sebagai penjaga NKRI bersama kekuatan nasional lainnya. Oleh sebab itu, seluruh gagasan dan kebijakan nasional harus berpijak pada empat prinsip tadi.[190]

Salah satu manfaat ritual yang sering dilakukan di Indonesia seperti *Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw tersebut* adalah menumbukan solidaritas sosial untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Menurut teori E Durkheim, kegiatan ritual tidak sia-sia walaupun itu bersifat ritual, karena disamping ada *maudlah hasanah*/sambutan-sambutan untuk saling mengingatkan kepada kebaikan, juga dapat mendorong terwujudnya solidaritas sosial dan mendorong untuk mengikuti dan mentaati norma-norma agama (Islam) tersebut.[191]

Menurut KH MA Sahal Mahfudh, nalar fiqih ke-NU-an pada dasarnya bertujuan untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian martabat manusia. Nalar gerakan fiqih ke-NU-an yang digalang para ulama NU adalah untuk turut membangun dan mengembangkan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera. Kehadian fiqih ke-NU-an pada dasarnya tidak lepas dari spirit kelahiran NU sebagai organisasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan yang telah menjadi penyokong keutuhan dan ketahanan NKRI.[192]

> "Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup

---

[190]KH Said Aqil Siraj, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun*, (Jakarta: LTNU, 2014), hlm. 125-127.

[191] R N Bellah, "Evolusi Agama", dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm.317

[192]KH MA Sahal Mahfudh, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah, diakses 20 Juni 2016; KH MA Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2004).

berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara. Dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia dan aktif mengambil bagian dalam pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT. Nahdlatul Ulama dalam hal ini mengembangkan ukhuwwah Islamiyah yang mengemban kepentingan bangsa. Pendiri Nahdlatul Ulama, KH M Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya ukhuwah dengan mengutip berbagai ayat A1-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan ukhuwah".[193]

Secara empiris, ada hambatan yang paling mendasar dalam membangun persaudaraan itu, yakni lemahnya kesadaran dan rasa kasih sayang terhadap sesama umat manusia dan sesama anak bangsa. Oleh sebab itu, pada era globalisasi yang sesungguhnya sangat mengancam kerekatan persaudaraan sebangsa dan setanah air, maka kita harus memupuknya kembali dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan nilai-nilai keagamaan/keislaman. Hal ini menjadi penegasan Nabi Muhammad saw dalam risalahnya bahwa kesempunaan iman seseorang juga ditentukan oleh sejauh mana mencintai sesamanya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Oleh sebab itu, segala hambatan yang mengganggu persaudaraan sesama umat Islam, umat beragama, dan sesama anak bangsa dapat dilakukan semua pihak agar ukhuwah itu menjadi potensi yang sangat bermanfaat bagi seluruh anak bangsa Indonesia dalam suasana kebersamaan dan keragaman yang menjadi cerminan dari kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.[194]

---

[193] KH MA Sahal Mahfudh, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah, diakses 20 Juni 2016.

[194] Menurut KH MA Sahal Mahfudh, kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk abstraknya dari *akhun*. Kata *akhun* berarti saudara, bentuk jamaknya *ikhwah*, dapat pula diartikan kawan. Secara etimologis, kata *ukhuwah* dapat diartikan dengan "kesaudaraan/persaudaraan atau kekawanan/perkawanan". Dalam al-Qur'an, hubungan antara kaum mukmin disebut *ikhwah* yang berarti bahwa orang mukmin

Persaudaraan sebagai bangsa yang plural itu juga menjadi modal utama menjaga dan mempertahankan eksistensi persatuan kebangsaan Indonesia, sehingga kita harus menegakkan prinsip-prinsip persaudaraan. Hal ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo berikut:

> "Sebagai bangsa yang besar, selain jiwa tegak dan kerja keras tersebut, kita juga perlu menegakkan prinsip persaudaraan, baik persaudaraan sesama manusia, *ukhuwah insaniyah,* persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air, *ukhuwah wathoniyah,* persaudaraan sebagai pemeluk agama, *ukhuwah diniyah,* dan persaudaraan sesama kaum muslimin, *ukhuwah Islamiyah.* Dengan *spirit ukhuwah* tersebut, pemerintah dan seluruh masyarakat secara otomatis akan mempunyai kekuatan alamiah untuk membendung gerakan-gerakan radikalisme atas nama agama".[195]

Sebagai bangsa yang mayoritas warganya Muslim dengan tali persaudaraan yang erat dan kokoh, kita harus menjadikan hal itu sebagai kekuatan baik dalam geopolitik maupun geoekonomi dunia. Nalar (fiqih) Islam Indonesia yang bersifat moderat dan selalu mendorong hidup rukun berdampingan dengan agama-agama lainnya menjadi modal besar dalam membangun keutuhan sebagai bangsa yang majemuk. Ini merupakan sebuah cermin wawasan keilmuan fiqih Islam yang bukan hanya mampu mewujudkan citra yang baik terhadap bangsa Indonesia yang plural dengan tali persaudaraannya yang baik, tetapi juga akan mampu menciptakan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin) (baca: Q.S. al-Anbiya' [21]: 107)*.[196] Harapan akan

---

adalah bersaudara di antara sesama mukmin. KH MA Sahal Mahfudh, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah, diakses 20 Juni 2016.

[195] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur›an Nasional di Istana Negara, Jakarta Tanggal 3 Juli 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[196] Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Mengenai Pendidikan Tinggi Islam Moderat di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Tanggal 5 Juni 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_con

adanya sikap pluralitas itu juga telah disosialisasikan sejak Joko Widodo menjadi Walikota Surakarta dimana ia menghendaki adanya sikap ukhuwah Islamiyah, tetapi secara lintas agama menghendaki adanya sikap toleran, rukun, damai dan nyaman yang terpatri dalam kehidupan/kesalehan sosial.[197]

Citra sebagai warga mayoritas penduduk Muslim yang terbesar di dunia dengan tali persaudaraan yang erat itu menjadi modal kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan contoh bagi dunia Internasional. Dengan adanya wawasan (fiqih) keislaman yang baik dan cinta damai, maka penilaian dunia terhadap Indonesia akan semakin baik dan sekaligus juga citra baik bagi agama Islam. Hal ini juga akan mematahkan pandangan masyarakat dunia bahwa terorisme dan anti-demokrasi itu identik dengan agama Islam.[198]

Bangsa yang kita cita-citakan adalah bangsa yang sesuai dengan amanah sila keempat Pancasila, yakni kita hendak membangun bangsa atau "rakyat yang berdaulat" dengan didukung oleh sistem pemerintahan yang melayani rakyat, sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktek korupsi dan tindakan intimidasi, mengedepankan kompetensi skill/keterampilan dan birokrasi yang bersih, handal dan kapabel, yang benar-benar mampu bekerja dan melayani sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, mampu melakukan penegakkan hukum, dan penegakan kedaulatan politik. Selain itu, kita juga harus mampu membangun kepribadian sosial dan budaya dalam rangka membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama di negara ini.[199] Dari mana revolusi mental

---

tent&task=view&id=9395&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[197] Solopos, 6 Desember 2006; Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009*.

[198] Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Mengenai Pendidikan Tinggi Islam Moderat di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Tanggal 5 Juni 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9395&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[199] Joko Widodo, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html, diakses 30 Juni 2016.

digerakakkan, Joko Widodo berpendapat harus berangkat dari jati diri bangsa Indonesia.

> "Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara".[200]

> "Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional, usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan sendiri, dengan restu Allah SWT sebagaimana dikatakan dalam ayat Al Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa "*Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka.*"[201]

Revolusi mental yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada dasarnya jika kita telusuri berakar dari paham fiqih kebangsaan terutama yang disampakan oleh Ir Soekarno yang menyatakan bahwa perubahan mental merupakan hal utama yang perlu dilakukan sebelum melakukan perubahan dan pembangunan fisik atau material atau setidaknya dilakukan secara kedua-duanya. Ia menyatakan:

> "Oleh sebab itu, alangkah baiknya jikalau kita pada malam ini merenungkan pekerjaan dan usaha Nabi Muhammad saw yang di lapangan moraliteit, di lapangan mental, di lapangan batiniah, mencurahkan segenap ia punya hidup 100 persen, terutama sekali untuk hal itu. Buka kita punya Qur'an, terutama sekali ayat-ayat yang turun di zaman Mekkah. Terutama sekali ayat-ayat yang turun di zaman Mekkah itu boleh dikatakan hampir 100 persen mengenai hal-hal yang kebatinian ini. Ayat-

---

[200] Joko Widodo, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html, diakses 30 Juni 2016.

[201] Joko Widodo, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html, diakses 30 Juni 2016.

> ayat yang diturunkan di zaman Madinah berisikan hukum-hukum. Oleh karena itu, di zama Madinahlah terbangunnya negara, terbangunnya masyarakat, negara dan masyarakat yang memerlukan peraturan-peraturan. Ayat-ayat yang dari zaman Madinah ini terutama sekali berisi hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Tetapi, terutama sekali ayat-ayat yang diturunkan di zaman Mekkah, Saudara-saudara, terutama sekali, yaitu *mental preparations*, persiapan mental, mental *investment.* Oleh sebab itu, jikalau kita menjalankan atau hendak menjalankan pembangunan, Saudara-saudara, janganah lupa kepada mental *investment* ini. Jangan hanya mengadakan material *investment.* Jangan hanya kita mengadakan *investment of human skill,* tetapi juga jangan lupa mental *investment."*[202]

Akhirnya, nalar fiqih ke-NU-an hingga kini tetap menjadi pembendung dan penghalau atas hadirnya paham fundamentalisme dan radikalisme agama, dan sekaligus tetap setia berkorban dalam membela dan mempertahankan asas hidup berbangsa yang majemuk dengan landasan nilai spiritual yang dalam. Nalar fiqih ke-NU-an itu berpegang pada pendapat kitab *Fathul Mu'in* yang menyebutkan bahwa *daf'u al-dlarar ma'shumin musliman kana au ghaira muslim* (melindungi kehormatan orang-orang yang perlu dibela, baik muslim maupun non-muslim).[203]

F. FIQIH KENEGARAAN

Menurut Ramlan Surbakti, politik dalam kehidupan kenegaraan memiliki beberapa pengertian, yakni *Pertama*, usaha-usaha yang dilakukan warga negara untuk membahas, membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. *Ketiga*, segala kegiatan yang berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan

---

[202] Soekarno, "Nabi dan Pembangunan", dalam Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw di Istana Negara, Jakarta, 15 September 1959 dalam R Soemarjono (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin...*, hlm. 196.

[203] Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial...*, hlm. 442.

dalam masyarakat. *Keempat*, kegiatan yang berhubungan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber kekuasaan yang dianggap perlu dan dianggap penting.[204]

Dalam hal ini yang dibicarakan adalah segala kegiatan untuk membangun eksistensi kebaikan hidup bersama dalam wadah negara yang adil, makmur dan sejahterah baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, wadah negara perlu menjadi perhatian bersama untuk dibentuk agar kekuasaan untuk membangun kebaikan bersama bisa terwujud dalam kehidupan masyarakat dan warga negara.

Secara historis, pada awal-awal pembentukan negara Indonesia, Islam dan nasionalisme/negara menjadi bahan pembicaraan para tokoh-tokoh yang sebagian besar NU akan nasib bentuk negara jika merdeka. Mereka memiliki perhatian yang cukup besar terhadap eksistensi Islam, dan negara sebagai wadah hidup dan beramal kebajikan.

> "Di masa-masa awal pembentukan negara Indonesia, kata Gus Dur, Islam memang sempat menjadi perbincangan hangat yang dikaitkan dengan isu nasionalisme yang ketika itu tumbuh menjamur. Bahkan sejak tahun 1919, tiga sepupu yang juga tokoh menjadi nasional, H O S Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy'arie dan KH Wahab Chasbullah, secara intens mendiskusikan hubungan Islam dan nasionalisme itu. Belakangan menantu Tjokroaminoto, Soekarno yang ketika itu baru berusia 18 tahun, juga terlibat aktif dalam pertemuan mingguan yang berlangsung selama bertahun-tahun itu".[205]

Perjuangan untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat dari para penjajah itu tidak hanya dilakukan dengan perjuangan fisik yang luar biasa dahsyat dan memakan waktu yang panjang, tetapi juga dilakukan secara gigih untuk

---

[204] Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana, *Kiyai Dan Politik* (Resensi Buku), [h]ttp://hamdanhusein.blogspot.co.id/2014/09/kiyai-dan-politik-resensi-buku.html, diakses 15 Juli 2016.

[205] Ali Maskur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 121.

membangun landasan dasar bagi berdirinya negara yang merdeka –yang juga menjadi diskursus tokoh-tokoh nasional selama bertahun-tahun itu- dengan menyusun dasar dan ideologi negara melalui serangkaian persiapan. Persiapan itu akhirnya kemudian diwujudkan oleh para pendiri/ tokoh bangsa dengan wadah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada Maret 1945 dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada Agustus 1945.[206] Adapun ideologi sebagai wacana keilmuan memiliki beberapa pengertian sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie.

Dalam hal ini, ideologi memiliki tiga pengertian, yaitu *Pertama*, ideologi dipahami sebagai kesadaran palsu, yang berarti bahwa ideologi adalah teori-teori yang hanya berpihak pada kepentingan yang propaganda. *Kedua*, ideologi dipahami sebagai segala hal yang netral dalam sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar hidup dari kelompok sosial atau budaya tertentu. *Ketiga*, ideologi dipahami sebagai keyakinan atau kepercayaan yang tidak ilmiah, sehingga gagasan atau pandangan yang tidak dapat dibuktikan melalui penalaran rasional atau empiris disebut "ideologi".[207]

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie, secara teoritis, ideologi yang dipahami dalam konteks ideologi Pancasila adalah yang kedua, yaitu ideologi yang dipahami sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok masyarakat atau bangsa di Indonesia. Secara praktis, ideologi terbagi menjadi dua, yaitu *Pertama*, ideologi tertutup yang mempunyai paradigma berpikir atau pandangan dunia yang dinilai mutlak kebenarannya yang harus dipatuhi. *Kedua,* ideologi terbuka yang memiliki orientasi dasar berpikir hanya pada prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pada tataran aplikasinya pada tataran sosial-budaya dan politik dapat disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Ideologi

---

[206] Fathoni Ahmad, *Sejarah di Balik Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, http://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945-, diakses 20 Juni 2016.

[207] Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi,* Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia., hlm. 1-2.

terbuka inilah yang dapat dikembangkan di negara demokratis, termasuk di Indonesia.[208]

Secara historis, ideologi Pancasila ditetapkan dalam Sidang pertama yang dibuka tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In dan 10-16 Juli 1945 dengan agenda, yakni sidang pertama menetapkan Dasar Negara Pancasila dan sidang kedua menetapkan rancangan UUD 1945. Dalam sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mohamad Yamin menyampaikan pidato yang memuat tentang asas-asas yang diperlukan sebagai dasar dalam kehidupan kenegaraan. Pada sidang tanggal 31 Mei, Soepomo juga menyampaikan mengenai uraian dasar-dasar negara. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara tegas menyampaikan 5 poin yang hendak dijadikan dasar negara, sehingga dengan usulan lima poin itulah kemudian untuk pertama kalinya disebutkan "Pancasila". Ilustrasi gambar Pancasila dan NU adalah sebagai berikut:[209]

Menurut Gus Dur, pada sidang lanjutan tanggal 1 Juni 1945, para pemimpin rakyat masih menyangsikan kemampuan bangsa Indonesia untuk menjalankan sistem negara yang merdeka, tetapi hal itu bukan

[208] Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*...., hlm. 2-4.

[209] Fathoni Ahmad, *Sejarah di Balik Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, http://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945-, diakses 20 Juni 2016

berarti sebagai wujud keputusasaan, melainkan hal itu sebagai motivasi positif untuk merumuskan dasar negara. Walaupun demikian, akhirnya para pendiri negara melalui perjuangan jiwa, raga dan pikiran kemudian berhasil menyatakan Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, proses kemerdekaan RI yang diperjuangkan oleh para pendiri negara berserta segenap rakyat Indonesia itu bukan hanya berjuang lepas dari penjajahan, tetapi juga berusaha melahirkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi NKRI yang majemuk.[210]

Sikap kemajemukan yang diharapkan menjadi wadah kehidupan berbangsa dan bernegara itu juga telah menjadi perdebatan di awal perumsan dasar ideologi dan dasar negara, yakni dalam Piagam Jakarta yang salah satunya berbunyi: "Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya". Sebelum Muqaddimah UUD-NRI 1945 disahkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia dari bagian Timur yang hendak memisahkan diri jika poin "Ketuhanan" tidak diubah. Oleh sebab itu, setelah melalui musyawarah, akhirnya ditetapkanlah dengan redaksi berikut: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan konsep tersebut, umat Islam tetap memiliki hak menjalankan

[210]Dalam uraiannya dijelaskan: "*Jika balik lagi memperhatikan proses penyusunan dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945, apa yang dijelaskan oleh Gus Dur, itulah misi yang dibawa oleh para pemimpin rakyat agar dasar negara merupakan pondasi kokoh yang mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa, bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas. Seperti diketahui bahwa Tim 9 (sembilan) perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin, merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta yaitu: "Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari›at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya". "Sebelum Pembukaan/Muqaddimah (Preambule) disahkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin "Ketuhanan" tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Fathoni Ahmad, *Sejarah di Balik Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, http://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945-, diakses 20 Juni 2016.

keyakinan agamanya dengan seutuhnya. Oleh sebab itu, umat Islam yang mengamalkan Pancasila di sini sama artinya dengan mengamalkan Syariat/ fiqih Islam dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, hubungan agama dan negara menjadi unik, yakni bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama (dengan dasar agama tertentu, Islam), tetapi negara yang melindungi dan mendukung kemajuan hidup beragama. Dalam hal ini, KH Abd Wahid Hasyim berperan aktif menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dan teologis dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi umat Islam Indonesia yang berkarakter inklusif sebagaimana nalar akidah *Ahlusssunnah Wal Jamaah* dari Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, NU menolak mendirikan negara Islam karena tidak ada konsep khusus tentang negara Islam baik secara konseptual maupun secara historis.[211]

Secara historis, nalar fiqih ke-NU-an sebagai aturan hidup manusia lebih mengutamakan fungsi negara dari pada bentuknya, sehingga bentuk negara dalam sejarah Islam senantiasa mengalami perubahan, yakni (a) bermula dari sistem prasetia (*bai'at*) dari suku-suku pada Sayyidina Abu Bakar; (b) pergantian pemimpin dengan melakukan penunjukkan dari Abu Bakar pada Sayyidina Umar Ib Khattab; (c) perkembangan berikutnya dilakukan sistem pemilihan pemimpin melalui (*ahlul halli wal aqdi*) baik langsung maupun tidak; (d) setelah masa khalifah yang empat, kemudian diteruskan dengan sistem kerajaan atau keturunan di satu sisi.[212]

> "Demikian juga, Islam tidak menentukan besarnya negara yang akan dibentuk. Di zaman Nabi Saw, negara meliputi satu wilayah kecil saja –yaitu kota Madinah dan sekitarnya, diteruskan dengan imperium dunia di masa para khalifah dan kemudian Dinasti Umaiyyah dan Abbasyiah. Setelah itu, berdirilah kerajaan-kerajaan lokal dari Dinasti Murabbitîn di

[211] Fathoni Ahmad, *Sejarah di Balik Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, http://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945-, diakses 20 Juni 2016; Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita...*, hlm. 81-84.

[212] Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita...*, hlm. 112.

barat Afrika hingga Mataram di Pulau Jawa. Kini, kita kenal dua model; model negara-bangsa (*nation state*) dan negara kota (*city state*). Keadaan menjadi lebih sulit, karena negara kota menyebut dirinya negara-bangsa, seperti Kuwait dan Qatar".[213]

Secara tekstual-normatif, Gus Dur mengemukakan bahwa nalar fiqih ke-NU-an tidak mengenal sistem negara Islam, tetapi hanya mengemukakan mengenai nilai-nilai hidup berbangsa dan bernegara yang harus dibangun:

"....pengertian negara dari kata "*daulah*", yang tidak dikenal oleh al-Qur'an. Dalam hal ini, kata tersebut mempunyai arti lain, yaitu "berputar" atau "beredar", yaitu dalam ayat "agar harta yang terkumpul itu tidak berputar/beredar antara orang-orang kaya saja di lingkungan anda semua (*kailâ yakûna dûlatan bainal aghniyâ'i minkum*)" (QS al-Hasyr (59):7). Ini menunjukkan yang dianggap oleh al-Qur'an adalah sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan bentuk dari sebuah negara itu sendiri. Jadi, pembuktian tekstual ini menunjukkan Islam tidak memandang penting bentuk negara. Atau, dengan kata lain, Islam tidak mementingkan konsep negara itu sendiri".[214]

Adapun pendapat yang menyatakan adanya negara dalam Islam, harus dimaknai sebagai pandangan agama tentang masyarakat. Dengan kata lain, Islam hanya mengajarkan ideologi sebagai pedoman hidup masyarakat yang bisa diamalkan umat Islam, seperti adanya *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, sehingga minimal berlaku untuk para warga umat Islam saja. Dalam hal ini, negara dapat berdiri tanpa ideologi negara Islam, untuk melindungi hak-hak semua warga negara di hadapan UUD-NRI tahun 1945. Jika negara berdasarkan ideologi Islam, maka warga negara non-Muslim akan menjadi warga negara kelas dua, baik secara normatif-hukum maupun faktual-praktis. Sementara itu, NKRI berdiri tanpa mengunakan ideologi agama tertentu secara konstitusional.

---

[213] Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*...., hlm.112-113.

[214] Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*...., hlm. 112.

Dengan demikian, perjuangan rasional dan konstitusional etis fiqih ke-NU-an itulah dapat diusulkan menjadi regulasi hukum nasional atau regulasi yang spesifik seperti penyelenggaraan Haji tadi.[215]

Dalam masalah hubungan agama dan negara, Joko Widodo juga memberikan pandangan dalam *Sambutan Walikota Surakarta pada Bedah Buku Karya Dr Masdar F Mas'udi*, Surakarta, 16 Agustus 2011, bahwa agama dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, Indonesia bukanlah negara sekuler, dan juga bukan negara agama, tetapi negara Indonesia mengatur hak-hak warga negara untuk beragama yang berdasarkan Pancasila dan UUD-NRI 1945. Oleh sebab itu, norma agama termasuk Islam dapat menjadi sumber moral transendensi dalam membangun konstitusi, sebab agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an tidak pernah berbicara tentang negara Islam, tetapi Islam justru berbicara penyampaian rahmat bagi segenap alam, ***rahmatan lil 'alamin***. [216]

> "Hubungan Agama-Negara, tidak bisa dipisahkan, sebab keduanya bagaikan ruh dengan badan. Walaupun negara kita bukan berdasarkan agama namun negara telah mengatur hak-hak warga negara untuk bergama....Indonesia bukan negara agama atau sekuler, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kita semua telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sehingga tinggal bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agama sebagai sumber moral transendensi harus berbicara tentang konstitusi dan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan Pancasila sebagai dasar Negara. Islam yang bersumber Al-Qur'an juga tidak ada satu istilah tentang Negara Islam. Bahkan Islam akan muncul sebagai ***rahmatan lil 'alamin***".[217]

---

[215] Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita*...., hlm. 114-115.

[216] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Bedah Buku Karya Dr Masdar F Mas'udi*, Surakarta, 16 Agustus 2011.

[217] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Bedah Buku Karya Dr Masdar F Mas'udi*, Surakarta, 16 Agustus 2011.

Dalam konteks ini, Joko Widodo menyatakan bahwa Islam sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai ke-Indonesia-an harus mampu menawarkan nalar fiqih (pemahaman keislaman) yang produktif dan konstruktif untuk menegakkan keutuhan dan ketahanan bangsa Indonesia, terutama dalam mengisi nilai-nilai ke-Indonesa-an dalam kerangka ideologi Pancasila dan UUD-NRI 1945.[218] Hubungan agama dan negara berada dalam posisi bahwa nilai keagamaan sebagaimana sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menjadi landasan etis dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia yang sesungguhnya menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila-sila berikutnya dalam Pancasila,[219] yakni

> "....kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan sila ketuhanan ini, sekaligus dengan penjabarannya di konstitusi, ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila adalah sebuah negara religius (*religious nation state*). Di negara ini tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti-Ketuhanan dan anti keagamaan. Saat yang sama, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"... Ajaran agama, dengan demikian, harus dilaksanakan dengan penuh toleransi dan berkeadaban disamping peran proaktif negara dengan menyelenggarakan dialog antar umat beragama".[220]

Menurut Faisal Ismail, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila memiliki sifat terbuka dan bersifat universal dalam menjawab

---

[218] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Bedah Buku Karya Dr Masdar F Mas'udi*, Surakarta, 16 Agustus 2011.

[219] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa....*, hlm. 48.

[220] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa....*, hlm. 48.

tantangan hidup nasional dan global.[221] Lebih lanjut, Joko Widodo dalam *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011, menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengabdian sesuai dengan komitmen untuk melaksanakan pembangunan dan perubahan ke arah perbaikan secara menyeluruh. Walaupun demikian, ia menyadari bahwa wawasan dan penghayatan-pengalaman Pancasila itu belum seutuhnya dipahami dan dilaksanakan melainkan masih sepotong-sepotong, sebab masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan, anarkisme, dan kemiskinan, sehingga perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat harus diarahkan pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia saat ini tidak perlu mempersoalkan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara karena sudah final, tetapi yang harus dilakukan bersama adalah menjadikan Pancasila tetap ampuh, dan mampu membimbing bangsa dan negara Indonesia menuju kehidupan yang bersatu, berdaulat adil dan makmur, sebab hanya dengan Pancasila, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan berwibawah.[222] Lebih lanjut Joko Widodo menyatakan:

> "Kita menyadari bahwa saat ini, nilai-nilai Pancasila belum dapat kita amalkan sepenuhnya. Meledaknya bom Solo, maraknya anarkisme dan kekerasan, masih banyaknya kemiskinan, hal ini membuktikan bahwa pemahaman kita terhadap Pancasila masih sepotong-potong, sehingga perjalanan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat tidak berjalan pada jalur yang benar, tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang sangat merugikan".[223]

> "Kita tidak perlu lagi mempersoalkan kebenaran Pancasila sebagai dasar negara. Yang harus kita perhatikan dan harus

---

[221]Faisal Ismail, *Islam dan Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2001), hlm. 103.

[222] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

[223]Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

kita usahakan bersama adalah, bagaimana Pancasila itu tetap ampuh, dan mampu membimbing bangsa dan negara Indonesia menuju tujuannya. Yang harus kita jaga adalah kelestarian Pancasila, karena kita berkeyakinan bahwa hanya dengan Pancasila bangsa Indonesia yang besar dan bhinneka ini, dapat mencapai suatu kehidupan bersatu, berdaulat adil dan makmur".[224]

Dengan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan menjadi terarah dalam membangun tata hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, membangun tata hidup politik dan ekonomi dengan cara-cara musyarawah, bijaksana, mengedepankan pemenuhan kewajiban dari menuntut hak, mengutamakan kesejahteraan bersama daripada pribadi, sikap saling mengasihi dan saling membantu. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ini sangat berbeda dengan budaya Barat yang serba rasional-individualistik, mengutamakan tuntutan pemenuhan hak daripada pemenuhan kewajiban.[225] Lebih lanjut, Joko Widodo mengutarakan:

"Nilai Pancasila akan membimbing kita untuk lebih mementingkan kesejahteraan bersama daripada kesenangan pribadi, lebih memperhatikan kewajiban daripada menuntut hak, lebih mengutamakan memadu pendapat melalui musyawarah daripada mengadu suara untuk mencari menang. Pancasila akan menuntun kita menumbuhkan semangat kerukunan dan keutuhan, semangat persatuan dan kebersamaan, sikap tenggang rasa dan setia kawan, sikap tolong menolong dan gotong royong. Untuk itu mari kita pahami dan kita resapi Pancasila secara utuh, bukan saja artinya, bukan saja semangatnya, tetapi juga bagaimana agar Pancasila itu dapat kita rasakan manfaatnya dalam setiap segi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat".[226]

---

[224] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

[225] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

[226] Joko Widodo, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

Dalam menempuh perjuangan ideologi Pancasila untuk menegakkan kedaulatan, keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama, Joko Widodo menekankan perlunya melakukan dua hal pokok; *Pertama*, persatuan Indonesia. Republik ini bukan sebuah negara yang hanya dibangun untuk satu golongan ataupun beberapa kelompok saja, tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, negara ini memerlukan persatuan, memerlukan kebersamaan, dan memerlukan gotong-royong seluruh elemen bangsa. *Kedua*, keberanian untuk menjebol berbagai rintangan dan aturan yang menghambat kemajuan dan kemakmuran dengan cara-cara yang legal, keberanian untuk membangun dengan jujur dan adil. Dalam hal ini, Joko Widodo mengutip kembali apa yang pernah disampaikan Bung Karno, «*Pergerakan kita janganlah pergerakan yang kecil-kecilan. Pergerakan kita haruslah pada hakekatnya, suatu pergerakan yang ingin mengubah sama-sekali sifatnya masyarakat. Suatu pergerakan yang ingin menjebol kesakitan-kesakitan masyarakat, sampai ke sulur-sulurunya, sampai ke akar-akarnya*». Oleh sebab itu, kita harus berjuang untuk melawan mentalitas bangsa yang berada dalam keterjajahan, ketertindasan, ketidakadilan, ketidakmerdekaan dan sekaligus membangun mentalitas baru sebagai bangsa yang merdeka 100% dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, terutama yang berada di perbatasan, pulau terluar, para pembantu rumah tangga, pedagang kecil, buruh, petani, tukang cuci pakaian, dan rakyat kecil lainnya. Inilah cita-cita besar Bung Karno melalui ideologi dan falsafah Pancasila, yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari, dan Indonesia yang berkepribadian.[227]

Dengan berpegang pada ideologi dan falsafah Pancasila, kita berarti sedang menjaga eksistensi NKRI, sebab tidak ada jalan lain dalam mempertahakan keutuhan NKRI kecuali harus kembali pada prinsip dasar yang telah kita sepakati, yaitu sistem politik dan demokrasi yang berdasarkan ideologi Pancasila. Tekad itu juga dimiliki oleh NU

[227]Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Lahir Pancasila Blitar, Jawa Timur, tanggal 1 Juni 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9373&Itemid=26 diakses 4 Juni 2016

sebagai ormas Islam terbesar yang ditegaskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo Jawa Timur tahun 1983, bahwa NU bertekad dan berkewajiban untuk mempertahankan dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Oleh sebab itu, sikap politik kenegaraan NU sangat jelas dan tegas berpijak pada sistem politik dan demokrasi Pancasila, sehingga sistem legislasi hukum yang diterapkan juga harus bersendikan nilai-nilai falsafah Pancasila yang mengajarkan keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan bagi warganya.[228] Dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan itu, NU berusaha kembali menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara, sehingga siapa pun yang mengganggu atau menentang Pancasila harus dicegah karena ini musuh negara. Tidak hanya itu, NU juga memiliki sikap yang teguh bahwa Mukadimah UUD-NRI 1945 itu sama sekali tidak boleh diubah atau diamandemen, karena Mukadimah tersebut menjadi pedoman yang memuat filosofi serta arah perjuangan bangsa Indonesia.[229] Konsepsi hidup berbangsa yang inklusif dan egaliter ini juga dikembangkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im, pembaru hukum Islam asal Sudan, dalam membangun nalar hukum/fiqih modern.

Dalam kehidupan kenegaraan, An-Na'im menentukan kedudukan dan hak asasi warga negara secara setara dan adil sebagai berikut: *Pertama*, status konstitusional Muslim dan non Muslim dalam tataran negara memiliki hak sipil dan politik secara setara. *Kedua*, status konstitusional non-Muslim dan Muslim setara serta sama-sama memiliki hak kewarganegaraan yang permanen.[230] Demikian juga Gus Dur hendak membangun tata kehidupan kenegaraan yang egaliter dan non diskriminasi serta menolak adanya gerakan Arabisasi. Demikian juga para kiai pesantren memiliki kecenderungan untuk menghadirkan hukum-hukum fiqih yang khas Indonesia, yakni nalar fiqih ke-NU-an

[228] KH Said Aqil Siraj, *Islam...*, hlm. 128.

[229] http://www.nu.or.id/post/read/39618/kembali-ke-khittah-indonesia-1945, diakses 20 Juni 2016.

[230] Moh Dahlan, *Epistemologi Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im,* (Yogyakarta: Disertasi Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 212-215.

yang senafas dengan nalar fiqih Walisongo.[231] Nalar fiqih kenegaraan itu bertujuan memberikan status hak dan kedudukan warga yang sama dalam negara. Oleh sebab itu, NU sebagai Jam'iyyah tidak menghendaki pendirian negara Islam sebagaimana yang diproklamirkan oleh NII tahun 1947 di Jawa Barat dan juga tidak tertarik dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia dan Majlis Mujahidin Indonesia yang hendak mendirikan negara Islam.[232] Oleh sebab itu, Gus Dur menyatakan bahwa nalar fiqih ke-NU-an tidak mengharuskan untuk mendirikan negara Islam, sehingga NKRI itu sudah final.[233]

Sistem hukum kenegaraan yang berbasis pada asas kesetaraan dan keadilan lahir dari budaya bangsa, yang di dalam ushul fiqihnya menyerap hukum adat ke dalam hukum fiqih (melalui perangkat *al-adah muhakkamah*). Konsepsi ini adalah landasan peraturan hukum fiqih yang diserap oleh lembaga negara untuk menjadi hukum positif, seperti Undang-Undang tentang Zakat, Wakaf, Haji dan lainnya.[234] Dengan demikian, kita harus mendorong kesadaran kaum Muslim Indonesia untuk menjadikan norma fiqih sebagai faktor kompelementer terhadap Pancasila yang berarti bahwa norma fiqih dapat menjadi salah satu sumber pokok dalam legislasi hukum nasional.[235]

Dalam nalar fiqih kenegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi landasan untuk membangun hukum nasional yang berdasar pada UUD-NRI tahun 1945 yang senantiasa dapat diwarnai dan dijiwai nilai-

---

[231] Hasil Wawancara Redaktur JIL dengan Dr. Rumadi dan Abd Moqsith Ghazali: Gus Dur Adalah Jendela, Garansi, Lokomotif http://islamlib.com/id/artikel/gus-dur-adalah-jendela-garansi-lokomotif/, diakses 10 Agustus 2010.

[232] Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: *LKiS*, 2010), hlm. 265.

[233] Hasil Wawancara Redaktur JIL dengan Dr. Rumadi dan Abd Moqsith Ghazali: Gus Dur Adalah Jendela, Garansi, Lokomotif http://islamlib.com/id/artikel/gus-dur-adalah-jendela-garansi-lokomotif/ diakses 10 Agustus 2010.

[234] Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara...*, hlm. 156.

[235] Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, eds Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, (Yogyakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 236-238.

nilai fiqih secara secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin pelindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia (Q.S. An-Nisa' [4]: 58).[236]

Dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI, menyebutkan bahwa Negara diisi dengan spirit kerohanian agama dan agama dilindungi oleh negara. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi indikasi bahwa negara hadir dalam memakmurkan agama, bangsa dan negara. Pada sisi lain, juga dapat dipahami bahwa agama juga menentukan arah kehidupan bernegara, hubungan penguasa dan rakyat, yakni negara hadir melayani dan menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan negara dan agama terjadi dalam hubungan yang harmonis dan mutualistik, bukan hanya dalam bidang ibadah saja, tetapi juga muamalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dalam bidang muamalah, agama (fiqih Islam) mendorong dan mendukung lahirnya kehidupan yang adil dan makmur yang mana hal itu juga perlu dimulai dari adanya perbaikan sistem dan regulasi jika ada persoalan regulasi.[237]

Dalam masalah fiqih kenegaraan, Joko Widodo mengedepankan perlunya melakukan harmonisasi hukum dalam kehidupan kenegaraan, sehingga regulasi yang ada dan yang akan dibangun tidak saling bertentangan. Oleh sebab itu, Joko Widodo menekankan perlunya melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik yang sudah ada maupun yang hendak dibuat. Salah satu contohnya adalah harmonisasi antara izin lingkungan dengan izin HO (izin gangguan) yang

[236]Masdar F Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 52; lihat juga Moh Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Yogyakarta: IAIN Bengkulu Press, 2013).

[237]Orang Indonesia yang beragama Islam bermakna bahwa ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an tidak bisa dipertentangkan karena keduanya memiliki hubungan mutualistik, saling membutuhkan dan saling mengisi. Ali Zawawi, (ed.), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Semua Agama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), hlm. 52.

dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi perhatian Joko Widodo. Lebih lanjut, ia menyatakan:[238]

> "Saya juga minta agar dilakukan harmonisasi peraturan perizinan, terutama izin lingkungan di kawasan industri. Ini juga penting sekali. Harmonisasi perizinan bukan berarti meniadakan fungsi pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi memastikan bahwa fungsi itu dijalankan lebih baik, lebih efisien, lebih efektif sehingga tidak terjadi kendala dalam berusaha dan berinvestasi".[239]

Dalam kehidupan kenegaraan, kita seluruh pejabat negara harus mampu menyelenggarakan amanah kenegaraan yang akuntabel dengan mengedepankan visi pelayanan pada masyarakat sehingga rakyatlah sebagai perhatian utama dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks kehidupan otonomi daerah, sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus selalu bersinergi dan berkoordinasi dalam rangka memajukan pembangunan nasional untuk menjamin keadilan dan kemakmuran.[240] Ha ini senafas dengan spirit kaidah fiqhiyyah bahwa kebijakan pemimpin harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat (*tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslahah*). Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam acara pelantikan kepala daerah:

---

[238]Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, dan Izin Ganguan Kantor Presiden, 15 MARET 2016* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[239]Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinn terkai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, dan Izin Ganguan Kantor Presiden, 15 MARET 2016* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[240] Joko Widodo, *Amanat Presiden Republik Indonesia Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Reublik Indonesia Hasil Pilkada Serentak Istana Negara, Jakarta 12 Februari 2016,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10864&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

> "Setelah pilkada serentak berakhir, ini saatnya kita melangkah bersama untuk melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang mahaberat, mewujudkan janji-janji Saudara untuk mencapai kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang Saudara pimpin. Ini saatnya Saudara-saudara harus berjanji bekerja siang dan malam untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok wilayah bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari, memastikan semua rakyat di daerah yang Saudara-saudara pimpin mendapatkan air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau, serta bisa mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik. Jangan lupa, rakyat juga mengharapkan daya beli yang semakin kuat dengan tingkat inflasi yang rendah, terkendali, pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk menyerap pengangguran, langkah yang lebih konkret dalam mengentaskan kemiskinan, terobosan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kesenjangan sosial".[241]

Demikianlah fiqih kenegaraan Joko Widodo dalam artian orientasi kerja kepala negara atau kepala pemerintahan harus memiliki oreintasi yang sama dengan amanah UUD-NRI 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Amanah untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur juga menjadi bagian dari nalar fiqih ke-NU-an.

Secara umum, arah gagasan dan kebijakan Presiden Joko Widodo berorientasi pada pembangunan tata laksana pemerintahan yang besifat melayani rakyat secara efeksif dan efesien. Demikianlah salah satu contoh kebijakan yang disampaikan dalam pidato Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2017 yang dalam isinya ada arahan untuk mencapai target kerja sebagai berikut: *Pertama*, ada sebuah perubahan total dalam

---

[241]Joko Widodo, *Amanat Presiden Republik Indonesia Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Reublik Indonesia Hasil Pilkada Serentak Istana Negara, Jakarta 12 Februari 2016,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10864&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

mengendalikan anggaran dan tidak diberikan pada bawahan. Artinya, arah kebijakan itu dipegang penuh oleh pimpinan, sehingga bawahan hanya memberikan rincian, tetapi kebijakan (*policy*) yang berkaitan dengan anggaran itu dipegang pimpinan. *Kedua*, program kerja tidak boleh berdasarkan *money follows function.* Dalam hal ini, organisasi ini perlu, tetapi perlu kita sampaikan bahwa kita harus mempunyai prioritas dan fokus dalam kinerja. Oleh sebab itu, yang betul mestinya *money follows program dalam menjalankan program kerja*. Inilah hal-hal yang perlu disiapkan secara matang.[242]

Dalam nalar teori kritis, kebijakan Joko Widodo dari *money follows function kepada money follows program* merupakan bagian dari nalar keilmuan yang tidak hanya mau menjelaskan fenomena perlunya perubahan arah sistem pembangunan negara yang berpihak pada masyarakat, tetapi juga sekaligus pembangunan nalar keilmuan dan sistem yang hendak dilakukan perubahan dalam pembangunan negara, terutama dalam bidang ekonomi untuk menuju kemakmuran dan keadilan.

Dalam tata hubungan internasional, sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia sangat mendukung kemerdekaan, perdamaian dunia dan keadilan sosial. Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi penengah dari konflik di berbagai belahan dunia. Peran Indonesia itu akan dilakukan baik dalam bentuk pengiriman pasukan perdamaian, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, seruan pada saudara-saudara Muslim di Timur Tengan untuk berdamai maupun memberikan kepemimpinan di Samudra Hindia, di mana Indonesia akan menjadi pemimpin *Indian Ocean Rim Association* Periode 2015-2017.[243]

---

[242] Joko Widodo, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Paripurna Kabinet Kerja tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Daftar Negatif Investasi (DNI, serta Percepatan Integrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kantor Presiden, Jakarta 10 Februari 2016*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10871&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[243] *Jokowi Serukan Muslim di Timur Tengah Berdamai Demi Ukhuwah Islamiyah*, http://news.detik.com/berita/2991945/jokowi-serukan-muslim-di-timur-tengah-

(Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)[244]

Dalam menjaga dan mempertahankan NKRI, Presiden Joko Widodo juga berkomitmen untuk membangun kekuatan pertahanan negara yang tangguh dengan memberdayakan alutsista produksi dalam negeri untuk mendukung kekuatan dalam menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan bangsa, yakni kekuatan pertahanan negara yang mampu mengamankan dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta mampu melindungi sekitar 250 juta warganya dengan senantiasa menjunjung tinggi karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa yang cinta damai.[245] Oleh sebab itu, untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI sebagai wujud *hubbul wathan min al-iman* (cinta tanah air sebagai bagian dari iman), maka ia menegaskan perlunya mempertahankan keberadaan satuan

berdamai-demi-ukhuwah-islamiyah, diakses 8 Juni 2016.

[244] Dalam Acara Pidato Kenegaraan, *Jokowi Serukan Muslim di Timur Tengah Berdamai Demi Ukhuwah Islamiyah*, http://news.detik.com/berita/2991945/jokowi-serukan-muslim-di-timur-tengah-berdamai-demi-ukhuwah-islamiyah, diakses 8 Juni 2016.

[245] *Jokowi Serukan Muslim di Timur Tengah Berdamai Demi Ukhuwah Islamiyah*, http://news.detik.com/berita/2991945/jokowi-serukan-muslim-di-timur-tengah-berdamai-demi-ukhuwah-islamiyah, diakses 8 Juni 2016.

teritorial untuk mendeteksi dini ancaman-acaman terhadap keutuhan wilayah NKRI dan ketahanan bangsa.

> ".....tentang satuan teritorial. Ini perlu saya tegaskan bahwa saya berkeyakinan bahwa satuan teritorial itu tetap sangat, dan sangat penting, untuk dipertahankan keberadaannya. Sebagai apa? Sebagai deteksi dini terhadap ancaman-ancaman terhadap negara kita. Deteksi dini adanya potensi ancaman terhadap bangsa dan negara, ancaman terhadap keutuhan NKRI, dan adanya gangguan keamanan di dalam negeri kita. Memang ada kajian-kajian akademik sebagai masukan, sebagai pendapat, sebagai bahan pertimbangan, tetapi sekali lagi saya sampaikan saya memilih untuk tetap mempertahankan keberadaan satuan teritorial TNI".[246]

Hal ini juga menjadi komitmen fiqih ke-NU-an melalui Jam'iyyah NU yang terus bertekad dan berjuang mendukung dan membangun keutuhan NKRI dan ketahanan bangsa dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang mendukung terwujudnya keadilan dan kemakmuran, *baldatun thayyibatun.*

Dalam membangun negara yang adil dan makmur tersebut, KH Hasyim Muzadi dengan menyitir pedapat KH MA Sahal Mahfudz juga berpendapat bahwa NU berusaha terus berada pada tingkat *high politics* bukan *low politics* (praktis). Sebagai negarawan, konsep KH MA Sahal Mafudz dalam membangun hubungan agama dan negara sangat jelas, yaitu beraliran inklusif-substantif, sehingga negara dapat berjalan dengan baik tanpa berhadap hadapanan dengan agama, dan menjamin agama tidak ditinggalkan oleh negara. Inilah pemikiran moderat, bukan ekstrim dan bukan pula liberal. Dengan demikian, harus ada

---

[246] *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Acara Buka Puasa Bersama dengan Prajurit TNI dan PNS Mabes TNI, 27 Juni 2016, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Oleh: Humas ; Diposkan pada: 27 Juni 2016; 2026 Views Kategori: Transkrip Pidato*, http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-acara-buka-puasa-bersama-dengan-prajurit-tni-dan-pns-mabes-tni-27-juni-2016-di-plaza-mabes-tni-cilangkap-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

sinergi antara agama dan negara serta berusaha memberdayakan dan mengayomi seluruh warga negara.[247]

G. FIQIH DAKWAH BLUSUKAN KIAI

Dalam penulisan gagasan dan kebijakan Joko Widodo ini merupakan bagian kegian dari *dakwah bil maqalah* (dakwah dengan tulisan). Bagaimana hukumnya mengungkapkan jejak langkah dan amal perbuatan baik seseorang, yang dalam hal ini menceritakan dan menjelaskan amal shaleh Joko Widodo kepada publik? Menurut Hadits Nabi saw, hukumnya dibolehkan menarasikan dan mempublikasikan amal shaleh seseorang dalam berbagai media, apalagi untuk kepentingan memberikan suri tauladan, malah itu akan mendapatkan pahala, karena dengan demikian, hal itu akan dapat memotivasi orang lain untuk meniru dan mengerjakan amal shaleh itu. Hadits Nabi saw menyatakan yang artinya.

> "Utsman r.a. juga memuji dirinya. Dia berkata, 'apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, 'Barangsiapa yang menggali sumur rumah, maka baginya surga, maka aku pun menggalinya. Apakah kamu tidak tahu bahwa beliau bersabda, 'Barangsiapa yang memperlengkapi tentara yang kesulitan, maka baginya surga, 'maka aku pun memperlengkapinya. 'Orang-orang pun membenarkan perkataannya (HR Bukhari)".[248]

Ibnu Hajar dalam karyanya *Fathul Bari* menerangkan bahwa hadits tersebut menerangkan kebolehan sesorang menceritakan atau mempublikasikan berbagai kegiatan atau perbuatan baiknya jika hal itu diperlukan. Cerita/publikasi itu bertujuan untuk menepis kemudlaratan,

---

[247] *Kesan KH Hasyim Muzadi terhadap Mbah Sahal*, http://news.okezone.com/read/2014/01/24/337/931308/kesan-kh-hasyim-muzadi-terhadap-mbah-sahal, diakses 20 Juni 2016.

[248] Sayyid Muhammad Nuh, *Afatun 'ala Thariq* yang sudah diterjemahkan menjadi *Penyebab Gagalnya Dakwah*, terj. Nur Aulia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 397-398.

fitnah, atau untuk meraih keuntungan yang mana dengan publikasi itu dapat memberikan motivasi bagi lainnya untuk berbuat baik.[249]

Menceritakan dan menarasikan Joko Widodo sebagai suri tauladan yang baik bagi umat dan masyarakat dalam hukum fiqih tersebut merupakan bagian dari *dakwah bil maqalah.* Hal itu penting karena suri tauladan yang baik dari pemimpin itu sangat berguna dan sangat berpengaruh terhadap bawahan atau rakyat. Salah satu suri tauladan yang dapat diambil dari Joko Widodo dalam hal ini adalah bagaimana kita umat Islam atau masyarakat Muslim diharuskan memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi untuk membangun umat yang terbaik.

> "Sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik, umat yang senantiasa membangun solidaritas sosial di antara sesama manusia, umat yang tidak gampang dilanda kebencian, tidak gampang dilanda kedengkian, umat yang berkehendak merangkul, dan bukan memukul eksistensi kelompok lain".[250]

Pernyataan yang mengatakan: "kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai umat yang terbaik" menunjukkan bahwa tanggung jawab bukan hanya manajerial, tetapi juga tanggung jawab pelaksanaan tugas beserta konsekuensinya. Sikap tanggung jawab itu ternyata menjadi rahasia mengapa Islam diturunkan di Jazirah Arab, menurut Sayyid Muhammad Nuh, sikap tanggung jawab itu melekat dalam tradisi masyarakat Arab.[251]

> "Nenek moyang bangsa Arab di Jazirah Arab meraih kepercayaan diri, kehormatan, dan ketinggian sejak masa sebelum Islam. Oleh karena, mereka membiasakan diri bertanggung jawab sejak usia dini dan membinanya secara berkesinambungan.

---

[249] Sayyid Muhammad Nuh, *Afatun 'ala Thariq* ..., hlm. 398.

[250] Joko Widodo, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

[251] Sayyid Muhammad Nuh, *Afatun 'ala Thariq* ..., hlm. 400-401.

> Kemudian Islam datang dan semakin mengokohkan hal tersebut dan mengubahnya dari sekadar tradisi dan kebiasaan menjadi syariat dan agama....Dari biografi Nabi saw kita mengetahui bahwa ketika muda beliau mengembala kambing, berniaga, membantu merenovasi Ka'bah, dan berpartisipasi dalam perang al-Fujjar.... Pekerjaan-pekerjaan tersebut ikut andil dalam menyiapkan dirinya untuk memikul amanat dakwah, penyampaian risalah dan jihad di kemudian hari".[252]

Dalam hal ini, Sayyid Muhammad Nuh menjelaskan mengenai tanggung jawab yang diatur dan disyariatkan oleh agama Islam sebagai hal yang penting. Allah berfirman.[253]

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

> Artinya: Dan Katakanlah: «Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. at-Taubah [9]: 1-5)

Di samping tanggung jawab yang menjadi perhatian Nabi Saw dalam memegang teguh perintah Allah, juga bekerja komprehensif dan utuh menjadi perhatian yang dalam ilmu teologi yang disebut teologi transformatif. Dalam rangka menyiapkan *khairah ummah*, Nabi saw menyiapkan langkah-langkah yang harus dimiliki orang yang hendak berdakwah terutama ulil amri, baik fuqaha' maupun umara'/ pemerintah, yakni membuat persiapan, penyempurnaan, pewaspadaan, dan menyusun perencanaan terhadap persoalan mulai yang sederhana hingga masalah-masalah yang kompleks, dari masalah yang mudah hingga masalah yang rumit. Kecermatan dan kesempurnaan kerja

---

[252] Sayyid Muhammad Nuh, *Afatun 'ala Thariq* ...., hlm. 401.

[253] Sayyid Muhammad Nuh, *Afatun 'ala Thariq* ...., hlm. 401.

menjadi perhatian Nabi saw yang bersabda: *inna Allah yuhibbu idza 'amala ahadukum 'amalan ayyutqinahu* (yang artinya: Allah sesungguhnya senang jika salah seseorang di antara kamu melakukan suatu pekerjaan supaya melakukannya dengan cermat dan sempurna). Allah berfirman: [254]

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S. al-Anfal [8]: 60)

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:....dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S. al-Baqarah [2]: 195)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama! (Q.S. An-Nisa' [4]: 71).

---

[254] Sayyid Muhammad Nuh, *Afatun 'ala Thariq* ...., hlm. 407-408.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa "sebagai umat Nabi Muhammad, kita mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan karena harus mampu menunjukkan sebagai **umat yang terbaik**" memiliki muatan makna yang mendalam dan merupakan kerja-kerja para para Nabi, shabat, dan tabi'in yang kemudian dilanjutkan oleh ulama/kiai sebagai pewaris para Nabi (*al-'ulama warasah al-anbiya'*), sehingga program kerja umat atau masyarakat yang dikehendaki di sini adalah program kerja yang bisa membangun budaya umat yang terbaik sebagaimana firman Allah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

> Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma›ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah (Q.S. Ali Imran [3]: 110).

Berdasarkan ayat tersebut, KH Said Aqiel Siraj menyatakan bahwa membangun *khaira ummah* merupakan kerja-kerja dakwah terutama kiai/ulama yang pada umumnya berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah misi dakwah berikut: menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, dan beriman pada Allah swt. Para kiai atau ulama memiliki perhatian khusus terhadap pembangunan *khaira ummah,* bahkan para kiai rela berkorban untuk "masuk-masuk ke pedalaman" atau blusukan untuk menyampaikan misi dakwah dan mengajarkan agama bagi masyarakat, ilmu-ilmu kemasyarakatan, dan juga mengajarkan wirausaha sebagaimana dilakukan KH Zaini Mun'im, Pendiri Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur, bahkan tidak hanya itu, tetapi ibu nyai (istri kiai) juga ber-*dakwah bil hal* yang selama ini dilakukan "Muslimat dalam menjaga keluarga dan lingkungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan" sebagaimana telah disinggung

Joko Widodo dalam sambutannya pada acara Harlah Muslimat NU ke 70 di Malang.[255]

(Presiden Joko Widodo (kanan) menabuh rebana bersama Ketua PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa (tengah) dan Gubernur Jatim Sukarwo (kiri) saat acara Harlah Muslimat NU ke-70 di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Sabtu (26/3). Harlah tersebut diikuti sekitar 50 ribu peserta.(ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/aww/16).[256]

Semua langkah-langkah itu adalah untuk membangun *khaira ummah* yang dalam hal ini perlu dilakukan sebagai berikut.

> "Pertama yang harus ditempuh guna mewujudkan atribut "*khaira ummah*" haruslan ber-*iqamatul ma'ruf* (menegakkan kebajikan). *Iqamatul ma'ruf* di sini dalam arti yang luas sekali, termasuk perbaikan bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, ilmu pengetahuan, dan aspek kehidupan lainnya yang akan mengangkat kemaslahatan bersama. Setelah langkah pertama sukses, terus meningkat langkah kedua, *nahi al-munkar* (mencegah kemungkaran). Kemungkaran di sini

[255]Risalah NU, Edisi 60 1437 H/ Mei 2016, hlm. 28

[256] http://www.antaranews.com/berita/551885/presiden-jokowi-hadiri-harlah-ke-70-muslimat -nu, diakses 18 Juli 2016.

termasuk kemiskinan, kebodohan, kemalasan dalam berbuat baik, maupun *akhlakul madzumah* lainnya. Setelah menggarap langkah pertama dan kedua barulah menginjak langkah ketiga, *tu'minuna billah*. Artinya jangan harap *tu'minuna billah* berhasil sebelum *iqamatul ma'ruf* dan *nahi al-munkar* digarap terlebih dahulu. Implementasinya, industrialisasi boleh saja merubah cara hidup manusia, namun keimanan yang tertancap dalam *qalbu* tidak tergusur".[257]

Secara konseptual, dalam rangka membangun *khaira ummah*, Zuhairi Misrawi berpendapat bahwa umat yang terbaik adalah umat yang memiliki sikap toleransi yang aktif, yakni selalu menerima dan mengakui adanya perbedaan, serta bisa bekerjasama dalam hal-hal yang bersifat umum sebagaimana para kiai yang terlibat langsung dalam pentas politik nasional, seperti KH A Wahid Hasyim yang telah terlibat aktif dalam kekuasaan dan berkomitmen untuk membangun dan memajukan umat dan bangsa melalui pengamalan ideologi Pancasila, berdasarkan UUD-NRI 1945, dalam wadah NKRI dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bukan toleransi pasif yang mana seseorang menerima keberagaman sebagai realitas faktual yang harus diterima, tetapi tidak ada upaya saling mengenal dan tidak mau kerjasama.[258]

Dengan berdasarkan tuntunan al-Qur'an, Joko Widodo yakin akan mampu membangun peradaban umat, masyarakat dan bangsa yang maju, sehingga pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, investasi, infrastruktur antar wilayah dan pengentasan kemiskinan akan dapat diwujudkan dengan baik dan penuh tanggung jawab dari para pelaksananya di lapangan.

Membangun infrastruktur untuk mewujudkan hubungan konektivitas antarwilayah di tanah air. Membangun sumber daya manusia Indonesia agar bisa bersaing dengan negara-negara yang lain....Saya yakin apabila kita bersandar terus pada tuntunan Al Quran, insya Allah di ujung jalan, di ujung

[257]Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial...*, hlm. 221.

[258]Zuhairi Misrawi, *al-Qur'an Kitab Toleransi....*,hlm.166.

jembatan, di ujung pelabuhan, Indonesia akan menjadi lebih baik. Indonesia akan bebas dari kemiskinan. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bahagia lahir dan batin.[259]

Program kerja Joko Widodo itu mencerminkan ajaran Nabi Muhammad saw dan para ulama/kiai dalam membangun umat/masyarakat dan bangsa untuk menuju keadaan yang bebas dari kemiskinan, sehingga menjadi bangsa yang maju dan bahagia lahir-batin. Alwi Shihab menyatakan bahwa spiritualitas al-Qur'an tidak hanya bermakna esoteris, tetapi juga sekaligus eksoteris. Dengan demikian, spiritualitas al-Qur'an mengandaikan aspek konsep dan praktis.[260]

Secara historis, peran kiai/ulama Nusantara telah terbukti berpegaruh secara internasional di bidang ilmu pengetahuan agama, yang mana kiai Nusantara menjadi rujukan belajar di Suadi Arabiyah, khususnya Masjidil Haram, di antaranya:

"Syaikh Nawawi al-Bantani al-Makki, Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Lathif al-Minangkabawi, Syaikh Mahfudz at-Turmusi al-Makki, Syaikh Abdul Hamid al-Qudsi al-Makki, Syaikh Muhsin al-Musawa al-Palimbangi al-Makki, Syaikh Abdullah Muhaimin bin Abdul Aziz al-Lasemi al-Makki, Syaikh Baqir bin Muhammad Nur al-Jukjawi al-Makki, Syaikh Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki, Syaikh Ahmad bin Abdul Gaffar al-Sambasi al-Makki, Syaikh Ismail al-Khalidiyah al-Minagkabawi al-Makki, Syaikh Muhammad Mukhtar bin 'Atharid al-Bughur al-Makki, Syaikh Junaid al-Batawi, Syaikh Abdul Karim al-Bantani al-Makki, Syaikh Ali bin Abdullah al-Banjari al-Makki, Syaikh Muhammad Ahyad bin Muhammad Idris al-Bughuri al-Makki, Syaikh Abdul Ghani al-Bimawi al-Makki, Syaikh

---

[259] *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Nuzulul Quran* Tahun 1437 H/2016 M, Selasa, 21 Juni 2016, di Istana Negara Jakarta**,** oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **21 Jun 2016 ; 2406 Views**Kategori: Transkrip Pidato**,**http://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowi-pada-peringatan-nuzulul-quran-tahun-1437-h2016-m-selasa-21-juni-2016-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

[260] Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat: Menepis Tudingan, Meluruskan Pemahaman*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 233-238.

Jinan Muhammad Thayyid al-Sariaki al-Makki, Syaikh Asy'ari bin Abdurrahman al-Baweani al-Makki, Syaikh Abu Bakar bin Syihabuddin at-Tambusi al-Makki, Syaikh Ahmad Nahrawi al-Banyumasi al-Makki, Syaikh Muhammad Zainuddin al-Baweani al-Makki, Syaikh Abdul Qadir al-Mandili al-Makki, Syaikh Abdullah bin Hasan al-Jawi al-Makki, Syaikh Muhammad bin Muhammad al-Jawi al-Makki, Syaikh Marzuki al-Jawi al-Makki, dan Syaikh Muhammad bin Umar al-Sumbawi al-Makki".[261]

Salah satu ulama selain Syaikh Nawawi al-Bantani yang sangat produkif dalam bidang karya keilmuan Islam/kitab di antara ulama Nusantara, juga ada ulama Nusantara abad ke-19 yang sangat anti terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda, KH. Ahmad Rifa›i (1786-1870) Kalisalak, Batang, Jawa Tengah yang menurut Karel A. Steenbrink dalam bukunya yang berjudul *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* juga merupakan salah satu ulama yang produktif dalam menulis karya kitab. Selama hidup di pengasingan Ambon, Ahmad Rifa›i masih tetap konsisten menulis. Sartono Kartidirjo dalam bukunya *Protest Movements in Rural Java* menyebutkan kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa›i yang masih disimpan di Universitas Leiden Belanda antara lain:[262]

1. No. 1139 Riayatal Himmah, tahun 1849 M
2. No 6944, Riayatul Himmah, tahun 1849 M
3. No. 5866, Riayatal Himmah, tahun 1849 M
4. No. 11002, Riayatal Himmah, tahun 1849 M
5. No. 11003, Riayatal Himmah, tahun 1849 M
6. No. 8566, Riayatal Himmah, tahun 1849 M
7. No. 6617, Nadzam Kaifiyah, tahun 1845 M
8. No. 7520, Tanbih Bahasa Jawa

---

[261] *Pengaruh Ulama Nusantara dalam Perjuangan Melawan Penjajah*, Majalah Risalah NU, Edisi 60 Tahun X 1437 Tahun 2016, hlm. 15.

[262] *33 Kitab Karya KH Ahmad Rifa›i Kalisalak yang Tersimpan di Leiden*, http://www.nu.or.id/post/read/69671/33-kitab-karya-kh-ahmad-rifai-kalisalak-yang-tersimpan-di-leiden, diakses 18 Juli 2016.

9. No. 11004, Tanbib Bahasa Jawa
10. No. 7521, Husnul Mithalab, tahun 1842 M
11. No. 8570, Husnul Mithalab, tahun 1842 M
12. No. 8590, Husnul Mithalab, tahun 1842 M
13. No. 7522, Takhyirah Mukhtasar, tahun 1848 M
14. No. 11004, Takhyirah Mukhtasar 1848 M
15. No. 11004, Takhyirah Mukhtasar, tahun 1848 M
16. No. 7523, Abyanal Hawaij, tahun 1849 M
17. No. 7524, Nadzam Irfaq, tahun 1845 M
18. No. 8489, Munawirul Himmah, tahun 1856 M
19. No. 5865, Athlab, tahun 1842 M
20. No. 8566, Nadzam Tazkiyah, tahun 1852 M
21. No. 8567, Tasyrihatal Muhtaj, tahun 1849 M
22. No. 8568, Syarihul Iman, tahun 1839 M
23. No. 8569, Tasfiyah, tahun1849 M
24. No. 11001, Bayan, tahun1839 M
25. No. 11001, Imdad, tahun 1845 M
26. No. 11004, Thariqat, tahun 1840 M
27. No. 8571, Tahshinah (memperbagus bacaan), tahun 1850 M
28. No. 11004, Tanbihun Bahasa Melayu, tahun 1860 M
29. No. 11001, Prose Epistle (?), tahun 1938 M
30. No. 11004, Lembar, 300 hal
31. Tanpa nomer, Shihhatun Nikah
32. Tanpa Nomer, Tajwid (ringkasan Tahsinah)
33. Tanpa Nomer, Nadzam Wiqayah.[263]

[263] *33 Kitab Karya KH Ahmad Rifa›i Kalisalak yang Tersimpan di Leiden*, http://www.nu.or.id/post/read/69671/33-kitab-karya-kh-ahmad-rifai-kalisalak-yang-tersimpan-di-leiden, diakses 18 Juli 2016.

Selanjutnya, munculnya ulama pesantren KH Hasyim Asy'arie tidak lepas dari hubungan ulama Nusantara di Makkah, di antaranya Syaikh Mahfudz Tremas, Syaikh Khalil Bangkalan, Syaikh Saleh Darat, Syaikh Zainuddin Sumbawi, dan Syaikh Nawawi Banten. Hubungan guru-murid, kiai-santri, yang kokoh menjadi pondasi jejaring ulama Nusantara, di antaranya Syaikh Mahfudz, Syaikh Saleh Darat, Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Ahmad Khatib Sambas, Tuanku Guru Zainuddin Sumbawa, Syaikh Abdul Ghani Bima dan ulama lainnya yang telah memberikan dasar-dasar jejaring ulama Nusantara, yang kemudian berkembang menjadi komunitas ulama. Dengan komunitas ulama itu, KH Hasyim Asy'arie dengan bimbingan KH Muhammad Khalil Bangkalan menginisiasi/merintis berdirinya lembaga ulama yang kemudian terbentuklah Nahlatul Ulama sebagai wadah perkumpulan ulama Nusantara yang berjuang untuk memajukan syiar agama Islam, keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran umat dan bangsa di negeri ini.[264]

Dalam koordinasi Ormas NU, para kiai atau santri berperan penting tidak hanya dalam dakwah penyebaran agama Islam, tetapi juga dalam mengawal perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI. Para kiai dan santri menjadi benteng pertahanan NKRI selama berabad-abad, dari serbuan kolonial, agresi militer hingga ancaman rongrongan terhadap ideologi Pancasila.[265]

Kiai/ulama beserta santri menjadi salah satu elemen yang sangat disegani Belanda, terutama yang mengikuti tarekat. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro, Mursyid Tarekat Qodiriyah,[266] yang telah berpejuang melawan Belanda selama masa 5 tahun (1825-1830), bahkan Belanda hampir mengalami kekalahan.[267]

---

[264] *Pengaruh Ulama Nusantara dalam Perjuangan Melawan Penjajah*, Majalah Risalah NU, Edisi 60 Tahun X 1437 Tahun 2016, hlm. 19.

[265] *Teladan Perjuangan Para Santri*, Majalah Risalah NU, Eidisi 61 Tahun X 1437 H, Juni 2016, hlm. 60.

[266] *Ulama Nusantara dalam Perjuangan,* Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X 1437 H, Mei 2016, hlm. 23-25.

[267] *Ulama Nusantara dalam Perjuangan,* Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X

Ki Hajar Dewantara juga seorang santri dari Kiai Sulaiman Zainuddin di Daerah Kalasan, Perambanan, Utara Kota Yogyakarta dan santri dari Kiai Onggamaya di Bagelan yang berhasil menanamkan pentingnya pendidikan di negeri ini. Demikian juga penyusun lagu syukur dan lagu Hari Kermedekaan, 17 Agustus tahun 45 adalah Sayyid Husein al-Mutahhar, cucu Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad saw, bahkan ketika Bung Karno hendak membaca teks Proklamasi Kemerdekaan RI minta didampingi putra kiai, Bung Hatta. Bung Hatta adalah putra dari Buya Haji Jamil, Guru Tariqah Nasyabandiyah Kholidiyah.[268]

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Bung Karno sempat diasingkan selama masa 1938-1942 di Bengkulu. Walaupun di pengasingan, beliau tetap berkarya dalam waktu senggangnya, yang salah satunya, adalah melakukan renovasi Masjid Jami' Bengkulu dengan arsitektur filosofi Islam, yang tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya, di samping mengajar di Sekolah Muhammadiyah. Selain itu, "Rumah ibu negara pertama Fatmawati, berada di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang menyimpan mesin jahit sang saka merah putih untuk dikibarkan saat Proklamasi 17 Agustus 1945".[269] Oleh sebab itu, Masjid Jami' Bengkulu,[270] Rumah Kediaman Bung Karno, dan Rumah Kediaman

---

1437 H, Mei 2016, hlm. 23-24.

[268] *Ulama Nusantara dalam Perjuangan,* Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X 1437 H, Mei 2016, hlm. 23-24.

[269] *Rumah Fatmawati Sukarno,* http://bengkuluprov.go.id/2016/02/08/rumah-fatmawati-sukarno/, diakses 18 Juli 2016.

[270] Selama di Pengasingan, Bung Karno mengisi waktu luangnya dengan menjar di Sekolah Muhammadiyah Bengkulu, dan juga mengingat Masjid Jami Bengkulu sudah nampak banyak yang rusak pada waktu itu, maka ia membuat rancang ulang, atap dan tiang yang dibuat dengan filosofi dalam ajaran Islam. "Atapnya dibuat bentuk limas dengan tiga lapisan yang menyimbolkan iman, Islam, dan ihsan. Bangunan Masjid Jami Bengkulu terdiri dari tiga bagian: ruang utama untuk salat, serambi, dan tempat berwudu. Bangunan utama berukuran 14,65 X 14,65 meter dengan tiga pintu masuk. Di dalamnya terdapat mihrab dengan lebar 1,6 meter dan tinggi 2,5 meter. Sebuah mimbar bercorak Istanbul, Turki, berdiri indah di sebelah kanan mihrab. Sementara, bagian serambi berbentuk persegi panjang dengan ukuran 11,46 X 7,58 meter. Di luar serambi terdapat sebuah bedug dengan diameter 80 sentimeter." Eko (Reporter), *Masjid Jami Bengkulu Karya Presiden Sukarno,* http://www.dream.co.id/jejak/masjid-

Ibu Fatmawati Soerkarno menjadi destinasi wisata yang monumental di Propinsi Bengkulu.

Tampak Bagian Depan Masjid Jami' Bengkulu

Tampak Bagian Dalam Masjid Jami' Bengkulu

jami-bengkulu-karya-presiden-sukarno-141113y.html, diakses 18 Juli 2016.

Tampak Bagian Depan
Rumah Kediaman Bung Karno

Tampak Bagian Dalam
Rumah Kediaman Bung Karno

Sepeda Bung Karno
Di Rumah Kediaman Bung Karno

Rumah Kediaman Ibu Fatmawati Soekarno

Dengan demikian, para ulama/kiai dan santri di seluruh Nusantara merupakan salah satu elemen terpenting yang bersatu padu dalam berjuang melawan penjajah, terutama Belanda dan Jepang. Salah

satu dari mereka misalnya ulama-ulama dari Aceh. Dalam meraih kemerdekaan, ulama Aceh juga besar perannya termasuk ketika sudah merdeka untuk mempertahankan Kemederkaan RI.[271] Melihat Belanda yang terang-terangan merongrong Kemerdekaan RI dengan kekuatan Senjata, Ulama Aceh kemudian mengadakan rapat tanggal 15 Oktober 1945 yang menghasilkan *Makloemat Bersama* yang isinya menyebutkan bahwa perjuangan melawan para penjajah Belanda yang hendak kembali ke Indonesia adalah *Perang Sabil* dan orang yang mati dalam peperangan itu dihukumi mati syahid.[272] Lebih dari itu, mengingat gentingnya suasana tanah air, terutama pertempuran tanggal 10 Novemver 1945 di Surabaya, ulama Aceh kemudian membentuk Laskar Mujahidin tanggal 17 November 1945.[273]

Selain para kiai atau ulama, para santri dari Pesantren juga turut serta dalam melawan penjajah di antaranya adalah Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri Jawa Timur yang berdiri pada tahun 1927,[274] dan Pesantren Nurul Jadid Probolinggo dengan komando KH Zaini Mun'im yang menjadi pimpinan barisan Pembela Tanah Air (PETA) dan pimpinan Sabilillah di kawasan Madura dan Pantura.[275]

Dari sisi dakwah dan pengajaran ilmu-ilmu agama Islam/fiqih serta ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti bertani, nelayan dan tata cara menanam tembakau serta kebijakan perekonomian, para kiai juga memberikan perhatian serius, seperti yang dilakukan KH Zaini Mun'im.[276] Spirit dan perjuangan dakwah para kiai hampir sama

---

[271] Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 79-81.

[272] Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial...*, hlm. 81.

[273] Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial...*, hlm. 83.

[274] Aji Setiawan, "Mengaji dan Menjaga Moralitas Bangsa", Rubrik Pesantren, *Majalah Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012, hlm. 77.

[275] *Biografi KH Zaini Mun'im,* http://www.nuruljadid.net/biografi-kh-zaini-munim.html, diakses 8 Juni 2016

[276] *Biografi KH Zaini Mun'im,* http://www.nuruljadid.net/biografi-kh-zaini-munim.html, diakses 8 Juni 2016; lihat juga *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*,

semuanya, yakni menyampaikan syiar agama Islam, yakni bagaimana umat Islam menjalankan agama Islam secara sempurna baik secara ritual seperti ibadah shalat, puasa, zakat dan haji maupun secara sosial kemasyarakatan bisa berdaya seperti terbangunnya kesejahteraan ekonomi bagi petani kecil, pedagang kecil, dan nelayan kecil. Para kiai itu rela berkorban masuk ke pedalaman, pedesaan, pesisiran, dan pegunungan untuk memberikan pencerahan dan wawasan keilmuan agama Islam serta ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan agar umat bisa beragama dengan baik dan bisa maju secara sosial kemasyarakatan dengan ilmu pengetahuan.

Oleh sebab itu, para kiai pesantren sejak masa-masa sebelumnya, KH Hasyim Asy'arie, KH A Wahid Hasyim dan hingga masa kini tetap mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum yang dibutuhkan masyarakat. Demikian juga KH Zaini Mun'im -sebagai muridnya KH Hasyim Asy'arie dan KH A Wahid Hasyim yang juga pendiri Pesantren Nurul Jadid Probolinggo- beserta pesantren lainnya sejak berdirinya juga bergelut dengan pendidikan agama dan ilmu-ilmu umum sebagai wujud tanggung jawab terhadap pembinaan dan pembangunan *khaira ummah*, sebab pembangunan *khaira ummah* itu tidak akan pernah terwujud tanpa terpenuhinya lima unsur pokok pembangunan kebutuhan manusia yang tertera dalam ilmu fiqih, *al-dlaruriyah al-khams* yakni *hifdz al-din* (memlihara agama) dengan cara mengajarkan dakwah agama Islam beserta dengan syiar-syiarnya, *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) dengan adanya pembangunan kesehatan jasmani yang dalam hal ini diwujudkan dengan program *Kartu Indonesia Sehat*, atau pendidikan kemiliteran ketika masa penjajahan untuk jihad fisabilillah melawan penjajah, *hifdz 'ird* dan *nasl* (memelihara kehormatan dan keturunan) dengan mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas, (*hidfz 'aql*) dengan program pendidikan ilmu baik ilmu agama maupun ilmu umum bagi umat dan bangsa dengan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, *Kartu Indonesia Pintar*, dan *hifdz al-mal* (memeihara harta) dengan cara bekerja dan mengajarkan

http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016.

kerja yang baik dan profesional untuk mendapatkan rezki yang halal dan barakah. Salah satu misalnya bisa berwujud pemberdayaan nelayan yang sedang dilakukan dalam program pemerintahan Joko Widodo dengan harapan; ada pemberian wawasan kenelayanan, pemberian bantuan peralatan nelayan, dan pemberian akses modal dari pemerintah, dan pembangunan infrastruktur ke pelabuhan dan ke pasar ikan yang baik.

Lima unsur pokok tersebut inilah yang menjadi misi dakwah dan perjuangan para kiai dan santri dalam memperjuangan, mempertahankan dan memajukan kermerdekaan RI. Indikasi dakwah dan perjuangan itu tergambar dari semangat dakwah KH Zaini Mun'im, yang menyatakan bahwa *"orang yang hidup di Indonesia kemudan tidak melakukan perjuangan, dia telah berbuat maksiat. Orang yang hanya memikirkan masalah ekonominya saja dan pendidikannya sendiri, maka orang itu telah berbuat maksiat. Kita harus memikirkan perjuangan rakyat banyak"*.[277]

Dalam konteks ini, spirit blusukan Joko Widodo selama ini yang hendak hadir langsung ke masyarakat mengandung misi perjuangan, pemberdayaan dan pembangunan dalam segala aspek bagi umat, masyarakat dan bangsa. Hal ini pada dasarnya memiliki kesamaan spirit dengan misi dakwah para ulama dan kiai sebagai pewaris para Nabi, misalnya KH Zaini Mun'im (1906-1976) yang dalam sejarahnya telah melakukan misi dakwah blusukan "*yang tak mengenal lelah, naik-turun gunung, keluar masuk pelosok desa menjalankan misi kerisalahan Nabi Muhammad saw menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan advokasi kepada masyarakat, memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat....membela hak-hak rakyat, khususnya pada saat itu pembelaan terhadap petani tembakau*".[278]

---

[277] *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016.

[278] *KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu*, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016.

KH Said Aqil Siraj, Ketua Umum PBNU, juga menyatakan hal yang sama, bahwa perjuangan para kiai dan ulama bersama para santrinya senantiasa berusaha menegakkan syiar-syiar agama, keimanan, keadilan dan pemberdayaan kaum du'afa' menuju umat yang terbaik (umat yang maju dan unggul) yang semuanya itu merupakan realisasi dari misi dakwah Nabi Muhammad saw, sahabat, tabi'in dan *salafus shaleh*.[279]

Dengan demikian, arahan Joko Widodo yang menyatakan; "Sekarang kita perlu tuntunan Al Quran untuk menata kehidupan bangsa Indonesia agar lebih maju, lebih toleran, dan bebas dari kemiskinan" pada dasarnya juga menjadi bagian dari misi dakwah ulama dan kiai beserta para santrinya untuk mewujudkan nilai-nilai al-Qur'an dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta pembangunan peradaban umat Islam/bangsa Indonesia menuju *khaira ummah*.[280] Dengan kerangka keilmuan Imam Suprayogo dan KH Said Aqiel Siraj, kita dapat menyatakan bahwa komitmen politik Joko Widodo dalam menerapkan nilai-nilai Qur'ani dalam peradaban umat/bangsa Indonesia dengan berlandaskan prinsip "tanggung jawab" menuju "*khaira ummah*" merupakan bagian dari misi dakwah ke-ulama-an, sehingga tidak berlebihan jika disematkan status kiai pada Joko Widodo, yakni "kiai politik/ ulama politik".[281]

---

[279]KH Said Aqil Siraj, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara* ...., hlm. 51.

[280] Imam Suprayogo, *Memelihara Sangkar Ilmu*..., hlm. 169; KH Said Aqil Siraj, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*..., hlm. 51.

[281]Nita Agustina Nurlaila Eka Erfiana, *Kiyai Dan Politik* (Resensi Buku), http://hamdanhusein.blogspot.co.id/2014/09/kiyai-dan-politik-resensi-buku.html, diakses 15 Juli 2016; lihat Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara teologis, Joko Widodo merupakan seorang Muslim sejati yang telah melaksanakan ajaran Nabi Muhammad Saw, para sahabat, dan ulama *salafus shaleh*, yakni menjalankan dan menerapkan akidah Islam yang inklusif, moderat, toleran dan akomodatif serta ritual pokok Islam. Nalar akidah ini merupakan nalar akidah yang dianut, diajarkan dan diamalkan oleh *Jam'iyyah Nahdlatul Ulama*. Oleh sebab itu, dalam nalar keilmuan Clifford Geertz, nalar akidah Joko Widodo dapat dimasukkan ke dalam kategori sebagai seorang santri walaupun tidak pernah mondok di Pesantren,[1] bahkan menurut pemikiran Simuh, nalar akidah Joko Widodo merupakan simbol dari seorang santri sejati, karena identitas santri tidak ditentukan dengan asal-usul pendidikan, tetapi dinilai dari keistiqamaan keimanan dan keselamatan akidahnya.

Secara syari'ah/fiqhiyah, Joko Widodo memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan ide-ide/gagasan dan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (baca: *al-maslahah al-'amm*), yakni berupaya mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran hidup bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Secara syar'i dan budaya, seseorang dapat dinyatakan sebagai seorang

[1] Clifford Geertz, *The Religion of Java*...., hlm. 7.

santri apabila telah menjalankan tradisi pokok peribadatan Islam secara teratur, shalat, puasa, haji dan sedekah/zakat. Walaupun secara formal belum pernah nyantri di Pesantren, tetapi sikap, jiwa dan perilaku Joko Widodo adalah jiwa seorang santri sejati yang ikhlas, tawadu', rajin ibadah, dan pekerja keras dalam membantu sesamanya dan mambangun kesejahteraan umat/masyarakat dan bangsa. Tipe seorang Muslim/santri yang seperti inilah yang diidealkan oleh pendiri NU, KH M Hasyim Asy'ari. Oleh sebab itu, kita dapat menilai bahwa apa yang dilakukan Joko Widodo tidak terlepas dari spirit nilai-nilai nalar fiqih ke-NU-an, sehingga gagasan dan kebijakannya sangat sesuai dengan nalar fiqih ke-NU-an yang sejak sebelum Kemerdekaan RI hingga masa kini tetap istiqamah mendukung, mempertahankan dan memajukan NKRI. Konsistensi itu dapat dipahami dari sejak Muktamar PBNU 1936 di Banjarmasin yang menetapkan keputusan hukum fiqih yang isinya menyatakan perlunya mendirikan *darus salam* (negara harmoni).

Nalar fiqih ke-NU-an terus berusaha untuk memajukan dan mengejar ketertinggalan yang dihadapi bangsa Indonesia menuju negara yang damai yang didalamya ditegakkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Inilah yang juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, sehingga nalar keilmuannya juga sama dengan nalar fiqih ke-NU-an. Upaya membangun negara yang adil, makmur dan sejahterah sedang dan terus digerakkan oleh Joko Widodo untuk mengejar berbagai ketertinggalan yang dalam hal ini dapat dipotret dari nalar fiqih ke-NU-an di antaranya; *Pertama*, fiqih kaum pinggiran yang telah mengungkap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat nelayan, petani, dan kaum miskin lainnya yang dimulai dari penataan infrastruktur, modal, dan iklim usahanya. *Kedua*, fiqih kebangsaan yang telah mengungkap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun masyarakat dan bangsa yang majemuk. *Ketiga*, fiqih ekonomi kerakyatan yang telah mengungkap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun sistem perekonomian nasional yang dimulai dari pinggiran atau kaum lemah dengan spirit pemerataan dan pertumbuhan dalam pembangunan ekonomi. *Keempat*, fiqih kemanusiaan yang telah mengungkap gagasan dan kebijakan Joko

Widodo dalam menjaga dan melindungi hak-hak warga negara dari ancaman dan pelanggaran hak asasi. *Kelima*, fiqih kenegaraan yang telah mengungkap gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam membangun relasi agama dan negara dimana agama harus berperan penting dalam membangun dan menjaga keutuhan NKRI serta memajukannya, sehingga paham agama (Islam) yang damai, moderat, rukun dan toleran harus ditumbuhkan dan dikembangkan di NKRI. Spirit ini menjadi spirit nalar fiqih ke-NU-an, yang juga senafas dengan spirit UUD-NRI 1945. *Keenam*, fiqih dakwah kiai yang menggambarkan spirit dakwah kiai/ulama dalam berjuang menyampaikan syiar-syiar agama, ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan dan berjuang menegakkan keadilan bagi umat/masyarakat dan bangsa, tidak hanya dilakukan di ruang belajar Pesantren, tetapi juga masuk-kasuk ke pedalaman/pelosok atau daerah terpencil. Karena adanya kesamaan spirit dakwah antara kiai dengan Joko Widodo itu, maka kita layak menyematkan status kiai kepada Joko Widodo, dalam hal ini fungsi ke-kiai-an dalam bidang politik, atau disingkat "kiai politik" atau "ulama politik".

B. SARAN

Buku ini merupakan hasil refleksi ilmiah yang meneliti ide-ide/gagasan dan kebijakan Joko Widodo berdasarkan nalar fiqih ke-NU-an, sehingga dengan lahirnya buku ini diharapkan akan menjadi salah satu model pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama (fiqih) Islam yang penuh keramahan, moderasi, rukun, dan toleransi, yang dalam UUD-NRI Tahun 1945 dikenal dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh sebab itu, spirit gagasan dan kebijakan Joko Widodo dalam menegakkan kesejahteraan umum yang merupakan bagian pokok dari amanah UUD-NRI 945 jika kita dalami akan seirama dan sesuai dengan idealisme nalar fiqih ke-NU-an. Dengan demikian, konsep-konsep keilmuan fiqih ke-NU-an ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam menyelenggarakan pembangunan kehidupan keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan yang seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M Amin, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ahmad, Fathoni, *Sejarah di Balik Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, http://www.nu.or.id/post/read/68503/sejarah-di-balik-lahirnya-pancasila-1-juni-1945-, diakses 20 Juni 2016.

Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: *LKiS*, 2010.

al-Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramdlân, *Dawâbith al-Mashlahah fî Syarî'ah al-Islâmiyyah* Libanon: Mu'assasah al-Risâlah, 2001.

Ali, Yunasril, *Manusia Citra Ilahi: Pengembangan Konsep Insan Kamil Ibn Arabi oleh al-Jili*, Jakarta: Paramadina, 1997.

al-Jabiri, Muhammad Abed, *Bunyat al-'Aql al-'Arabi,* Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 1993.

al-Jili, Abdul Karim, *al-Insan al-Kamil fi Ma'rifat al-Awahir wa al-Awail*, Beirut: Dar al-Fikr, 1975.

al-Maktabah al-Syamilah, al-Qur'an al-Karim wa Tafsiruhu.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Membangun Metodologi Ushul Fiqh: Telaah Konsep al-Nadb & al-Karahah dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.

al-Rasheed, Momoon, "Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Sosial", dalam Glenn D. Paige, dkk., (eds.), *Islam and Nonviolence*, *Islam tanpa Kekerasan*, terjemahan M. Taufiq Rahman, Yogyakarta: LkiS, 1998.

al-Syahrastani, Muhammad Ibn Abd al-Karim Ahmad, *al-Milal wa al-Nihal: Aliran-Aliran Teologi dalam Islam*, terj. Syuaidi Asy'ari, Bandung: Mizan, 2004.

al-Zukhailî, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî,* Jilid II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

Amin, KH Ma'ruf, dkk (Tim Penyusun), *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Amri, Arfi Bambani, *Joko Widodo Dilantik Lagi Jadi Walikota Solo,* http://politik.news.viva.co.id/news/read/167299-joko-widodo-dilantik-lagi-jadi-bupati-solo.

Amstrong, Karen, *Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi, Tuhan,* terj. Satrio Wahono dkk., Bandung: Mizan, dan Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.

Amstrong, Karen, *Islam; Sejarah Singkat*, Yogyakarta: Jendela, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Apa arti kata blusukan yang sebenarnya?, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/apa-arti-kata-blusukan-yang-sebenarnya, diakses 3 Juli 2016.

Arif, Mahmud, *Pendidikan Islam Transformatif*, Yogyakarta: *LKiS*, 2008.

Arkoun, Mohamed, *al-Fikr al-Ushûlî wa Istihâlah al-Ta'shîl*, Beirut: Dar al-Saqi, 2002.

Asshiddiqie, Jimly, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi,* Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Asy'ari, KH Hasyim, "Ziyadah Ta'liqat 'ala Mandumah al-Syaikh 'Abdllah bin Yasin" dalam Ishomuddin Haziq (ed), *Irsyad al-Syari fi Jam'i Mushannifah al-Syaikh Hasyim Asy'ari*, Jombang: Maktabah al-Masruriyah, t.th.

Asy'arie, Muhammad Hasyim, *al-Tambihat al-Wajibat li man yashna'u al-Maulid bi al-Munkarat*, Jombang: Ma'had Tebuireng, t.th.

Asy'arie, Muhammad Hasyim, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*: *Analisis tentang Hadis Kematian, Tanda-tanda Kiamat dan Pemahaman tentang Sunnah dan Bid'ah*, terj. Ngabdurrohman al-Jawi, Jakarta: LTM PBNU dan Pesantren Cianjur, 2011.

Asy-Syarqawi, Hasan, *Nahwa Manhaj 'Ilmi Islami* yang diterjemahkan dengan judul *Manhaj Ilmiah Islami*, terj. A M Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press,1994.

Athaillah, A., *Rasyid Ridha': Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, Jakarta: Erlangga, 2006.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat,* Jakarta: Gramedia,2000.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid*, terj. Nanang Tahqiq, Jakarta: Paramadina, 1999.

Baso, Ahmad, *Islam Liberal Sebagai Ideologi*, Gerbang, Vol. 06, No 03. Pebruari-April 2000.

Bellah, R N, "Evolusi Agama", dalam Roland Robertson (ed.), *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Biografi Joko Widodo, https://www.facebook.com/notes/indonesia-hebat/biografi-joko-widodo/463980870405272/, diakses 4 Juni 2016

Biografi KH Zaini Mun'im, http://www.nuruljadid.net/biografi-kh-zaini-munim.html, diakses 8 Juni 2016

Bizawie, Zainul Milal, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949, Tangerang: Pustaka Compass, 2014.

Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutics; Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique,* London: Routledge dan Kegan Paul, t.th.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Juz IV, Surabaya: al-Hidayah, t.th.

Dahlan, Moh, *Abdullahi Ahmad An-Naim: Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Dahlan, Moh, *Epistemologi Hukum Islam: Studi Atas Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im,* Yogyakarta: Disertasi Sunan Kalijaga, 2006.

Dahlan, Moh, *Konsep HAM Menurut Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im*, Yogyakarta: Tesis S2 IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Dahlan, Moh, *Paradigma Ushul Fiqh Gus Dur Multikultural*, Yogyakarta: Kaukabah dan IAIN Bengkulu Press, 2013.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, yang diprogram oleh Achmad Fahrudin dkk ke dalam "freeware Al Quran", Versi 1.2, *Freeware © Hak cipta hanya milik Allah swt.*

Dofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Doorstop Presiden Republik Indonesia Peninjauan ke Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kalimantan Barat 23 Maret 2016, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11379&Itemid=26, diakses 4 Juni 16.

Duran, Khalid, "Religious Liberty dan Human Rights in Sudan", dalam Leonard Swidler (ed.), *Religious Liberty and Human Rights in Nations and in Religions*, New York: Ecumenical Press Philadelphia,1986.

Eko (Reporter), *Masjid Jami Bengkulu Karya Presiden Sukarno,* http://www.dream.co.id/jejak/masjid-jami-bengkulu-karya-presiden-sukarno-141113y.html, diakses 18 Juli 2016.

Erfiana, Nita Agustina Nurlaila Eka, *Kiyai Dan Politik* (Resensi Buku), http://hamdanhusein.blogspot.co.id/2014/09/kiyai-dan-politik-resensi-buku.html, diakses 15 Juli 2016.

Fakhruddin, Zudan Arif, *Peranan Hukum dalam Merekatkan Kebangsaan Indonesia*, Orasi Ilmiah disampaikan dalam Dies Natalis ke-30 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, http://jdih.depdagri.go.id/ diakses 2 September 2012.

Fakih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, dan Insist, 2001.

Fathoni, *Ulama-Santri, Garda Depan Perjuangan Kemerdekaan*, http://www.nu.or.id/post/read/50382/ulama-santri-garda-depan-perjuangan-kemerdekaan diakses 6 Juni 2016.

Geertz, Clifford, *The Religion of Java: Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mashasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Gusmian, Islah, "Metodologi Penafsiran Emansipatoris: Ilmu Sosial sebagai Alat Analisis Teks Kitab Suci" dalam *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, Temanggung: STAINU Press, 2008.

Hadi, Otho, *Nation and Character Building Melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan*, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8543/, diakses tanggal 11-12-2011.

Hadi, Sofyan, "Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia", *Jurnal Millah,* Vol. X, No 2, Februari 2011.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Hanafi, Hasan, *Min al-Aqidah ila al-Tsaurah,* Jilid I, Beirut: Maktabah Madbulah, t.th.

Hanafi, Muchlis M., "Konsep al-Washatiyyah dalam Islam", *HARMONI:* Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. VIII No. 32, Oktober - Desember 2009.

Harisuddin, M Noor, "Madzhab Fiqih Berbasis Lokalitas", dalam *Jurnal al-'Adalah* Vol 9 No 3, Jember: STAIN Press, 2006.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I,* Jakarta: Logos, 1997.

Haryatmoko, *Etika Publik untuk Pejabat Publik dan Politisi*, Jakarta: Gramedia, 2013.

Hasil Observasi Lapangan pada Acara Pelantikan TPAKD di Hotel Santika tanggal 3 Juni 2016, yakni kebijakan Presiden RI Joko Widodo tersebut didapat dari pengarahan yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu, Dr. H Ridwan Mukti, M.H.

Hasil Wawancara dengan Abang Becak, Mardi, tertanggal 23 Juni 2016 di Surakarta.

Hasil Wawancara dengan Sopir Taksi, Yudi, tanggal 25 Juni 2016.

Hasil Wawancara dengan Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, tanggal 24 Juni 2016 Jam 18 WIB di Kantor Walikota Surakarta.

Hasil Wawancara dengan warga Surakarta, Susanto, Sopir Taxi Bandara Adi Sumarmo, tanggal 22 Juni 2016.

Hasil Wawancara Redaktur JIL dengan Dr. Rumadi dan Abd Moqsith Ghazali: Gus Dur Adalah Jendela, Garansi, Lokomotif http://islamlib.com/id/artikel/gus-dur-adalah-jendela-garansi-lokomotif/ diakses 10 Agustus 2010.

Hefner, Robert W, "Muslim Democrats and Islamist Violence in Post-Soeharto Indonesia", dalam Robert W Hefner (ed.), *Remaking*

Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization, Pricenton: Pricenton University Press, 2005.

Hitti, Philip K, *History of The Arabs: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, terj. R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.

http://geotimes.co.id/menurut-jokowi-ini-sebab-kegagalan-pembangunan-di-perbatasan/, diakses 24 Mei 2015.

http://m.tribunnews.com/regional/2014/12/17/jokowi-janji-garap-perbatasan-mulai-tahun-depan, diakses 24 Mei 2015

http://nasional.kompas.com/read/2014/08/07/20033701/MUI.Haramkan.Ajaran.ISIS, diakses 4 Juli 2016.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo, diakses 12 Desember 2014.

http://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/22/173668525/menata-rumah-kumuh-pemerintah-sediakan-ongkos-rp-4-triliun, diakses 24 Mei 2015

http://news.okezone.com/read/2014/11/25/340/1070300/jokowi-kembali-ancam-kapal-asing-pencuri-ikan.

http://setkab.go.id, diakses 7 Juli 2016.

http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2016/07/2016-07-06-PHOTO-5846.jpg, diakses 7 Juli 2016.

http://www.antaranews.com/berita/551885/presiden-jokowi-hadiri-harlah-ke-70-muslimat -nu, diakses 18 Juli 2016.

http://www.beritasatu.com/nasional/322254-hasyim-muzadi-masyarakat-dunia-kehilangan-rasa-spiritualisme.html, diakses 20 Juni 2016.

http://www.citizenjurnalism.com/world-news/indonesia/presiden-jokowi-hukuman-mati-tak-akan-ditunda/, diakses 26 Februari 2015.

http://www.nu.or.id/post/read/39618/kembali-ke-khittah-indonesia-1945, diakses 20 Juni 2016.

http://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme, diakses 20 Juni 2016

http://www.nu.or.id/post/read/69671/33-kitab-karya-kh-ahmad-rifai-kalisalak-yang-tersimpan-di-leiden, diakses 18 Juli 2016.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1298&Itemid=167, diakses 4 Juni 2016.

http://www.suaramuhammadiyah.id/2015/12/03/seputar-hari-santri/3/, diakses 4 Juli 2016.

https://www.facebook.com/JKWofficial?fref=ts, diakses 11 Desember 2014.

Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabawiyah,* Jilid 1. Mathbaah Muhammad Ali Shubih, t.th.

Ibnu Arabi, Muhyiddin, *Fushuh al-Hikam*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1946.

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibrahim, Anis, *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah,* Malang: In-Trans Publishing, 2008.

Ibrahim, Duksi, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep istiqro' al-Maknawi Asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Aqidah Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.

Ismail, Faisal, *Islam and Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan, Depag RI, 2001.

Ismail, Faisal, *Islam dan Pancasila: Indonesian Politics 1945-1995*, Jakarta: Balitbang Depag RI, 2001.

Ismail, Yahya, *Manaj al-Sunnah fi al-'Alaqah baina al-Hakim wa al-Mahkum* yang sudah diterjemahkan dengan judul *"Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspekif Sunnah,* terj. Andi Suherman, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Ismuha, "Ulama Ach dalam Perspekif Sejarah", Taufik Adullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta: CV Rajawali, 1983.

Jailani RA, Syaikh Abdul Qadir, *al-Fathur Rabbani wa al-Faidhur Rahmani* yang telah diterjemahkan oleh Masrahan Ahmad dengan judul *Jalan Menuju Cinta Ilahi,* Yogyakarta: Citra Media, 2007.

Joko Widodo: "Islam Kita Penuh Kesantunan dan Tatakrama" https://serambiminang.com/2015/08/joko-widodo-islam-kita-penuh-kesantunan-dan-tatakrama.html/, diakses 6 Juni 2016

Jokowi Kumpulkan Menteri dan Eselon I buat Bayar Zakat http://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/10082281/jokowi.kumpulkan.menteri.dan.eselon.i.buat.bayar.zakat, diakses 4 Juli 2016.

Jokowi Minta MUI Jadi Muara Pemikiran Semua Ormas Islam, https://m.tempo.co/read/news/2015/08/25/078694909/jokowi-minta-mui-jadi-muara-pemikiran-semua-ormas-islam, diakses 6 Juni 2016.

Jokowi Presiden, Ternyata Sudah Diramalkan Gus Dur, http://www.nu.or.id/post/read/56217/jokowi-presiden-ternyata-sudah-diramalkan-gus-dur, diakses 4 Juli 2016.

Jokowi Serukan Muslim di Timur Tengah Berdamai Demi Ukhuwah Islamiyah, http://news.detik.com/berita/2991945/jokowi-serukan-muslim-di-timur-tengah-berdamai-demi-ukhuwah-islamiyah, diakses 8 Juni 2016.

Jokowi: Alhamdulillah, Islam Kita Islam Nusantara, http://www.jpnn.com/read/2015/06/14/309550/Jokowi:-Alhamdulillah-Islam-Kita-Islam-Nusantara-/page2 diakses 6 Juni 2016.

Jokowi: Eropa Minta Indonesia Kembangkan Islam yang Moderat , https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/23/078765300/jokowi-eropa-minta-indonesia-kembangkan-islam-yang-moderat, diakses 30 Juni 2016.

Kaelan, *Filsafat Bahasa: Masalah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Paradigma, 1998.

Karya, Soekama, dkk, *Ensiklopedi Mini: Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Islam, 1996.

Kesan KH Hasyim Muzadi terhadap Mbah Sahal, http://news.okezone.com/read/2014/01/24/337/931308/kesan-kh-hasyim-muzadi-terhadap-mbah-sahal, diakses 20 Juni 2016.

KH Zaini Mun'im Sosok Sang Pencinta Ilmu, http://www.lontarmadura.com/kh-zaini-munim-sosok-ulama-pencinta-ulama/5/, diakses 3 Juli 2016

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Koran Tempo, 24 Januari 2015.

Kusnadiningrat, E, *Hassan Hanafi, Islam, Oposisi, dan Revolusi*, http://islamlib.com/tokoh/hassan-hanafi/, diakses 4 Juli 2016.

Kusnadiningrat, E, *Hassan Hanafi, Islam, Oposisi, dan Revolusi*, http://islamlib.com/tokoh/hassan-hanafi/, diakses 4 Juli 2016

Lampiran Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

Litle, David, John Kelsay dan Abdullaziz A. Sachedina, *Kebebasan Beragama dan Hak-hak Asasi Manusia; Kajian Lintas Kultural,* terj. Riyanto, Yogyakata: Pustaka Pelajar & ACAdeMIA, 1997.

*Lukman Saifuddin: Menteri Kader NU Layani Semua Warga,*http://www.nu.or.id/post/read/55483/lukman-saifuddin-menteri-kader-nu-layani-semua-warga, diakses 4 Juli 2016.

Madjid, Nurcholish, dkk, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina dan The Asia Foundation, 2004.

Magnis-Suseno, Franz, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Mahfudh, KH MA Sahal, *Islam dan Sistem Perekonomiannya*, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem-perekonomiannya, diakses 20 Juni 2016.

Mahfudh, KH MA Sahal, *NU dan Ukhuwah Islamiyah*, http://www.nu.or.id/post/read/51294/nu-dan-ukhuwah-islamiyah, diakses 20 Juni 2016.

Mahfudh, KH MA Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: *LKiS*, 2004.

Majalah Risalah, Edisi 4 Tahun 2013.

Majalah Risalah, *Mutolaah*, Edisi 34 Tahun 2012.

Majalan Risalah NU, *Laporan Utama*, Edisi 41 Tahun 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mas'ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, Yogyakarta: *LKi*S, 2004.

Mas'udi, Masdar F, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.

Masud, Muhammad Khalid, *Fisalafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.

Memimpin Solo ala Jokowi, dimuat 4 Agustus 2011 - 15:02 WIB, dalam http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2011/08/110804_tokohjokowidodo.shtml

Mimin, *10 Kriteria Aliran Sesat MUI yang Perlu Diwaspadai Pengurus Rohis*, http://rohis.itsar.org/10-kriteria-aliran-sesat-mui-yang-perlu-diwaspadai-pengurus-rohis/, diakses 8 Juni 2016.

Misrawi, Zuhairi, "Inspirasi Pancasila untuk Dunia Arab", *Kompas*, 24 Januari 2015.

Misrawi, Zuhairi, *al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan lil 'Alamin*, Jakarta: Penerbit Oasis, 2010.

Misrawi, Zuhairi, *Hadratusysyaikh Hasyim Asy'arie: Modratisme, Keuamatan, dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas, 2010.

Muhammad al-Fayad, tentang Pemikiran Emmanuel Levinas.

MUI Haramkan Ajaran ISIS,

MUI: Ada 300 Lebih Aliran Sesat di Indonesia, http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160121180616-12-105893/mui-ada-300-lebih-aliran-sesat-di-indonesia/, diakses 8 Juni 2016.

Munawar-Rachman, Budhy, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah,* Jakarta: Paramadina, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musa, Ali Maskur, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Muzani, Saiful, (ed.), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*, Bandung: Mizan, 1996.

Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 1992.

Nuh, Sayyid Muhammad, *Afatun 'ala Thariq* yang sudah diterjemahkan menjadi *Penyebab Gagalnya Dakwah*, terj. Nur Aulia, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Nuruddin, Irfan, *Jokowi di Mata Kiai Lokal,* http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,52963-lang,id-c,kolom-t,Jokowi+di+Mata+Kiai+Lokal-.phpx, diakses 11 Agustus 2014.

Paham keagamaan, http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,7-t,paham+keagamaan-.phpx, diakses 3 Agustus 2014.

Paige, Glenn D., dkk (eds.) *Islam, Anti-Kekerasan, dan Transformasi Sosial,* terj. M. Taufiq Rahman, Yogyakarta: *LK*iS, 1998.

Pengarahan Presiden Joko Widodo Pada Rapat Koordinasi Nasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115), Rabu, 29 Juni 2016, di Istana Negara, Jakarta, Oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **29 Juni 2016; 983 Views.** Kategori: Transkrip Pidato, http://setkab.go.id/pengarahan-presiden-joko-widodo-pada-rapat-koordinasi-nasional-satuan-tugas-pemberantasan-penangkapan-ikan-secara-ilegal-satgas-115-rabu-29-juni-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

Pengaruh Ulama Nusantara dalam Perjuangan Melawan Penjajah, Majalah Risalah NU, Edisi 60 Tahun X 1437 Tahun 2016.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Presiden RI Joko Widodo Blusukan di Pasar Gudang Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis 11 Februari 2016, http://presidenri.go.id/kabar-presiden/koleksi-foto.html, diakses 30 Juni 2016.

Presiden Tunaikan Shalat Jumat di KBRI Den Haag, http://presidenri.go.id/kabar-presiden/hari-hari-presiden/presiden-tunaikan-shalat-jumat-di-kbri-den-haag.html, diakses 30 Juni 2016.

Qardawi, Yusuf, *Fiqih Minoritas: Fatwa Kontemporer terhadap Kehidupan Kaum Muslim di Tengah Masyarakat nn-Muslim*, terj. Adillah Obid, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.

Rahardjo, Mudjia, *Penelitian Sosiologis Hukum Islam,* http://www.mudjiarahardjo.com/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html diakses 06 Juni 2011.

Ramdlan, Mahbub Ma'afi, *Kebolehan Mengangkat Pemimpin Non Muslim***, Laporan Bahstul Masail,** http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,59-id,55652-lang,id-c,bahtsul+masail-t,Kebolehan+Mengangkat+Pemimpin+Non+Muslim-.phpx, diakses 20 Januari 2014.

Ramelan, Kastoyo, *Jokowi: Beragama dalam Tindakan,* Jakarta: Penerbit Imania, 2014.

Ricklefs, M C, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, Jakarta: PT Serambi, 2008.

Rifai, Muhammad, *Gus Dur, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Risalah NU, Edisi 31 Tahun 2012.

Risalah NU, Edisi 60 1437 H/ Mei 2016.

Rivai, Veithzal, dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam bukan Alternatif tetap Solusi*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Rumah Fatmawati Sukarno, http://bengkuluprov.go.id/2016/02/08/rumah-fatmawati-sukarno/, diakses 18 Juli 2016.

Said, As'ad Ali, *Al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya*, Jakarta: LP3ES, 2014.

Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Schumann, Abdurrahman, *Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004.

Sejarah, http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx, diakses 3 Agustus 2014.

Setianto, Agus, Mohammad Hidayat, dan Izzudin Abdul Manaf, "Training Eksekutif Certified Ushul Fiqih Keuangan dan Perbankan Syariah Kontemporer Angkatan I", dalam *Kumpulan Makalah* bagi pelatihan yang diselenggarakan pada 24-25 Februari 2012 di Kantor Pusat MES Jakarta Selatan.

Setiawan, Aji, "Mengaji dan Menjaga Moralitas Bangsa", Rubrik Pesantren, *Majalah Risalah NU*, Edisi 31 Tahun 2012.

Shahct, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.

Shihab, Alwi, *Membedah Islam di Barat: Menepis Tudingan, Meluruskan Pemahaman*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Shihab, M Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014.

Siradj, Said Aqiel, "Wanita Presiden", Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia,* Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.

Siraj, KH Said Aqil, *Islam: Sumber Inspirasi Budaya Nusantara Menuju Masyarakat Tamaddun*, Jakarta: LTNU, 2014.

Siroj, KH Said Aqil, *Ahlussunnah wal Jamaah: Sebuah Kritik Historis,* Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008.

Siroj, Said Aqil, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Ahmad Baso (ed), Jakarta: LTN PBNU, 2012.

Sirry, Mu'in, *Polemik Kitab Suci: Tafsir Reformasi atas Kritik al-Qur'an terhadap Agama lain*, terj. R Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Gramedia, 2013.

Soekarno, "Negara Nasional dan Cita-Cita Islam", dalam Kuliah Umum di Univesitas Indonesia, Jakarta, 7 Mei 1953, "Nabi dan Pembangunan", dalam Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw di Istana Negara, Jakarta, 15 September 1959, "Shirathal Mustaqim, Jalan Yang Benar", dalam Amanat pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad saw di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, 6 Agustus 1963, dan "Islam, Agama Amal", dalam Amanat pada Peringatan Nuzulul Qur'an di Istana Negara Jakarta, 15 Maret 1960 dalam R Soemarjono (peny), *Bung Karno: Seorang Amirul Mukminin*, Jakarta: Putra Sang Fajar, 2015.

Soekarno, *Nasionalisme, Islamisme, Marxisme: Pikiran-Pikiran Soekarno Muda*, Kholid O Santoso (ed), Bandung: Sega Arsy, 2015.

Solopos, 26 September 2006.

Solopos, 6 Desember 2006

Solopos, tanggal 29 Desember 2006.

Sudjana, Eggi, *HAM dalam Persepektif Islam; Mencari Universalitas HAM bagi Tantangan Modernitas yang Hakiki,* Jakarta: Nuansa Madani, 2002.

Sumartana, Muhammad Ari, *Aspirasi pendidikan masyarakat desa : Penelitian di Mulyodadi Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis UGM, 2002, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=20272

Suprayogo, Imam, *Memelihara Sangkar Ilmu: Refleksi Pemikiran dan Pengembangan UIN Malang*, Malang: UIN Malang Press, 2006.

Suprayogo, Imam, *Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Suprayogo, Imam, *Persatuan Bangsa*, http://www.facebook.com/note.php?note_id= 10150383606043880, diakses 11 September 2011.

Supriatna dan Ahmad Pattiroy, *Paradigma Integratif-interkonekif: Alternatif metodologi dalam Penelitian Hukum Islam*, t.tp.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009.

Syukur, M Amin, *Zuhud di Abad Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang danGenerasi*, Surabaya: CV Kita, 2007.

Teladan Perjuangan Para Santri, Majalah Risalah NU, Eidisi 61 Tahun X 1437 H, Juni 2016.

TIM Yayasan Paramadina, *Al-Ghazali tentang Ilmu Kalam*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.

Ulama Nusantara dalam Perjuangan, Majalah Risalah NU, Eidisi 60 Tahun X 1437 H, Mei 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Seketariat Jenderal MPR-RI, Cet XII, 2013.

Wahid, Abdurrahman, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam", dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.) *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,* Jakarta: Paramadina, 1995.

Wahid, Abdurrahman, "Kebebasan Beragama dan Hegemoni Negara", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, ed, *Passing Over: Melintasi Batas Agama*, Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998.

Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, eds Agus Maftuh Abegebriel dan Ahmad Suaedy, Yogyakarta: The Wahid Institute, 2007.

Wahid, Abdurrahman, *Islam, Budaya dan Pribumisasi*, http://www.nu.or.id/post/read/60985/pribumisasi-islam, diakses 20 Juni 2016.

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi,* Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

Wahid, Abdurrahman, *NU: Modernisasi Tumbuh dari Tradisionalisme,* http://www.nu.or.id/post/read/59798/nu-modernisasi-tumbuh-dari-tradisionalisme, diakses 20 Juni 2016

Wahid, Abdurrahman, *Pengembangan Ahlusunnah wal Jamaah di Lingkungan NU*, http://www.nu.or.id/post/read/58804/pengembangan-ahlussunnah-wal-jamaah-di-lingkungan-nu, diakses 20 Juni 2016.

Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan,* Depok: Desantara, 2001.

Wahid, Abdurrahman, *Tata Krama dan 'Ummatan Wahidatan,* http://www.nu.or.id/post/read/53490/tata-krama-dan-lsquoummatan-wahidatan, diakses 20 Juni 2016.

Wahid, Abdurrahman, *Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser*, Yogyakarta: *LKiS*, 2002.

Wahid, KH Abdurrahman, *Sekedar Mendahului: Bunga Rampai Kata Pengantar*, Tri Agus Siswowiharjo dkk, (peny), Bandung: Nuansa, 2011.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, dalam J. Milton Cowan (ed.), t.tp., t.th.

Widodo, Joko, *Amanat Presiden Republik Indonesia Pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Reublik Indonesia Hasil Pilkada Serentak Istana Negara, Jakarta 12 Februari 2016,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10864&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Pengantar Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Mengenai Pendidikan Tinggi Islam Moderat di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Tanggal 5 Juni 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9395&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Paripurna Kabinet Kerja tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, Daftar Negatif Investasi (DNI, serta Percepatan Integrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kantor Presiden, Jakarta 10 Februari 2016,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10871&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Pengantar Presiden Republik Indonesia Rapat Terbatas tentang Harmonisasi Peraturan Perizinan Terkai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan, dan Izin Ganguan Kantor Presiden, 15 MARET 2016* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11235&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Hut Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* http://www.setneg.go.id/images/stories/kepmen/kontributor/humas/081415_pidato_kenegaraan_presiden_dalam_rangka_hut_ri_70.pdf, diakses 15 Agustus 2015.

Widodo, Joko, *Revolusi Mental*, http://presidenri.go.id/ulasan/revolusi-mental.html, diakses 30 Juni 201

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Bimbingan Teknis PPID*, Surakarta, 12 April 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Wisuda Sarjana S-1 ke 23 Sekolah Tinggi Agama Islam Mamba'ul 'Ulum* Surakarta, 11 Oktober 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Acara Buka Puasa Bersama dengan Prajurit TNI dan PNS Mabes TNI, 27 Juni 2016, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Oleh: Humas ; Diposkan pada: 27 Juni 2016; 2026 Views Kategori: Transkrip Pidato*, http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-acara-buka-puasa-bersama-dengan-prajurit-tni-dan-pns-mabes-tni-27-juni-2016-di-plaza-mabes-tni-cilangkap-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Nuzulul Quran* Tahun 1437 H/2016 M, Selasa, 21 Juni 2016, di Istana Negara Jakarta, oleh: **Humas** ; Diposkan pada: **21 Jun 2016 ; 2406 Views**Kategori: Transkrip Pidato,http://setkab.go.id/sambutan-presiden-jokowi-pada-peringatan-nuzulul-quran-tahun-1437-h2016-m-selasa-21-juni-2016-di-istana-negara-jakarta/, diakses 6 Juli 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Acara Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional di Istana Negara, Jakarta Tanggal 3 Juli 2015*,http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26, diakses 6 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembagian Sembako Usai Sholat Idul Fitri 1436 H di PLTD Apung, Kampung Punge, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh Nangroe Aceh Darussalam Tanggal 17 Juli 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9596&Itemid=26, diakses 15 Agustus 2015.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Pembukaan Kongres Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Hotel Santika Dyandra, Medan Kota, Sumatera Utara Tanggal 18 April 2015*, http://

www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9283&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad saw Tahun 1436 H di Istana Negara, Jakarta Tanggal 15 Mei 2015,* http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9365&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Harlah ke-55 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Masjid Nasional al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur Tanggal 17 April 2015*,http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9281&Itemid=26, diakses 6 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari Lahir Pancasila Blitar, Jawa Timur, tanggal 1 Juni 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9373&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Pada Rapat Kerja Nasional dan Forum Investasi dan Perdagangan Kadin Indonesia Bagian Timur Hotel Borobudur, Jakarta Tanggal 25 Mei 2015*, **(ed. Sekretariat Negara RI)** http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9361&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Penutupan Kongres Umat Islam VI di Hotel Inna Garuda Yogyakarta Tanggal 11 Februari 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8776&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Maulid Nabi Muammad Saw di Istana negara, Jakarta 23 Desember 2015*, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10678&Itemid=26, diakses 4 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden Republik Indonesia Peringatan Natal Nasional Tahun 2015 Kupang, Nusa Tenggara Timur 2 Desember 2015*,http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10676&Itemid=26, diakses 5 Juni 2016.

Widodo, Joko, *Sambutan Presiden RI Pada Peringatan Nuzulul Qur'an Nasional*, di Jakarta, tgl 3 Juli 2015, http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9534&Itemid=26, diakses 15 Agustus 2015.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Bedah Buku Karya Dr Masdar F Mas'udi*, Surakarta, 16 Agustus 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Pemberangkatan Calon Haji TH.1432 H 11 Oktober 2009*.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Penyerahan Bantuan Mesin dan Peralatan Batik*, Surakarta, 28 Desember 2010.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Upacara Hari Kesaktian Pancasila*, Surakarta, tanggal 01 Oktober 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Wisuda D-III Perhotelan Akademi Pariwisata Mandala Bhakti Surakarta,* Surakarta, 29 Desember 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Wisuda Sarjana STIE Wijaya Mulya Surakarta*, 22 Januari 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta pada Workshop Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Surakarta, 19 Juli 2011.

Widodo, Joko, *Sambutan Walikota Surakarta Pada Workshop Pengembangan Ekonomi Kelurahan di Kota Surakarta*, 18 Juli 2011.

Yustika, Ahmad Erani, *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, terj. Saifullah Ma'sum, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fi al-Qawaid al-Fiqhiyyah fi al-Syariah* yang sudah diterjemahkan berjudul *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

Zainuddin, *I'anah al- Thalibin*, Juz IV. Semarang: Thaha Putra, t.th.

Zawawi, Ali, (ed.), *133 Hari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin: Menteri Semua Agama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014.

33 Kitab Karya KH Ahmad Rifa›i Kalisalak yang Tersimpan di Leiden,

5 Alasan Jokowi jadi wali kota terbaik ketiga dunia, http://www.kemendagri.go.id/news/2013/01/09/5-alasan-jokowi-jadi-wali-kota-terbaik-ketiga-dunia, diakses 4 Juni 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. DATA PERSONAL

Nama Lengkap	:	Dr. Moh Dahlan, M.Ag.
Jabatan Fungsional	:	Dosen Ushul Fiqih IAIN Bengkulu
Jabatan Strukural	:	Wakil Rektor IAIN Bengkulu
Handphon/Email	:	08179403094/ drdahlan@yahoo.co.id
Alamat Kantor	:	Jl. Raden Fatah Bengkulu
Tempat & Tanggal Lahir	:	Bondowoso, 17 Maret 1978
Istri	:	Siti Mas'ulah, M.Pd.I
Anak	:	1. M Maulana Malik AZ-Zhahir
		2. Syarifatus Syakurah
		3. M Hirzan Haidar ar-Razi

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat	Tahun	Nama Institusi	Fakultas / Jurusan	Lulus / Gelar
S-3	2006	UIN SUNAN KALIJAGA	STUDI ISLAM/ FILSAFAT HUKUM ISLAM	Lulus / Dr
S-2	2003	IAIN SUNAN KALIJAGA	AGAMA DAN FILSAFAT/ FILSAFAT ISLAM	Lulus / M.Ag.
S-1	2000	IAI NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO JATIM	SYARI'AH / AS	Lulus / S.Ag.

SLTA	1996	MA KEAGAMAAN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO JATIM	-	-
SLTP	1993	MTS NURUL HUDA PAOWAN SITUBONDO JATIM	-	-
SD	1990	SDN TARUM 01 PRAJEKAN BONDOWOSO JATIM	-	-

C. KEGIATAN ORGANISASI

NO	ORGANISASI
1	WAKIL KETUA TANFIDZIYAH PCNU KOTA BENGKULU
2	PENGURUS MDI PROPINSI BENGKULU
3	PENGURUS ISNU PROPINSI BENGKULU
4	PENGURUS MESS PROPINSI BENGKULU
5	PENGURUS WILAYAH PERGUNU PROPINSI BENGKULU
6	PENGURUS TIM PERCERPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH PROPINSI BENGKULU

D. PENGALAMAN PENDIDIKAN PESANTREN

NO	PONDOK PESANTREN	LOKASI
1	PP NURUL HUDA	PAOWAN PANARUKAN SITUBONDO JATIM
2	PP NURUL JADID	PAITON PROBOLINGGO JATIM

E. PENGALAMAN JABATAN STRUKTURAL

NO	PERGURUAN TINGGI
1	DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAI NURUL JADID PROBOLINGGO JAWA TIMUR

NO	PERGURUAN TINGGI
2	KETUA STAI CENDEKIA INSANI SITUBONDO JAWA TIMUR

F. PENGALAMAN MENGAJAR

NO	INSTITUSI	MATA KULIAH
1	INSTITUT AGAMA ISLAN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO JATIM	USHUL FIQIH
2	PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG	FILSAFAT HUKUM ISLAM
3	STAIN JEMBER JATIM	FILSAFAT ILMU
4	STAI AT-TAQWA BONDOWOSO JATIM	TARIKH TASY'RIK

G. PENGALAMAN PELATIHAN DAN KURSUS

NO	NAMA	TAHUN	PENYELENGGARA	LOKASI
1	PKD PMII	1996	PMII JOMBANG	STIT BAHRUL ULUM JOMBANG
2	PKL PMII	1997	PC PMII MALANG	MALANG
3	PELATIHAN USHUL FIQH EKONOMI SYARI'AH	2012	MES PUSAT	JAKARTA
4	SHORT COURSE HUKUM ISLAM	2010	LEIPZIG UNIVERSITY	JERMAN

H. PENGALAMAN ORGANISASI

NO	TAHUN	ORGANISASI	JABATAN
1	1997-1998	KOMISARIAT PMII IAI NURUL JADID PROBOLINGGO JATIM	SEKRETARIS UMUM
2	1998 – 2000	PC PMII PROBOLINGGO JATIM	WAKIL SEKRETARIS
3	1999-2000	SENAT MAHASISWA IAI NURUL JADID PROBOLINGGO JATIM	WAKIL KETUA UMUM

Bengkulu, 18 Juli 2016

Penulis,

Dr Moh Dahlan, M.Ag

Membumikan
i.s.l.a.m
dalam Kerangka Kebijakan

Semangat yang penuh perjuangan untuk membangun agama, masyarakat, bangsa dan negara menjadi spirit gagasan dan kebijakan Joko Widodo. Bahkan beliau menandaskan bahwa kita harus berusaha untuk bersama-sama melindungi bangsa dan negara dari semua bentuk ancaman radikalisme dan terorisme, serta sekaligus berupaya mengajak umat menuju paham Islam -dalam hal ini akidah dan fiqih- yang toleran, moderat dan santun.
Dr H Ridwan Mukti, MH *(Gubernur Bengkulu)*

Kehadiran buku ini pada dasarnya hendak mengungkapkan pentingnya menjaga dan menegakkan nilai-nilai moderasi, toleransi, kerukunan, ukhuwah dan keadilan dalam kehidupan umat yang majemuk yang dalam hal ini menampilkan figur Joko Widodo yang sekarang sedang menjabat sebagai Presiden RI.
Prof Dr H Machasin, MA *(Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI)*

Dalam kajian ini dijelaskan, gagasan dan kebijakan Bapak Ir H Joko Widodo memiliki interrelasi yang sangat erat dengan spirit dan ruhul jihad Jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) dalam membangun bangsa dan negara, terutama dalam membangun relasi antara agama dan negara yang bertujuan mewujudkan hubungan simbiosis mutualistik, sehingga kemajuan negara dapat menopang kemajuan syiar-syiar agama dan juga sekaligus syiar-syiar agama dapat mendukung keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Prof Dr H Sirajuddin M, M.Ag., MH *(Rektor IAIN Bengkulu)*

Saya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menyambut baik hadirnya buku ini yang diharapkan akan memberikan orientasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dengan benar di dalam upaya menangkal tumbuh dan berkembangnya aliran/paham sesat maupun penodaan agama,dan sekaligus mampu mempertahakan serta memajukan NKRI.
Ali Mukartono, SH., MM. *(Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu)*

KAUKABA